

Wawancara investigatif:
BAHAN BACAAN



Mary Schollum



September 2005

Wawancara Investigatif: BAHAN BACAAN

Mary Schollum



September 2005

ISBN 0-477-10011-2

Diterbitkan oleh
Kantor Kepala Kepolisian Selandia Baru
PO Box 3017
Wellington

www.police.govt.nz

Penyunting:
Agus Irianto
Fadillah Agus

Penerjemah:
Rully Sandra

DAFTAR ISI

TENTANG PENULIS.....	2	LATAR BELAKANG	34
DAFTAR ISI	4	MEMORI	36
RANGKUMAN.....	8	BAHASA TUBUH ATAU KOMUNIKASI NON-LISAN.....	41
GAMBARAN UMUM	13	PENGELABUAN	42
PENDAHULUAN	13	<i>SUGGESTIBILITY</i>	44
STRUKTUR	13	TERWAWANCARA	46
KETERBATASAN.....	13	SAKSI	46
DEFINISI.....	15	SAKSI RENTAN.....	47
WAWANCARA	15	TERSANGKA	48
KORBAN DAN SAKSI	15	TERSANGKA REMAJA	49
PELAPOR.....	16	PENOLAKAN DARI TERWAWANCARA.....	50
TERSANGKA	16	MODEL WAWANCARA PEACE.....	53
INTEROGASI VERSUS WAWANCARA.....	16	MENUJU KEPADA MODEL PEACE	53
WAWANCARA INVESTIGATIF	18	PENGEMBANGAN PEACE	53
PENYIDIK / DETEKTIF.....	18	PENGUNAAN PEACE SECARA MELUAS ..	53
PENTINGNYA WAWANCARA INVESTIGATIF ..	20	DESKRIPSI.....	54
JENIS WAWANCARA	20	IMPLEMENTASI	57
MENGAPA WAWANCARA INVESTIGATIF PENTING.....	20	APAKAH MODEL PEACE BERFUNGSI?	57
PEWAWANCARA.....	21	GAGAL MEMENUHI HARAPAN.....	58
MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWANCARA.....	22	EVALUASI TAHUN 2001 ATAS PELATIHAN PEACE.....	59
WAWANCARA SAKSI ATAU TERSANGKA – MANA YANG LEBIH PENTING?.....	22	DAMPAK PELATIHAN PEACE	60
PENEKANAN PADA MENDAPATKAN PENGAKUAN.....	23	SUPERVISI.....	61
WAWANCARA YANG ETIS.....	26	PENILAIAN FORMAL	62
PENDAHULUAN	26	PELANGGARAN PACE	62
LATAR BELAKANG.....	26	PENERAPAN YANG LEBIH LUAS	62
WAWANCARA YANG TIDAK ETIS.....	26	TEKNIK-TEKNIK WAWANCARA UTAMA.....	65
WAWANCARA YANG ETIS	27	PENDAHULUAN	65
KESALAHAN HUKUM.....	28	1. MENGAJUKAN PERTANYAAN	65
PERBAIKAN	29	WAWANCARA KOGNITIF DAN WAWANCARA KOGNITIF YANG DISEMPURNAKAN.....	69
PENGAKUAN PALSU	30	WAWANCARA KOGNITIF YANG DISEMPURNAKAN.....	70
PRINSIP-PRINSIP WAWANCARA INVESTIGATIF	31	MEWAWANCARAI KORBAN TRAUMA.....	71
PENGARUH PSIKOLOGI	34	ADOPTI WAWANCARA KOGNITIF.....	73
		KETERBATASAN DAN PERMASALAHAN PRAKTIS.....	73
		BERGESER DARI TEKNIK WK UNTUK	

PELATIHAN UMUM	75
DISKUSI	76
3. INGATAN BEBAS.....	77
4. MANAJEMEN PERCAKAPAN.....	77
TEKNIK-TEKNIK WAWANCARA LAIN.....	81
1. HIPNOTIS FORENSIK	81
Pro dan kontra	81
2. POLIGRAF	82
3. ANALISIS PERNYATAAN	83
4. RASIONALISASI, PROYEKSI, DAN MINIMALISASI – <i>RATIONALISING, PROJECTING AND MINIMISING (RPMS)</i>	88
5. TAKTIK INTEROGASI	89
6. TEKNIK MUTT DAN JEFF (“POLISI BAIK/POLISI JAHAT”)	95
7. WAWANCARA TERFOKUS DAN WAWANCARA ANALISIS	95
KESIMPULAN	108
STRATEGI WAWANCARA INVESTIGATIF ACPO	110
PENDAHULUAN	110
REKOMENDASI	110
KOMITMEN	110
MATERI PELATIHAN NASIONAL	111
PEKERJAAN LEBIH LANJUT	111
DOKTRIN INTI INVESTIGASI	111
TEKNOLOGI DAN WAWANCARA.....	113
PENDAHULUAN	113
AMERIKA SERIKAT	113
INGGRIS DAN WALES	116
VIDEO DIBANDINGKAN DENGAN AUDIO... 116 DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN (ADMISSABILITY)	116

TETAP MENGANDALKAN PERNYATAAN TERTULIS.....	117
MEREKAM WAWANCARA SAKSI DENGAN PERALATAN ELEKTRONIK / DIGITAL	117
PERNYATAAN TERTULIS MASIH DIPERLUKAN	118
ASPEK-ASPEK PRAKTIS DARI MEREKAM WAWANCARA DENGAN SEMUA SAKSI.....	119
PENERIMAAN REKAMAN DIGITAL DI PENGADILAN	123
KESEDIAAN UNTUK DIREKAM.....	123
MENJADI DIGITAL	123
LOKASI WAWANCARA.....	126
PENDAHULUAN	126
MEWAWANCARAI TERSANGKA.....	126
PENEMPATAN OPTIMAL.....	127
MEWAWANCARAI KORBAN DAN SAKSI... 127 PEMANTAUAN JARAK JAUH	128
PELATIHAN.....	130
ISI PELATIHAN.....	130
TUJUAN PELATIHAN	131
LAMANYA PELATIHAN DI TEMPAT PENDIDIKAN	131
HUKUM.....	131
TERWAWANCARA YANG RENTAN	131
PENILAIAN EFEKTIFITAS PELATIHAN	132
PROSES PENILAIAN TAHUNAN	132
MELATIH STAF UNTUK MENILAI KUALITAS WAWANCARA	132
MENGGUNAKAN DATA NASIONAL	133
PEWAWANCARA SPESIALIS	134
KESIMPULAN.....	136
DAFTAR PUSTAKA.....	138

RANGKUMAN

Bagian ini menjelaskan pesan-pesan utama dari berbagai literatur internasional tentang wawancara investigatif.

UMUM

Informasi yang dikumpulkan selama wawancara harus akurat, relevan dan lengkap.

Penelitian menunjukkan bahwa pewawancara yang efektif adalah mereka yang:

- Memiliki pengetahuan tentang psikologi dan percobaan ilmiah mengenai wawancara
- Menerima pengetahuan dasar yang menyeluruh tentang berbagai teknik-teknik praktis untuk melakukan wawancara sebagaimana mestinya
- Memiliki kesempatan praktik yang cukup dalam lingkungan yang terpelajar, dan
- Diawasi dan diberikan umpan balik pada saat melakukan wawancara yang sebenarnya.

DEFINISI

- 'Wawancara saksi' adalah istilah umum untuk semua wawancara yang dilakukan kepada korban, saksi, atau pelapor.
- Perhatian khusus perlu diberikan kepada saksi yang 'rentan', 'terintimidasi' dan 'penting'.
- Manfaat 'interogasi' untuk bertanya kepada tersangka dikalahkan oleh konotasi negatif dari istilah tersebut, dan tidak mempertimbangkan adanya pihak yang bersedia bekerja sama.
- Materi pelatihan yang digunakan di Inggris dan Wales sudah tidak menggunakan istilah 'interogasi' dan menggunakan istilah 'wawancara investigatif' untuk menjelaskan semua wawancara dengan korban, saksi dan tersangka.
- Meningkatnya permintaan agar petugas polisi sudah menjadi penyidik sejak awal karirnya.

PENTINGNYA WAWANCARA INVESTIGATIF

- Wawancara investigatif adalah metode pencari fakta utama yang dimiliki polisi untuk menyelidiki kejahatan. Mereka harus bisa melakukannya dengan baik.
- Penyelidikan yang berkualitas memerlukan wawancara investigatif yang berkualitas.
- Petugas harus menyadari bahwa setiap wawancara unik dan berpotensi menghasilkan informasi yang dapat berguna tidak hanya untuk penyelidikan tersebut tetapi juga untuk kegiatan perpolisian lain.
- Pewawancara perlu menghargai kontribusi wawancara untuk keberhasilan penyelidikan dan bahwa keberhasilan ini bergantung pada itikad baik dan kerja sama korban, saksi, dan masyarakat.
- Keterangan saksi mata dan pengakuan pelaku dianggap sebagai bentuk alat bukti yang paling

meyakinkan.

- Sebagian besar tersangka siap memberikan pernyataan mereka. Pewawancara harus memastikan mereka mendapatkan sebanyak mungkin informasi dan tidak terburu-buru mengakhiri wawancara.
- Sebagian besar tersangka yang mengaku melakukan pelanggaran biasanya akan mengaku di awal wawancara.
- Sebaik apapun upaya yang dilakukan pewawancara, hanya sedikit tersangka yang mengubah keterangannya setelah mereka menolak tuduhan melakukan pelanggaran.

WAWANCARA YANG ETIS

- Wawancara harus dilakukan dengan integritas, penalaran dan penilaian yang adil.
- Tidak dibenarkan dalam kondisi apapun untuk menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mendapatkan pengakuan (korupsi dengan niat mulia).
- Pewawancara harus menghindari perilaku yang tidak etis seperti mengancam atau memberikan janji-janji palsu atau menggunakan taktik yang memaksa dan menindas.
- Wawancara yang etis berarti memperlakukan tersangka dengan hormat dan berpikiran terbuka, bertoleransi dan tidak memihak.
- Jika pelaku merasa diperlakukan dengan baik, akan lebih kecil kemungkinannya mereka memiliki pandangan negatif tentang polisi atau menjelek-jelekan polisi ketika berbicara dengan orang lain.
- Banyak kesalahan atau penyalahgunaan hukum disebabkan oleh malpraktik yang dilakukan polisi.
- Polisi harus menyadari mengapa ada orang-orang yang membuat pengakuan palsu. Hal ini terjadi dalam berbagai cara dan karena berbagai alasan, termasuk faktor-faktor disposisional (misalnya: usia, karakter perorangan, gangguan intelektual, dll) dan situasional (misalnya: isolasi, konfrontasi, dan minimisasi).
- Tujuh prinsip wawancara investigatif yang dikembangkan oleh Kantor Departemen Dalam Negeri Inggris tahun 1992 untuk digunakan di Inggris dan Wales telah terbukti kegunaannya dan telah diadopsi oleh sejumlah negara barat lain.

PENGARUH ILMU PSIKOLOGI

- Memori. Memori memiliki tiga bagian penyimpanan yang berurutan: bagian sensorik, bagian memori jangka pendek dan memori jangka panjang, dan melibatkan tiga proses yang berbeda: memberikan kode, penyimpanan dan pengambilan. Upaya pertama untuk mengingat biasanya akan menghasilkan gambaran umum tetapi tidak rinci. Tidak adanya interupsi dari pewawancara, dan instruksi untuk berkonsentrasi dan menceritakan segalanya, biasanya akan menolong mendapatkan detail yang diperlukan.

- Bahasa tubuh / petunjuk non-lisan. Penelitian menemukan bahwa raut wajah, nada suara, diam, posisi tubuh, gerakan mata, jeda dalam bicara, dan aspek-aspek bahasa tubuh dan komunikasi non-lisan lainnya mengirimkan pesan-pesan. Baik untuk memastikan, mengaburkan, atau menentang apa yang disampaikan. Penelitian memperingatkan agar pewawancara berhati-hati dan jangan terlalu yakin dengan kemampuan mereka 'membaca' bahasa tubuh/KNL dari terwawancara.
- Pengelabuan. Tidak ada yang namanya perilaku non-lisan yang pasti terkait dengan pengelabuan atau penyangkalan. Selain itu, peneliti telah menemukan bahwa orang-orang (termasuk pewawancara dan yang diwawancara) seringkali memiliki pandangan stereotip tentang perilaku non-lisan yang tidak tepat. Dengan demikian, kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perilaku seseorang di ruang wawancara tidak dapat diandalkan.
- Pengaruh terhadap pihak yang diwawancara (*suggestibility*). Pewawancara harus menyadari bahwa pihak yang diwawancara rentan terhadap berbagai teknik yang mengarahkan atau mempengaruhi yang dapat berdampak pada ingatan mereka.

PIHAK YANG DIWAWANCARA

- Kelengkapan dan keakuratan keterangan saksi sering kali menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu kejahatan terpecahkan atau tidak.
- Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 (Inggris & Wales) menyarankan polisi untuk merekam wawancara dengan saksi yang 'rentan' dan 'terintimidasi' tetapi menyerahkan kepada pengadilan untuk memutuskan apakah rekaman tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti utama dari saksi.
- Wawancara tersangka merupakan hal yang sangat menentukan dalam proses konstruksi dan disposisi kasus.
- Tersangka lebih mungkin mengaku ketika mereka beranggapan bahwa bukti-bukti yang memberatkan mereka cukup kuat (ini merupakan alasan yang paling penting), ketika mereka menyesali tindakan mereka dan ingin membicarakan tentang apa yang terjadi, dan juga ketika mereka bereaksi terhadap tekanan dari luar dari faktor-faktor seperti stres karena ditahan dan persuasi petugas polisi.
- Polisi Inggris menggunakan pendekatan 3-tahap untuk mewawancarai tersangka – 'agenda/rencana tersangka', 'agenda/rencana polisi' dan 'tantangan'.
- Polisi harus menghargai berbagai alasan pada saat saksi dan tersangka mungkin tidak mau bekerja sama dalam wawancara, termasuk karena mereka takut merasa malu, balas

dendam, hilang akal, proses hukum, menyakiti orang lain, membuka diri dan takut akan adanya pembalasan.

MODEL WAWANCARA PEACE

Model wawancara PEACE memberikan struktur yang dapat digunakan dalam semua wawancara investigatif. Komponennya adalah:

- P - *Planning & Preparation*
(Perencanaan & Persiapan)
- E - *Engage & Explain*
(Terlibat & Jelaskan)
- A - *Account*
(Keterangan)
- C - *Closure*
(Penutup)
- E - *Evaluation*
(Evaluasi)

- Model PEACE dikembangkan oleh polisi dan telah digunakan secara meluas baik di Inggris atau di negara-negara barat lain.
- Secara teoritis didasarkan pada model wawancara PEACE, tetapi juga berdasarkan pada pengalaman dan sudut pandang praktis dan pragmatis dari kegiatan perpolisian sehari-hari.
- Sejak tahun 1993, kepolisian di Inggris dan Wales melakukan program pelatihan besar-besaran untuk model PEACE ini, tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan tahun 2000, pelatihan ini tidak mencapai hasil yang diharapkan. Alasannya karena kurangnya dukungan dari pihak manajemen/atasan, kurangnya keyakinan dari para supervisor/penyelia, penerapan yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara program tersebut.
- Evaluasi yang dilakukan tahun 2001 (Clarke & Milne) untuk Kantor Departemen Dalam Negeri menemukan buruknya transfer informasi dan keterampilan dari dalam kelas ke lapangan. Misalnya, penelitian menemukan penggunaan teknik-teknik wawancara yang buruk untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang diwawancara, sedikitnya pengawasan rutin dari atasan dan penyelia terhadap wawancara yang dilakukan di tempat kerja dan kesalahpahaman tentang model PEACE.
- Evaluasi menemukan bahwa wawancara korban dan saksi bahkan dilakukan dengan lebih buruk daripada wawancara tersangka. Diperkirakan ini terjadi karena kurangnya panduan pelaksanaan, adanya anggapan bahwa wawancara saksi memiliki 'status' yang lebih rendah dan gangguan yang terjadi selama wawancara berlangsung dalam lingkungan

yang tidak bisa dikendalikan oleh petugas polisi (misalnya: di rumah atau tempat kerja saksi).

- Clarke & Milne secara tegas menyarankan untuk membuat rekaman video dari semua wawancara dengan saksi dan korban yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

TEKNIK-TEKNIK WAWANCARA UTAMA

WAWANCARA KOGNITIF

- Peningkatan dramatis dari jumlah penelitian dan diskusi tentang Wawancara Kognitif (WK) dan Wawancara Kognitif yang Disempurnakan (WKS) pada akhir tahun 90-an memberikan kepastian bahwa teknik-teknik ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ingatan pada saat mewawancarai subjek yang bersedia bekerja sama.
- Ada kebingungan tentang makna sebenarnya dari 'wawancara kognitif' dan 'pewawancara kognitif', dan 'wawancara kognitif yang disempurnakan' dan 'pewawancara kognitif yang disempurnakan'.
- PEACE adalah model wawancara yang dipilih kepolisian di Inggris dan Wales, dengan 'ingatan bebas' dan 'manajemen percakapan' (lihat di bawah) sebagai gaya wawancara yang dipilih untuk meningkatkan memori di sebagian besar wawancara.
- Pada tahap 'account' ('keterangan') dalam wawancara PEACE dengan saksi yang mau bekerja sama, petugas melakukan wawancara keterangan bebas (Tingkat 1), WKS dasar (Tingkat 2) atau WKS mahir (Tingkat 3).
- Semua jenis wawancara memiliki serangkaian taktik yang dapat digunakan petugas.
- WKS mahir biasanya digunakan untuk wawancara yang membutuhkan keterampilan wawancara khusus, misalnya ketika mewawancarai saksi yang rentan, terintimidasi dan/atau penting.
- Keberhasilan wawancara memerlukan gabungan antara keterampilan kognitif, interpersonal dan faktor-faktor sosial untuk memfasilitasi kembalinya memori.

Seperti halnya WKS, ada dua model wawancara lain yang dikenal secara internasional untuk digunakan di dalam kerangka PEACE, yaitu:

- ingatan bebas (FR) – dianggap sebagai salah satu metode yang paling praktis dan berhasil untuk mendapatkan keterangan yang terpercaya, lengkap dan akurat dari tersangka dan saksi yang bersedia bekerja sama. Wawancara untuk 'mengingat' biasanya dilakukan oleh petugas berseragam dan penyidik untuk wawancara terhadap kasus-kasus yang banyak terjadi di masyarakat.
- manajemen percakapan (CM) – metode yang dapat diandalkan dan efektif untuk mewawancarai saksi dan tersangka yang

menolak bekerja sama. Model ini dapat digunakan untuk semua jenis kejahatan dan di semua tahap.

TEKNIK-TEKNIK UMUM YANG DAPAT MEMBANTU

Buku ini juga memberikan sejumlah teknik/taktik wawancara yang efektif. Jumlah penggunaan dan sejauh mana teknik tersebut digunakan dalam wawancara tergantung pada tingkat keterampilan pewawancara, kerja sama dari pihak yang diwawancarai, karakter kasus/pelanggaran yang sedang diselidiki atau ditangani, dan jenis pendekatan yang digunakan, misalnya: wawancara ingatan bebas, wawancara manajemen percakapan atau wawancara WKS.

- Kesan pertama yang baik
- Wawancara yang dibuat personal
- Membangun hubungan
- Menjelaskan arah dan tujuan wawancara
- Perlunya berkonsentrasi
- Pertanyaan terbuka dan pertanyaan lanjutan yang tertutup
- Bentuk-bentuk pertanyaan lain yang produktif
- Gunakan jeda dan diam
- Tidak menginterupsi orang yang sedang diwawancarai
- Bahasa tubuh/komunikasi non-lisan
- Perilaku pewawancara yang baik
- Menanyakan pertanyaan yang sesuai dengan kemampuan terwawancara
- Tidak apa-apa berkata "tidak tahu"
- Tidak apa-apa berkata "tidak paham"
- Jangan mengada-ada atau menebak
- Mendorong laporan atau keterangan yang diberikan secara sukarela
- Memperoleh ingatan yang terfokus
- Aktivasi dan mendorong gambaran tertentu
- Mengajukan pertanyaan lanjutan tentang suatu topik secara sistematis
- Menggaungkan pertanyaan lanjutan
- Mendengarkan secara aktif
- Merangkum
- Meminta klarifikasi dan penjelasan tambahan
- Melakukan sinkronisasi/menyelaraskan
- Membuat sketsa gambar atau alat bantu visual lainnya (contoh: peta, foto)
- Menantang atau mempertanyakan
- Meminta klarifikasi atas hal-hal yang tidak konsisten
- Pengaturan tempat duduk
- Mencatat
- Arah pandangan/kontak mata
- Bersahabat, sabar dan mendukung
- Memberikan pujian atas upaya yang dilakukan oleh pihak yang diwawancarai
- Melaporkan semua (LS)
- Transfer kendali (TK)

- Menegaskan konteks (MK)
- Upaya mengingat yang beragam dan ekstensif
- Mengubah urutan waktu
- Mengubah sudut pandang
- Fokus pada semua panca indera
- Pencetus memori tentang nama – nama yang umum/tidak umum, panjang nama, huruf pertama, dll
- Pencetus memori tentang seseorang – penampilan, pakaian, karakter, dll
- Bahasa non-lisan
- Memberikan waktu rehat
- Menyelidiki pertanyaan-pertanyaan penting.

TEKNIK-TEKNIK WAWANCARA LAIN

- Hipnotis. Secara umum disetujui bahwa hipnotis investigatif berisiko, dengan empat risiko utama yang berhubungan dengan *suggestibility*, hilangnya kemampuan untuk membuat penilaian kritis, bualan atau kebohongan, dan menguatkan memori yang tidak benar.
- Poligraf. Meskipun alat ini terus digunakan di beberapa bagian di Amerika Serikat, tetapi hasil pengujian poligrafi secara umum dianggap tidak dapat dipercaya untuk mendeteksi apakah seseorang berkata yang sebenarnya atau berbohong.
- Analisis pernyataan. Pemeriksaan ilmiah atas kata-kata yang diperoleh dari wawancara melalui sejumlah teknik semakin banyak, diajarkan kepada polisi. Untuk dapat melakukan ini dengan baik diperlukan catatan atau rekaman kata-kata sebenarnya yang digunakan oleh terwawancara dan bukan penafsiran tertulis dari kata-kata tersebut.
- RPMs. Taktik ini (merasionalkan, memproyeksikan dan meminimalisir) umum digunakan oleh polisi Amerika – dan didukung oleh pengadilan – agar tersangka mengaku. Mereka membantu tersangka menemukan pembenaran atas tindakan mereka, menyalahkan pihak lain dan mengurangi tingkat keseriusan pelanggaran yang terjadi. Metode ini tidak disarankan oleh polisi Inggris.
- Teknik lain. Tipologi Kalbfleisch (1994) dan Teknik Reid keduanya menjelaskan serangkaian taktik untuk mewawancarai tersangka. Meskipun secara umum didukung oleh pengadilan Amerika Serikat, tetapi untuk negara-negara lain yang menggunakan sistem hukum yang mirip dengan Inggris, kebanyakan taktik-taktik ini dianggap manipulatif dan menindas.

STRATEGI WAWANCARA INVESTIGATIF ACPO

- Satu kelompok kerja yang dibentuk oleh Asosiasi Kepala Kepolisian Inggris dan Wales

(ACPO) yang melakukan evaluasi pada tahun 2001 mengenai kondisi wawancara investigatif menyimpulkan bahwa model PEACE perlu diperbarui, diperkenalkan ulang serta didukung oleh struktur dan proses yang layak.

- Dengan dukungan penuh dari ACPO dan Departemen Dalam Negeri Inggris, Strategi Wawancara Investigatif untuk Inggris, Wales (dan Irlandia Utara) mulai dirancang tahun 2003, yang mana semua kantor kesatuan kepolisian diminta mengirimkan rencana implementasi pada akhir tahun 2004.
- Strategi ini mengembangkan struktur pelatihan 5 tahap dan merekomendasikan pelatihan yang komprehensif untuk setiap tahapnya dan dilengkapi dengan penilaian terus-menerus di tempat kerja.
- Strategi ini menekankan pada praktik-praktik yang baik yang diadopsi dari model PEACE, mengakui bahwa wawancara yang efektif memerlukan waktu, konsentrasi dan kelenturan yang cukup, serta mengakui peran penting dari pengawasan/supervisi.
- Centrex (Pusat Pelatihan dan Pengembangan Polisi (Pusdiklat) Inggris dan Wales) mengembangkan dan menyediakan sejumlah paket bahan pelatihan untuk setiap tahap pada tahun 2004.
- Strategi ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mana pewawancara yang tidak berpengalaman dapat meminta bantuan dalam merencanakan dan melakukan wawancara dari penyelia atau kolega yang lebih berpengalaman, dan dukungan tambahan dapat diberikan oleh petugas yang mahir dalam keterampilan wawancara untuk kasus-kasus serius

TEKNOLOGI DAN WAWANCARA

- Sebagian besar yurisdiksi barat telah menerima rekaman elektronik sebagai alat yang praktis dan bermanfaat untuk mendokumentasikan wawancara polisi dengan tersangka.
- Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 mewajibkan semua polisi di Inggris dan Wales untuk merekam wawancara tersangka dengan menggunakan alat elektronik. Rekaman wawancara saksi merupakan suatu fenomena yang baru-baru ini dilakukan.
- Penelitian menunjukkan bahwa arah kamera memiliki pengaruh besar terhadap penilaian juri atau hakim terhadap bukti pengakuan yang dibuat dengan sukarela.
- Alat perekam berubah dengan cepat. Penggunaan kaset video VHS akan segera tertinggal dan penggunaannya tidak lagi didukung. Polisi harus siap untuk melakukan perubahan atau memperbarui sistem rekaman videonya.

LOKASI WAWANCARA

- Polisi harus memiliki kendali terhadap lokasi wawancara investigatif sebesar mungkin. Pewawancara dan orang yang diwawancarai harus dapat berkonsentrasi sehingga gangguan di rumah atau tempat kerja saksi, atau di meja kerja pewawancara yang berada di kantor yang ramai, tidak kondusif untuk wawancara yang efektif.
- Ruang wawancara tersangka harus memastikan agar kamera-kamera yang ada fokus pada kedua pihak secara adil. Penggunaan teknologi *picture-in-picture*/gambar-di dalam-gambar (2 gambar dari ruang wawancara) semakin banyak digunakan.
- Percakapan akan lebih nyaman dilakukan dengan menggunakan sudut 90° (atau arah pukul empat belas kurang sepuluh menit/13.50). Percakapan yang dilakukan saling berhadapan dapat terlalu konfrontatif.
- Ruang wawancara harus bebas dari gangguan, kalau ada meja, sebaiknya meja tersebut diletakkan di sisi petugas daripada di antara petugas dan tersangka, dan pastikan alat bantu untuk mengingat tersedia untuk memastikan persyaratan hukum dan persyaratan lain terpenuhi.
- Untuk wawancara saksi, privasi dan kenyamanan merupakan pertimbangan utama.
- Dalam wawancara dengan saksi yang rentan, terintimidasi dan penting, wawancara dengan dua pewawancara semakin dianggap penting (satu pewawancara di dalam ruang wawancara bersama dengan saksi dan satu lagi di ruang sebelah bertugas mencatat, memastikan semua peralatan berfungsi, dan mengkomunikasikan dengan pewawancara utama jika terjadi ketidakcocokan dan hal-hal lain yang mungkin terlewatkan).

PELATIHAN

- Menurut strategi ACPO, kepolisian di Inggris, Wales dan Irlandia Utara menerapkan 5 tingkatan pelatihan – 1) magang (bagi petugas polisi yang berada di dua tahun pertamanya di kepolisian); 2) pewawancara dan penyidik berseragam; 3) pewawancara spesialis (untuk saksi-saksi rentan, terintimidasi & penting, dan tersangka untuk kasus-kasus pelanggaran besar); 4) supervisor/penyelia; 5) penasihat wawancara (kelompok kecil pewawancara ahli yang dapat dimintakan bantuannya dalam merencanakan wawancara utama dan/atau rumit).
- Keterampilan dasar yang perlu dikembangkan oleh petugas polisi pewawancara adalah kemampuan untuk merencanakan dan mempersiapkan wawancara, kemampuan untuk membangun hubungan dan kemampuan

- mendengarkan/menyimak dengan efektif dan mengajukan pertanyaan dengan efektif.
 - Pelatihan wawancara harus: menjelaskan tentang kerangka teoritis dan kompetensi teknis; dilakukan secara menyeluruh yang terdiri dari instruksi atau pengajaran di kelas, simulasi skenario dan bermain peran, pemantauan mandiri, dan penilaian di tempat kerja; dan difokuskan kepada seluruh aspek polisi dan seluruh aspek karir.
 - Pelatihan di Inggris dilakukan selama satu sampai tiga minggu untuk setiap tingkatannya, serta penilaian terus-menerus di tempat kerja. Pelatihan wawancara spesialis (contoh: mewawancarai saksi atau tersangka tingkat mahir) dirancang untuk berlangsung selama tiga minggu.
 - Pemantauan dan evaluasi harus dijadikan bagian dari program implementasi.
 - Pelatihan harus melibatkan penyelia dan manajer – dukungan mereka sangat penting.
 - Pelatihan harus menekankan bahwa wawancara yang dilakukan tanpa didahului dengan perencanaan yang matang hanya “terburu-buru untuk gagal”.
 - Struktur wawancara 5-tingkat yang dikenalkan sejak tahun 2003, sekarang sedang dalam proses untuk digabungkan ke dalam proyek “Meningkatkan keprofesionalan proses penyelidikan” (PIP) yang dipimpin oleh Departemen Dalam Negeri/ACPO. Misalnya: wawancara saksi dan wawancara tersangka merupakan dua dari tiga komponen untuk PIP tingkat 1 (terdiri dari 3 standar operasional nasional untuk semua ‘penyelidik’).
-

GAMBARAN UMUM

PENDAHULUAN

Faktor yang paling penting dalam suatu kasus pidana adalah wawancara. Ini adalah pendapat dari banyak komentator (misalnya: Baldwin, 1993; Milne & Bull, 1999; Shaw, 2002) yang menekankan pentingnya informasi yang diperoleh dari saksi, korban atau tersangka. Wawancara memiliki tujuan, ruang lingkup dan isi yang berbeda-beda tetapi semua memiliki tujuan yang sama: untuk mengumpulkan informasi (McGurk, Carr & McGurk, 1993).

Mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan lengkap merupakan tujuan yang berat dan rumit, serta harus dijalankan dengan hati-hati, piawai dan terampil. Akan tetapi, secara tradisional, tugas penting ini tidak diberikan waktu yang cukup (George & Clifford, 1992; Inbau, Reid & Buckley, 1986; Shaw, 1996a). Sebagian besar polisi belajar melakukan wawancara korban, saksi dan tersangka melalui gabungan antara intuisi, contoh dari sesama polisi dan pengalaman praktis (Shepherd, 1993; Takitimu & Reid, 1994). Bahaya dari hal ini cukup jelas – petugas dapat meniru cara yang salah atau kehilangan informasi yang bernilai. Pada akhirnya penyelidikan dapat rusak, terganggu atau bahkan hancur.

Wawancara investigatif merupakan bidang yang penting dalam penelitian kontemporer. Hal-hal penting seperti keterangan saksi mata dan kondisi memori manusia telah digali selama beberapa dekade sebagai bagian dari ilmu sosial, tetapi baru sekitar 20 tahun terakhir dihargai implikasi dari hal ini terhadap penegakan hukum (Yeschke, 2003).

Sebelum ini, hanya sedikit yang diketahui tentang tingkat efektifitas teknik wawancara tradisional. Ruang wawancara (atau 'interogasi') polisi yang terkesan rahasia mengakibatkan meluasnya kekhawatiran tentang cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan pengakuan – seperti intimidasi, tekanan, pengelabuan dan bahkan kekerasan fisik (Leo, 1992). Telah terbukti bahwa cara-cara ini dapat menyebabkan dihasilkannya pengakuan palsu/salah, yang mana hal ini mengakibatkan terjadinya dua kesalahan hukum – tidak hanya menghukum orang yang tidak bersalah tetapi pelaku yang sebenarnya tetap bebas (Gudjonsson, 1992).

Ilmu dan informasi ilmiah, akademik dan praktis yang sekarang tersedia tentang wawancara investigatif telah digunakan oleh berbagai kepolisian untuk meningkatkan kesadaran tentang kekurangan atau kegagalan yang diakibatkan oleh wawancara yang tidak memadai serta untuk mempromosikan pelatihan polisi yang sistematis tentang praktik yang baik (lihat, sebagai contoh, Bull & Cherryman, 1995; CFIS, 2004).

STRUKTUR

Tinjauan ini memberikan gambaran umum tentang wawancara investigatif dalam perpolisian. Dan juga akan menarik bagi siapapun yang menggunakan cara wawancara ini dalam pekerjaannya, misalnya penyidik penipuan asuransi, pengacara dan kantor pemerintahan.

Tinjauan ini menjelaskan tentang upaya yang dilakukan oleh polisi dan psikolog dalam beberapa dekade terakhir untuk:

- Menyampaikan tentang pentingnya wawancara investigatif
- Memahami apa yang terjadi dalam wawancara investigatif
- Menggunakan teori-teori dan penelitian psikologis untuk mencari tahu apa yang menyebabkan suatu wawancara berhasil
- Memeriksa tingkat efektifitas dari berbagai keterampilan dan teknik
- Menemukan kerangka kerja dan penjelasan dasar dari wawancara investigatif
- Menghasilkan panduan tentang bagaimana melakukan wawancara.

Judul tiap bab dirancang sedemikian rupa agar pembaca dapat dengan mudah mencari topik yang menjadi ketertarikan mereka. Tidak semua topik berdiri sendiri, terpisah dari topik yang lain. Misalnya, ada bab terpisah tentang bahasa tubuh dan pengelabuan. Namun, salah satu cara yang dapat membantu mendeteksi ketika seseorang berbohong adalah dengan menafsirkan bahasa tubuhnya. Sehingga ada irisan antara kedua topik tersebut, dan juga topik-topik lain.

KETERBATASAN

1. Literatur kontemporer tentang wawancara investigatif cukup banyak. Sehingga, hanya sedikit yang dapat terwakili disini. Para pembaca didorong untuk menggunakan daftar pustaka yang ada untuk memperluas pengetahuan mereka.
2. Ada beberapa topik yang tidak dibahas atau hanya sedikit disinggung. Diantaranya tentang wawancara khusus (misalnya: dalam kasus penganiayaan anak), jenis 'wawancara' yang dilakukan di dalam kondisi terkontrol (karena panggilan darurat ke polisi) dan karena adanya tuntutan masyarakat, serta diskusi tentang persyaratan hukum. Hal-hal ini tidak dibahas karena:
 - Kepolisian Selandia Baru ingin mengidentifikasi praktik-praktik internasional yang baik yang dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka dasar tentang wawancara

investigatif. Setelah dikembangkan, informasi ini dapat digunakan oleh berbagai kelompok dan diterapkan dalam keadaan khusus seperti ruang atau kondisi terkontrol dan mewawancarai anak.

- Hukum dan aspek-aspek hukum terkait dengan perpolisian dianggap sebagai bahan pelatihan umum dan tidak spesifik menjadi bagian dari bahan pelatihan tentang wawancara (tetapi pelatihan wawancara membutuhkan sesi yang menjelaskan hak untuk tetap diam, hal-hal yang perlu diperhatikan dan lain-lain yang perlu dikelola selama wawancara); dan
 - Peninjau pelatihan yang tidak tersumpah adalah dari bidang penelitian dan kriminologi. Oleh karena itu, aspek-aspek yang terkait dengan hukum, pengalaman tersumpah, dan psikologi dilaporkan dari sudut pandang masyarakat umum.
3. Karena ketiadaan penelitian di Selandia Baru tentang wawancara polisi, buku ini sangat mengandalkan sumber referensi dari Inggris dan juga sedikit dari Amerika. Hal ini mengangkat dua permasalahan penting:
- Tinjauan ini tidak memberikan masukan tentang praktik wawancara polisi di Selandia Baru (untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut, suatu kegiatan terpisah dari tinjauan ini sedang dilakukan untuk membuat standar praktik); dan
 - Kesimpulan berdasarkan sumber referensi yang bukan dari Selandia Baru tidak dapat digeneralisir untuk konteks Selandia Baru karena adanya perbedaan hukum, kebijakan organisasi dan hal-hal lain dalam yurisdiksinya.

Meskipun begitu, referensi dari Anglo-Amerika tetap memberikan landasan yang kuat untuk dilakukannya penelitian dan praktik lebih lanjut di Selandia Baru.

DEFINISI

Seperti halnya bidang-bidang spesialisasi lain, penting untuk kita memahami istilah dan kosa kata seputar wawancara investigatif yang memiliki makna yang dapat dipahami oleh semua pihak (Shepherd, 1991).

WAWANCARA

Untuk mudahnya, wawancara disebut sebagai “percakapan dengan tujuan tertentu” (Hodgson, 1987, hal. 2), tetapi dalam kasus-kasus pidana, diperlukan keterampilan yang lebih dari sekedar percakapan. Karena, untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan lengkap dari pihak yang diwawancarai, pewawancara investigatif harus mengesampingkan beberapa karakter yang ada dalam percakapan sehari-hari, seperti menginterupsi lawan bicara dan mengajukan pertanyaan tertutup (Baldwin, 1993; McGurk et al, 1993; Milne & Bull, 1999). Selain itu, petugas diharapkan untuk mengingat bahwa wawancara juga berarti memberikan informasi, misalnya: menjelaskan pada pihak yang diwawancarai tentang apa yang terjadi dan mengapa dan apa yang akan terjadi kemudian (NCPE, 2005).

KORBAN DAN SAKSI

Menurut Kamus Kecil Bahasa Inggris Oxford edisi ke-9 (1995), korban adalah seseorang yang terluka, tewas atau disakiti sebagai hasil dari suatu keadaan atau kejadian, dan saksi adalah seseorang yang ada di suatu kejadian dan dapat memberikan informasi tentang kejadian tersebut. Dalam kaitannya dengan wawancara investigatif, ‘wawancara saksi’ termasuk juga:

- Semua wawancara dengan korban. Karena korban adalah saksi atas kejahatan yang menimpanya (CPTU, 1992a; Gudjonsson, 1992). Sehingga, sebagian besar materi pelatihan dirancang agar sesuai dengan dua jenis wawancara saja – saksi dan tersangka. Secara implisit sudah terangkum bahwa wawancara ‘saksi’ juga termasuk korban (CFIS, 2004).
- Semua wawancara dengan seseorang yang memiliki informasi tentang dugaan pelanggaran atau pelaku pelanggaran, meskipun orang tersebut tidak hadir secara fisik di tempat kejadian. Hal ini termasuk saksi alibi atau seorang informan (Gudjonsson, 1992).

Korban dan saksi yang rentan dan terintimidasi

Peraturan terkini di Inggris - Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 (Inggris dan Wales) dan Peraturan tentang Bukti Pidana (Irlandia Utara) tahun 1999 telah menyebabkan penggunaan istilah ‘saksi rentan’ dan ‘saksi terintimidasi’:

- Saksi rentan – korban dan saksi di bawah usia 17 pada saat sidang, atau rentan karena mengalami gangguan mental, kurang kecerdasan dan fungsi sosial yang penting, disabilitas fisik atau gangguan fisik;
- Saksi terintimidasi – korban dan saksi yang takut atau tertekan karena kesaksiannya. Hal ini dapat terjadi karena alasan-alasan: usia, latar belakang sosial budaya atau etnis, kondisi rumah tangga dan pekerjaan, keyakinan agama, opini politik, perilaku tertuduh, anggota keluarga tertuduh atau kenalannya terhadap saksi. Menurut Undang-Undang tersebut, polisi dapat memilih untuk menghasilkan rekaman visual dari wawancara, yang nantinya, tergantung pada putusan pengadilan, dapat digunakan di pengadilan sebagai barang bukti utama dari saksi. Hal ini dibahas lebih lanjut dalam bab tentang ‘teknologi dan wawancara’.

Saksi penting

Banyak petugas polisi di Inggris yang juga menyadari perlunya memiliki rekaman visual dari bukti wawancara yang dilakukan terhadap ‘saksi penting’ (Milne & Bull, 2003). Saksi penting ini termasuk mereka yang “mungkin menjadi, atau mengaku menjadi saksi mata dari suatu kejadian...atau saksi yang memiliki hubungan khusus dengan korban atau memiliki posisi penting dalam penyidikan” (NCPE, 2005, hal. 87).

Heaton-Armstrong dan Wollchover (1999, hal. 237-238) menawarkan sejumlah kriteria berikut untuk memutuskan siapa yang dapat dianggap sebagai ‘saksi penting’:

- Tingkat keseriusan pelanggaran yang sedang diselidiki (mis: pembunuhan dan serangan seksual serius)
- Jika saksi kemungkinan akan membuat pernyataan yang akan ditentang dalam persidangan
- Semua saksi mata untuk kejadian-kejadian serius/pelanggaran utama yang sedang diselidiki
- Saksi yang sudah berbicara dengan tersangka setelah kejadian tentang hal-hal yang relevan dengan kejadian
- Saksi yang berbahaya atau berpotensi membahayakan
- Siapapun yang terakhir kali bertemu dengan korban sebelum pelanggaran diketahui
- Saksi yang menemukan jasad korban, dan
- Petugas yang pertama kali menanggapi kejadian serius/utama dan menyaksikan kejadian atau menahan tersangka.

Ketika menggunakan istilah ‘pelapor’ maksudnya adalah seseorang yang membawa suatu kasus melawan orang lain di pengadilan, istilah ini memiliki makna hukum yang jelas (sama dengan ‘penggugat’). Akan tetapi, istilah ini juga memiliki makna umum lain ketika digunakan untuk mengacu pada orang yang membawa suatu permasalahan untuk mendapat perhatian polisi sehingga memicu tanggapan oleh polisi (Gudjonsson, 1992). Pelapor dalam hal ini bisa disamakan dengan ‘korban’ atau ‘saksi’ meskipun di beberapa kejadian pelapor mungkin bukan korban langsung (misalnya seorang ibu yang melaporkan dugaan penganiayaan terhadap anaknya) atau bahkan saksi langsung (misalnya seseorang yang melaporkan tetangganya yang hilang). Dalam situasi seperti ini, polisi akan mewawancarai pelapor sebagai bagian dari penyelidikan; namun demikian, tampaknya hanya sedikit referensi tentang ‘pelapor’ dalam literatur tentang wawancara investigatif. Pengecualian adalah McGurk dan rekan (1993) yang mengelompokkan pelapor sebagai kelompok terpisah yang diwawancarai oleh polisi. Dari sudut pandang teknis, wawancara ini harus diperlakukan seperti salah satu bentuk wawancara saksi.

TERSANGKA

‘Tersangka’ adalah seseorang yang diduga telah melakukan pelanggaran yang sedang diselidiki. Tersangka juga secara umum disebut sebagai ‘pelanggar’ atau ‘pelaku’ walaupun kata ‘pelaku’ lebih merupakan istilah di Amerika (misalnya Kiley, 1998; Leo, 1992; Vessel, 1998). Istilah ‘pelaku’ semakin sering digunakan di Selandia Baru dan Inggris karena pengaruh program-program kepolisian Amerika. Istilah yang lebih jauh, dan mungkin sedikit ekstrim, juga dapat ditemukan digunakan oleh Morgan (1999, hal. 11) yang menyebut pelanggar sebagai ‘pelaku pelanggaran’ – dalam tulisannya

“Dalam buku ini, kita akan melihat sejumlah faktor yang dapat diterapkan dalam pertemuan yang umum terjadi di jalan antara petugas dan pelaku pelanggaran”.

INTEROGASI VERSUS WAWANCARA

Literatur tentang wawancara investigatif hanya menunjukkan sedikit konsistensi antara penggunaan istilah ‘wawancara’ dan ‘interogasi,’ meskipun istilah ‘interogasi’ hanya digunakan untuk wawancara dengan tersangka. Sebagai contoh, bahan-bahan awal tentang teknik yang dapat digunakan petugas untuk membujuk seseorang untuk mengaku cenderung menggunakan istilah ‘interogasi’ (misalnya Inbau, Reid & Buckley, 1986). Beberapa pengamat lebih memilih pembedaan berikut:

- “Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi, sementara tujuan dari interogasi adalah untuk mendapatkan pengakuan” (Meyer & Morgan, 2000, hal. 2).
- “Sasaran wawancara adalah mengumpulkan data yang sebenarnya yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan penentuan tindakan yang adil. Sementara, di sisi lain, interogasi adalah pertemuan tatap muka dengan seorang subjek dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan atau pengakuan tentang pelanggaran hukum atau kebijakan yang secara nyata terjadi” (Yeschke, 2003, hal. 49).

Konotasi negatif

Akhir-akhir ini, penggunaan istilah ‘interogasi’ tidak lagi diminati, salah satunya karena kritik terhadap beberapa ‘taktik interogasi’ yang dikhawatirkan dapat menyebabkan pengakuan palsu (Gudjonsson, 1992). Ditinggalkannya istilah ini merupakan tanggapan terhadap citra negatif yang muncul, terutama gambaran tentang orang-orang yang menjadi subjek dari taktik-taktik fisik dan psikologis yang tidak menyenangkan, tidak adil dan tidak baik yang dilakukan oleh aparat berwenang (CFIS, 2004; Shepherd, 1991).

Citra negatif ini dijelaskan dalam istilah ‘derajat ketiga’. Leo (1992, hal. 41-42) menjelaskan bahwa ini adalah ungkapan umum untuk berbagai strategi koersif yang berhubungan dengan interogasi. Beliau membuat penjelasan yang menarik tentang “tiga jenis interogasi derajat ketiga yang ideal”:

- Derajat ketiga ‘tradisional’ – penggunaan kekerasan fisik secara langsung, seperti memukul atau mencambuk saksi sampai mengaku – umum dilakukan di abad 19 dan awal abad 20;
- Derajat ketiga ‘terselubung’ – penyiksaan fisik yang tidak meninggalkan tanda-tanda eksternal, misalnya memukul dengan tongkat karet, menggunakan lampu yang cahayanya membutakan karena sangat terang atau penahanan terisolir, perampasan makanan dan kesempatan tidur dan sesi tanya-jawab yang berlangsung lama oleh sejumlah petugas – dari sekitar tahun 1910 sampai awal tahun 1930an;
- Derajat ketiga ‘psikologis’ – bentuk paksaan yang tidak bersifat fisik misalnya intimidasi, tekanan, ancaman disakiti, dan janji keringanan hukuman.

Leo (1992) berpendapat bahwa jenis interogasi ‘tiga derajat’ ini telah digantikan dalam beberapa dekade terakhir dengan strategi yang tidak menggunakan kekerasan berdasarkan pada pengelabuan dan manipulasi. Contoh yang paling terkenal dapat ditemukan di dalam buku “Interogasi Pidana dan Pengakuan” oleh Inbau, Reid & Buckley (1986). Salah satu penulisnya, Fred Inbau, merasa perlu untuk

membela pandangannya tentang taktik-taktik yang dijelaskan dalam buku tersebut dengan berkata:

“Untuk melindungi diri saya agar tidak disalahartikan, saya ingin menjelaskan bahwa saya tidak menganjurkan apa yang sering disebut sebagai ‘derajat ketiga’, karena saya sangat menentang penggunaan taktik atau teknik interogasi apapun untuk membuat seorang yang tidak bersalah mengaku. Dengan demikian, saya menentang penggunaan tindakan keras, ancaman, atau janji keringanan – jika digunakan untuk mempengaruhi seseorang yang tidak bersalah untuk mengaku; tetapi saya menyetujui taktik dan teknik psikologis seperti tipu daya dan kecurangan yang tidak hanya bermanfaat tetapi sering kali diperlukan untuk mendapatkan informasi yang memberatkan dari orang yang bersalah, atau petunjuk penyelidikan dari saksi atau informan yang tidak mau bekerja sama” (Inbau, 1999, hal. 1403).

Masih digunakan

Meskipun istilah ‘interogasi’ memiliki konotasi negatif, tetapi tidak berarti istilah tersebut sudah hilang. Istilah ini masih sangat sering digunakan dalam referensi FBI dan literatur Amerika (misalnya Napier & Adams, 1998; Vessel, 1998; Walter, 2002; Yeschke, 2003). Bahkan dapat dikatakan bahwa istilah ini merupakan pembeda yang bermanfaat. Misalnya, Swanson, Chamelin dan Territo (2002) mengingatkan kita bahwa

“perbedaan yang paling penting adalah sejumlah persyaratan hukum yang harus dipenuhi dalam interogasi tidak lagi diberlakukan dalam wawancara”.

Manfaat dari perbedaan ini juga ditunjukkan oleh Morgan (1999), seorang petugas polisi berpengalaman yang merancang teknik wawancara untuk ‘wawancara lapangan’ (kebalikan dari wawancara terstruktur yang formal) yang beliau namakan ‘Wawancara Terfokus’. Dalam bukunya, Morgan mengartikan ‘wawancara lapangan’ sebagai

“upaya untuk mendapatkan informasi di lapangan yang bersifat non-konfrontatif, jika dibandingkan dengan ‘interogasi lapangan’ yang mana ini merupakan upaya untuk mendapatkan informasi di lapangan yang bersifat konfrontatif”.

Disini, ‘interogasi’ digambarkan sebagai situasi konfrontatif sementara wawancara adalah situasi yang tidak konfrontatif. Penulis Amerika lainnya, Don Rabon (1992) menawarkan pembeda sederhana: wawancara menekankan pada upaya ‘mencari tahu’ dan interogasi lebih mirip dengan ‘persuasi’.

Agen Khusus FBI Vessel (1998, hal. 3) menjelaskan perbedaan wawancara tersangka dengan membagi antara tahap wawancara dan interogasi:

“Penyidik harus membuat perbedaan jelas antara dua proses mewawancarai dan menginterogasi tersangka. Wawancara harus dilakukan setiap sebelum interogasi. Melalui wawancara, petugas mengetahui tentang terwawancara, kebutuhan, ketakutan, kekhawatiran dan sikap mereka. Petugas kemudian dapat menggunakan informasi ini untuk mempersiapkan tema atau argumen yang dapat digunakan selama interogasi. Selama proses tanya jawab awal yang tidak mengancam ini, penyidik... membangun hubungan dan mencari titik temu antara dirinya dan terwawancara”.

Keterbatasan dalam membuat perbedaan

Ada sejumlah keterbatasan dalam menggunakan istilah wawancara dan interogasi. Pertama, hal ini menimbulkan kesan bahwa interogasi lebih penting dari wawancara. Shepherd (1991) menjelaskan fenomena ini dari sudut pandang polisi. Wawancara korban dan saksi sering dilihat memiliki status rendah, sementara interogasi dianggap memiliki status tinggi. Hal ini terjadi karena wawancara dianggap sebagai “bentuk percakapan yang dilakukan ketika hanya ... mengalami sedikit penolakan atau hambatan”, sementara kebutuhan interogasi menyiratkan “seperangkat perilaku, pola, atau strategi [yang perlu] diterapkan oleh petugas untuk mengatasi penolakan dari pihak yang diwawancara baik yang semakin meningkat, tetap atau total terhadap usaha petugas untuk mengelola informasi dan percakapan” (Shepherd, 1991, hal. 51).

Shepherd merasa asumsi utama yang sering dimiliki orang-orang adalah wawancara itu mudah dan siapapun dapat melakukannya, sementara interogasi sulit dan memerlukan keterampilan khusus dari si pewawancara. Hal ini, menurutnya, mengakibatkan “kerancuan cara berpikir dan kerancuan praktik” (1991, hal. 56). Beliau menghimbau polisi untuk membuang ‘beban istilah yang kontraproduktif ini’ dan “melakukan pembersihan mental. Mengucapkan selamat tinggal pada wawancara versus interogasi! Mengucapkan selamat datang pada wawancara investigatif” (1991, hal. 56).

Kedua, dapat dikatakan bahwa perbedaan tidak memperhatikan kenyataan yang terjadi dalam banyak wawancara polisi. ‘Wawancara’ menyiratkan diskusi dengan seseorang yang bersedia memberikan informasi; ‘interogasi’ menyiratkan diskusi dengan seseorang yang tidak bersedia memberikan informasi. Dalam kenyataannya, korban dan saksi juga mungkin tidak bersedia bicara – dan banyak tersangka yang bersedia bicara (Milne & Bull, 1999; Rabon, 1992). Perbedaan yang tampak berguna (misalnya yang dibuat oleh Morgan (1999) tentang konfrontasi versus

non-konfrontasi) tidak masuk akal ketika menghadapi orang yang tidak bersedia bicara ketika diwawancara dan orang yang bersedia bicara ketika diinterogasi.

Keterbatasan ketiga adalah fakta bahwa perbedaan antara saksi dan tersangka juga dapat terlihat kabur. Terkadang 'saksi' dapat muncul menjadi tersangka (Yeschke, 2003). Ini merupakan salah satu alasan untuk mengajukan rekaman suara atau video dari pernyataan saksi, terutama untuk kasus-kasus pembunuhan berencana dan pelanggaran serius lain (Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999).

Meskipun sekarang istilah 'interogasi' terutama ditemukan di literatur Amerika, namun sesekali juga muncul di buku-buku Inggris (lihat, contohnya, Baldwin, 1994; Sanders, 1994; Sanders & Young, 2002; dan Williamson, 1994a).

WAWANCARA INVESTIGATIF

Pada awal tahun 90an, Eric Shepherd (1991) menganjurkan untuk mengadopsi istilah 'wawancara investigatif' untuk menggambarkan proses bertanya kepada korban, saksi dan tersangka (Gudjonsson, 1992; Ord et al, 2004). Hal ini untuk melawan persepsi publik tentang teknik-teknik yang lebih 'persuasif' dan diimplementasikan oleh kepolisian di Inggris dan Wales tahun 1993. Hal ini kemudian menjadi bagian dari program pelatihan, penelitian dan pengembangan yang menghasilkan paket 'PEACE' (Soukara, Bull & Vrij, 2002).

Singkatan PEACE ini (nanti akan dijelaskan di bab selanjutnya) merupakan gabungan huruf-huruf pertama dari: *Planning and preparation* (Perencanaan dan Persiapan), *Engage and Explain* (Terlibat dan Jelaskan), *Account* (Keterangan), *Closure* (Penutup) dan *Evaluation* (Evaluasi). Model wawancara ini secara menyeluruh menolak istilah 'interogasi' (lihat CFIS, 2004). Semua wawancara, baik dengan korban, saksi atau tersangka, adalah 'wawancara investigatif'.

PENYIDIK / DETEKTIF

Dahulu, penyelidikan kejahatan merupakan tugas prerogatif dari detektif (Maguire, 2003), namun meningkatnya jumlah kejahatan yang dilaporkan sejak pertengahan abad 20 menyebabkan polisi berseragam juga menyelidiki apa yang disebut sebagai pelanggaran atau kejahatan ringan, seperti pencurian, perusakan dan penyerangan ringan. Kejahatan 'serius' tetap ditangani oleh detektif (Wright, 2002). Akan tetapi, menurut Ede dan Shepherd (2000, hal. 111)

"karena semakin banyak petugas yang terlibat dalam penyelidikan proaktif dan reaktif, istilah detektif menurut pengertian tradisional mejadi

semakin tidak relevan. Dari segi jumlah, ketika kepolisian mengubah penekanan kegiatan perpolisiannya, semakin banyak petugas yang terlibat dalam pekerjaan detektif meskipun mereka tidak secara resmi memegang jabatan 'detektif'... dan untuk menambah kebingungan, banyak orang dengan jabatan detektif tetapi tidak terlibat dalam tugas-tugas detektif!"

Wright (2002) menggunakan kasus 'Pembunuh dari Yorkshire', yang mana ada 13 perempuan tewas dibunuh oleh Peter Sutcliffe, untuk menjelaskan bahwa penyelidikan harus dilihat sebagai kegiatan polisi secara menyeluruh. Ketika memecahkan kasus ini, fokus utamanya ditujukan kepada tim penyidik (detektif), tetapi ternyata penangkapan dilakukan oleh seorang sersan polisi dan polisi magang yang sedang melakukan patroli rutin. Hal ini menantang penggunaan istilah 'penyidik' sebagai sinonim dari istilah 'detektif'. Wright (2002) menganjurkan agar semua petugas polisi menjadi penyidik pada suatu waktu, dan kompetensi penyelidikan harus mencakup kompetensi dasar sampai spesialisasi.

Sama juga dengan bahan ajar pelatihan dari 'Pelatihan Dasar' dari Kesatuan Kepolisian Metropolitan (2001, hal. 4) yang menyatakan:

"Sebagai polisi berseragam, anda hampir selalu akan menjadi petugas pertama yang tiba di tempat kejadian perkara. Terkadang, anda adalah satu-satunya petugas yang datang, dan oleh karena itu anda bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan atas perkara atau kejahatan yang terjadi. Dengan kata lain, anda adalah 'penyelidik'. Tujuan utama anda haruslah: 1) memenuhi kebutuhan korban, 2) menjaga keutuhan TKP, 3) mulai melakukan penyelidikan yang akan memberikan prospek terbaik untuk menangkap pelaku." [penekanan atas versi asli]

Dapat dikatakan bahwa siapapun yang terlibat dalam pekerjaan penyelidikan adalah 'penyelidik' atau Ede dan Shepherd (2000) merekomendasikan sebagai 'penyidik forensik'. Mereka mendukung penggunaan istilah ini dengan mengutip model yang disampaikan oleh ketua ACPO, David Phillips (sebelumnya Kepala Polisi di daerah Kent) tahun 1999 yang mengusulkan agar penyidik forensik memenuhi kriteria professional yang sama seperti ahli forensik ilmiah (Ede dan Shepherd, 2000, hal. 112-113).

- Penyidik forensik harus memiliki pengetahuan untuk melakukan tugasnya dengan kompeten. ... [jika tidak] penyidik forensik yang tidak peduli akan terlibat dalam pengelabuan diri sendiri dan mengelabui orang lain; dan merupakan suatu ancaman, karena kekurangan kesadarannya akan mengakibatkan dilakukannya kesalahan yang akan menyebabkan dihukumnya

seseorang yang tidak bersalah sementara yang bersalah tetap bebas.

- Penyidik forensik harus memiliki syarat-syarat keterampilan teknis, metode dan teknik untuk mengumpulkan, menyusun, menganalisis dan mengevaluasi bukti – dan untuk merekam semua proses ini secara menyeluruh serta hasilnya.
- Penyidik forensik harus mengadopsi pendekatan ilmiah untuk memperhatikan segalanya. Bukan hanya untuk memastikan apa yang dipercaya oleh seseorang sebagai kasusnya. ...penyidik forensik berkewajiban untuk memiliki hipotesis bahwa si tersangka tidak bersalah, tidak tahu apa-apa, dan mengumpulkan serta memeriksa sejumlah informasi yang dari spektrum yang luas untuk menguji hipotesis tersebut.
- Penyidik forensik harus berpikiran terbuka. Seperti halnya peneliti, mereka harus menolak untuk berpihak atau menjadi partisan, terlibat secara emosional dalam satu permainan yang harus dimenangkan. Apabila ini terjadi, risiko nyata yang mungkin dialami adalah seseorang: menolak semua kemiripan dari keadaan atau posisi yang tidak sesuai; dan secara selektif memilah bukti-bukti yang mendukung ‘teori kasusnya’ dan melekatkan suatu perkara ke seorang tersangka, tanpa memperhatikan bukti-bukti lain yang berlawanan atau setara.
- Berikutnya, penyidik forensik juga harus siap untuk mengumpulkan dan merekam secara jujur semua bukti-bukti yang muncul tanpa melihat statusnya, baik bukti-bukti tersebut membuktikan ketidakbersalahan tersangka (misalnya tidak sesuai), atau kebersalahannya, atau dapat ditafsirkan ganda.
- Kinerja penyidik forensik di seluruh aspek penyelidikan harus menjadi subjek atas kontrol terhadap mutu dan pemeriksaan jaminan mutu yang nyata. Di saat yang sama, penyidik forensik yang kinerja pribadinya tidak dipantau, tidak diperiksa, tidak diberikan umpan balik atas kesalahan yang terjadi, dan tidak diberikan sanksi untuk kinerja yang tidak profesional akan beranggapan bahwa kualitas tidak penting.

Kriteria profesional ini dapat diterapkan dengan mudah untuk pewawancara investigatif dan juga penyidik secara umum. Mengingat pentingnya wawancara untuk keberhasilan penyelidikan, tidak ada keraguan tentang hal ini.

Poin-poin utama

1. ‘Wawancara saksi’ adalah istilah generik untuk semua wawancara dengan korban, saksi, pelapor.
2. Perhatian khusus harus diberikan kepada saksi yang ‘rentan’, ‘terintimidasi’ dan ‘penting’.
3. Manfaat istilah ‘interogasi’ untuk menanyai tersangka lebih kecil daripada konotasi negatif dari istilah tersebut, dan tidak mempertimbangkan ketika ada subyek yang bersedia bekerja sama.
4. Bahan pelatihan Inggris sudah meninggalkan istilah ‘interogasi’ dan memilih menggunakan istilah ‘wawancara investigatif’ untuk menjelaskan semua wawancara dengan korban, saksi dan tersangka.
5. Ada peningkatan permintaan untuk menganggap petugas polisi sebagai penyidik sejak awal karirnya.

PENTINGNYA WAWANCARA INVESTIGATIF

JENIS WAWANCARA

Mengumpulkan berbagai bentuk informasi merupakan bagian penting dalam sejumlah pekerjaan. Misalnya, perawat, dokter, pengacara, pekerja sosial, semua pekerjaan ini harus mengetahui sejarah atau latar belakang kasus kliennya. Wawancara menjadi sangat penting ketika informasi yang diperlukan tidak dapat diperoleh dengan cara lain (Memon & Bull, 1999, hal. iii). Polisi juga menghadapi hal yang sama. Hampir semua aspek pekerjaan polisi berhubungan dengan masalah orang-orang (Newburn, 2003). Hal ini menyebabkan kemampuan berbicara dengan orang lain menjadi penting.

Situasi yang melibatkan polisi “berbicara” dengan orang-orang, termasuk:

- korban, saksi dan tersangka yang terlibat dalam kejahatan dan kecelakaan
- interaksi di pinggir jalan (tilang, membantu pengemudi kendaraan bermotor, ‘memeriksa’ kendaraan, melakukan uji kadar alkohol)
- berbicara dengan masyarakat secara informal (memberikan petunjuk arah, menjawab pertanyaan, menilai kebutuhan pencegahan kejahatan)
- mewawancarai pendaftar polisi dan keluarga serta orang yang merekomendasikannya
- negosiasi sandera (diskusi antara polisi dan penyandera)
- berbicara dengan orang yang mengancam akan bunuh diri
- diskusi antara masyarakat dengan staf pusat komunikasi/ruang kendali
- diskusi antara masyarakat dan staf pemantau/meja penerima laporan masyarakat
- penyelidikan internal (misalnya polisi mewawancarai polisi).

Semua situasi di atas dapat dikatakan sebagai bentuk ‘wawancara’, tetapi hanya beberapa yang dianggap sebagai ‘wawancara investigatif’. Bentuk wawancara seperti ini terjadi ketika ada informasi yang diperlukan sebagai bagian dari ‘proses penyelidikan’ untuk mencari tahu apa yang terjadi (Ord, Shaw & Green, 2004). Jadi wawancara investigatif cenderung dibatasi hanya proses tanya-jawab oleh polisi terhadap korban,

saksi dan tersangka yang terlibat dalam kejahatan dan kecelakaan.

MENGAPA WAWANCARA INVESTIGATIF PENTING

Satu artikel baru (Wilson & Fowles, 2005, hal. 210) menghimbau untuk memperhatikan peran utama polisi:

“Departemen Dalam Negeri meyakini bahwa dunia tempat polisi beroperasi sekarang sudah sangat berubah. Teknologi menghilangkan batas dan hambatan; perubahan di masyarakat melahirkan kesempatan dan tantangan baru; meningkatnya investasi untuk pelayanan umum dan meningkatnya budaya konsumen menyebabkan tingginya harapan akan pelayanan pelanggan. Peran utama polisi adalah, dan akan tetap seperti itu, pencegahan, pendeteksian dan pengurangan angka kejahatan, dan melindungi masyarakat.”

Penyelidikan adalah inti dari peranan ini. Penyelidikan merupakan proses yang dipercayakan oleh sistem peradilan pidana dan masyarakat kepada kepolisian dan diasumsikan akan dijalankan secara efektif dan penuh integritas (Ede & Shepherd, 2000). Seperti yang dinyatakan dalam “Doktrin Penyelidikan Dasar” (NCPE, 2005, hal. 15):

“Ketika seseorang menjadi korban kejahatan atau menyaksikan suatu kejadian traumatis, mereka mengharapkan Kepolisian memberikan rasa aman, dukungan dan jaminan, serta penyelidikan efektif”.

Penelusuran penyelidikan biasanya dilakukan melalui beberapa cara, termasuk memahami dan menjaga TKP, penggunaan ilmu forensik, pengumpulan barang bukti, wawancara, dan lain-lain (Maguire, 2003; Walters, 2002). Dalam praktiknya, diperkirakan bahwa “barang bukti nyata jumlahnya sekitar 20 persen dari semua bukti yang diajukan ke pengadilan; sisa 80 persennya adalah kesaksian” (Yeschke, 2003, hal. 47).

Kesaksian ini biasanya diperoleh dari wawancara dengan korban, saksi dan tersangka. Euale dan Turtle (1998) menganggap pengumpulan informasi dari tersangka dan saksi sebagai keterampilan yang paling bernilai dan sulit yang dapat dikembangkan oleh polisi. Mereka menekankan pentingnya mengumpulkan dan memelihara kesaksian lisan sejak awal. Memori

berkurang, cerita berubah, dan terkadang saksi yang awalnya bersedia bekerja sama berubah pikiran.

Menurut Williams (2000), sekitar 90 persen dari kegiatan penyidik melibatkan pengumpulan, penyusunan, pengelompokan, dan pengevaluasian informasi. Penyidik tidak dapat berfungsi tanpa informasi, dan informasi tidak dapat diperoleh tanpa bantuan dari masyarakat dan semua yang terlibat. Bukti kesaksian biasanya diberikan secara lisan dan dapat direkam atau disimpan dalam bentuk tertulis. Beberapa wawancara, terutama dengan tersangka, direkam secara elektronik (Milne & Bull, 1999).

Buku ini menegaskan bahwa penyelidikan yang berkualitas memerlukan wawancara investigatif yang berkualitas. Misalnya, Maguire (2003) mengatakan bahwa salah satu fitur utama yang ditemukan dalam kerja-kerja 'generalis' dan penyelidikan penyidikan adalah keduanya sangat bergantung pada bukti yang diperoleh dari wawancara. Sama halnya dengan putusan 'Miranda' yang terkenal yang menggambarkan ruang wawancara sebagai "pusat saraf untuk mendeteksi kejahatan" (Miranda vs. Arizona, 384 U.S. 436, 1966, hal. 501).

Komentator lain juga memiliki pandangan yang sama:

"Tugas penyelidikan merupakan aspek inti dari perpolisian masa kini dan tugas inti ini melahirkan unsur utama yaitu kemampuan untuk melakukan wawancara" (Evans & Webb, 1993, hal. 37).

"Keterampilan wawancara yang solid merupakan landasan kemampuan polisi untuk memerangi kejahatan" (Einspahr, 2000, hal. 20).

PEWAWANCARA

Yeschke berpandangan (1993, hal. xviii) bahwa petugas polisi

"tidak memiliki kemampuan alami untuk melakukan wawancara yang afektif, efektif dan lancar. Kita tidak dilahirkan dengan keterampilan untuk mengumpulkan kesaksian, sama halnya kita juga tidak dilahirkan dengan kemampuan menggunakan senjata api dengan baik atau memberikan pertolongan pertama (P3K)."

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa di sebagian besar kepolisian, ada petugas polisi yang secara alami mampu memperoleh informasi rinci dari saksi dan pengakuan dari tersangka. Akan tetapi, sebagian besar petugas harus berjuang untuk melakukan hal yang sama (Morgan, 1999; Shepherd

dan Kite, 1989). Namun, ada pendapat kuat yang beranggapan bahwa dengan pengajaran yang tepat, sebagian besar petugas dapat belajar menjadi pewawancara yang efektif (Baldwin, 1993; Gudjonsson et al, 1992; Memon et al, 1994; Ord et al, 2004; Williamson, 1994). Secara keseluruhan, penelitian menemukan bahwa tanpa pelatihan yang layak, sebagian besar petugas polisi akan menjadi pewawancara yang buruk (Milne & Bull, 1999).

Kualitas wawancara yang baik

Ada banyak nasihat dari berbagai literatur tentang apa yang membuat seseorang menjadi pewawancara yang baik. Misalnya, Swanson, Chamelin dan Territo (2002) mengatakan bahwa tujuan pelatihan wawancara adalah untuk menghasilkan wawancara yang dapat membuat dirinya mudah diajak bicara melalui penggunaan nada suara, modulasi, dan penekanan; mampu menunjukkan tanggapan emosi yang tepat sesuai kebutuhan (misalnya simpati, marah, takut dan senang); tidak berpihak, fleksibel dan berpikiran terbuka; dan tahu cara menggunakan psikologi, kemampuan menjual, dan dramatisasi.

Yeschke (1993, hal. xvii) cukup berpendapat bahwa wawancara yang baik harus menunjukkan kesadaran diri yang kuat, kepercayaan diri, tujuan, visi, dedikasi, dan komitmen untuk mencapai standar perorangan tertinggi.

Wicklander & Zulawski (2003) menjelaskan profil yang lebih terstruktur tentang wawancara yang sukses. Mereka mengatakan sikap petugas harus: obyektif, menghormati dan sopan, tenang, tulus, tertarik dan memahami. Postur tubuhnya harus: tegak, menghadap ke depan, sesekali condong ke depan, dan terbuka (tidak menyilangkan tangan). Petugas harus menjaga kontak mata ketika mengajukan pertanyaan kepada tersangka dan ketika mereka menjawab, penting untuk sesekali mengalihkan pandangan.

Para penulis mengakui bahwa interogasi (AS) atau bagian wawancara yang menantang (Inggris dan Wales) memerlukan karakteristik lain. Mereka menyarankan, misalnya, sikap percaya diri, gigih, nada suara yang tegas (tetapi tidak agresif atau marah), penggunaan gerak tangan ketika berbicara (telapak tangan menghadap ke atas, tangan terbuka), mengalihkan pandangan ketika tersangka menyangkal, dan menggunakan nada yang lebih lembut atau lebih keras ketika membuat poin positif atau negatif.

Keterampilan dasar

Materi pelatihan Centrex (NCOF, 2004) menekankan empat keterampilan dasar yang harus dikembangkan oleh petugas wawancara yaitu kemampuan untuk merencanakan dan mempersiapkan wawancara, kemampuan untuk membangun hubungan, mendengarkan dan bertanya dengan efektif. Kemampuan ini akan membantu petugas dalam setiap wawancara. Keterampilan yang lebih mahir diperlukan

untuk pewawancara spesialis dan penasihat wawancara.

Walaupun kita bisa menjelaskan karakteristik pewawancara yang baik dan keterampilan yang diperlukan, beberapa literatur mengatakan adanya kesenjangan yang lebar antara kondisi ideal dan kondisi pewawancara yang sebenarnya. Sebagai contoh, Sear dan Stephenson (1997, dikutip dalam Cherryman & Bull, 2000) menemukan sedikit hubungan antara kepribadian seorang petugas dengan gaya wawancaranya. Meskipun seorang petugas memiliki nilai kepribadian yang tinggi untuk sifat-sifat seperti kesadaran diri, mudah disukai dan keterbukaan tetapi sering kali petugas tersebut juga menunjukkan gaya wawancara yang buruk sama seperti koleganya yang lain. Sudah jelas, pelatihan saja tidak cukup untuk mengatasi efek dari pengaruh-pengaruh lain terhadap gaya wawancara.

MEMAHAMI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWANCARA

Wawancara memerlukan kombinasi seni dan keterampilan yang harus dibina dan dipraktikkan. Tidak semua orang yang memiliki informasi yang diperlukan oleh penyidik bersedia membaginya (Yeschke, 2003). Misalnya, saksi mungkin memiliki beragam motivasi dan persepsi yang dapat mempengaruhi tanggapan mereka pada saat wawancara. Mungkin saja ini berdasarkan pilihan sadar atau stimulus alam bawah sadar, atau berdasarkan sikap positif atau negatif saksi terhadap polisi (Gudjonsson, 1992). Selain itu, mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok seperti lansia dan anak-anak memerlukan keterampilan khusus dari sisi penyidik. Di saat yang sama, karakteristik lain seperti waktu dan tempat wawancara juga dapat menghambat wawancara (Heaton-Armstrong et al, 1999).

Setiap kondisi ini harus ditangani. Tugas pewawancara yang paling penting adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya (Gudjonsson, 1992). Oleh karena itu, pewawancara yang berhasil harus memahami teknik wawancara dan mengetahui mengapa orang bersedia atau tidak bersedia untuk membagi informasi (Yeschke, 2003).

Mengingat kompleksitas dan ragam wawancara investigatif, kemampuan dan keterbatasan pewawancara juga harus dipertimbangkan. Kepribadian dan sikap dalam komunikasi antar-pribadi dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi yang diperoleh. Sebagian besar literatur menjelaskan bahwa seorang pewawancara yang ideal harus dapat menunjukkan beragam emosi serta empati dan ketulusan di berbagai kesempatan ketika diperlukan (misalnya Shepherd, 1991).

Juga penting bagi pewawancara untuk berpikiran terbuka. Pewawancara harus dapat menerima semua informasi, tanpa memandang sifat informasi tersebut. Selain itu, pewawancara yang berhasil harus memiliki rasa keingintahuan yang besar (Williams, 2000), dan mengetahui informasi yang akurat dan terpercaya tentang perilaku manusia adalah suatu keharusan (Gudjonsson, 1992).

Penelitian di Inggris dan Wales beberapa tahun terakhir menemukan sedikit tanda penggunaan taktik yang menindas atau negatif (Clarke & Milne, 2001). Kritik yang ada sebagian besar memperlakukan kurangnya keterampilan. Banyak petugas polisi datang ke satu wawancara dengan asumsi, harapan dan hipotesis tentang kejadian yang sedang mereka selidiki (Ede & Shepherd, 2000). Jika keyakinan petugas ini memiliki dasar yang cukup, maka ini keyakinan tersebut dapat membantu wawancara agar lebih fokus pada hal-hal yang esensial. Masalah timbul ketika petugas mendatangi wawancara dengan penilaian yang tidak berdasar atau salah tentang kejadiannya. Penting bagi pelatihan wawancara untuk mengajarkan petugas untuk meminimalisir potensi bias (Baldwin, 1994).

WAWANCARA SAKSI ATAU TERSANGKA – MANA YANG LEBIH PENTING?

McGurk, Carr dan McGurk (1993) menemukan bahwa wawancara saksi dan tersangka merupakan salah satu tugas yang paling sering dilakukan dalam perpolisian. Selain itu, responden polisi mereka melaporkan bahwa mengambil keterangan, mewawancarai saksi, dan mewawancarai tersangka adalah tiga tugas mereka yang paling penting dalam penyelidikan, yang mana wawancara tersangka dinilai sebagai tugas yang paling penting.

Penekanan pada wawancara tersangka tidaklah mengejutkan. Dalam penelitiannya yang memeriksa pengelolaan dan supervisi wawancara, Stockdale (1993) menemukan bahwa petugas polisi cenderung memiliki pandangan yang kaku tentang 'wawancara'. Setiap ada penyebutan wawancara polisi, mereka langsung secara otomatis mengaitkannya hanya dengan wawancara tersangka. Penyebutan wawancara korban dan saksi hanya muncul ketika hal ini disebutkan secara khusus.

Strongman (1994, hal. 16) mengamati fenomena yang sama di Selandia Baru: "seakan-akan, bagi anggota Kepolisian Selandia Baru, 'wawancara' berarti 'wawancara tersangka'". Tetapi penekanan ini tidak terlalu jelas terlihat dalam materi pelatihan yang dihasilkan oleh kepolisian di Inggris dan Wales (misalnya, lihat: CPTU, 1992a; CFIS, 2004) yang secara tegas menjelaskan status yang setara untuk semua wawancara investigatif.

Bukan berarti wawancara dengan korban, saksi dan tersangka akan sama persis. Ada sejumlah peraturan dan hak-hak yang berlaku untuk wawancara tersangka tetapi tidak untuk wawancara saksi (CPTU, 1992b; Maguire, 2003). Di balik perbedaan ini, para komentator sepakat bahwa:

“Secara umum, wawancara saksi, pelapor dan korban merupakan praktik yang sama khususnya dengan wawancara tersangka, tetapi menggunakan teknik yang berbeda” (Strongman, 1994, hal. 17).

Beberapa peneliti berpendapat lebih jauh lagi. Sebagai contoh Milne dan Bull (2003, mengutip sebagian dari Milne & Shaw, 1999) berkata:

“para profesional semakin mengakui bahwa wawancara investigatif dengan saksi / korban memiliki posisi yang setara, jika tidak lebih penting dari wawancara tersangka. Jika wawancara awal dengan saksi-saksi terkait tidak dilakukan dengan baik maka seluruh penyelidikannya bisa gagal. Dari wawancara pertama itulah keseluruhan bentuk kasusnya dapat dikembangkan; mengartikan sifat pelanggaran, menyusun kemungkinan tersangka, membuat saluran penyelidikan, dan lain-lain” (hal. 112).

Pandangan ini diamini juga oleh mantan Superintenden Detektif Tom Williamson (dikutip oleh Mulraney, 2001, hal. 22).

“Dalam melakukan penyelidikan kita harus belajar dari kesalahan prosedur hukum di masa lalu dan tidak mengidentifikasi tersangka lalu kemudian terlibat dalam kegiatan untuk membuat tersangka tersebut mengaku. Yang harus kita lakukan adalah mengembangkan keterampilan wawancara dan menerapkannya kepada saksi dan korban jadi kita memiliki banyak informasi yang bisa diajukan kepada tersangka. Itu lah yang membentuk landasan pendekatan wawancara investigatif”.

PENEKANAN PADA MENDAPATKAN PENGAKUAN

Sebagian besar literatur menekankan bahwa keterangan saksi mata dan pengakuan tersangka merupakan dua bukti yang paling meyakinkan (misalnya Loftus, 2004). Akan tetapi, banyak petugas polisi yang melihat wawancara tersangka lebih penting daripada keterangan saksi mata karena bagi mereka, mendapatkan pengakuan adalah hasil terbaik yang paling diharapkan (Stockdale, 1993). Pengakuan adalah jalan pintas untuk bisa menghukum (Moston et

al, 1992) dan menghemat sumber daya (Ede & Shepherd, 2000).

Bull dan Cherryman (1995) melaporkan suatu studi yang menarik untuk Departemen Dalam Negeri ketika ada beberapa kelompok psikolog forensik dan polisi berpengalaman (dengan keahlian tentang wawancara investigatif) mendengarkan sejumlah sampel rekaman suara wawancara polisi dengan tersangka. Mereka menggunakan suatu borang untuk menilai 28 keterampilan wawancara. Penilaian di dalam kelompok yang sama cukup konsisten: yaitu, satu psikolog setuju dengan psikolog yang lain, dan para polisi setuju satu dengan yang lain. Tetapi penilaian polisi tidak sama dengan penilaian psikolog. Perbedaan utama terletak pada penilaian keterampilan polisi sangat dipengaruhi oleh apakah pengakuan didapatkan.

Morgan dan Stephenson (1994) mengakui godaan untuk mendapatkan pengakuan:

“jika ada beberapa bukti, walau sedikit, tentang seorang tersangka, dan petugas yang mewawancarai tidak mampu mendapatkan lebih banyak bukti, tetapi ‘merasa yakin’ bahwa si tersangka bersalah melakukan pelanggaran, maka hal ini, dan keyakinan (meskipun salah) bahwa seseorang tidak akan mengakui sesuatu yang tidak mereka lakukan, dapat berakibat timbulnya pendapat bahwa tidak apa-apa mengambil risiko menindas”.

Wawancara tersangka tampaknya diberikan status yang lebih tinggi daripada wawancara saksi karena dua alasan: pertama, karena wawancara tersangka dianggap lebih sulit; kedua, karena nilai pengakuan yang dianggap tinggi (Yeschke, 2003; Maguire, 2003). Alasan pertama (yaitu wawancara tersangka lebih sulit daripada saksi) tidak memiliki dukungan ilmiah yang cukup. Banyak tersangka yang dengan segera bersedia menerima kesalahannya, penelitian menunjukkan jumlah antara 42 persen sampai 68 persen (Baldwin, 1992; Bull & Cherryman, 1995, 2000; Moston et al, 1992; McConville et al, 1991).

Tidak hanya itu, sebagian besar yang menerima kesalahannya ini melakukannya di awal-awal wawancara. Hal ini sering kali menyebabkan petugas segera mengakhiri wawancara dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bukti-bukti yang meringankan (Moston & Engleberg, 1993) dan informasi lain yang bermanfaat.

Buku ini secara tegas menyatakan perlunya pewawancara berkonsentrasi untuk mendapatkan informasi terbaik sebisa mungkin. “Panduan praktis tentang wawancara investigatif” (CFIS, 2004, hal. 16) memberikan saran berikut:

“Bukti-bukti harus selalu dicari dari wawancara yang akan membantu memvalidasi pengakuan

yang ada. Ketika dihadapkan dengan pengakuan bersalah, anda harus mencari detail lebih lanjut untuk membantu menegaskan keterangan tersebut dan tidak begitu saja menerima akurasi dari apa yang disampaikan tersangka. Kebenaran atau keadilan pengakuan dapat selalu dipertanyakan di kemudian hari. Anda harus mengantisipasi hal ini dengan memperoleh bukti dari semua sumber yang tersedia dan selama wawancara dengan tersangka.”

Pesan terakhir tentang pentingnya wawancara investigatif datang dari Milne dan Bull (1999, hal. 191):

“Masyarakat tidak sanggup hidup dengan wawancara investigatif yang buruk. Hal ini akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang sistem peradilan pidana. Orang yang bersalah justru bebas, yang tidak bersalah dihukum, tidak ada keadilan bagi anak-anak dan orang dewasa yang rentan. Wawancara yang buruk tidak berguna bagi siapapun; hal tersebut hanya akan membuang-buang waktu, uang dan sumber daya. Tidak ada yang menang. Orang-orang tidak akan bicara jika mereka tidak mempercayai kualitas teknik wawancara yang dimiliki penyelidik”.

Poin-poin utama

1. Wawancara investigatif merupakan satu metode pencarian fakta utama yang dimiliki polisi ketika menyelidiki kejahatan. Polisi harus bisa melakukannya dengan baik.
2. Penyelidikan berkualitas memerlukan wawancara investigatif yang berkualitas.
3. Petugas harus menyadari bahwa setiap wawancara bersifat unik dan berpotensi menghasilkan informasi intelijen yang dapat digunakan tidak hanya untuk penyelidikan kasus yang spesifik tetapi juga untuk kegiatan perpolisian lain.
4. Pewawancara perlu menghargai kontribusi wawancara untuk keberhasilan penyelidikan dan keberhasilan ini bergantung pada itikat baik dan kerja sama korban, saksi dan masyarakat.
5. Keterangan saksi mata dan pengakuan tersangka dianggap sebagai bukti yang paling meyakinkan.

Poin-poin utama (lanjutan)

6. Sebagian besar tersangka siap untuk menerima kesalahan.
7. Sebagian besar yang menerima kesalahan melakukannya di awal-awal wawancara.
8. Meskipun pewawancara sudah berusaha sebaik mungkin, ada beberapa tersangka yang mengubah cerita mereka setelah mereka menolak melakukan kesalahan.
9. Pewawancara harus menghindari pertanyaan-pertanyaan terlalu dini yang membuat tersangka dapat menolak atau menghindar dari pelanggaran.

WAWANCARA YANG ETIS

ditentukan setelah semua bukti-bukti terkumpul dan dianalisis.”

PENDAHULUAN

Ketika ruang wawancara di Inggris hampir sepenuhnya tertutup dari evaluasi – sampai sekitar pertengahan 80an – taktik-taktik yang menindas sering digunakan (Leo, 1992). Seiring dengan berjalannya waktu, pengadilan (dan juga masyarakat) menyampaikan taktik yang dapat diterima dan yang tidak. Tapi dalam beberapa situasi (misalnya dalam kasus R vs Staggs (1994) yang disampaikan oleh Maguire, 2003, hal. 381), pengadilan mengakui ada ketidakjelasan hukum. Meskipun ada ketidakpastian ini, tapi secara umum masyarakat tidak menyetujui kekerasan fisik atau mental, meski untuk mencari kebenaran (Rabon, 1992; Williamson, 1994; Yeschke, 2003). Bab ini menggali pendekatan wawancara yang etis yang diajukan oleh psikolog (misalnya Eric Shepherd, 1991; 1993; Shepherd & Milne, 1999). Sejak itu, istilah ini telah masuk ke dalam daftar kosa kata wawancara investigatif (CFIS, 2004; Yeschke, 2003).

LATAR BELAKANG

Literatur Amerika pada masa-masa awal menjelaskan perilaku polisi di sana yang melakukan wawancara dengan sangat tidak etis:

“Polisi kita, dengan tidak adanya sanksi hukum, menggunakan tekanan, ancaman, perundungan, beragam kekerasan fisik yang moderat dan bahkan penyiksaan” (E.J. Hopkins, 1931, dikutip di Leo, 1992, hal. 35).

Evaluasi publik dan komentar pengadilan pada akhirnya mendorong perubahan taktik yang terlalu agresif ini dengan taktik lain yang menggunakan manipulasi dan pengelabuan (Leo, 1992). Tetapi literatur Amerika yang baru mempertanyakan penekanan penggunaan pengelabuan ini. Menurut Yeschke (2003, hal. 11):

“Sepanjang sejarah, salah satu masalah besar yang kita hadapi adalah pengembangan sistem untuk menggali kebenaran. Solusi dari masalah ini beragam dari penggunaan ruang penyiksaan di abad pertengahan sampai ke masa menerima perkataan yang datang dari kaum bangsawan tanpa keraguan di abad ke-18. Keduanya tidak dapat memenuhi persyaratan masa kini. Kita sangat menghormati martabat manusia sehingga tidak mengizinkan kekerasan fisik atau mental untuk mencari kebenaran. Namun kita menyadari bahwa musuh kita tidak akan sungkan berbohong, bahkan di bawah sumpah, jika ini diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Kebenaran hanya dapat

WAWANCARA YANG TIDAK ETIS

Yeschke (2003, hal. 12) menjabarkan tindakan-tindakan berikut sebagai perilaku yang tidak etis:

- menggunakan interogasi dan bukan wawancara
- memperlakukan setiap terwawancara seakan-akan bersalah, dengan tidak mempertimbangkan konsekuensi jika ternyata orang tersebut tidak bersalah
- membuat ancaman
- memberikan janji ilegal
- menggunakan paksaan dan tekanan
- menggunakan tindakan keras atau ancaman kekerasan
- menggunakan metode yang kejam
- memenjarakan terwawancara secara tidak sah
- tidak menghormati terwawancara
- tidak menjaga martabat terwawancara.

Penulis lain juga menyebutkan perilaku tidak etis lainnya, termasuk ketika pewawancara berbohong kepada tersangka bahwa mereka juga pernah melakukan pelanggaran yang sama (Gudjonsson, 1992) dan “menggunakan cara yang kejam atau mengelabui pada saat menginterogasi tersangka” (Miller, 2004, hal. 32).

Taktik-taktik tidak etis dalam ruang wawancara sering kali dilakukan untuk mempercepat proses; Alasan ‘hasil membenarkan cara’ (Morgan & Stephenson, 1994). Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, salah satu faktor penggerak dibalik wawancara yang tidak etis adalah hasrat untuk memperoleh ‘pengakuan’ meskipun hasil pengamatan, seperti yang dilakukan oleh Lord Devlin (1979), menunjukkan bahwa pengakuan bukanlah jalan pintas untuk mencapai keadilan. Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 (Inggris dan Wales) dirancang untuk menjaga hak tersangka dan mencegah tekanan yang tidak adil agar mereka mengaku.

Shepherd (1991, hal. 46) memberikan komentar tentang bahaya masuk ke satu wawancara dengan cara pandang yang sudah tidak bisa diubah:

“Hubungan, proses penyelidikan dan dikeluarkannya informasi selama wawancara dikelola dengan cara yang sudah disesuaikan dengan kerangka acuan perilaku pewawancara yang tidak etis. Dengan kerangka acuan ini, pikiran dan tindakan diarahkan untuk menghasilkan dan mengenali tanggapan yang sesuai dengan konsepsi awal pewawancara tentang masalah, situasi dan terwawancara”.

Shepherd (1991) juga mencatat bahaya yang muncul karena kondisi melekat dari wawancara yang mengarah pada kepatuhan dan *suggestibility*.

“faktor-faktornya adalah gabungan dari keinginan untuk menyenangkan orang lain, usia, kecerdasan, kepribadian, kondisi psikologis pada saat itu (keraguan, kecemasan, ketakutan, dan depresi) dan tingkat semangat (meningkat karena terisolasi secara fisik, persepsi, sosial dan psikologis selama di tahanan polisi)” (hal. 47).

Jika hal-hal ini tidak dipertimbangkan, maka hasil wawancara bisa jadi: (1) mereka akan dipaksa mengambil pilihan yang dalam keadaan normal tidak akan mereka ambil; dan (2) dihambat peluangnya untuk membuat pilihan yang biasanya akan mereka ambil. Hasilnya adalah keterangan ‘fakta’ yang baik sebagian atau keseluruhannya tidak akurat (Shepherd, 1991, hal. 48)

WAWANCARA YANG ETIS

Maguire (2003) mencatat bahwa perubahan penting telah terjadi –disahkannya Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 (disingkat PACE) dan implementasi rekomendasi dari Komisi Kerajaan

tentang Peradilan Pidana 1991 (RCCJ) telah amat mengubah sikap dan praktik petugas polisi. Serta perubahan struktural besar-besaran (termasuk mengurangi jumlah satuan spesialis reserse kriminal), kemudian meningkatkan penekanan pada konsep seperti ‘wawancara yang etis’ yang bertujuan mengajarkan petugas untuk lebih membuka pikiran dan berperilaku tidak seagresif sebelumnya terhadap tersangka (Williamson, 1994). Kegagalan penyelidikan kasus-kasus besar – seperti ‘Pembunuh dari Yorkshire’ dan Stephen Lawrence – menunjukkan masih ada hal-hal yang dapat diperbaiki (Maguire, 2003).

Apa yang dimaksud wawancara yang etis?

Shepherd (1991, hal. 43) memperkenalkan istilah ‘wawancara yang etis’ untuk menjelaskan teknik wawancara yang mana petugas bersedia menerima bahwa terwawancara memiliki “hak untuk diperlakukan dengan bermartabat dan hak untuk mengambil pilihan secara bebas – untuk memutuskan apakah mereka mau terlibat dalam percakapan atau tidak, dan untuk mengevaluasi serta menanggapi isi dan cara percakapan”.

Hal ini membuat kedua pihak berada dalam posisi setara – sementara cara sebelumnya membuat petugas berada di posisi dominan – dan menyampaikan rasa saling menghormati. Shepherd menjelaskan enam prinsip dalam wawancara yang etis:

Tabel 1: Enam prinsip wawancara yang etis (Shepherd, 1991)

Prinsip	Implikasi	Arti	
1. Prinsip penyelidikan sebelumnya	Saya harus menyadari cakupan dan dalamnya pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung pernyataan dan argumen saya	Saya harus mampu menghadapi kalau anda mempertanyakan pengetahuan saya (isi dan kualitas)	Saya harus tahu apa yang saya bicarakan: membual itu tidak etis
2. Prinsip ketulusan	Saya harus memilih informasi dan argumen secara adil, dan menyajikannya secara adil, dalam kalimat-kalimat saya (pernyataan, pertanyaan, hasil pengamatan, dan komentar)	Anda dapat menilai dan memilih dengan adil tentang validitas informasi saya	Saya harus mengatakan yang sebenarnya, tidak menghindar, membual, membingungkan atau berpura-pura
3. Prinsip keterbukaan	Saya harus terbuka dan mengatakan yang sebenarnya tentang darimana saya mendapatkan pengetahuan ini	Anda dapat menilai dengan adil tentang apakah informasi saya dapat dipercaya dan apakah ada bias dan praduga	Saya harus siap memberitahukan sumber saya
4. Prinsip berpikiran terbuka	Saya tidak boleh menghakimi dalam pendekatan saya untuk mengumpulkan informasi dan memproses informasi	Orang lain harus dilindungi dari bias dan praduga pribadi saya	Saya tidak boleh berpikiran tertutup

sebelum dan selama percakapan

5. Prinsip toleransi	Saya harus bisa mengakui/menerima (tapi bukan berarti menyetujui) penolakan atas informasi, argumen dan sumber	Mentolerir jika anda tidak sepakat dengan pandangan saya	Saya harus bisa menghadapi sanggahan dan penolakan
6. Prinsip integritas	Dalam upaya saya untuk mempengaruhi anda agar menerima informasi saya, saya harus memelihara integritas saya	Keinginan untuk mengubah pemikiran dan tanggapan anda tidak menghilangkan kewajiban saya untuk melindungi martabat anda dan hak anda untuk membuat pilihan	Saya tidak boleh membiarkan tujuan pribadi membutuhkan kewajiban moral saya

Menurut Shepherd (1991), mengikuti prinsip-prinsip di atas akan memastikan kualitas wawancara investigatif dan nantinya akan “mengarah kepada tingkat keberhasilan yang lebih baik untuk pencegahan kejahatan, deteksi dan penghukuman penjahat yang bersalah” (hal. 55).

Gudjonsson (1992) berpendapat bahwa pandangan ini naif:

“Pendekatan ‘keterampilan sosial’ yang digunakan Shepherd untuk wawancara mungkin terlihat menarik dari sudut pandang perikemanusiaan, tetapi saya tetap tidak yakin bahwa kita bisa, secara efektif, melakukan semuanya tanpa pertanyaan yang persuasif” (hal. 323).

Akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa wawancara yang dilakukan dengan tenang, masuk akal dan tidak memihak akan lebih besar kemungkinannya menghasilkan tanggapan yang baik daripada menggunakan pendekatan agresif (Kennedy, 1989). Sebagai contoh, dalam penelitian menarik tentang pengalaman pelaku pembunuhan dan penyerangan seksual pada saat diwawancara polisi dan kecenderungan mereka untuk menerima atau menolak tuduhan kejahatan, para penulis (Holmberg & Christianson, 2002) menemukan bahwa dalam wawancara yang didominasi oleh petugas pewawancara (menunjukkan ketidaksabaran dan pendekatan yang kasar dan keras serta menghakimi) ternyata lebih besar kemungkinannya dikaitkan dengan penolakan. Sebaliknya, wawancara yang dilakukan dengan manusiawi (menunjukkan rasa hormat dan sikap positif terhadap tersangka sebagai seorang manusia) lebih mungkin dikaitkan dengan penerimaan.

Panduan terkini dari Asosiasi Kepala Polisi Inggris dan Wales (NCPE, 2005, hal. 20) menyatakan:

“Jika [pelaku] percaya bahwa mereka telah diperlakukan secara etis selama penyelidikan akan lebih kecil kemungkinan mereka untuk memiliki pandangan dan menceritakan hal-hal negatif

tentang polisi ke orang lain. Mereka juga akan lebih mungkin bekerja sama untuk penyelidikan di masa depan, baik sebagai korban, saksi atau tersangka”.

Meskipun Gudjonsson (1992) berpendapat tentang keterbatasan pendekatan ‘keterampilan sosial’, beliau mengakui bahwa penggunaan taktik yang menindas untuk mendapat pengakuan dari tersangka dapat mengakibatkan efek yang merusak. Bahkan di negara-negara yang tidak menerapkan hukuman mati, ‘wawancara yang tidak etis’ dapat mengakibatkan kesalahan hukum dan membuat seseorang yang tidak bersalah dipenjara untuk waktu yang lama (Maguire, 2003).

KESALAHAN HUKUM

Sir Ludovic Kennedy (1989) menggambarkan secara rinci bagaimana Gerrard Conlon, salah satu dari ‘Guildford Four’, menceritakan bagaimana dia menandatangani pengakuannya. Pertama dia menceritakan bagaimana polisi mengejeknya dengan “orang Irlandia pembunuh brengsek”, meremas buah zakarnya, memukul di bagian ginjal dan menampar wajahnya, Conlon menulis:

“Saya ketakutan dan menangis. Simmons berkata kalau saya tidak membuat pengakuan tertulis, dia akan menelpon Belfast besok pagi dan saya tidak akan melihat ibu dan adik perempuan saya lagi. Pertahanan terakhir saya hancur ketika dia berkata begitu. Saya menangis dan gemetar sejadi-jadinya. Saya katakan keluarga saya tidak melakukan apa-apa. Saya merasa remuk berantakan. Simmons berkata apa yang terjadi pada keluarga saya tergantung pada saya. Saya katakan saya akan membuat pernyataan seperti kemauan mereka, tapi itu tidak benar karena saya tidak melakukannya” (Kennedy, 1989).

Ketika ditanyakan pendapatnya, mantan sekretaris kelompok perubahan hukum memperkirakan bahwa dalam

setiap waktu ada sekitar 200 sampai 300 orang tahanan di penjara yang telah salah vonis (Kennedy, 1989). Menurut Kennedy (1989):

“Secara keseluruhan, kepala lapas manapun akan bercerita, orang yang bersalah akan menerima vonis dan menjalani hukuman mereka. Mereka tidak punya motivasi, bukti atau kemampuan bermain peran yang diperlukan untuk membuktikan mereka tidak bersalah dan tetap bertahan dengan pendapat itu selama bertahun-tahun. Tetapi ini yang akan dilakukan orang tidak bersalah. Mereka tidak pernah menyerah, selalu mencari bukti baru, selalu menghubungi orang-orang yang mungkin dapat menolong mereka, selalu meminta kasus mereka ditinjau kembali. Saya tidak akan ragu-ragu berkata kasus-kasus yang sudah bertahun-tahun, bahkan berdekade-dekade, terus meminta penilaian kembali, seperti kasus Timothy Evans, James Hanratty, Patrick Meehan, kasus Confait, kasus Luton, kasus Guildford Four, the Maguire Seven, dan the Birmingham Six, adalah kasus-kasus yang memenjarakan orang yang tidak bersalah. Pada akhirnya kebenaran akan terungkap.”

Literatur tentang kesalahan hukum (misalnya, lihat, Kassin & Gudjonsson, 2004; dan Walker, 1999), menegaskan peran penindasan untuk mendapatkan pengakuan dan masalah dengan vonis-vonis yang seluruhnya atau sebagian besar berdasarkan pada pengakuan.

Penggunaan cara-cara yang tidak adil untuk mendapatkan pengakuan sering disebut sebagai korupsi dengan niat mulia (Maguire, 2003). Maksudnya, begitu kuatnya keinginan untuk memberikan vonis yang ‘tepat’ sehingga membenarkan segala cara. Proses persidangan dan tekanan dari masyarakat untuk segera menunjukkan hasil mengakibatkan terjadinya korupsi dengan niat mulia.

Pada tahun 1970an, ada beberapa kasus yang mendapat perhatian tinggi dari masyarakat dan terdakwa divonis bersalah oleh pengadilan yang di kemudian hari diketahui melibatkan malpraktik polisi. Diantaranya adalah kasus-kasus:

- Maxwell Confait (1972) yang mana ada tiga bocah laki-laki dituduh melakukan pembunuhan dan pembakaran atas Maxwell Confait, seorang PSK laki-laki. Putusan kasus ini dibatalkan di tingkat banding tahun 1975 setelah ada bukti baru yang menunjukkan bahwa Confait telah meninggal lama sebelum dibakar. Semua bocah laki-laki memiliki keterbelakangan mental (usia mentalnya lebih rendah daripada usia biologisnya) dan bukti yang ada hanya berdasarkan pada pengakuan. Selain itu masalah lain adalah waktu kematian korban telah diubah.
- Judith Ward (1974) diputus bersalah meledakkan bom di sebuah bis Angkatan Darat atas nama IRA (Gerakan Separatis Irlandia Utara), yang menewaskan 12 orang. Dia dipenjarakan selama 18

tahun sebelum kemudian putusannya dibatalkan tahun 1992 setelah diketahui bahwa menurut pengadilan banding seharusnya juri diberi tahu terlebih dahulu tentang kondisi penyakit mentalnya yang membuat dia mudah mengaku dalam kondisi interogasi polisi.

- Terdakwa Guildford Four (1975) dihukum penjara seumur hidup karena mengebom beberapa pub di Guildford. Serangan ini menewaskan lima orang dan lebih dari 100 korban luka-luka. Keempat orang menghabiskan waktu 15 tahun di penjara sebelum putusan kasusnya dibatalkan tahun 1989 setelah penyelidikan polisi yang baru menemukan kesalahan serius yang dilakukan oleh Kepolisian Surrey dalam pencatatan pengakuan empat orang ini: pengakuan tersebut tidak segera ditulis dan petugas kemungkinan telah mengubah kata-kata dalam pernyataan tersebut.
- Birmingham Six (1974) diputus bersalah setelah pengeboman IRA di Birmingham yang mengakibatkan 21 orang tewas dan lebih dari 160 orang luka-luka. Para tahanan dibebaskan tahun 1991 setelah dipenjarakan selama 16 tahun, setelah adanya penyidikan polisi yang baru yang menggunakan uji forensik baru dan menemukan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Birmingham Six diganti di hari berikutnya. Para peneliti juga mengakui di pengadilan bahwa uji forensik pertama yang menyatakan bahwa dua dari enam orang ini telah menangani bahan peledak sebenarnya juga akan menunjukkan hasil forensik yang sama jika orang tersebut memegang rokok.
- Maguire Seven (1976) ketika Annie Maguire, lima anggota keluarganya, dan seorang teman keluarga dipenjarakan di London karena memiliki bahan peledak, berdasarkan bukti ilmiah yang nantinya terbukti tidak bisa dipercaya. Karena adanya temuan serupa di kasus-kasus terdahulu, laporan dari mantan hakim pengadilan tinggi, hakim John May, meyakinkan Menteri Dalam Negeri David Waddington bahwa kesalahan hukum juga terjadi dalam kasus Maguire. Pada bulan Juli 1990 menteri dalam negeri meminta kasus ini dipelajari lagi di Pengadilan Banding dan ketujuh terdakwa dibebaskan bulan Juni 1991.

PERBAIKAN

Pada tahun 1970-an dan 1980-an di Inggris dan Wales, legitimasi peradilan pidana dipertaruhkan. Sesuatu harus dilakukan. Hal ini menjadi fokus pembuat kebijakan. Kekhawatirannya sangat besar sehingga dibentuk Komisi Kerajaan tentang Peradilan Pidana (1981), yang kemudian mendorong disahkannya Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 (PACE) – produk hukum utama yang membantu memantau, salah satunya, integritas produksi barang bukti (Maguire, 2003).

Melalui PACE (mulai berlaku 1986), wawancara polisi dengan tersangka harus direkam. Hal ini diharapkan dapat

mengakhiri rezim penyelidikan polisi yang lama (Lea, 2004). Efektifitas Undang-Undang dan tindakan yang dilakukan masih terus diperdebatkan. Di satu sisi, McConville dan rekan mengatakan pada tahun 1991 bahwa wawancara polisi hanya sedikit berubah terutama terkait dengan ‘*suggestibility* interogasi’. Dengan kata lain, merekam wawancara tidak mengubah hubungan kekuasaan dalam proses wawancara, terutama dalam situasi yang mana “Interogasi dilakukan dalam lingkungan yang meningkatkan kerentanan tersangka dan memaksimalkan kewenangan dan kendali polisi” (1991, hal. 78).

Sebaliknya, Ede dan Shepherd (2000, hal. 109) seperti halnya tidak ragu tentang efek rekaman bagi wawancara tersangka:

“Pengadilan bereaksi keras terhadap transparansi barang bukti yang diperoleh dari teknik bertanya yang persuasif dan tidak etis ... [dan] rekaman wawancara PACE membantu sehingga wawancara dengan kekerasan menurun tajam dan mengungkapkan sejumlah kekurangan polisi dalam menjalankan perannya sebagai pewawancara”.

Laporan Milne dan Bull (2003) menyatakan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh petugas polisi berpengalaman:

“Sejak PACE diperkenalkan tahun 1986 terkait dengan keharusan merekam wawancara dengan tersangka, wawancara polisi jadi terencana dengan lebih baik, lebih terstruktur, dan hilangnya penggunaan jebakan dan pengelabuan” (hal. 121).

Selain itu, Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999) mengakui bahwa “warisan paling penting dari Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 adalah bahwa sekarang wawancara tersangka dipagari dengan sejumlah perlindungan formal” (hal. 222). Pandangan mereka tentang manfaat Undang-Undang ini terkait dengan proses rekaman yang memungkinkan inspeksi dan pengakuan keabsahan keterangan tertulis serta validasi rekaman wawancara.

Kasus George Heron (1993)

Beberapa prosedur wawancara yang semakin ketat sejak PACE dihasilkan dari beberapa kasus spesifik. Kasus yang paling terkenal adalah R vs Heron (1993). George Heron ditangkap dan dituduh melakukan pembunuhan atas korban anak perempuan berusia 7 tahun, Nicki Allen, tahun 1992. Korban terakhir terlihat bersama dengan seorang pria yang ciri-cirinya sama seperti Heron. Meskipun saksi-saksi yang lain mengetahui bahwa Heron mengenal korban, tapi pada awalnya dia menolak hal ini. Setelah ditangkap, Heron diwawancara dalam lima kesempatan berbeda, tugas ini menghabiskan 12 kaset rekaman. Pada kaset-kaset terakhir, dia membuat pengakuan penuh dan memberikan informasi mendetail yang saat itu hanya diketahui polisi dan penyidik forensik.

Akan tetapi, pada persidangan Heron tahun 1993, hakim (Yang Mulia Hakim Mitchell) memutuskan hanya empat kaset pertama (berisikan penolakan yang konsisten) yang dapat diterima pengadilan. Hakim menolak kaset-kaset yang lain karena pertanyaan yang diajukan menekan. Termasuk pertanyaan tentang kehidupan seksual Heron dan agama, menyarankan bahwa lebih baik Heron mengaku untuk kepentingan dirinya, dan kecenderungan petugas untuk membuat komentar dan bukan pertanyaan. Heron akhirnya diputus tidak bersalah, walaupun berikutnya di kasus perdata yang diajukan oleh orang tua korban dia dianggap bertanggung jawab dan diperintahkan untuk membayar ganti rugi.

Kasus ini memberikan pengaruh besar terutama bagi kesatuan kepolisian yang terlibat (Northumbria) dan pihak-pihak lain terkait praktik wawancara. Kasus ini digunakan untuk menjadi dasar pemikiran tentang implementasi model PEACE di tingkat nasional (dijelaskan di bab lain dalam buku ini) dan dijadikan bagian dari materi pelatihan polisi (Milne & Bull, 1999).

PENGAKUAN PALSU

Alasan lain mengapa polisi harus melakukan wawancara yang etis adalah untuk menghindari pengakuan palsu. Seperti yang disampaikan oleh Elizabeth Loftus:

“Salah satu sasaran sistem hukum kita adalah menghukum orang yang bersalah, tetapi juga untuk mengurangi kemungkinan kesalahan hukuman, termasuk karena pengakuan palsu” (2004, hal. i)

Kassin dan Gudjonsson (2004) menjabarkan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pengakuan yang diberikan itu palsu:

“Pengakuan dapat dianggap palsu jika kemudian ditemukan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan (misalnya korban pembunuhan ternyata ditemukan masih hidup); ketika bukti-bukti tambahan menunjukkan bahwa orang yang mengaku bersalah secara fisik tidak mungkin melakukan kejahatan tersebut ...; ketika pelaku yang sebenarnya, yang tidak memiliki hubungan dengan terdakwa, ditangkap dan dihubungkan dengan kejahatan tersebut (misalnya memiliki pengetahuan mendetail tentang kejahatan, uji balistik, atau bukti fisik); dan ketika bukti ilmiah menegaskan bahwa orang yang mengaku ternyata tidak bersalah” (2004, hal. 48).

Fenomena pengakuan palsu terjadi dalam berbagai cara dan karena alasan yang berbeda, termasuk faktor-faktor disposisional dan situasional (Kassin & Gudjonsson, 2004):

Disposisional (faktor-faktor risiko pribadi)

- ciri-ciri kepribadian – orang yang membuat pengakuan palsu cenderung lebih mudah

dipengaruhi, patuh, cemas, kurang mampu menyampaikan pendapat atau apa yang dirasakan dan memiliki memori yang lemah serta kepercayaan diri yang rendah

- remaja – sangat rentan ketika menghadapi pertanyaan yang mengarah, pengulangan, tidak dipercaya atau taktik lain yang digunakan oleh petugas atau aparat berwenang
- gangguan kecerdasan – banyak ditemukan dalam kasus pengakuan palsu – terutama karena mereka mudah dipengaruhi dan memiliki hasrat untuk mendapat persetujuan dari orang lain, dan tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan mereka
- patologi psikologis – kecenderungan untuk membuat pengakuan palsu dapat ditemukan di orang-orang yang memiliki masalah atau gangguan persepsi dan memori, mereka tidak berada dalam realitas yang sama, gangguan dalam memutuskan, kecemasan, gangguan emosi, dan kemungkinan kurangnya kendali diri

(Kassin & Gudjonsson, 2004, hal. 53).

Situasional

- penahanan fisik – kecemasan ekstrim yang terjadi pada beberapa tersangka karena berada di tempat asing dan tidak mampu melarikan diri, hal ini dapat membuat seseorang bersedia melakukan atau berkata apapun
- isolasi – banyak 'interogasi' berlangsung lama, menyebabkan kelelahan, ketakutan dan ketidakpastian, misalnya sebuah studi tentang pengakuan palsu di Amerika (Leo, 1996) menemukan bahwa 34% berlangsung antara 6 sampai 12 jam dan 39% berlangsung selama 12 sampai 24 jam
- konfrontasi – penelitian sudah dengan jelas menunjukkan bahwa seseorang dapat dipengaruhi untuk mengaku dan menerima tanggung jawab atas sesuatu yang tidak dia lakukan dengan menggunakan taktik-taktik, seperti menyampaikan dengan kuat bahwa mereka bersalah, memotong penolakan, memberikan bukti palsu yang memberatkan, dan mengatakan mereka tidak lulus uji kebohongan
- minimisasi – suatu proses yang memberikan atau mengizinkan tersangka untuk membuat alasan yang

membenarkan tindakan mereka – yang menyiratkan akan ada keringanan (misalnya diijinkan pulang atau hukuman yang lebih ringan).

Ada banyak penelitian dilakukan dalam topik ini (sebagai contoh, lihat, Gisli Gudjonsson, 1992) dan pengakuan palsu telah mengakibatkan dihukumnya orang-orang tidak bersalah. "Proyek Tidak Bersalah" (klinik hukum nirlaba di Sekolah Hukum Benjamin N. Cardozo, AS yang menangani kasus-kasus yang mana uji DNA setelah penghukuman dapat memberikan bukti ketidakbersalahan seseorang secara pasti) menjelaskan tentang hal ini:

"Masalah pengakuan palsu semakin tercerahkan dengan dibebaskannya lima orang – Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana, dan Kharey Wise – yang telah salah dihukum atas kasus serangan brutal di Central Park, New York. Uji DNA mendukung pengakuan dari Matias Reyes. Reyes menyatakan bahwa dia melakukannya sendiri dan dia tidak mengenal lima orang yang dihukum dalam kasus yang dikenal dengan nama Kasus Pelari Central Park. Kelima pria tersebut, pada saat itu masih remaja, ditangkap polisi setelah satu malam yang kisruh di Central Park, ditandai dengan kekerasan dan tindakan 'liar'. Pernyataan mereka ke polisi cukup merepotkan. Masing-masing memberikan pernyataan yang direkam yang mengurangi keterlibatan mereka dalam kejahatan tetapi menunjukkan bahwa empat orang yang lain terlibat. Para juri tidak melihat taktik yang digunakan untuk mendapatkan pernyataan ini, salah satu pernyataan diperoleh setelah satu interogasi yang dilakukan lebih dari 24 jam. Meskipun keterangan mereka berbeda satu sama lain, tapi pengakuan ini digunakan untuk menghukum kelima orang ini, semuanya telah menjalani masa hukumannya" (Proyek Tidak Bersalah, 2001).

Peneliti Saul Kassin dan Gisli Gudjonsson (2004) memberikan banyak contoh pengakuan palsu di dalam literatur terbaru mereka tentang psikologi pengakuan. Penelitian mereka menjelaskan mengapa polisi tidak boleh mengesampingkan hasil penelitian tentang mengapa seseorang mengaku melakukan sesuatu yang tidak mereka lakukan.

PRINSIP-PRINSIP WAWANCARA INVESTIGATIF

Yeschke (2003, hal. 12) menyatakan bahwa:

"Inilah saatnya mereka yang terlibat dalam wawancara investigatif untuk diajarkan tentang apa yang etis dan apa yang tidak etis, tidak hanya belajar tentang apa yang sah dan tidak sah".

dekade sebelum tulisan Yeschke. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri nomor 22/1992 memberikan tujuh prinsip wawancara investigatif berikut ini:

Sudah jelas bahwa Inggris dan Wales mengakui dan mengadopsi konsep wawancara yang etis lebih dari satu

Tabel 2: Prinsip-prinsip wawancara investigatif (Surat Edaran Departemen Dalam Negeri 22/1992)

1. Peran wawancara investigatif adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya dari tersangka, saksi atau korban untuk dapat menemukan kebenaran tentang masalah yang sedang diselidiki polisi.
2. Wawancara investigatif harus dikenali dengan pemikiran terbuka. Informasi yang diperoleh dari seseorang yang sedang diwawancara harus selalu diuji dengan apa yang sudah diketahui petugas pewawancara sebelumnya atau apa yang bisa disimpulkan.
3. Ketika mengajukan pertanyaan, seorang petugas polisi harus bertindak adil sesuai dengan kondisi masing-masing kasus.
4. Polisi pewawancara tidak harus menerima jawaban atau keterangan pertama yang diberikan. Terus bertanya bukanlah tindakan yang tidak adil tapi lebih karena petugas pantang menyerah.
5. Meskipun tersangka menggunakan haknya untuk tetap diam, polisi tetap berhak mengajukan pertanyaan.
6. Ketika melakukan wawancara, petugas polisi bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kebenaran; kecuali untuk wawancara dengan anak-anak yang menjadi korban penyerangan seksual atau kekerasan yang akan digunakan di persidangan, mereka tidak dibatasi oleh peraturan pengadilan untuk pengacara.
7. Orang-orang yang rentan, baik korban, saksi atau tersangka, harus selalu diperlakukan dengan mempertimbangkan situasi mereka.

Prinsip-prinsip ini telah ditegaskan ulang (misalnya NCF, 1996; NCF, 1998; NCOF, 2003; dan CFIS, 2004). Semua kesatuan kepolisian memerlukan daftar prinsip yang sama yang harus dipahami oleh semua petugas. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan untuk wawancara yang etis dan memberikan kontribusi penting terhadap kepercayaan publik terhadap polisi.

Poin-poin utama

1. Wawancara harus diadakan dengan integritas, logika dan keputusan yang adil.
2. Menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk mendapatkan pengakuan (korupsi dengan niat mulia) tidak dibenarkan.
3. Pewawancara harus menghindari perilaku yang tidak etis seperti membuat ancaman atau janji-janji atau taktik-taktik yang menekan dan menindas
4. Wawancara yang etis melibatkan memperlakukan tersangka dengan hormat dan berpikiran terbuka, toleran dan tidak memihak.
5. Jika pelaku merasa diperlakukan dengan baik akan lebih kecil kemungkinan mereka memiliki pandangan negatif tentang polisi atau menyampaikan pandangan negatif tentang polisi ke orang lain.
6. Banyak kesalahan hukum disebabkan karena malpraktik polisi.
7. Polisi harus menyadari bahwa ada orang-orang yang akan membuat pengakuan palsu. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai cara dan karena berbagai alasan termasuk faktor-faktor disposisional dan situasional.
8. Tujuh prinsip wawancara investigatif Inggris dan Wales dikembangkan tahun 1992 dan telah bertahan selama ini dan diadopsi oleh beberapa kantor polisi negara barat.

PENGARUH PSIKOLOGI

LATAR BELAKANG

Polisi mengandalkan wawancara sebagai cara utama untuk mencari fakta dan menjawab pertanyaan. Namun demikian, ketergantungan terhadap wawancara ini memiliki beberapa masalah: memastikan apakah tersangka atau saksi berkata jujur, mengevaluasi apakah memori seseorang dapat dipercaya, mengizinkan dan menilai kondisi fisik dan mental seorang saksi atau tersangka, dan lain-lain. Ada bidang-bidang yang telah dipelajari secara mendalam oleh ilmu psikologi sosial dan psikologi klinis.

Meskipun temuan penelitian ini ditanggapi secara “dingin” oleh komunitas polisi-penegak hukum di AS sampai dengan pertengahan tahun -1990an (Fisher, 1995, hal. 758), tetapi efek dari penelitian psikologis ini dapat ditemukan di materi polisi Inggris (misalnya CPTU, 1992a). Bidang penelitian ini dikenal dengan nama “psikologi forensik” (Memon & Bull, 1999) dan beberapa ahli utama di bidang ini adalah:

Elizabeth Loftus	Pakar dari Amerika yang sudah banyak mempublikasikan tentang psikologi memori, ingatan yang salah, ingatan yang terpendam, dan keterangan saksi mata
Amina Memon	Ingatan yang salah, wawancara investigatif, saksi rentan, mengenali wajah, keterangan saksi mata, <i>suggestibility</i> saksi anak-anak, dan pengambilan keputusan juri persidangan
Gisli Gudjonsson	Psikologi forensik, tingkat kepercayaan barang bukti, <i>suggestibility</i> , pengakuan palsu, kerentanan psikologis selama penahanan, dorongan untuk menghina, dan dorongan untuk menyalahkan

Rebecca Milne	Semua aspek teori psikologis, penelitian dan praktik polisi terkait dengan wawancara investigatif, terutama penggunaan ECI (wawancara kognitif yang disempurnakan) untuk wawancara saksi yang khusus
Ray Bull	Telah mempublikasikan banyak tulisan dalam bentuk buku dan jurnal akademis tentang psikologi, hukum dan perpolisian terutama tentang mewawancarai saksi anak-anak dan wawancara investigatif polisi dengan tersangka dewasa
Eric Shepherd	Semua aspek psikologi forensik termasuk wawancara, perilaku polisi dalam penyelidikan dan kesaksian
Aldert Vrij	Pakar internasional yang telah mempublikasikan banyak tulisan tentang pengelabuan – bagaimana perilaku pembohong, apa yang mereka katakan, seberapa bagus kemampuan orang mendeteksi kebohongan, dll
Julie Cherryman	Identifikasi saksi suara, dan wawancara investigatif polisi dengan tersangka dan saksi – terutama saksi yang mengalami kesulitan belajar.

Tulisan dari orang-orang ini bisa menjadi referensi yang sangat baik. Salah satu sumber yang bermanfaat adalah “Wawancara investigatif – psikologi dan praktik” (Milne dan Bull, 1999), buku yang menelaah wawancara dalam kerangka psikologis (hal. xi).

Sebagai contoh, Milne dan Bull (1999, hal. 2-5) menjelaskan studi yang berpengaruh di AS oleh Fisher, Geiselman dan Raymond (1987) yang mana para psikolog memeriksa sejumlah rekaman suara wawancara dari berbagai jenis pelanggaran. Pewawancara memiliki pengalaman sebagai polisi rata-rata 10.5 tahun dan tidak pernah menerima pelatihan wawancara standar. Meskipun pewawancara biasanya mencari ‘keterangan bebas’ dari terwawancara dengan menggunakan pertanyaan “Ceritakan apa yang terjadi”, akan tetapi narasi ini, rata-rata, diinterupsi setelah baru berlangsung 7.5 detik. Meskipun di awal petugas mengatakan bahwa niatnya adalah mendapatkan keterangan bebas dari orang tersebut, tetapi kenyataannya pewawancara adalah orang yang menentukan struktur dan urutan pertanyaan selama wawancara. Wawancara rata-rata mengandung 3 pertanyaan terbuka dan 26 pertanyaan singkat (tertutup). Penelitian ini juga menemukan bahwa terwawancara menyesuaikan diri dengan gaya pewawancara, dan bukan sebaliknya. Jika pertanyaannya singkat, maka jawabannya biasanya singkat dan dangkal.

Fisher dan rekan (1987) menemukan sedikit atau bahkan tidak ada teknik sama sekali digunakan oleh pewawancara untuk membuat saksi lebih mudah mengingat detail yang relevan. Tetapi para peneliti mengamati teknik yang tidak membantu. Diantaranya, pewawancara cenderung memakai jargon atau istilah dan gaya bicara dan bersikap yang formal; mereka mengajukan pertanyaan dengan kaku; memotong dengan pertanyaan yang terlambat untuk menindaklanjuti poin sebelumnya; pertanyaan yang mengarah sering digunakan. Jenis wawancara seperti ini terbukti mengganggu terwawancara dan membatasi jumlah dan kualitas informasi yang diberikan (Milne & Bull, 1999).

Walaupun semua hal yang disebutkan di atas memiliki dampak terhadap praktik wawancara investigatif, tetapi bab ini hanya akan membahas tiga hal – memori, bahasa tubuh dan pengelabuan, dengan pembahasan singkat di bagian akhir tentang ‘*suggestibility*’. Bab lain akan membahas teknik-teknik yang diciptakan dari penelitian psikologis, terutama empat teknik yang menjadi dasar ‘wawancara kognitif’ dan ‘wawancara kognitif yang disempurnakan’.

MEMORI

Penelitian dengan percobaan pertama tentang memori dipublikasikan tahun 1885 oleh psikolog Jerman Hermann Ebbinghaus, dan puluhan ribu penelitian

tentang memori telah dilakukan sejak itu (Loftus & Calvin, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa otak manusia memiliki kemampuan untuk menyimpan banyak informasi dan pengalaman yang didapat sepanjang hidup. Tetapi memori tidak seperti video yang merekam semua yang dilihat, atau komputer yang bisa mengambil informasi apapun yang tersimpan di dalamnya. Sebaliknya:

“Memori manusia berantakan. Memori tidak hilang tapi lebih terganggu atau tidak dapat ditemukan. Kita sering kali berkata kita kehilangan suatu memori – tapi sering kali, satu jam kemudian, memori tersebut muncul tiba-tiba di dalam kesadaran kita, yang mana sebenarnya memori tersebut selalu ada sebelumnya. Perbedaan serius antara komputer dan memori manusia adalah kita tidak menyimpan bentuk asli dari suatu kejadian sebagaimana mestinya, seperti yang dilakukan komputer. Justru yang terjadi adalah, kita merekonstruksi memori kita sebisa mungkin dari semua hal yang tersebar berantakan. Kita menebak. Sering kali, tebakan ini tidak cukup baik, terutama untuk proses hukum yang adil. Atau karena harga diri seseorang; sering kali kita malu telah melakukan suatu yang salah dan kita menolak kesalahan tersebut bahkan dalam diri kita sendiri” (Loftus & Calvin, 2001).

Penelitian

Sebagian besar penelitian fokus pada mengidentifikasi kondisi yang mempengaruhi upaya mengingat. Sebagai contoh, karya pionir dari Elizabeth Loftus memberikan bukti kuat tentang pengaruh dari ‘kontaminasi pasca kejadian’ yaitu ketika ada informasi baru yang secara tidak sadar kita gabungkan dengan ingatan lama (Davies, 1995; Wells & Loftus, 1984).

Studi pertamanya (Loftus & Palmer, 1974, dikutip oleh Davies, 1995) melibatkan peserta penelitian menonton film 10 detik tentang kecelakaan lalu lintas, kemudian mereka diminta menjelaskan apakah di film tersebut mobil yang satu ‘menabrak’ mobil yang lain atau saling ‘bertabrakan’. Beliau menemukan kata kerja yang digunakan memberikan dampak terhadap jawaban tentang kecepatan dan keberadaan pecahan kaca. Dalam studi klasiknya yang kedua, relawan ditunjukkan *slide-slide* kecelakaan lalu lintas yang melibatkan rambu tanda ‘Berhenti’ atau rambu ‘Berikan jalan’. Pertanyaan yang diajukan kemudian mengacu pada rambu tersebut baik secara konsisten atau tidak konsisten, yang mana relawan diminta untuk memilih *slide* gambar yang mereka lihat sebelumnya. Ketika relawan diberikan informasi yang menyesatkan, hanya 41 persen yang mampu mengidentifikasi dengan benar *slide* yang pertama kali mereka lihat.

Loftus (1989) mengusulkan tiga penafsiran tentang ‘efek informasi yang salah’:

- hipotesis ‘pembaruan informasi yang merusak’ atau ‘perubahan’, yang mana ingatan asli diubah oleh informasi baru sehingga menciptakan ingatan baru yang mengandung unsur-unsur dari informasi asli dan informasi yang menyesatkan;
- pandangan ‘tambahan’ yang mana saksi tidak memperhatikan hal-hal mendetail yang penting pada awalnya tetapi setelah diberikan informasi yang menyesatkan, informasi tersebut dicampurkannya dengan ingatan asli; dan
- pandangan ‘keberadaan yang berdampingan’ yang mana kedua informasi, yang asli dan yang menyesatkan, sama-sama diingat tetapi informasi yang lebih baru lebih mudah diakses.

Penafsiran yang berbeda-beda ini penting untuk diketahui karena dapat mempengaruhi upaya yang dilakukan untuk memperbaiki ingatan yang bias. Sebagai contoh, pengujian teori ‘keberadaan yang berdampingan’ yang berhasil dilakukan, Bekerian dan Bowers (1983, dikutip oleh Loftus, 1989) menyimpulkan bahwa untuk mengatasi efek dari informasi pasca kejadian yang menyesatkan, tergantung pada penggunaan teknik mengingat yang baik untuk mengakses ingatan asli, misalnya dengan menelusuri kembali urutan-urutan kejadian.

Walaupun penelitian ini dilakukan di dalam kondisi laboratorium yang terkontrol, dan sebagian besar ‘saksi

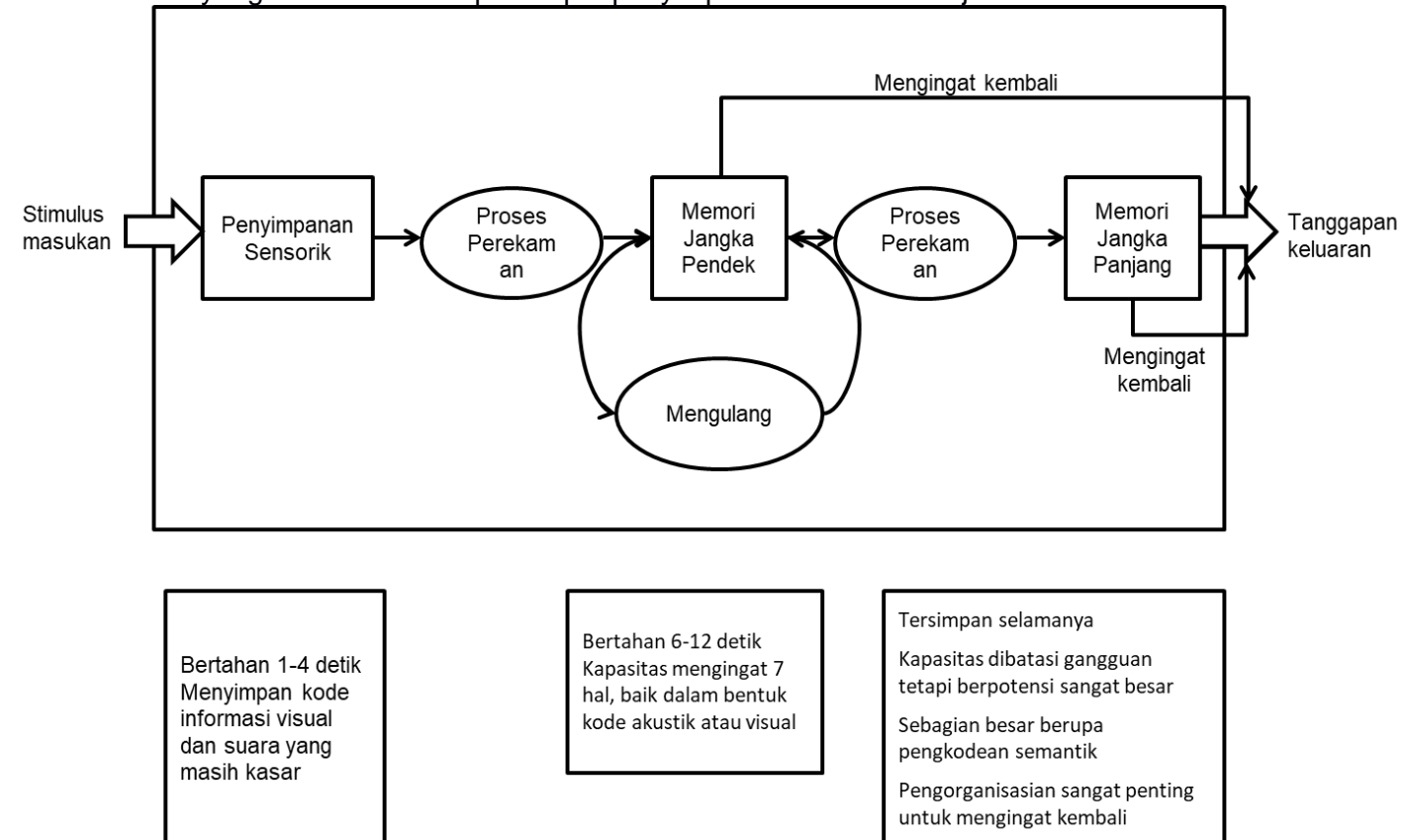
mata’ atau relawannya adalah mahasiswa, tetapi temuan dari percobaan ini dan percobaan lain yang sejenis telah memberikan kita bukti tentang kontaminasi ingatan. Beberapa bukti ini diperdebatkan, misalnya seperti yang bisa kita lihat dari kontroversi hukum terkait ingatan yang ‘ditemukan’ tentang penyerangan seksual yang dialami di masa kecil (Lindsay & Read, 1994). Tetapi, kita dapat berspekulasi bahwa jika mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi dan dalam keadaan santai saja menunjukkan gangguan kinerja memori, maka kita bisa memperkirakan kinerja yang lebih buruk dari saksi yang tidak memiliki karakter yang sama dan diwawancara di kondisi yang kurang optimal.

Bagaimana cara kerja memori

Melihat memori yang mudah dipengaruhi, maka penting bagi pewawancara polisi untuk memahami bagaimana memori bekerja, cara-cara yang menyebabkan terjadinya kesalahan, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi apa yang disampaikan oleh terwawancara (Cohen, 1999; Milne dan Bull, 1999; CFIS, 2004). Pemahaman ini dapat membantu pewawancara untuk menilai dengan lebih akurat apakah saksi dapat dipercaya untuk mengingat lagi kejadian yang dimaksud (TBR) dan seberapa besar tingkat kepercayaan kita terhadap kesaksian mereka. Untuk lebih mudah memahami, berikut ini ada dua diagram yang diambil dari referensi literatur. Diagram ini menggambarkan dan merangkum temuan penelitian tentang memori.

Tiga tempat penyimpanan memori

Model memori yang memiliki beberapa tempat penyimpanan memori ditunjukkan di Gambar 1 berikut:



Bertahan 1-4 detik
Menyimpan kode informasi visual dan suara yang masih kasar

Bertahan 6-12 detik
Kapasitas mengingat 7 hal, baik dalam bentuk kode akustik atau visual

Tersimpan selamanya
Kapasitas dibatasi gangguan tetapi berpotensi sangat besar
Sebagian besar berupa pengkodean semantik
Pengorganisasian sangat penting untuk mengingat kembali

Gambar 1: Model beberapa tempat penyimpanan memori (awalnya diajukan oleh Atkinson & Shiffrin, 1968, dikutip oleh Cohen, 1999, hal. 5).

Penjelasan Cohen atas model ini [dengan sedikit berbeda] adalah sebagai berikut:

2. belum ditafsirkan, yang diterima oleh panca indera (contoh penglihatan, suara, aroma). Hanya sebagian kecil dari informasi yang masuk di tempat penyimpanan sensorik ini yang dipilih dan diteruskan ke tempat penyimpanan memori jangka pendek.
3. Memori jangka pendek berhubungan dengan kesadaran saat ini, yaitu apa yang anda pikirkan dalam satu waktu. Durasinya singkat dan kapasitasnya sangat terbatas. Memori ini juga sangat rapuh dalam hal adanya informasi atau gangguan baru akan menyebabkan ingatan tersebut terlempar keluar dan hilang. Akan tetapi, mungkin untuk memelihara isi memori dengan 'mengingat' informasinya dengan menyebutnya atau membahasakan, contohnya: ketika kita mengulang nomor telepon yang ingin kita hubungi. Hanya sebagian dari informasi di memori jangka pendek yang diteruskan ke memori jangka panjang.
4. Durasi dan kapasitas memori jangka panjang nyaris tidak terbatas, meskipun informasinya baru tersedia dalam alam sadar melalui upaya mengingat kembali. Beberapa memori jangka panjang tidak dapat diambil atau diingat kembali.

1. Tempat penyimpanan sensorik diyakini menyimpan informasi dalam bentuk kasar dan

Jadi apa yang terjadi ketika kita berusaha mengingat sesuatu? Milne dan Bull (1999, hal. 11) menjelaskan tiga proses memori yang berupa tiga tahap yang berurutan: pengkodean, penyimpanan dan pengambilan.

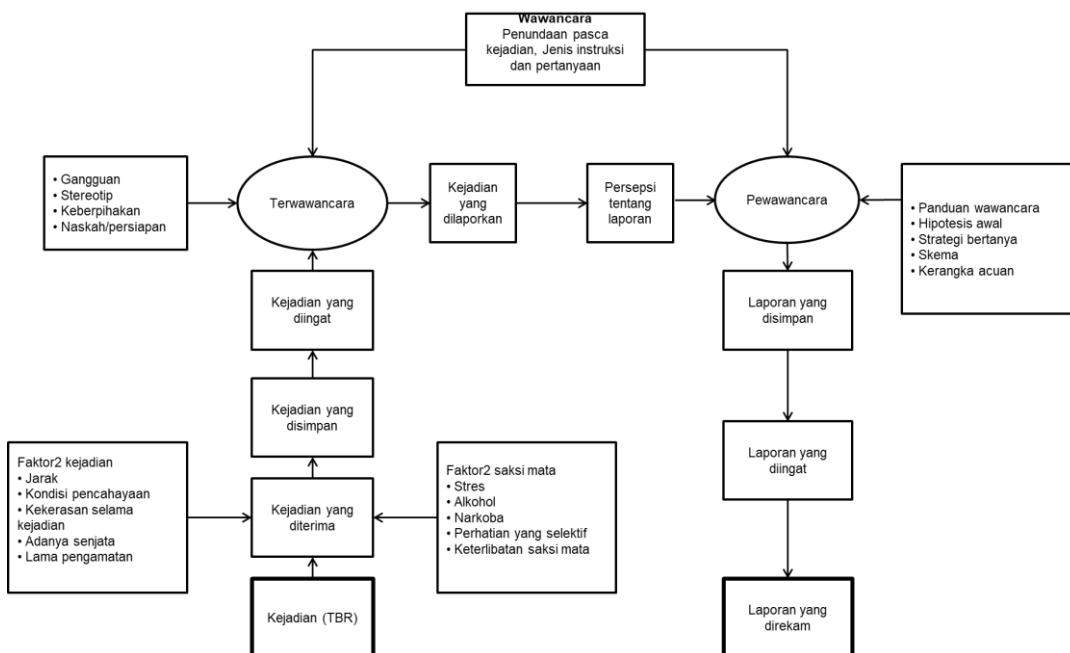
“Pengkodean adalah proses yang mana informasi dimasukkan ke dalam memori. Masukan fisik, seperti penampilan pelaku, ditransformasi menjadi satu kode yang diterima oleh memori. Penampilan pelaku yang baru saja dibuatkan kode kemudian disimpan dalam memori. Pada saat wawancara, beberapa jam atau beberapa hari kemudian, terwawancara mungkin perlu mendeskripsikan pelaku, maka dia akan berusaha mengambil informasi ini dari memorinya.”

Kesalahan dapat terjadi di tahap pengambilan, atau pada tahap penyimpanan, atau terjadi pada saat mengingat atau naratif (Yarmey, 2003). Penggalian mendalam tentang risiko korupsi memori karena kejadian eksternal, gangguan dan penyakit fisik atau mental, serta kerentanan saksi tertentu dapat ditemukan di buku “Analysing Witness Testimony” (Menganalisis Keterangan Saksi) yang diedit oleh Heaton-Armstrong, Shepherd dan Wolchover (1999).

Proses Memori

Pengaruh terhadap memori

Gambar 2 berikut, menggambarkan efek proses memori pada saat wawancara. Seperti yang bisa dilihat, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi apakah seseorang mengenali atau menyadari tentang suatu kejadian, sebelum menyimpannya atau kemudian mengingatnya kembali. Beberapa bagian dari diagram tersebut sudah cukup jelas, atau mudah dipahami setelah penjelasan singkat tentang cara kerja memori.



Gambar 2: Teori memori dan proses wawancara (dikembangkan dari Koehnken, 1995, dikutip oleh Milne & Bull, 1999, hal. 27)

Penelitian menegaskan bahwa sejumlah faktor-faktor mempengaruhi kejadian dan saksi mata di gambar di atas dapat memiliki pengaruh serius pada memori kejadian yang harus diingat (TBR - *to-be-remembered*). Beberapa dari faktor-faktor ini dijelaskan di bawah ini.

Adanya senjata

Penelitian menyimpulkan keberadaan senjata dapat mempengaruhi memori. Saksi dapat mendeskripsikan senjatanya tetapi tidak terlalu mengingat hal-hal selain itu. Fenomena ini sering disebut sebagai “perhatian yang tersalurkan” (Gilmour, 1988) dan ini merupakan fungsi adaptasi yang sangat penting (Matte, 1996, dikutip oleh Morgan, 1999, hal. 20). Saksi terfokus pada hal yang mengandung ancaman terbesar. Sehingga, informasi lain yang penting untuk penyelidikan, seperti detail tentang pelaku atau apa yang dibicarakan jadi sulit diingat.

Alkohol / narkoba

Ketika membahas pengaruh “narkoba” (obat apapun yang mengubah fungsi otak) terhadap ingatan, Lader (1999) mengingatkan bahwa memori sering kali terganggu dan ini memberikan pengaruh besar pada kemampuan saksi/tersangka memberikan kesaksian yang akurat (lihat juga, Yuille & Tollestrup, 1990, dikutip dalam Milne & Bull, 1999). Konsekuensinya adalah jangan mewawancarai orang yang masih dalam pengaruh narkoba, dan petugas harus berhati-hati dalam menerima apa yang saksi/tersangka anggap sebagai ‘kebenaran’.

Stres

Kebalikan dari literatur yang berdasarkan penelitian laboratorium (yang mana stres sering kali dihubungkan dengan kinerja memori yang buruk), penelitian menemukan bahwa saksi dalam situasi nyata yang membuat stres memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengingat kembali. Sebagai contoh, Milne dan Bull (1999, hal. 14) mengutip hasil-hasil berikut dari sejumlah penelitian:

- Yuille dan Cutshall (1986) menemukan bahwa saksi kasus pembunuhan yang diindikasikan mengalami stres tingkat tinggi memiliki kemampuan untuk mengingat kembali secara akurat sebesar 93% ketika diwawancarai dua hari setelah kejadian.
- Christianson dan Hubinette (1993) menemukan tingkat akurasi yang sama dalam studi mereka terhadap petugas teller bank dan nasabah yang menjadi saksi langsung dalam kasus perampokan bank.

Namun demikian, Milne & Bull (1999) mencatat bahwa meskipun penelitian-penelitian yang ada secara konsisten melaporkan hasil yang sama tentang tingginya kualitas informasi yang dilaporkan, tetapi kuantitasnya tidak.

Perhatian

Menurut Milne dan Bull (1999, hal. 16)

“Perhatian yang selektif tergantung pada pengetahuan, harapan, sikap, pengalaman masa lalu, ketertarikan, pelatihan dan hal-hal lain yang menurut orang tersebut paling penting pada saat itu. Sehingga, orang-orang akan secara selektif memperhatikan hal yang berbeda-beda [untuk diingat] dari suatu kejadian... jika ada lima orang menyaksikan suatu kejadian, itu akan menghasilkan lima versi kejadian yang berbeda.”

Hal ini penting diketahui pewawancara polisi, tidak hanya untuk memahami bagaimana perhatian yang selektif bisa mempengaruhi terwawancara tapi juga bagaimana hal ini dapat mempengaruhi si pewawancara. Pewawancara harus berhati-hati agar tidak dipengaruhi oleh perhatian selektifnya sendiri terhadap apa yang disampaikan oleh orang yang sedang diwawancarai atau dengan kata lain hanya fokus pada informasi yang membenarkan pendapat pewawancara tentang apa yang terjadi (Carson dan Bull, 2003). Hal ini mungkin merupakan proses yang tidak kita sadari, tetapi dapat mengakibatkan apa yang sering disebut oleh banyak penulis sebagai ‘bias konfirmasi’. Hal ini dimulai dari premis tentang kebersalahan tersangka, pewawancara kemudian lebih memperhatikan pada informasi (dari tersangka maupun saksi) yang sesuai dengan pendapat mereka tentang ‘apa yang terjadi’ (Maguire, 2003; Williams, 2000). Hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab tentang ‘bertanya’.

Stereotip

Meskipun kita mungkin tidak sadar, tetapi kita sering memiliki prasangka subjektif terhadap orang lain. Ketika diminta mengingat detail tentang seseorang yang mereka lihat, sering kali detail ini menggabungkan informasi stereotip dengan informasi awal (Milne & Bull, 1999). Misalnya, orang-orang mungkin mengharapkan seseorang dari kelompok suku bangsa tertentu memiliki mata coklat jadi akan mengingat orang tersebut bermata coklat meskipun mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar memperhatikan warna mata orang tersebut.

Keberpihakan

Milne dan Bull (1999) menjelaskan bagaimana ingatan juga dapat dialihkan dengan keberpihakan (yaitu hal-hal dari kejadian tersebut yang secara pribadi penting bagi saksi). Misalnya, dalam perkelahian antara dua gerombolan yang bermusuhan, seorang saksi yang berasal dari satu kelompok akan meyakini bahwa kelompok lain melakukan kekerasan atau pelanggaran yang lebih berat; saksi dari kelompok lain akan berpikir sebaliknya. Petugas wawancara harus mempertimbangkan keberpihakan saksi ketika mendengarkan dan menggali lebih dalam keterangan mereka.

Kebiasaan

Penelitian menegaskan bahwa banyak tindakan kita, dan ingatan atas tindakan kita, diatur oleh 'kebiasaan' internal; sebagai contoh, menyetir, makan di restoran dan lain-lain. Seperti yang dijelaskan dalam Milne dan Bull (1999, hal. 18):

“Daripada mengingat dan membuat kode semua detail yang terjadi, kita dapat dengan mudah bergantung pada kebiasaan yang tertanam di memori kita dan hanya membuat kode atas informasi yang baru dan berbeda ... upaya mengingat, akan tetapi, bisa terganggu apabila kebiasaan tersebut tidak cocok ... orang cenderung untuk secara tidak sadar ‘mengisi kesenjangan’ informasi dalam memori dengan informasi dari kebiasaan mereka”.

Putusan Turnbull (dan singkatan ADVOKATE)

Karena adanya defisiensi memori, salah satu putusan pengadilan Inggris - R vs. Turnbull dan lain-lain (1976) – menyarankan agar semua petugas, selama wawancara, menerapkan seperangkat kriteria terhadap keterangan saksi. Hal ini diterima oleh polisi dan dibuatlah singkatan ADVOKATE (dijelaskan di bawah ini) untuk membantu proses wawancara:

A	<i>Amount of time under observation</i> (Waktu pengamatan)	Berapa lama saksi melihat tersangka?
D	<i>Distance</i> (Jarak)	Berapa jarak antara saksi dan tersangka?
V	<i>Visibility</i> (Jarak pandang)	Bagaimana kondisi jarak pandang pada saat kejadian? (termasuk siang/malam, lampu jalan, dll)
O	<i>Obstruction</i> (Halangan)	Apakah ada yang menghalangi pandangan saksi?
K	<i>Known or seen before</i> (Melihat atau mengenal sebelumnya)	Apakah saksi pernah melihat tersangka sebelumnya? Jika ya, kapan dan di mana?

A	<i>Any reason to remember</i> (Ada alasan untuk mengingat)	Apakah ada alasan tertentu yang membuat saksi mengingat tersangka? (misalnya: ciri khas atau keunikan tertentu, atau sifat dari kejadian itu sendiri)
T	<i>Time lapse</i> (Selang waktu)	Berapa lama waktu telah berlalu sejak saksi melihat tersangka?
E	<i>Error or material discrepancy</i> (Kesalahan atau perbedaan materi)	Apakah ada kesalahan atau perbedaan antara keterangan yang diberikan saksi pertama kali dengan keterangan-keterangan berikutnya?

Tabel 3: ADVOKATE: Daftar dari R vs. Turnbull yang diminta untuk digunakan oleh pewawancara di Inggris dan Wales pada saat mendapatkan keterangan saksi. (Diadaptasi dari Ede & Shepherd, 2000, hal. 72)

Meskipun pelatihan polisi sejak putusan Turnbull ini (contoh: NCF, 1996; CFIS, 2004) mengharuskan polisi mencantumkan semua unsur-unsur ADVOKATE dalam pernyataan tertulis, Ede dan Shepherd (2000, hal. 282) mengklaim bahwa “hal ini jarang dilakukan secara lengkap dan sering kali malah tidak sama sekali”. Mereka mengkritisi polisi terutama karena gagal mematuhi kriteria terakhir (yaitu memeriksa apakah ada kesalahan atau perbedaan materi):

“Mengingat deskripsi saksi sangat rentan untuk dipengaruhi, ditambah dengan kurangnya keterampilan polisi atau kurangnya sistem untuk memperoleh deskripsi tersebut, maka di banyak kasus kita menemukan deskripsi saksi mengalami evolusi dengan penambahan, pengurangan dan perubahan dari keterangan pertama. Proses ini diperparah dengan keengganan petugas menerapkan pemeriksaan atas unsur terakhir dari ADVOKATE” (Ede & Shepherd, 2000, hal. 138).

Menurut Cohen (1999, hal. 16) tantangan bagi pewawancara adalah untuk “membantu saksi mengakses informasi yang ada di memorinya tetapi sulit untuk ditarik, dan melakukan ini tanpa mendorong memori yang salah atau tidak akurat karena menyarankan keterangan tambahan atau alternatif”.

Rangkuman

Banyaknya penelitian tentang memori telah digunakan oleh kepolisian Inggris untuk menghasilkan materi pelatihan wawancara. Contoh terkini adalah “Panduan praktis tentang wawancara investigatif” yang dibuat oleh Centre for Investigative Skills (Pusat Keterampilan Penyelidikan) (CFIS 2004).

Panduan ini menjelaskan teori memori dan penerapannya dalam pekerjaan forensik secara lugas dan menyeluruh. Panduan ini menjelaskan tentang

bagaimana memori diatur dan ditarik kembali, berbagai pengaruh dalam mengingat kembali dan rekonstruksi ingatan, dan lain-lain. Informasinya dirangkum sebagai berikut (CFIS, hal. 36-37):

Memori: membuat kode dan penyimpanan

- memori tidak bersifat total: seseorang tidak bisa mengingat semuanya
- pernyataan tentang kejadian di masa lalu mungkin saja jujur, tapi bukan berarti berdasarkan fakta
- memori direkonstruksi
- setiap orang memiliki caranya sendiri untuk mengatur cara penyimpanan informasi
- tidak mungkin mengingat semuanya sekaligus
- memori dapat memburuk
- memori dapat dipengaruhi oleh trauma.

Memori: mengingat atau menarik kembali

- upaya mengingat pertama [biasanya] menghasilkan gambaran umum, tapi sedikit detail
- orang dapat menambahkan atau ketinggalan suatu informasi pada saat pertama kali mengingat
- upaya mengingat dapat dibantu dengan mengatur lokasi
- seseorang harus diijinkan memberikan keterangan tanpa interupsi
- setiap orang punya cara mengingatnya sendiri
- kepercayaan diri tidak menjamin ketepatan dari apa yang dikatakan saksi
- saksi harus didorong untuk fokus dan berkonsentrasi pada kejadian, dan melaporkan segalanya.

Menurut Einspahr (2000), petugas polisi didorong untuk:

“belajar mengevaluasi kebenaran informasi yang diperoleh dengan ‘membaca’ tanda-tanda lisan dan non-lisan dari orang yang mereka wawancara” (hal. 18).

Dorongan ini berdasarkan pada sejumlah penelitian murni dan terapan yang dilakukan dalam beberapa dekade terakhir terhadap bahasa tubuh (BT) atau komunikasi non-lisan (KNL) (Strongman, 1994). Para peneliti sosial telah menemukan bahwa raut wajah, nada suara, diam, posisi tubuh, gerakan mata, jeda dalam bicara, dan aspek-aspek lain dari BT dan KNL mengirmkan pesan (Vrij, 2003; Walters, 2002; Zulawski & Wicklander, 2001). Hal ini dapat memastikan, membuat rancu, atau bertentangan dengan apa yang disampaikan secara lisan (Yeschke, 2003; Hodgson, 1987).

Bidang penelitian yang sama (dikenal juga dengan nama ‘*Kinesics*’) telah menunjukkan bahwa ketika kita berbicara dengan seseorang, ada mekanisme alam bawah sadar di dalam otak kita yang mampu mengevaluasi keduanya sekaligus, KNL dan apa yang disampaikan secara lisan (Strongman, 1994; Walters, 2002). Penelitian-penelitian ini menemukan bahwa ketika dua orang berkomunikasi:

- 55% sampai 65% pesan yang disampaikan adalah non-lisan;
- 30% sampai 40% disampaikan melalui nada bicara; dan
- Kurang dari 10% komunikasi yang merupakan hasil dari komunikasi lisan

(Zulawski & Wicklander, 2001).

Meskipun begitu, kita lebih tidak mampu mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, daripada apa yang akan mereka katakan. Dalam banyak situasi, banyak orang tidak menyadari atau memahami pesan-pesan non-lisan yang disampaikan melalui postur tubuh, gerakan tubuh, gerakan tangan, raut wajah, dan kontak matanya. Sehingga, mudah untuk menyinggung orang yang datang dari budaya berbeda.

Manfaat untuk Polisi

Akan tetapi, ketidakseimbangan antara komunikasi lisan dan non-lisan terbukti menguntungkan bagi polisi (Milne & Bull, 1999). Dalam wawancara, kemampuan untuk mengamati dan menafsirkan KNL berperan penting dalam menentukan iklim atau suasana wawancara (Yeschke, 2003). Contohnya, KNL mungkin

dapat membantu pewawancara membangun hubungan dengan terwawancara (misalnya dengan menganggukan kepala seakan-akan menyetujui kata-katanya) atau dapat menolong untuk mendeteksi pengelabuan.

Beberapa bacaan di masa lalu sangat yakin tentang cara “membaca” pengelabuan atau kebenaran. Sebagai contoh, Inbau dan rekan (1986, hal. 52) menyatakan:

“tersangka yang berbohong matanya akan tampak berkabut, bingung, bertanya-tanya, berharap (seakan-akan minta dikasihani), menghindar atau mengelak, dingin, keras, kaku, atau licik. Di sisi lain, orang yang jujur matanya tampak jernih, terang, sangat sadar, hangat, menatap langsung, mudah, lembut dan tidak bertanya-tanya”.

Strongman (1994) dan yang lain (misalnya Vrij, 2003) tidak setuju. Pengetahuan di bidang penelitian ini dapat memberikan masukan bagi terwawancara, dan oleh karena itu harus dimasukkan ke dalam program pelatihan. Tetapi banyak penulis lain (misalnya Baldwin, 1992; Bull & Cherryman, 1995; Memon & Bull, 1999; Vrij, 2003) menyarankan untuk lebih berhati-hati:

- pertama, karena ada perangkat yang ditimbulkan oleh perbedaan antar perorangan dan kultural (serta subkultural);
- dan kedua, karena tidak ada jenis perilaku non-lisan standar yang secara universal dapat diasosiasikan dengan pengelabuan.

Sehingga para penulis ini mengingatkan agar petugas tidak terlalu mengandalkan ‘bacaan’ BT / KNL terwawancara.

Dua buku Amerika yang cukup baru (lihat Walters, 2002, dan Zulawski & Wicklander, 2001) tidak terlalu waspada. Para penulis ini menyatakan mereka sangat yakin dengan manfaat praktis dari mengajarkan petugas polisi untuk menafsirkan perilaku lisan dan fisik. Karena hal ini akan memberikan informasi dan teknik terpercaya yang dapat membantu pewawancara, dari yang sebelumnya hanya mengandalkan ‘intuisi’ tentang kebenaran yang dikatakan, menjadi mampu mengidentifikasi, menafsirkan dan mengartikulasi petunjuk-petunjuk perilaku dari subjek wawancara. Mereka beralasan bahwa beberapa teori wawancara yang ada sekarang dan langkah-langkah praktisnya mengindahkan nilai dan masukan dari studi dan penelitian ilmiah. Contohnya, mereka mengkritisi beberapa petugas yang berpendapat bahwa wawancara yang baik hanya membutuhkan kemampuan untuk bertanya “Apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana”.

¹ Bagian ini banyak yang beririsan dengan bab berikutnya tentang ‘pengelabuan’.

Meskipun ada beberapa teknik BT/KNL yang dipercaya, namun ada juga teknik lain yang sangat canggih. Sebagai contoh, Ekman dan rekan mengembangkan teknik non-lisan yang menggunakan 'ekspresi wajah mikro' sebagai indikator keadaan emosi seseorang yang sebenarnya, dibalik apapun yang mereka katakan (Ekman, 1991). Penulis melaporkan tingkat akurasi sampai 80% (artinya dengan menggunakan ekspresi wajah mikro, mereka menemukan 80% kebenaran dan 80% kebohongan). Mengingat ekspresi mikro biasanya hanya berlangsung selama 1/25 detik, mengenali dan menafsirkan mereka bukanlah tugas yang mudah (Memon & Bull, 1999). Oleh karena itu, para komentator menyarankan agar pelatihan ini hanya diberikan kepada pewawancara yang sudah di tingkat mahir (Memon & Bull, 1999).

Metode yang dipromosikan oleh Walters (2002) dan Zulawski & Wicklander (2001) juga harus disikapi dengan hati-hati. Meskipun mereka menyediakan banyak informasi untuk mendukung keyakinan mereka terhadap kemampuan seseorang untuk membaca BT/KNL, tetapi peserta pelatihan memerlukan waktu yang lama untuk dapat menyerap pesan ini dan mempraktikkannya.

Kekhawatiran lain tentang KNL terkait dengan kemungkinan petugas polisi menyalahgunakannya dengan cara yang menindas. Misalnya, petugas bisa saja menyalahgunakan kekuasaannya terhadap tersangka melalui perilakunya, seperti menatap tajam untuk jangka waktu yang lama, atau membanting barang ke atas meja atau dengan berdiri dan mencondongkan badan ke arah tersangka (Strongman, 1994).

Secara keseluruhan, terdapat cukup bukti yang membuat polisi merasa yakin akan manfaat mempelajari hal ini di tingkat dasar, untuk mencatat dan menafsirkan KNL terwawancara. Terutama literatur Inggris, yang telah secara konsisten memasukkan atau menekankan pelatihan di bidang ini dalam materi pelatihan yang disiapkan untuk pewawancara (contoh: CPTU, 1992a, b & c; Milne & Bull, 1999; CFIS, 2004). Polisi Amerika juga melihat pelatihan tentang KNL ini sebagai salah satu bagian yang diperlukan untuk wawancara yang efektif (Yeschke, 2003; Walters, 2002).

Selain itu, Yeschke (2003) menyarankan agar pengetahuan tentang KNL dapat membantu menghasilkan intuisi, salah satu komponen penting dalam wawancara yang efektif. Beliau menyarankan petugas untuk:

“memperdayai diri anda sendiri untuk memahami apa yang dirasakan oleh intuisi anda. Walaupun tampak tidak signifikan, pesan-pesan ini dapat membantu anda mengembangkan informasi yang anda

perlu. Ketegangan tubuh, rona wajah, luapan perasaan, frustrasi, upaya mengelak dan perasaan hancur dapat menegaskan atau menentang perkataan dari terwawancara. Dengarkan secara aktif dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di alam bawah sadar anda” (hal. 44).

PENGELABUAN

Literatur-literatur awal berpendapat bahwa mudah mengetahui seseorang yang berbohong (sebagai contoh lihat, Inbau et al, 1986). Hanya sedikit penelitian yang bisa menghasilkan hasil akurat secara konsisten. Beberapa penelitian menemukan tingkat akurasi antara 45% sampai 70%, tapi hasil penelitian lainnya menunjukkan hasil yang lebih rendah (Kalbfleisch, 1994). Sebagian besar komentator di masa kini berpendapat hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk membedakan pengelabuan dari kebenaran secara akurat (lihat Ekman, 1991; Vrij, 2003).

Kesulitannya timbul karena tidak ada satu perilaku pun – baik lisan atau fisik – yang benar-benar mencerminkan apakah seseorang jujur atau mengelabui. Bahkan di diri satu orang pun tidak ada konsistensi. Variasi perilaku dapat disebabkan dari jenis kebohongan yang dipilih, waktu untuk persiapan, strategi pewawancara, keberhasilan di masa lalu, atau sejumlah penjelasan lain (Zulawski & Wicklander, 2001, hal. 107).

Selain itu, ada pandangan umum yang berpendapat polisi dapat dilatih untuk mengenali pembohong melalui petunjuk-petunjuk perilaku. Lokakarya diadakan secara rutin oleh, diantaranya, FBI dan the US National Institute of Justice (Institusi Keadilan Nasional AS) dan dalam kesempatan tersebut penelitian-penelitian terbaru tentang cara mendeteksi pengelabuan dan topik-topik psikologi terkait lainnya dipresentasikan (Adelson, 2004).

Ekman (pakar Amerika tentang petunjuk-petunjuk non-lisan) berpikir pelatihan seperti itu dapat membantu aparat yang berwenang untuk bisa mengenali petunjuk-petunjuk samar yang mungkin mereka lupakan karena mereka bertemu dengan begitu banyak pembohong. Ekman percaya tidak ada satu pun yang disebut sebagai penanda kebohongan, tapi ada tanda-tanda lain misalnya ketika subjek berpikir terlalu lama ketika diminta menjawab pertanyaan yang tidak memerlukan dia berpikir, atau ketika emosi yang ditunjukkan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan (Ekman, 1991).

Literatur Amerika yang lebih baru (contoh: Walters, 2002; Zulawski & Wicklander, 2001) menggunakan penelitian tentang memori untuk membantu mendeteksi pengelabuan. Misalnya:

“Pewawancara dapat bertanya kepada subjek kapan dia terakhir melihat istrinya hidup. Jika subjek tersebut bertanggung jawab atas kematian istrinya, maka saat terakhir dia melihat istrinya hidup adalah pada saat dia mencekik leher si istri. Memori kejadian tersebut akan sangat kuat dan dengan demikian sulit dikesampingkan oleh pembunuh... [Hal ini] akan menciptakan stres yang tinggi untuk subjek tersebut” (Walters, 2002, hal. 57).

Pendekatan teoritis

Pakar Inggris ternama tentang pengelabuan, Aldert Vrij, percaya bahwa ada cara-cara untuk memperbaiki kemampuan mendeteksi pengelabuan dan hal ini dapat diajarkan kepada pewawancara investigatif. Misalnya, beliau berkata “pengamat harus terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika mereka menduga seseorang berbohong. Akan semakin sulit bagi si pembohong untuk terus mempertahankan kebohongan” (Vrij, 1999, hal. 323). Baru-baru ini, Vrij (2003, hal. 68-71) membahas tiga pendekatan teoritis untuk menafsirkan ‘perilaku seorang pembohong’:

- i) pendekatan emosional, yang mana proses pengelabuan adalah hasil dari sejumlah perasaan, misalnya: rasa bersalah, rasa takut dan semangat
- ii) pendekatan kognitif, yang mengusulkan bahwa pengelabuan merupakan tugas kognitif yang rumit, contoh: pembohong akan sibuk memikirkan jawaban yang sebaiknya mereka gunakan, untuk tidak bertentangan dengan kata-kata mereka sendiri, dll, sehingga mereka akan berbicara lebih pelan dan banyak jeda (dan lain-lain)
- iii) pendekatan upaya mengendalikan, yang mengusulkan pembohong akan menggunakan stereotip pembohong untuk mengendalikan perilaku mereka, dan sebagainya. Kalau mereka berpikir pembohong akan mengalihkan pandangan, gelisah jari dan terbata-bata, maka mereka akan berusaha menjaga kontak mata, diam dan berbicara dengan lancar.

Vrij mengingatkan bahwa mengajarkan teknik untuk ‘mendeteksi pengelabuan’ untuk petugas polisi akan menghadapi orang-orang yang tidak percaya: Misalnya, petugas polisi sangat percaya pada stereotip bahwa pembohong gelisah dan mengalihkan tatapan ... dan sulit untuk meyakinkan mereka bahwa pendapat ini sering kali tidak benar” (2003, hal. 75).

Setelah menganalisis ribuan rekaman wawancara dengan tersangka, ahli linguistik Australia, Georgina Heydon (lihat Gibson, 2004) sepakat dengan pandangan ini.

“tentu saja banyak pendapat tidak berbobot yang diulang-ulang tentang kemampuan mendeteksi kebohongan dan sejenisnya –

bahwa anda dapat mengetahui ketika seseorang berbohong. Para kriminolog khawatir pendapat yang banyak diyakini di kalangan polisi ini merupakan pendapat yang diserap secara ad hoc – misalnya, dari polisi senior yang menurunkannya ke polisi baru – dan pendapat ini bisa saja salah” [siaran berita dari Universitas Monash].

Karena adanya pemikiran bahwa polisi mampu mendeteksi kebohongan dan mengidentifikasi siapa yang bersalah, dan bagaimana ini dapat mempengaruhi proses wawancara, Heydon menyatakan bahwa “keseluruhan proses wawancara perlu diperiksa lebih lanjut” dan berharap agar “penelitian beliau dapat mengingatkan lembaga agar lebih memperhatikan pendapat atau keyakinan yang dibawa petugas polisi ke dalam ruang wawancara” (Gibson, 2004).

Tentu saja situasi yang ada saat ini tentang komunikasi non-lisan dan deteksi pengelabuan terkadang membingungkan untuk para praktisi. Sebagian besar kesimpulan yang ditawarkan memenuhi syarat. Contohnya, Yeschke (2003, hal. 25) mengatakan “Walaupun tidak ada metode yang sepenuhnya bisa digunakan untuk mendeteksi pengelabuan yang dilakukan oleh terwawancara, tetapi beberapa tanda-tanda lisan, non-lisan, dan fisiologis secara umum dapat dipercaya”. Vrij (2003) menjelaskan lebih jauh:

“Saya percaya ketidakpastian tentang keakuratan metode pendeteksian kebenaran dan kebohongan ini membuatnya tidak dibenarkan untuk dipakai di pengadilan. Jika pakar diminta untuk mempresentasikan hasil mereka di pengadilan pidana, mereka setidaknya harus memberitahukan batasan metode ini dan kemudian menjelaskan ketidakpastian tentang akurasinya” (hal. 83).

Di sisi lain, ada yang mengakui (contoh, Yeschke, 2003, hal. 31-32) bahwa psikologi telah membantu orang-orang untuk memahami hal-hal sebagai berikut:

- niat/motif mengelabui (untuk menyelamatkan diri agar tidak dipermalukan, rasa malu dan hukuman, atau berusaha menjadi lebih pintar dari pewawancara);
- pembohong patologis (orang yang berbohong bahkan ketika lebih mudah berkata yang sejujurnya); dan
- kepribadian psikopat (orang yang sangat egois yang tidak peduli dengan siapapun di dunia, termasuk anggota keluarganya sendiri. Mereka tampak percaya diri dan licik dan pembohong yang meyakinkan).

Tampaknya cukup berguna melatih petugas polisi untuk menilai petunjuk-petunjuk tentang kebenaran dan pengelabuan, selama keterbatasannya diakui dan

penilaiannya tidak semata-mata bergantung pada hal ini saja tanpa melihat aspek-aspek lain dari suatu penyelidikan.

SUGGESTIBILITY

Istilah ‘*suggestibility*’ (pengaruh terhadap pihak yang diwawancara) terkait dengan “keadaan yang mana pengkodean, penyimpanan, mengingat dan/atau melaporkan suatu kejadian dapat dipengaruhi oleh serangkaian faktor-faktor sosial dan psikologis yang berhubungan dengan proses wawancara” (Milne & Bull, 1999, hal. 91). Secara khusus, *suggestibility* adalah saat yang mana tanggapan terwawancara dipengaruhi oleh apa yang menurut mereka diharapkan atau diinginkan oleh pewawancara (NCF, 1996).

Banyak sekali penelitian psikologis (terlalu banyak untuk dijelaskan secara detail disini) yang sudah meneliti masalah ini (terutama lihat karya Loftus, 1984; Gudjonsson, 1992; dan Kassin & Gudjonsson, 2004). Temuan-temuannya menunjukkan bahwa tiga komponen *suggestibility* – yaitu ketidakpastian, kepercayaan dan harapan terhadap orang lain – dapat dengan mudah dimanipulasi oleh pewawancara.

Milne dan Bull (1999, hal. 92-98) memberikan beberapa saran teknik yang dapat mempengaruhi pelaporan kejadian oleh saksi:

- pertanyaan yang sugestif (menanyakan pertanyaan yang mengarah, menyesatkan dan tidak netral)
- dari orang lain (mengatakan kepada terwawancara bahwa petugas telah memperoleh informasi dari sumber lain)
- konsekuensi positif (memberikan pujian karena telah mengatakan suatu hal khusus)
- konsekuensi negatif (mengkritisi terwawancara atau memberikan kesan seolah-olah keterangannya tidak bagus)
- bertanya dan menjawab (menanyakan ulang pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya sehingga terwawancara berpikir jawaban yang mereka berikan sebelumnya salah).
- memancing spekulasi (menanyakan pendapat atas kejadian yang tidak disaksikan).

Bahkan cara berpakaian pewawancara dapat menjadi teknik yang sugestif atau mempengaruhi untuk mempengaruhi cara orang menjawab (NCF, 1996).

Bidang penelitian ini baru-baru ini dikembangkan fokusnya ke arah sikap pewawancara dan ‘Titik Tekanan Pewawancara’ (IP), serta pengaruh hal ini bagi terwawancara (Baxter, 2004). Baxter menyatakan pewawancara yang gagal memantau dan mengendalikan sikap mereka berisiko menerapkan titik tekanan yang berlebihan. Sehingga “pewawancara dapat mempengaruhi ingatan terwawancara ...

terutama dengan membuat mereka mengubah jawaban yang seharusnya tidak mereka ubah tanpa adanya IP” (Baxter, 2004, hal. 305). Baxter menyarankan satu cara untuk mengurangi gangguan IP yaitu dengan pewawancara mengingatkan terwawancara untuk “waspada dan berpikir kritis dalam menjawab pertanyaan”. Hal ini sama dengan nasihat yang diberikan dalam materi pelatihan di Inggris tentang bagian ‘*Engage and Explain*’ (Terlibat dan Menjelaskan) dalam wawancara PEACE (contohnya NCOF, 2003) dan dalam ‘wawancara kognitif yang disempurnakan’ (Milne & Bull, 1999).

Baxter (2004) mendukung penggunaan Skala *Suggestibility* Gudjonsson (lihat Gudjonsson, 1992, hal. 101-164 untuk diskusi tentang Skala ini) sebagai alat bantu penilaian dan pelatihan untuk menghilangkan titik tekanan yang berlebihan dari praktik wawancara.

“tentu saja ini terserah pada penilaian petugas yang melakukan interogasi dalam menerapkan jumlah titik tekanan yang sesuai untuk saksi yang menolak bekerja sama atau seorang tersangka yang diduga berbohong atau merusak, tetapi penggunaan IP tersebut harus dilakukan dengan penuh kesadaran tentang apa dan bagaimana hal tersebut dilakukan, serta keuntungan dan risiko atas bukti yang mereka peroleh” (Baxter, 2004, hal. 306-7).

Baxter (2004) menyarankan “diperlukannya penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi keragaman IP yang timbul dari gaya wawancara petugas pewawancara yang berbeda-beda, baik yang muncul secara alami atau dilakukan dengan sengaja” (hal. 307).

Poin-poin utama

1. **Memori.** Memori terdiri dari tiga urutan tempat penyimpanan: tempat penyimpanan sensorik, tempat penyimpanan ingatan jangka pendek dan tempat penyimpanan ingatan jangka panjang, dan melibatkan tiga proses yang berbeda: pengkodean, penyimpanan dan pengambilan. Upaya mengingat pertama biasanya mengungkapkan gambaran umum tetapi tidak rinci. Tidak adanya interupsi dari pewawancara dan instruksi untuk berkonsentrasi dan melaporkan segalanya akan menolong mendapatkan detail yang diperlukan.
2. **Bahasa tubuh / petunjuk non-lisan.** Penelitian menemukan bahwa raut wajah, nada suara, diam, posisi tubuh, gerakan mata, jeda dalam pembicaraan, dan aspek-aspek BT dan KNL lainnya memiliki pesan tersendiri. Pesan ini dapat menegaskan, membuat rancu, atau menentang apa yang dikatakan. Peneliti mengingatkan pewawancara agar jangan terlalu yakin dengan kemampuan mereka 'membaca' BT/KNL dari terwawancara.

Poin-poin utama (lanjutan)

3. **Pengelabuan.** Tidak ada perilaku non-lisan yang pasti berhubungan dengan pengelabuan. Akan tetapi, penelitian menemukan bahwa orang-orang (baik pewawancara atau yang diwawancara) sering kali memiliki pendapat stereotip yang tidak benar tentang perilaku non-lisan. Sehingga, mengambil kesimpulan hanya dari perilaku seseorang dalam ruang wawancara tidak dapat dipercaya.
4. **Suggestibility.** Pewawancara perlu menyadari bahwa terwawancara rentan dipengaruhi melalui sejumlah teknik sugestif yang dapat mempengaruhi ingatan mereka.

TERWAWANCARA

SAKSI

Banyak sekali penelitian tentang wawancara investigatif yang menekankan pentingnya keterangan saksi. Sebagai contoh, Milne dan Bull (1999, hal. 1) mengatakan “faktor utama yang menentukan apakah suatu kejahatan dapat diselesaikan adalah kelengkapan dan ketepatan keterangan saksi”. Sama halnya dengan, Heaton-Armstrong & Wolchover (1999, hal. 222) yang menyatakan bahwa “Landasan proses pengadilan *adversarial* adalah bukti dari saksi pada saat penuntutan, dan bukan pengakuan dari tersangka”.

Terkadang satu-satunya bukti yang memandu polisi dalam penyelidikan adalah apa yang dikatakan oleh saksi. Idealnya, semua saksi dapat menceritakan dan dengan gampang mampu memberikan kesaksian yang jelas, terpercaya dan akurat yang dapat menyebabkan pelaku tertangkap dan kemudian diputus bersalah. Namun kenyataannya tidak seperti ini. Keterangan saksi dapat saja tidak bisa dipercaya atau tidak lengkap. Dalam kondisi terburuk, kesaksian yang salah atau tidak lengkap dapat mengakibatkan dihukumnya seseorang yang tidak bersalah (Kassin & Gudjonsson, 2004) atau menyebabkan penyelidikan mengarah ke petunjuk atau orang yang salah (Maguire, 2003). Meskipun demikian, komentator terus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

“Konsentrasi untuk memperoleh dan merekam pernyataan terdakwa sangat jauh berbeda dengan kurangnya perhatian yang diberikan kepada pernyataan dan keterangan saksi potensial” (Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999, hal. 223)

Mengakui beban personal

Korban atau saksi mungkin saja tidak memiliki hubungan apapun dengan kejahatan yang terjadi kecuali karena mereka berada di tempat kejadian pada saat kejadian (Swanson et al, 2002). Mereka mungkin saja belum pernah terlibat dengan polisi atau sistem peradilan pidana sebelumnya. Namun demikian, tetap ada kritik terhadap polisi yang menangani saksi dengan keras (Milne & Bull, 1999). Polisi harus sensitif terhadap fakta bahwa biasanya orang-orang tidak mendapatkan keuntungan ketika mereka setuju bersaksi. Bahkan, beban perorangannya cukup besar. Misalnya, Ord, Shaw dan Green (2004, hal. 52) mengatakan:

“[Saksi] mungkin harus mengorbankan waktu pribadinya untuk diwawancara dan memberikan keterangan saksi. Mereka nantinya diminta untuk datang ke pengadilan atau persidangan, dan sering kali pada saat itu mereka sering merasa tidak

dianggap atau diperhatikan daripada tertuduh. Saksi [juga] mungkin saja harus:

- *menghadapi tertuduh;*
- *memberikan bukti di hadapan keluarga dan pendukung pelaku;*
- *menghadapi tertuduh, teman atau keluarganya setelah selesai persidangan;*
- *merasa bertanggung jawab untuk hukuman yang diterima pelaku”.*

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Beberapa saksi tidak mampu menceritakan apa yang terjadi atau apa yang mereka saksikan. Jadi terserah pada pewawancara untuk mendapatkan informasi terbaik dari mereka (Milne dan Bull, 1999). Dan harus dilakukan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan ke pihak luar dan melindungi integritas saksi (Ord et al, 2004).

Secara khusus, pewawancara harus menyadari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan hasil wawancara saksi (Gudjonsson, 1992; Milne & Bull, 1999; Ord et al, 2004; Strongman, 1994). Seperti:

- waktu yang tersedia untuk wawancara
- kapan dan di mana wawancara dilakukan
- keterlibatan saksi dalam kejadian
- kemampuan berbahasa saksi
- tingkat kecemasan saksi (misalnya apakah langsung setelah kejadian)
- apakah saksi mengkonsumsi alkohol atau narkoba
- sifat kejadian (misalnya apakah melibatkan kekerasan)
- keberadaan saksi lain atau penonton yang penasaran
- pewawancara berpikiran terbuka (tidak memulai wawancara dengan posisi atau asumsi yang sudah dipercaya terlebih dahulu)
- sikap pewawancara terhadap saksi (ini menjadi penting terutama untuk kasus-kasus wawancara dengan informan dan saksi atas kasus yang ‘mengerikan’)
- fleksibilitas pewawancara (untuk menjadi pewawancara, konselor/penasihat, teman berbagi).

Ord et al (2004, hal. 15-19) menjelaskan langkah-langkah utama untuk memastikan keberhasilan wawancara seperti:

- menciptakan kesan yang baik sejak awal
- memperlakukan terwawancara sebagai seorang individu
- memahami perasaan terwawancara
- menjelaskan alasan wawancara
- memberikan garis besar prosedur wawancara dan alasannya
- menjelaskan format wawancara

Penelitian menemukan bahwa sikap dan energi yang dibawa ke dalam wawancara sangat penting. Hal tersebut akan menentukan bagaimana pewawancara akan memperlakukan terwawancara, dan sebaliknya akan mempengaruhi reaksi dari terwawancara terhadap pewawancara.

SAKSI RENTAN

Seperti yang disebutkan sebelumnya, banyak orang yang merasa tertekan ketika terlibat menjadi saksi. Ada kelompok-kelompok saksi yang menghadapi kesulitan lebih. Termasuk anak-anak, orang dengan gangguan mental, orang dengan kesulitan belajar, orang dengan disabilitas fisik dan/atau komunikasi, korban perkosaan, dan sebagainya. Evans dan Webb (1993, hal. 37) mengingatkan bahwa:

“orang-orang ini menghadapi risiko yang mana jawaban atau tanggapan mereka selama wawancara dipengaruhi secara negatif, diganggu, dan dibentuk oleh petugas yang tidak mengetahui dan tidak memiliki keterampilan”.

Selama sekitar 15 tahun terakhir, sebagian besar sistem peradilan pidana di dunia telah menunjukkan kesadaran mereka tentang perlunya mengakomodir ‘saksi rentan’ di setiap tahap keterlibatan mereka dalam proses hukum (lihat CFIS, 2004; HMSO, 2002a & b).

Beberapa upaya spesifik yang dilakukan tidak terlalu berhasil (Milne & Bull, 2003). Sebagai contoh, Undang-Undang Peradilan Pidana tahun 1991 di Inggris dan Wales memperkenalkan langkah-langkah khusus untuk saksi anak-anak yang memberikan keterangan mereka, tetapi kelompok saksi lain tidak mendapatkan perhatian sebaik ini. Salah satu alasannya, menurut Milne dan Bull (2003) “...adanya kepercayaan, setidaknya di kalangan aparat hukum, bahwa orang-orang tersebut tidak kompeten untuk bersaksi... mempertimbangkan hal ini, pihak kepolisian memutuskan, dengan melihat prioritas mereka yang lain, untuk tidak fokus meningkatkan keterampilan wawancara mereka” (hal. 117). Pendapat ini terbukti salah.

Perkembangan terbaru

Milne dan Bull (2003) menyadari bahwa setidaknya di Inggris dan Wales, Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 harus bisa mengatasi masalah ini. “Undang-Undang Pionir” ini (hal. 118) mengatur beberapa ‘langkah-langkah khusus’ yang dimaksudkan untuk menolong saksi rentan dan terintimidasi – baik anak-anak atau orang dewasa – dalam memberikan ‘bukti atau keterangan terbaik mereka’ dalam proses persidangan. Diantaranya adalah:

- mengizinkan rekaman video atas wawancara saksi dan diajukan sebagai bukti utama

- meletakkan layar pembatas antara saksi dan tertuduh, dan
- memberikan bukti melalui siaran televisi langsung.

Menurut Undang-Undang ini, saksi berhak mendapat pendampingan khusus atas dasar kerentanan yang disebabkan oleh usia mereka atau ketidakmampuan mereka. Mereka berusia kurang dari 17 tahun pada saat persidangan, atau pengadilan harus mempertimbangkan kualitas bukti mereka yang akan berkurang karena saksi menderita gangguan mental, atau kekurangan kecerdasan dan fungsi sosial yang signifikan; atau memiliki disabilitas atau gangguan fisik.

Saksi juga berhak mendapatkan pendampingan karena mereka ‘terintimidasi’ yaitu jika mereka “ketakutan atau tertekan karena bersaksi”. Dalam situasi ini, pengadilan akan mempertimbangkan sifat dan kondisi pelanggaran yang sedang disidangkan, usia saksi, dan hal-hal lain yang relevan, misalnya–

- latar belakang sosial dan budaya serta asal suku bangsa saksi
- kondisi rumah tangga dan pekerjaan saksi
- keyakinan agama atau pendapat politik saksi
- perilaku terhadap saksi dari sisi –
 - tertuduh
 - anggota keluarga atau teman dari tertuduh, atau
 - orang lain yang mungkin jadi tertuduh atau saksi dalam persidangan.

Memperoleh bukti terbaik

Untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, Departemen Dalam Negeri menyiapkan suatu dokumen “Memperoleh bukti terbaik dalam proses peradilan pidana: panduan untuk saksi rentan dan terintimidasi, termasuk anak-anak” (HMSO, 2002b). Dokumen ini menyatakan, antara lain:

“memberikan nasihat dan panduan tentang bagaimana mempersiapkan dan mengadakan wawancara investigatif dengan saksi rentan dan/atau terintimidasi. ... [P]osisi hukum tentang saksi-saksi ini dijelaskan dan diberikan nasihat tentang bagaimana cara wawancara yang paling efektif untuk mendapatkan bukti terbaik. Panduan khusus diberikan tentang wawancara saksi yang memiliki gangguan sensorik, kesulitan belajar dan gangguan mental” (hal. 6).

Cara merekam

Selain itu, ada juga panduan untuk membuat keputusan tentang apakah wawancara akan dilakukan atau tidak, dan apakah wawancara harus direkam atau cukup dengan pernyataan tertulis (HMSO, 2002b, hal. 3). Misalnya, pertanyaan tentang apakah memerlukan rekaman video untuk wawancara tergantung pada penilaian petugas wawancara (atau petugas senior)

tentang kualitas bukti saksi yang mungkin dapat “dimaksimalkan”. Polisi harus memikirkan sejumlah faktor seperti keadaan pada saat kejadian dan keadaan dan pendapat saksi.

Sementara rekaman wawancara akan digunakan sebagai pengganti bukti utama dari saksi, tetapi keputusan akhirnya ditentukan oleh pengadilan, apakah mereka akan menggunakannya atau tidak – dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kemungkinan bahwa dengan menggunakan rekaman video dapat menghambat pengujian bukti oleh para pihak. Polisi harus menghindari kesan kepada korban bahwa seakan-akan rekaman tersebut akan secara otomatis dijadikan bukti utama (CFIS, 2004).

Sejak Undang-Undang tersebut, beberapa kantor kesatuan kepolisian di Inggris telah menetapkan sejumlah kriteria terbatas – seperti tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi – untuk memutuskan apakah mereka akan membuat rekaman video kesaksian dari saksi rentan. Sementara di tempat lain, seperti Irlandia Utara, semua wawancara dengan orang-orang yang memenuhi kriteria sebagai saksi rentan dan terintimidasi akan direkam dengan video jika memungkinkan dan disetujui oleh saksi. Saat ini, PSNI hanya memiliki 3 unit video portabel untuk wawancara seperti ini tetapi akan segera mendapatkan unit tambahan (*komunikasi pribadi*).

Seberapa efektif Undang-Undang dan panduan ini dapat mengatasi kekurangan yang ada sebelumnya dalam mengakomodir kebutuhan saksi rentan tidak dapat diketahui dalam waktu dekat. Di saat yang sama, Pusat Keterampilan Wawancara (CFIS, 2004) telah memastikan bahwa semua nasihat dan saran telah dimasukkan ke dalam pelatihan yang direkomendasikan untuk polisi pewawancara di bawah Strategi Wawancara Investigatif ACPO (Asosiasi Kepala Polisi Inggris dan Wales, 2003).

TERSANGKA

Wawancara tersangka merupakan tahapan penting dalam proses konstruksi dan penyidikan kasus. Sehingga menjadi tahap yang menentukan di sebagian besar kasus pidana (Baldwin, 1994; Williams, 2000, hal. 209). Namun ada perdebatan tentang tujuan wawancara tersangka. Sampai baru-baru ini, ada dua aliran tentang hal ini yaitu: 1) tujuannya adalah untuk mendapatkan pengakuan, dan 2) tujuannya untuk mendapatkan kebenaran. Pengakuan tampaknya akan memastikan putusan dan sanksi yang cepat dan pasti untuk orang yang melakukan kesalahan. Kebenaran akan memastikan bukti tentang kesalahan orang tersebut, dilanjutkan dengan hukuman yang cepat dan pasti; atau bukti bahwa orang tersebut tidak bersalah, dilanjutkan dengan pembebasan.

Beberapa komentator berpendapat tidak ada dari dua aliran ini yang akurat. Sebagai contoh, menurut Baldwin (1993)

“...saat ini, kalangan polisi mengidentifikasi tujuan wawancara adalah untuk ‘mencari kebenaran’ atau pengumpulan informasi yang netral dari tersangka ... [tetapi] harus diingat bahwa di seluruh wawancara yang dilakukan polisi ada harapan bahwa, untuk setiap pelanggaran, ada sejumlah fitur yang sudah didefinisikan dengan jelas – atau poin untuk dibuktikan – yang harus disikapi” (hal. 327).

Baldwin (2003) menyarankan bahwa “lebih realistis melihat wawancara sebagai mekanisme yang bertujuan untuk ‘konstruksi bukti-bukti” (hal. 327). Dengan kata lain, tujuan wawancara bukan untuk mendapatkan konsep ‘kebenaran’ yang rancu tetapi untuk membangun kasus berdasarkan bukti atau membuktikan tidak ada kasus.

Mengapa tersangka mengaku

Tersangka yang mengakui rasa bersalah merupakan sumber bukti penting untuk pengakuan. Ketika diperoleh dalam kondisi wawancara formal, maka pengakuan ini bernilai. Jadi, pewawancara harus memahami kenapa tersangka mengaku ketika diwawancara. Penelitian (dilaporkan dalam Gudjonsson, 1992) menemukan tiga alasan besar, alasan yang pertama adalah yang paling penting:

- tersangka paling mungkin mengaku ketika mereka merasa bukti-bukti yang memberatkan mereka cukup kuat (sehingga sia-sia menyangkal);
- banyak tersangka yang menyesali tindakan mereka dan ingin menceritakan hal tersebut dan menjelaskan apa yang terjadi;
- tersangka bereaksi terhadap tekanan dari luar seperti stres karena dipenjara dan bujukan polisi.

Penelitian tentang topik ini juga menyimpulkan bahwa tersangka yang mengaku karena dua alasan pertama akan merasa lebih puas dengan apa yang terjadi dibandingkan dengan mereka yang mengaku karena alasan ketiga (Gudjonsson, 1992).

Pendapat lain tentang bagaimana mendapatkan bukti dari rasa bersalah dapat dilihat dari Sanders (1994, hal. 788), yang mengatakan hal ini dapat diperoleh dari:

- tersangka yang langsung dan secara cepat mengaku (kebanyakan adalah tersangka yang mana polisi sudah memiliki banyak bukti yang memberatkan)
- tersangka yang ingin membuat ‘kesepakatan’ (mengaku bersalah agar mendapatkan sesuatu atau pengurangan hukuman)

- tersangka yang terintimidasi karena mereka diwawancara di wilayah polisi (musuh)
- tersangka yang diwawancara secara informal sebelum dan setelah wawancara formal [Sanders mendiskusikan hal ini cukup panjang lebar, dengan memberikan contoh penggunaan 'percakapan' informal dengan tersangka]
- tersangka yang dipaksa dengan teknik-teknik bertanya yang menjebak agar mereka mengaku bersalah
- tersangka yang 'dipermainkan dengan kata-kata' dengan cara memutarbalikkan kata-kata mereka (biasanya dalam pernyataan tertulis)
- tersangka yang membuat pengakuan palsu (karena alasan apapun).

Sebagian besar pendapat Sander di atas mengacu pada kemungkinan digunakannya tekanan. Pendapat ini mengindahkan kemungkinan tersangka mengaku karena wawancara yang baik.

Mewawancarai tersangka

Ede dan Shepherd (2000, hal. 85) menyusun pendekatan tiga-tahap yang digunakan kepolisian di Inggris dan Wales untuk mewawancarai tersangka:

- agenda tersangka – memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan apa yang dia mau, atau membahas permasalahan yang ingin dia bahas;
- agenda polisi – menyampaikan dan menanyakan tersangka tentang hal-hal yang dianggap penting bagi penyidik;
- mempertanyakan – menunjukkan anomali dan kelainan yang ada di tahap sebelumnya kepada tersangka

Pendekatan ini, dilakukan di tahap 'account' (keterangan) dalam wawancara PEACE, dan juga didorong dalam literatur Amerika, walaupun dengan istilah yang berbeda. Misalnya, Walters (2002) menyatakan inti dari wawancara tersangka yang produktif terdiri dari:

- fase narasi – tahap 'mendengarkan' ketika tersangka yang banyak berbicara (dan dapat memilih apakah dia mau mengatakan yang sebenarnya atau mengelabui). Fase ini juga termasuk segala pertanyaan yang diajukan pewawancara untuk mengklarifikasi penafsiran mereka tentang keterangan tersangka;
- fase pemeriksaan-silang – ketika pewawancara mengajukan pertanyaan spesifik tentang pernyataan yang dibuat oleh tersangka dalam fase narasi, serta mengangkat dan menggali poin-poin penting secara lebih mendetail.

Baik literatur Amerika atau Inggris, keduanya menekankan pentingnya tersangka merasa didengarkan oleh pewawancara. Hal ini meningkatkan stres yang dialami tersangka, terutama ketika dia

berusaha menghindari dari suatu hal atau berbohong. Serangan yang terfokus dan beralasan terhadap keterangan tersangka pada tahap mempertanyakan/pemeriksaan silang dapat melelahkan dan pada akhirnya menghancurkan kepercayaan tersangka dalam mempertahankan kisahnya.

TERSANGKA REMAJA

Sebagian besar petugas kepolisian dalam tugas perpolisiannya sehari-hari akan mewawancarai sejumlah anak muda yang diduga melakukan kejahatan. Namun demikian, hanya sedikit perhatian yang diberikan untuk wawancara tersangka remaja jika dibandingkan dengan wawancara saksi. Misalnya, bagian awal tinjauan ini menjelaskan tentang langkah-langkah legislatif terbaru untuk memenuhi kebutuhan saksi rentan, termasuk anak-anak.

Evans dan Webb (1993) melakukan studi yang melibatkan 60 rekaman wawancara yang dipilih secara acak dari Kepolisian Merseyside pada bulan Mei 1990 dengan tersangka berusia antara 10 sampai 16 tahun. Mereka menemukan: wawancaranya singkat (rata-rata 7 menit 22 detik); pewawancara menggunakan hampir 25% dari waktu wawancara untuk menjelaskan "fakta" dan bukan bertanya (dan terlebih lagi dengan mereka yang berusia 10-13 tahun dibandingkan dengan mereka yang berusia 14-16 tahun); setengah pertanyaan yang diajukan mengandung pertanyaan yang kontra-produktif dan berisiko; dan petugas lebih bersikap memerintah dalam pendekatannya (yaitu berbicara kepada remaja dan bukan dengan mereka).

Studi lain (Evans, 1993 dikutip di Milne & Bull, 1999) untuk Komisi Kerajaan tentang Peradilan Pidana 1993 menemukan bahwa: wawancara dengan tersangka remaja lebih singkat daripada dengan orang dewasa; sebagian besar dengan cepat mengaku bersalah (77% dibandingkan dengan 68% untuk orang dewasa); meluasnya penggunaan taktik 'persuasif' (misalnya dengan mengatakan kepada remaja bahwa kebenaran akan terungkap/kamu akan merasa lebih baik begitu mengeluarkannya dari dalam hatimu); dan dari 23% kasus yang mana tersangka remaja tidak segera mengaku, setengahnya akan mengaku pada akhirnya.

Evans dan Webb (1993) menyarankan agar pelatihan wawancara juga melibatkan praktik dengan anak-anak. Dari studi RCCJ, faktor penting yang terlihat adalah tingginya angka pengakuan bersalah yang dibuat dengan segera. Jika hal ini lazim terjadi, maka polisi seharusnya tidak perlu menggunakan taktik dan gaya bertanya yang menekan. Perbaikan umum pelatihan wawancara yang mana petugas berkonsentrasi untuk berhubungan dengan tersangka dan mendapatkan informasi yang menegaskan bahwa orang tersebut bersalah atau tidak bersalah harus mengembangkan

cara yang sedikit berbeda untuk wawancara dengan tersangka anak-anak.

PENOLAKAN DARI TERWAWANCARA

Orang yang menolak upaya untuk mengajak mereka bicara dapat membuat petugas polisi sangat frustrasi. Menurut Shepherd (1993):

“Penolakan dapat didefinisikan sebagai perilaku lisan, fisik dan emosional dari terwawancara yang bertujuan menghalangi upaya untuk mengajak mereka terlibat dalam percakapan demi mencapai tujuan penyelidikan, suatu hubungan yang berfungsi, dan untuk menentukan fakta-fakta penting. Sayangnya, banyak petugas polisi yang memiliki pemahaman yang rendah tentang siapa dan mengapa mereka menolak” (hal. 6).

Memahami siapa yang menolak dan mengapa

Ada berbagai alasan yang menyebabkan seseorang gagal bekerja sama dalam wawancara polisi. Beberapa berakar dari psikofisiologi. Misalnya, ketika seseorang berhadapan dengan “ancaman” – baik ancaman fisik atau psikologis – tubuh kita memiliki mekanisme “melawan, melarikan diri atau membeku” yang secara otomatis akan aktif (Morgan, 1999). Dalam situasi ini, detak jantung akan meningkat, tekanan darah naik, nafas menjadi pendek dan cepat, mulut terasa kering, dan lain-lain. Sebagian besar tenaga akan digunakan ketika seseorang menghadapi situasi yang “mengancam”, seperti wawancara polisi.

Beberapa penulis (contoh: Yeschke, 2003; Zulawski & Wicklander, 2001) memberikan alasan lain yang menyebabkan penolakan:

Takut dipermalukan	“Menyelamatkan muka” dianggap salah satu kebutuhan penting bagi peserta wawancara. Terwawancara akan bersikap defensif agar tidak dipermalukan.
Takut dengan upaya balas dendam	Terwawancara mungkin tidak bersedia bekerja sama karena mereka takut dengan pembalasan dari pihak yang bersalah atau pihak lain. Ketika terwawancara takut akan keselamatan mereka sendiri atau anggota keluarganya, penolakan mereka untuk bekerja sama bisa sulit untuk diatasi.

Takut kerugian bagi diri sendiri	Terwawancara mungkin khawatir tentang ketidaknyamanan dan kerugian keuangan yang timbul karena mereka bekerja sama dengan polisi.
Takut dengan proses hukum	Terwawancara mungkin hanya pernah sedikit berhubungan dengan sistem peradilan pidana atau memiliki pandangan negatif tentang sistem tersebut dan takut dengan akibat dari keterlibatannya. Di beberapa kasus, mereka mungkin takut dengan perlakuan kasar dan tidak pengertian dari aparat yang berwenang.
Takut menyakiti orang lain	Bahkan perasaan sebagai warga negara yang berkewajiban untuk bekerja sama dengan penyelidikan tidak akan cukup kuat untuk mengatasi penolakan kuat untuk memberikan informasi yang dapat menyakiti orang lain.
Takut mengungkapkan jati diri	Keberatan untuk berbagi jati diri mereka yang sebenarnya dengan orang asing sehingga beberapa orang jadi defensif dan sulit dipahami.
Takut harus ganti rugi	Beberapa tersangka tidak mau mengaku karena mereka merasa tidak sanggup memberikan ganti rugi kepada korban atas kerugian atau kerusakan yang mereka sebabkan.

Tabel 4: Alasan-alasan mengapa orang menolak berbicara dengan polisi

Faktor-faktor seperti ini mempengaruhi tingkat kenyamanan terwawancara dan menciptakan kerentanan yang harus dipahami dan ditangani oleh pewawancara. Meskipun wawancara polisi selalu dilakukan dalam situasi yang tidak alami – pewawancara bukanlah seorang teman, tetangga, atau saudara sama sekali – Yeschke (2003) mengatakan bahwa dengan pelatihan, pewawancara “dapat menampilkan kehangatan manusia dan dengan demikian dapat secara psikologis menciptakan rasa nyaman yang cukup untuk mendorong kepatuhan sementara” (hal. 21).

Apa yang harus dilakukan

Seperti yang dikatakan Williamson (1993, hal. 58): “Penolakan harus diantisipasi, tetapi sering kali menyebabkan petugas polisi menjadi panik, mengulang pertanyaan yang sama berulang-ulang dan mengakhiri wawancara terlalu dini.” Rasa panik terutama dirasakan ketika tersangka berkata “tidak ada komentar” atau tetap diam. Seperti bentuk penolakan lain, misalnya sikap bermusuhan, berbohong, tidak jelas, dan tidak bekerja sama, diperlukan kemampuan pewawancara untuk mengatasi situasi tersebut (Shepherd, 1993).

Strategi paling mudah untuk menangani penolakan dengan efektif adalah dengan mengembangkan dan melatih sejumlah tanggapan yang dapat digunakan ketika tersangka berkata mereka tidak mau menjawab atau memberikan pernyataan (TVP, 2004). Tentang masalah ini, ada banyak hal yang disampaikan dalam berbagai literatur. Rangkuman bermanfaat dibuat oleh Eric Shepherd (1993, hal. 7):

“...persyaratannya termasuk: menolak mentalitas ‘menang-kalah’; pengetahuan mendetail; memikirkan terlebih dahulu informasi dan permasalahan yang ada, perencanaan dan persiapan yang mendetail termasuk kemungkinan-kemungkinan hambatan yang muncul dalam percakapan; dan menyeimbangkan antara berbicara dan mendengarkan selaras dengan mencari tahu fakta dan memikirkan perasaan terwawancara dalam arti menghormati orang tersebut, berempati, mendukung, positif, terbuka, tidak bersikap menghakimi, berbicara terus terang dengan gaya bercakap-cakap menunjukkan komitmen untuk berbicara dengan orang yang setara, bukan antara atasan dan bawahan atau sebagai pseudo-setara”.

Pewawancara hanya dapat menerapkan strategi yang tepat ketika mereka sudah mendapatkan pelatihan dan pengujian menyeluruh tentang keterampilan percakapan dan komunikasi antar pribadi serta memiliki pengetahuan tentang perilaku manusia dan proses kognitif (Milne & Bull, 1999; Shepherd, 1993).

Poin-poin utama

1. Kelengkapan dan keakuratan keterangan saksi sering kali menjadi faktor utama yang menentukan dipecahkannya suatu kejahatan.
2. Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 (Inggris dan Wales) mendorong polisi untuk merekam wawancara dengan ‘saksi yang rentan’ tetapi menyerahkan keputusan akhir pada pengadilan apakah rekaman tersebut akan digunakan sebagai bukti utama dari saksi.
3. Wawancara tersangka merupakan hal yang menentukan dalam proses konstruksi dan penyidikan kasus.

Poin-poin utama (lanjutan)

4. Tersangka akan lebih mungkin mengaku ketika mereka menangkap kesan bahwa bukti-bukti yang memberatkan mereka cukup kuat (ini adalah alasan yang paling penting), ketika mereka menyesal atas kejahatan yang mereka lakukan dan ingin membicarakannya dan menjelaskan apa yang terjadi, dan ketika mereka bereaksi terhadap tekanan dari luar, misalnya faktor-faktor seperti stres karena dipenjara dan bujukan polisi.
5. Polisi Inggris menggunakan pendekatan wawancara 3-tahap - 'agenda tersangka', 'agenda polisi' dan 'mempertanyakan'.
6. Polisi perlu mengapresiasi berbagai alasan yang menyebabkan seseorang tidak mau bekerja sama dalam wawancara – alasannya termasuk Takut dipermalukan, balas dendam, kerugian diri, proses hukum, menyakiti orang lain, mengungkapkan jati diri, dan takut harus ganti rugi.

MENUJU KEPADA MODEL PEACE

Sampai akhir abad ke delapanbelas, para hakim di Inggris dan Wales memiliki tanggung jawab *inquisitorial* (mencari kebenaran) dan *magisterial* (menghakimi). Ketika mereka kehilangan tanggung jawab *inquisitorial*-nya, polisi kemudian secara alami mengambil alih tugas ini. Menurut Williamson (1993, hal. 57)

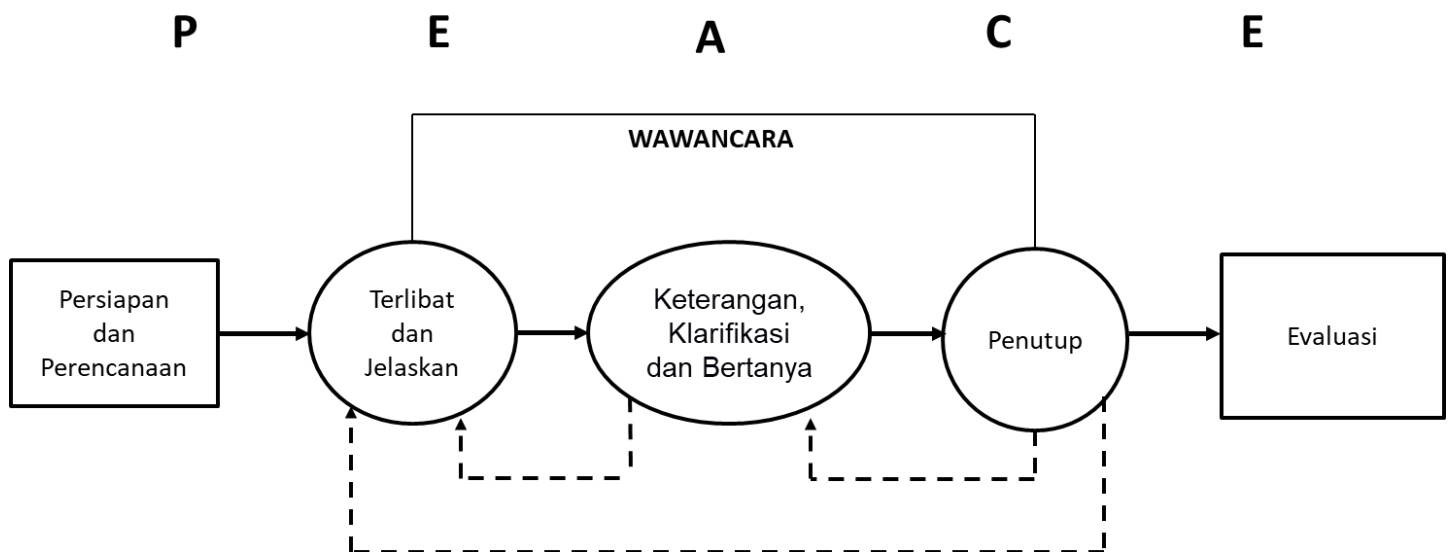
“Ketika tugas kepolisian yang baru mulai berkembang di Inggris dan Wales, petugas polisi mulai mengajukan pertanyaan kepada tersangka sebelum persidangan. Beberapa hakim mengizinkan laporan hasil percakapan antara petugas dan tersangka tersebut diajukan sebagai bukti, sementara hakim lain menentangnya. Menteri Dalam Negeri mengajukan permasalahan ini ke para Hakim dan pada tahun 1906 dipublikasikanlah Putusan Hakim”.

Meskipun polisi memiliki tanggung jawab baru tetapi mereka hanya memiliki sedikit panduan untuk melakukan wawancara sampai dengan pertengahan 80an (Milne & Bull, 1999). Maka dari itu, karena adanya kekhawatiran tentang ketidakefektifan Putusan Hakim tahun 1906 kemudian melahirkan Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 (PACE). Kendali yang lebih ketat terhadap cara polisi bertanya diterapkan, termasuk menggunakan rekaman video untuk wawancara dengan tersangka (Williamson, 1993). Langkah-langkah ini membantu mengungkapkan kesenjangan materi teknik wawancara yang bermanfaat dan memicu dilakukannya berbagai penelitian.

Pada tahun 1991, Kantor Departemen Dalam Negeri membentuk satu Kelompok Pengawas untuk wawancara investigatif, yang terdiri dari anggota kepolisian, Departemen Dalam Negeri dan Kantor Kejaksaan Kerajaan untuk berkoordinasi dalam wawancara, termasuk dalam hal pelatihan (Baldwin, 1993). Kelompok Pengawas kemudian membuat satu model wawancara yang bertujuan untuk menawarkan alternatif yang lebih efektif dan etis dari wawancara persuasif. Model tersebut, seperti yang ditunjukkan dalam gambar berikut, kemudian dikenal dengan singkatannya ‘PEACE’. Yang merupakan kepanjangan dari:

- P**lanning and Preparation (Perencanaan dan Persiapan)
- E**ngage and Explain (Terlibat dan Jelaskan)
- A**ccount (Keterangan)
- C**losure (Penutup)
- E**valuation (Evaluasi).

Model PEACE dirancang sebagai kerangka kerja wawancara dalam segala situasi dan dengan setiap jenis terwawancara. Langkah-langkah ini dijelaskan secara lengkap dalam dua buku panduan yang diterbitkan untuk petugas kepolisian: ‘Panduan Wawancara’ (CPTU, 1992a) dan ‘Buku Peraturan untuk Pewawancara’ (CPTU, 1992b). Kedua buku panduan ini disertai dengan satu buku kerja (CPTU, 1992c) dan panduan tentang prinsip-prinsip dasar wawancara polisi (Surat Edaran Departemen Dalam Negeri nomor 22/1992).



Gambar 3: Diagram Model Wawancara PEACE

PENGGUNAAN PEACE SECARA MELUAS

PEACE adalah sebuah model yang dikembangkan oleh dan untuk polisi di Inggris dan Wales. Ada perdebatan tentang apakah masalahnya dapat dibandingkan dengan situasi di negara lain sehingga solusi yang sama dapat digunakan. Misalnya, Bayley (1994) menyarankan bahwa karena kepolisian di negara-negara seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, Kanada dan AS menghadapi serangkaian masalah yang sama terkait dengan peran mereka, maka mereka bisa saling belajar dari satu sama lain.

Newburn (2003, hal. 34) lebih berhati-hati, dan menyarankan

“Kenyataan bahwa perubahan kebijakan dan praktik di satu negara berhasil, bukanlah suatu jaminan bahwa inovasi yang sama dapat berhasil diimplementasikan, atau beroperasi dengan sama efektifnya, di negara lain. Hal ini karena sistem kepolisian sangat melekat dengan struktur dan budaya masyarakat mereka yang lebih luas”.

Meskipun demikian, model PEACE telah diadopsi oleh negara lain, termasuk beberapa negara bagian di Australia, Kanada, Selandia Baru dan Eropa. Beberapa diantaranya, contoh: Queensland, Australia, mendasari materi pelatihan mereka sepenuhnya atas materi dari Inggris dan Wales (korespondensi pribadi). Negara lain, seperti Selandia Baru, hanya mengambil beberapa gagasan dasar dan menambahkannya ke dalam materi pelatihan yang sudah ada (lihat, misalnya, Program Pelatihan CIB - Wawancara Investigatif (CIB 005), Akademi Polisi Selandia Baru, September 2003).

DESKRIPSI

P - Planning and preparation (Perencanaan dan persiapan)

Hanya sedikit orang yang memiliki praktik wawancara yang cukup sehingga dapat melakukan wawancara berkualitas tinggi tanpa harus meluangkan waktu untuk mempersiapkan diri. Literatur yang ada sangat jelas menyebutkan bahwa langkah pertama untuk wawancara yang efektif adalah persiapan (misalnya Hodgson, 1987; Meyer & Morgan, 2000; Ord et al, 2004; Shaw, 1996b). Tanpa ini, banyak wawancara yang akan gagal bahkan dari sebelum dimulai. Shepherd menyebutnya sebagai pewawancara “terburu-buru untuk melakukannya dengan salah” (1991, hal. 54).

Menurut CPTU (1992a, hal. 1 dikutip oleh Milne & Bull, 1999, hal. 159) perencanaan adalah “proses mental untuk mempersiapkan diri melakukan wawancara” dan persiapan adalah “mempertimbangkan apa yang harus disiapkan sebelum wawancara [termasuk] hal-hal

seperti lokasi, lingkungan, dan administrasi”. Seperti yang disampaikan oleh Ord et al (2004, hal. 57):

“Semakin banyak informasi yang dimiliki pewawancara sebelum wawancara, semakin ia dapat mengendalikan jalannya wawancara, memastikan wawancara menuju arah yang benar. ... waktu yang tersedia bermacam-macam, tetapi waktu yang diinvestasikan untuk persiapan dan perencanaan akan meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan pewawancara, dan dalam jangka panjang, dapat menghemat waktu.”

Berbagai komentator (misalnya: McGurk et al, 1993; Milne & Bull, 1999; Ord et al, 2004) menggarisbawahi unsur-unsur penting untuk perencanaan yang baik, yaitu—

- memahami tujuan wawancara
- memperoleh sebanyak mungkin informasi tentang kejadian yang sedang diselidiki, termasuk (untuk tersangka) informasi tentang orang yang akan diwawancara
- mendefinisikan sasaran dan tujuan wawancara
- memahami dan mengenali hal-hal yang harus dibuktikan
- menilai bukti apa yang tersedia dan darimana diperolehnya
- menilai bukti apa yang diperlukan dan bagaimana dapat memperolehnya
- memahami peraturan perundang-undangan dan panduan serta pertimbangan terkait
- mempersiapkan mekanika wawancara (penyajian alat bukti, logistik, tempat, peralatan berfungsi, susunan tempat duduk, dan lain-lain).

Ord et al (2004, hal. 3-5) menyarankan petugas yang melakukan penyelidikan untuk mengikuti ungkapan ‘investigasi dahulu baru wawancara’ daripada ‘wawancara lalu investigasi’, dan menekankan kerugian utama dari persiapan dan perencanaan yang buruk. Mereka mengatakan pewawancara:

- mungkin meninggalkan bukti penting
- mungkin tidak mengidentifikasi ketidakkonsistenan dan kebohongan
- mungkin memerlukan rehat yang sebenarnya tidak perlu untuk mengambil informasi lain
- mungkin harus melakukan wawancara tambahan dengan orang yang sama
- mungkin kehilangan kendali wawancara.

Sementara perencanaan adalah fitur utama dalam model PEACE dan telah ditegaskan oleh beberapa komentator Inggris (misalnya Milne & Bull, 1999; Shepherd, 1993; Williamson, 1994), bahwa fitur ini juga diakui oleh komentator Amerika sebagai langkah penting dalam wawancara investigatif (misalnya Walters, 2002; Yeschke, 1997; Zulawski & Wicklander, 2001)

E - Engage and explain (Terlibat dan jelaskan)

Tahap pembukaan ini sangat penting untuk mencapai keberhasilan wawancara. Petugas harus menyadari bahwa diwawancara polisi bagi sebagian orang adalah pengalaman yang menakutkan dan diperlukan periode untuk 'mencairkan suasana' agar orang tersebut merasa nyaman. Pewawancara tidak perlu 'berteman' dengan terwawancara. Akan tetapi, pewawancara perlu mengusahakan untuk terlibat dengan subjek wawancara agar dapat membangun hubungan kerjasama dan santai selama wawancara (Ord et al, 2004).

Tahap Terlibat dan Jelaskan ini juga dikenal sebagai tahap 'membangun hubungan'. Dan tahap ini dijelaskan dalam literatur Inggris dan Amerika sebagai faktor yang paling berpengaruh untuk memastikan keberhasilan wawancara, termasuk wawancara dengan tersangka (Baldwin, 1992; Ede & Shepherd, 2000; Milne & Bull, 1999; Shepherd, 1991; Walters, 2002; Yeschke, 2003).

Tabel berikut merangkum langkah-langkah penting (diadaptasi dari Ord et al, 2004, hal. 15-19):

Menciptakan kesan yang baik sejak awal	"seorang pewawancara harus mengingat pesan yang dimuat dalam satu peribahasa kuno 'kita akan menangkap lebih banyak lalat dengan lapisan gula daripada menggunakan cuka'. Sikap sopan, ramah dan pengertian tidak akan memberatkan tetapi dapat sangat membantu keberhasilan wawancara" (hal. 16)
Menyikapi terwawancara sebagai seseorang	"pewawancara yang meluangkan waktu untuk mencari tahu kebutuhan dan kekhawatiran orang yang akan diwawancara, dan mengambil langkah-langkah untuk menanganinya, akan lebih besar kemungkinannya untuk berhasil dalam wawancara daripada mereka yang tidak mau meluangkan waktu atau menolak mengusahakan untuk mencari tahu" (hal. 17)
Memahami perasaan	"Empati [artinya] berusaha mengerti

orang yang diwawancara	perasaan orang lain sambil tetap mempertahankan tujuan wawancara" (hal. 18)
Menjelaskan alasan wawancara	"Pentingnya terwawancara mengetahui bagaimana wawancara tersebut dapat membantu penyelidikan harus ditegaskan, agar terwawancara menyadari peranan penting mereka dalam penyelidikan dan mengapresiasi apa yang diminta dari mereka " (hal. 18)
Memberikan kerangka prosedur dan alasannya	"Setelah terwawancara memahami tentang prosedur dan alasan mengapa hal tersebut dilakukan dan harus diikuti agar dapat menggunakan informasi yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya, pemahaman mereka bisa membantu menghasilkan informasi yang kualitasnya lebih bagus" (hal. 18)
Jelaskan format wawancara	[sampaikan kepada mereka bahwa] "... terwawancara akan diminta memberikan keterangan dengan kata-kata mereka sendiri tentang kasus yang sedang diselidiki; pewawancara kemudian akan mencari klarifikasi atas keterangan tersebut dengan mengajukan pertanyaan lanjutan; terwawancara lalu akan diminta berkomentar tentang hal-hal yang belum terlalu banyak dibahas; pewawancara akan memberikan rangkuman lisan dari waktu ke waktu secara reguler untuk memastikan penafsirannya tepat" (hal. 19).

Tabel 5: langkah-langkah penting untuk memastikan keberhasilan tahap Terlibat dan Jelaskan dalam wawancara.

Materi pelatihan PEACE (contoh: CPTU, 1992a; NCOF, 2003) mendorong petugas untuk menggunakan waktunya melakukan tahap wawancara ini dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Ini adalah saatnya petugas menunjukkan pertimbangan mereka dengan:

- menunjukkan kepedulian terhadap keadaan orang yang akan diwawancara (apakah mereka mau minum, atau ingin tahu di mana letak kamar kecil)
- Menanyakan bagaimana mereka mau disapa (contoh: dengan nama panggilan, atau dengan gelar dan nama keluarga)
- memeriksa waktu yang tersedia (contoh: apakah saksi harus pergi ke suatu tempat pada waktu tertentu, atau apakah mereka memarkir kendaraannya di tempat yang berbayar)
- menenangkan mereka jika mereka terlihat gugup menghadapi prosesnya.

Pewawancara juga perlu menentukan beberapa aturan dasar (NCOF, 2003; Ord et al, 2004). Sebagai contoh, petugas harus menyampaikan kepada saksi (diantaranya):

- bahwa apa yang akan mereka sampaikan itu penting sehingga pewawancara harus melaporkan semuanya dan akan berusaha sebaik-baiknya agar tidak melupakan apapun
- tidak mengubah atau mengurangi apapun selama mereka bicara meskipun menurut mereka ada informasi yang tidak relevan untuk penyelidikan
- bahwa mereka akan bekerja keras, karena mereka lah yang memiliki informasi
- mereka jangan ragu-ragu untuk menyampaikan jika petugas:
 - mengajukan pertanyaan yang tidak mereka pahami
 - mengajukan pertanyaan yang jawabannya tidak mereka ketahui
 - salah memahami apa yang disampaikan saksi
 - mengajukan pertanyaan yang mengarahkan atau tidak patut
- bahwa setelah saksi memberikan keterangannya, petugas mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mencari klarifikasi.

Tahap ini berfungsi sebagai fase 'latihan' yang mana pewawancara membuat orang yang akan diwawancara terbiasa dengan apa yang nanti diharapkan dari mereka (Milne, 2004). Tahap ini juga memungkinkan pewawancara untuk menilai kemampuan komunikasi orang yang akan diwawancara dan menyesuaikan bahasa, struktur dan panjang kalimat, dan lain-lain

yang akan digunakan sehingga berada di tingkatan yang sama dengan orang yang akan diwawancara.

Ada beberapa wawancara yang mana petugas akan lebih kesulitan untuk 'terlibat dan jelaskan'. Wawancara dengan orang-orang yang rentan (contoh: karena usia, disabilitas, bahasa) biasanya sudah memiliki ketentuan proses khusus yang dapat diikuti oleh pewawancara. Di Inggris, ketentuan ini diatur dalam panduan "Mendapatkan Bukti Terbaik" dan juga dalam berbagai dokumen pelatihan (lihat, misalnya, CFIS 2004; NCOF, 2003).

Tetapi ada beberapa wawancara yang memberikan tantangan tertentu ketika ingin membangun hubungan, misalnya ketika terwawancara tidak jelas atau menghindari, menipu, tidak bersedia memberikan informasi, atau secara terang-terangan bersikap bermusuhan. Situasi-situasi seperti ini dapat ditangani dengan lebih baik jika pewawancara memperlakukan mereka dengan hormat, sopan dan profesional (Ord et al, 2004).

A - Account (Keterangan)

Ini adalah tahap yang mana pewawancara mendapatkan keterangan penuh dari orang yang di wawancara tentang kejadiannya. Tiga langkah utama dalam tahap ini adalah –

- memperoleh keterangan dari terwawancara tanpa interupsi
- memluas dan mengklarifikasi keterangan mereka
- jika diperlukan (misalnya, dengan tersangka), mempertanyakan keterangan yang diberikan (NCF, 1996).

Keterampilan bertanya sangat penting agar keterangan akhir yang diberikan akurat dan terpercaya (Milne & Bull, 1999). Penting untuk disadari pewawancara bahwa terwawancara dapat berubah dari tadinya bersedia bekerja sama jadi menolak bekerja sama dan sebaliknya, dan pewawancara harus bisa menyesuaikan diri (CFIS, 2004).

Untuk korban, saksi dan tersangka yang bersedia bekerja sama, wawancaranya akan menggunakan teknik ingatan bebas dalam wawancara tingkat rendah dan teknik wawancara kognitif yang disempurnakan untuk wawancara tingkat mahir. Untuk orang yang tidak mau bekerja sama, pewawancara biasanya akan mengandalkan teknik manajemen percakapan. (Hal ini akan dijelaskan dalam bab tentang 'teknik-teknik wawancara utama'). Karena pewawancara menyimak dengan seksama selama wawancara, dia harus bisa mendeteksi perubahan perilaku dan kalimat dari terwawancara dan menyesuaikan pendekatannya sesuai kebutuhan.

Untuk tersangka, panduan praktis CFIS (2004) menyarankan pewawancara untuk mengajukan semua pertanyaan terkait bahkan ketika jawabannya adalah 'Tidak ada komentar'. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekosongan yang mungkin digunakan oleh pembela di pengadilan. Di Selandia Baru, komentar dari pengadilan (lihat *R vs Halligan* [1973] 2 NZLR 158) menyarankan agar hal ini tidak lebih dari 4-6 pertanyaan.

Setelah mengizinkan subjek memberikan keterangan mereka (dengan penggunaan taktik yang tepat, seperti merangkum secara berkala, mendorong upaya subjek untuk mengingat, menggunakan ADVOKATE untuk menilai bukti identifikasi saksi, dan sebagainya), pewawancara mungkin harus mengklarifikasi atau mempertanyakan keterangan tersangka. Bisa saja hal ini dilakukan karena petugas masih belum jelas tentang sesuatu yang dikatakan oleh terwawancara, atau karena informasinya tidak konsisten dengan bukti lain yang dimiliki petugas (MPS, 2001).

Panduan CFIS (2004) dan dokumen-dokumen lain (contoh: NCF, 1996) menekankan pada pentingnya fase mempertanyakan ini dalam mewawancarai tersangka. Sementara petugas pewawancara harus selalu siap mempertanyakan hal-hal yang tidak konsisten dalam keterangan, tetapi hal ini dapat direncanakan sejak awal dengan cara menyimpan informasi untuk menguji apa yang akan disampaikan oleh orang tersebut.

Petugas dapat terbantu dengan mengetahui saran yang diberikan oleh Ede dan Shepherd (2000) kepada pengacara pembela untuk mengatasi "masalah-masalah kritis" dalam fase bertanya pada saat wawancara tersangka. Mereka berkata praktik yang ada ternyata tidak mencerminkan filosofi etis dari model PEACE, misalnya: kebutuhan berpikiran terbuka, dan lain-lain. Kenyataannya, mereka mengatakan pewawancara cenderung bersikap defensif, dan terlibat dengan cara "bertanya yang dominan, membatasi dan menekan", dan lebih termotivasi dengan dorongan mendapatkan 'pengakuan' (hal. 145-148). Mereka menjabarkan fitur-fitur wawancara yang dapat dipertanyakan menurut bab 76 dan 78 dari PACE, termasuk petugas yang membatasi kemampuan tersangka untuk menanggapi pertanyaan sugestif, cara-cara interogasi, atau membingkai jawaban tersangka agar sesuai dengan keyakinan petugas, dan salah menafsirkan sesuatu sebagai fakta.

Evaluasi berkala terhadap wawancara polisi di Inggris dan Wales (contoh: Baldwin, 2002; Milne & Bull, 1999; Clarke & Milne, 2001) tidak banyak menemukan contoh taktik yang dijelaskan oleh Ede dan Shepherd (2000). Namun demikian, kenyataannya, pengadilan terus memutuskan beberapa bukti wawancara tidak dapat diterima yang menyiratkan bahwa penggunaan taktik seperti itu dapat terjadi dan memang sudah terjadi.

C - Closure (Penutup)

Hasil evaluasi terkadang menemukan bahwa petugas sering terburu-buru mengakhiri wawancara (Clarke dan Milne, 2001). Padahal, tahap penutupan ini harus dilakukan dengan sama lengkapnya dan sama efektifnya dengan tahap lain. Tahap ini harus dipikirkan bahkan sejak tahap perencanaan awal (Milne & Bull, 1999). Tujuan penutupan yang efektif adalah untuk:

- memastikan ada kesepahaman bersama tentang apa yang terjadi (dengan meninjau dan merangkum keterangan yang diberikan)
- Memverifikasi bahwa semua aspek sudah cukup dibahas (dengan memeriksa bahwa terwawancara sudah memberikan semua informasi yang bisa dan mau mereka berikan)
- Jelaskan apa yang akan terjadi berikutnya (dengan memberikan informasi yang cukup tentang tahap berikutnya dalam proses, misalnya jelaskan kepada saksi apakah mereka perlu datang ke persidangan atau tidak)
- Memfasilitasi sikap positif dengan menyediakan informasi akurat dan terpercaya di masa depan (hal ini berbeda tergantung apakah yang diwawancara saksi atau tersangka) (CFIS, 2004; NCF, 1996).

E - Evaluation (Evaluasi)

Tahap ini mengakhiri wawancara PEACE. Inilah saat yang mana pewawancara-

- memeriksa apakah sasaran dan tujuan wawancara telah tercapai
- meninjau penyelidikan setelah informasi baru yang didapatkan selama wawancara
- bercermin tentang seberapa baik wawancara yang dia lakukan dan mempertimbangkan perbaikan apa yang bisa dilakukan di kesempatan berikutnya (CFIS, 2004; MPS, 2001; NCF, 1996).

Milne dan Bull (1999) meragukan kemungkinan atau keefektifan langkah ketiga mengingat kultur polisi yang sangat kuat mencegah petugas mengenali kekurangan wawancara mereka atau mengakui mereka tidak terlalu percaya diri. Keraguan ini juga terlihat dalam temuan Baldwin (1992) yang menyatakan bahwa petugas polisi biasanya lemah dalam mengevaluasi kemampuan wawancara mereka sendiri.

IMPLEMENTASI

Paket pelatihan PEACE selama satu minggu yang dikembangkan pada tahun 1992 bertujuan membantu petugas polisi meningkatkan relevansi, kelengkapan dan reliabilitas informasi yang diperoleh dari wawancara (Shaw, 1996a). Pelatihan ini merupakan gabungan antara teori dan praktik, dan melibatkan

berbagai alat bantu mengajar seperti skenario dalam bentuk rekaman video (contoh: perampokan toko), simulasi TKP (contoh: laporan tentang kemalingan), dan menggunakan aktor untuk menjadi tersangka dan saksi. Hal ini memberi siswa kesempatan untuk berlatih hal-hal yang sudah mereka pelajari (Rigg, 1999). Niat awalnya adalah memberikan kursus ini ke petugas polisi yang sudah bertugas dua sampai enam tahun. Tetapi karena mendapatkan sambutan yang sangat baik dan segera terbukti bermanfaat, akhirnya paket pelatihan ini diperluas untuk semua staf operasional.

APAKAH MODEL PEACE BERFUNGSI?

Clarke dan Milne (2001, hal. 127) mengutip Roger Gasper, manajer tim pengembangan yang bertanggung jawab mengenalkan PEACE di Inggris dan Wales, berkata "Hanya ada sedikit kegiatan [yang pernah dilakukan] yang ukurannya bisa dibandingkan dengan kegiatan ini". Mengingat betapa besarnya pekerjaan yang dilakukan, tidak mengejutkan bahwa di sekitar delapan tahun pertama setelah model wawancara PEACE diperkenalkan, ada banyak sekali penelitian formal dan informal yang dilakukan tentang topik ini (Clarke & Milne, 2001).

Evaluasi pertama hasilnya cukup positif (McGurk, Carr & McGurk, 1993), menemukan bahwa pengetahuan dan keterampilan wawancara meningkat dan kemajuan ini tetap ditemukan pada saat dilakukan penilaian lanjutan enam bulan kemudian. Pada umumnya, evaluasi berikutnya cenderung menggarisbawahi sejumlah masalah yang sama dalam penggunaan dan supervisi model ini (Milne & Bull, 1999). Sementara ada kesepakatan umum bahwa PEACE memberikan kerangka kerja yang sangat baik untuk wawancara investigatif dan prinsip-prinsipnya terpercaya (Shaw, 2002), masih ditemukan secara luas bukti teknik bertanya yang buruk, lemahnya keterampilan komunikasi antar individu, kurangnya dukungan untuk pelatih, rendahnya kendali mutu wawancara dan lain-lain (Clarke and Milne, 2001).

Evaluasi yang dilakukan pada tahun 1994 oleh HMIC (Her Majesty's Inspectors of Constabulary - Instruktur Polisi Kerajaan) menemukan kurangnya konsistensi dalam pelatihan PEACE di antara kesatuan. Hal ini sebagian besar disebabkan karena perbedaan dalam hal durasi dan materi pelatihan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses wawancara seperti persyaratan hukum baru dan panduan hukum (Shaw, 1996a).

Hasilnya, dibentuklah tim proyek kedua, yang merevisi dan memutakhirkan paket pelatihan PEACE dan merumuskan ulang cara pengajarannya (Shaw, 1996a). Diantaranya, istilah 'wawancara kognitif' dan 'manajemen percakapan' dikeluarkan dari materi pelatihan untuk mengurangi jumlah penamaan atau label yang digunakan (Clarke & Milne, 2001). Dalam

beberapa tahun ke depan, program yang disempurnakan ini kemudian dilengkapi dengan upaya intensif dari kelompok-kelompok pelatih, seperti Fakultas Pidana Nasional di Akademi Kepolisian Bramshill, dan nasihat dari para pakar yang dipublikasikan seperti Gary Shaw (sebagai contoh, lihat, 6 seri artikel beliau yang dimuat di Police Review 5 Januari -16 Februari 1996).

Tidak diterima sepenuhnya

PEACE tidak sepenuhnya diterima. Misalnya, psikolog Eric Shepherd (1996) menyampaikan keraguannya tentang kebijaksanaan dan kesempatan diterapkannya peran "quasi-inquisitorial" dari petugas penyelidik. Akan tetapi, kritiknya lebih ditujukan untuk keseluruhan proses penyelidikan bukan pada wawancara saja. Salah satunya dikatakan bahwa:

"Direktur Pelatihan Polisi dan penelitian resmi telah memberikan manajemen polisi tentang fakta-fakta yang tidak diketahui masyarakat umum - kemampuan penyelidikan di seluruh kesatuan kepolisian sangat rendah; perilaku yang tidak sistematis dan manajemen waktu yang buruk adalah hal yang lazim; sistem dasarnya tidak memiliki cara yang dapat memastikan standar profesional untuk pengumpulan informasi, evaluasi dan diseminasi oleh petugas. ... sikap yang ditunjukkan petugas yang bertugas sayangnya sangat mencerminkan ketidakpedulian mereka tentang cara mengamankan TKP, menggeledah, dan dalam mengidentifikasi serta menyimpan barang bukti" (hal. 14).

Penasihat hukum juga diberikan peringatan untuk mewaspadaai PEACE. Contohnya, pengacara Ed Cape (1995) membuat panduan untuk praktisi dalam mewakili klien dan menangani pelanggaran PACE 1984 dan Aturan Praktik. Dalam panduan tersebut beliau mengatakan pengacara pembela atau penasihat hukum harus mencegah jika pewawancara berusaha membangun hubungan dengan tersangka dengan cara menanyakan tentang keadaannya, hobi, keluarga, dll. Beliau menyarankan agar petugas diingatkan tentang Peraturan C, ayat 11.1A yang isinya menyatakan wawancara bertujuan menanyai tersangka tentang suatu pelanggaran. Jika petugas tetap meneruskan taktik tersebut, Mr Cape menyarankan agar pembela menasihati kliennya untuk tidak menjawab (Rigg, 1999). Hal ini tidak disebutkan dalam materi pelatihan terbaru (yaitu NCOF, 2003) yang mungkin berarti nasihat ini tidak terlalu didengar atau tidak efektif. Evaluasi selanjutnya menemukan bahwa meskipun sudah ada upaya untuk menerapkan PEACE, pelatihan yang diterima petugas tentang wawancara investigatif tetap terbatas, sehingga dampaknya dalam performa di tempat kerja pun terbatas (Milne & Bull, 2003). Petugas di Inggris dan Wales, dan juga di negara lain, diharapkan untuk tetap belajar sambil bekerja atau dengan mengamati dan berbicara dengan

pewawancara yang sudah berpengalaman (Strongman, 1994; Walters, 2002). Pewawancara berpengalaman ini mungkin tidak menerima pelatihan lain selain pelatihan dasar yang sama dengan pewawancara baru. Seperti yang disampaikan Walters (2002, hal. 85): "Tidak ada jaminan bahwa penyidik senior memiliki keterampilan wawancara di atas rata-rata". Secara umum, pendekatan ini hanya melanjutkan kebiasaan lama yang buruk dan wawancara yang buruk.

GAGAL MEMENUHI HARAPAN

Pada akhir tahun 1990an, sudah jelas bahwa PEACE tidak berjalan sesuai harapan. Penyebabnya adalah:

- minimnya dukungan dan partisipasi dari pimpinan menengah dan atas (Gibbons, 1996)
- terbatasnya sumber daya yang tersedia bagi Fakultas Pidana Nasional untuk memelihara dan mengembangkan program tersebut (Smith, 2001 dikutip oleh Burbeck, 2001)
- Beberapa kriteria penting diterapkan secara tidak konsisten - seperti latihan wawancara yang lengkap dan melakukan banyak praktik wawancara (Shaw, 1996a)
- Para pelatih yang harus melatih peserta lain tentang model ini, juga baru saja menyelesaikan kursus pelatihannya (Milne & Bull, 1999)
- Tidak konsisten dalam pelatihan, ada beberapa hal yang dianggap tidak penting sementara hal yang lain terlalu ditonjolkan (Shaw, 2001)
- pada awalnya pelatihan PEACE dirancang hanya sebagai pengenalan, tetapi kemudian dibiarkan berlanjut sampai ke tingkat mahir tanpa ada struktur yang terkoordinasi (Burbeck, 2001)
- budaya polisi - tidak hanya lebih menganggap penting 'mendapatkan pengakuan' daripada menemukan 'kebenaran' atau informasi lain yang relevan, tetapi juga beranggapan wawancara tersangka lebih penting daripada wawancara saksi (Rigg, 1999)

Kekhawatiran tentang hal ini membuat Departemen Dalam Negeri dan Asosiasi Kepala Polisi Inggris dan Wales memerintahkan dilakukannya evaluasi penuh terhadap pelatihan PEACE. Evaluasi ini dilakukan oleh Dr Rebecca Milne dari Universitas Portsmouth dan mahasiswa S3 PC Colin Clarke dari Kantor Polisi Metropolitan (Clarke & Milne, 2001).

EVALUASI TAHUN 2001 ATAS PELATIHAN PEACE

Evaluasi Clarke dan Milne (2001) adalah suatu pekerjaan besar. Data diperoleh dari 6 kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales (mewakili campuran wilayah pedesaan dan perkotaan) dan meliputi:

- penilaian terhadap 177 wawancara tersangka yang direkam dan 75 wawancara saksi yang direkam tentang tindak pidana umum dan serius;
- informasi dari survei yang menanyakan (antara lain) apakah kepolisian memiliki kebijakan supervisi atau tidak, dan apakah petugas pewawancara dilatih tentang PEACE; dan
- informasi dari rekaman wawancara dengan berbagai orang dan kelompok.

Kualitas wawancara - saksi

Milne dan Bull (1999) mencatat bahwa selain George (1991) dan McLean (1992) hanya sedikit evaluasi yang meliputi wawancara saksi dan korban. Oleh karena itu, untuk memperkaya bidang ilmu ini, evaluasi Clarke dan Milne (2001) mencakup penilaian terhadap wawancara saksi. Mereka merancang agar 75 wawancara direkam secara audio (58 kejahatan umum dan 17 kejahatan serius, termasuk pembunuhan). Secara keseluruhan, mereka menemukan standarnya lebih rendah daripada wawancara saksi, dengan sedikit bukti bahwa petugas menggunakan teknik PEACE untuk meningkatkan kemampuan saksi mengingat.

Rata-rata wawancara berlangsung selama 50 menit (termasuk untuk menyiapkan keterangan tertulis) (minimum 8 menit dan maksimum 131 menit). Hanya seperempat dari waktu ini yang digunakan untuk benar-benar 'mewawancarai' orang tersebut (hal. 52). Hanya 16 persen wawancara saksi yang dilakukan di kantor polisi; sisanya 84 persen dilakukan di tempat yang tidak bisa dikendalikan oleh pewawancara (di rumah saksi, tempat kerja atau lokasi lain). Dalam keadaan ini, wawancara sering terganggu dengan berbagai interupsi dan gangguan (hal. 52). Sehubungan dengan hasil wawancara secara keseluruhan, hanya 29 persen pewawancara yang menangkap keterangan "penuh" dari saksi, 62 persen mendapatkan keterangan "parsial", dan 9 persen mendapatkan keterangan "singkat". Para penilai mengungkapkan kefrustrasian mereka saat mendengarkan rekaman karena teknik wawancara yang lebih baik akan bisa memperoleh lebih banyak informasi (hal. 53).

Tentang kualitas wawancara saksi, Clarke & Milne (2001) melaporkan sebagai berikut:

- P (*planning and preparation* / perencanaan dan persiapan) - 19% menunjukkan tidak ada atau hanya sedikit perencanaan; tidak ada yang dianggap menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang benar.
- E (*engage and explain* / terlibat dan jelaskan) - perilaku spesifik yang diharapkan pada tahap ini tidak dilakukan dengan benar misalnya hanya 16% yang memperkenalkan diri secara jelas dan profesional (26% tidak memperkenalkan diri sama sekali); hanya 5% yang menjelaskan tujuan wawancara dengan baik (32% tidak

- memberikan penjelasan sama sekali); hanya 1.8% yang menjelaskan dengan jernih apa yang akan terjadi (46% tidak mengatakan apapun tentang hal ini); dan 53% tidak menyebutkan bahwa wawancara adalah kesempatan untuk saksi menceritakan keterangan versi mereka.
- A (*account* / keterangan) - hanya 38% pewawancara yang benar-benar berusaha untuk memberikan saksi dan korban memberikan keterangan versi mereka tentang apa yang terjadi; hampir separuh wawancara (47%) hanya sedikit mengembangkan topik yang dibicarakan, dan 43% dinilai tidak membahas poin-poin yang penting. Meskipun tidak ada dari dua teknik berikut ini yang digunakan dengan baik atau sering, CM (manajemen percakapan) lebih sering digunakan daripada CI (keterangan bebas dan teknik sejenis).
- C (*closure* / penutup) - secara keseluruhan penutup dinilai rendah, contohnya 59% pewawancara tidak merangkum apapun yang telah disampaikan; 62% tidak menanyakan apakah orang yang diwawancara ingin menambahkan atau mengubah sesuatu; 83% tidak menjelaskan apa yang akan terjadi berikutnya.
- E (*evaluation* / evaluasi) - para peneliti hanya mendapatkan akses atas rekaman wawancara, sehingga tidak dapat menilai kualitas tahap evaluasi (E) wawancara.

Para peneliti mencatat bahwa cara yang digunakan kebanyakan pewawancara "teguh bertahan dengan pertanyaan dan jawaban rutin yang dipelajari dari standar wawancara polisi sebelum tahun 1992, sebelum naiknya PEACE" (hal. 113). Peneliti juga mencatat dampak negatif yang dialami oleh korban dan saksi karena ditangani oleh pewawancara yang tidak memiliki panduan formal dan alat bantu memori, dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki hal ini.

Rekomendasi untuk merekam wawancara saksi secara elektronik

Sebagai tambahan, Clarke dan Milne (2001) merekomendasikan untuk "merekam semua wawancara dengan saksi dan korban yang 'terkait dengan kejadian'" (hal. 111). Rekomendasi ini mendukung himbuan sebelumnya dari Rebecca Milne dan lain-lain (misalnya lihat Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999; Milne & Bull, 1999; Shepherd & Milne, 1999) agar polisi merekam secara elektronik wawancara dengan saksi. Para penulis ini berpendapat:

- merekam secara elektronik memungkinkan wawancara berlangsung dengan lancar dan dapat memfasilitasi perolehan informasi yang lebih akurat, terpercaya dan rinci dibandingkan ketika wawancara direkam dalam bentuk tertulis

- pentingnya keterangan saksi mungkin tidak akan diketahui terlebih dahulu sampai ketika saksi tersebut diwawancara; cukup umum menemukan orang yang pada awalnya diwawancara sebagai saksi lalu kemudian berubah menjadi tersangka sehingga pernyataan yang direkam akan memungkinkan penilaian yang lebih dekat tentang apa yang mereka katakan dan hal-hal yang belum dibahas oleh pewawancara pada awalnya.
- persiapan dan perencanaan wawancara tersangka akan sangat mengandalkan petugas pewawancara yang mengetahui apa yang disampaikan saksi - rekaman yang lebih otentik dan bukan keterangan tertulis adalah informasi terbaik
- hal ini dapat mengatasi potensi kerentanan saksi akibat pengaruh yang merusak dari metode penyelidikan yang tidak efektif atau tidak sesuai

Aspek ini dibahas secara lebih mendalam pada bab berjudul 'Teknologi dan Wawancara'.

Kualitas wawancara - tersangka

Dalam kaitannya dengan perencanaan dan persiapan (P), dan mengakui sulitnya menilai ini hanya dari melihat rekaman wawancara, peneliti melaporkan bahwa "pewawancara sering kali tidak menyadari lingkup kejadian yang sebenarnya, seperti tidak menyadari hal-hal yang harus dibuktikan tentang suatu pelanggaran, dan di beberapa kasus mencari atau membaca catatan selama wawancara" (hal. 34)

Dalam kaitannya dengan terlibat dan jelaskan (E) mereka melaporkan bahwa "pewawancara pada umumnya mematuhi prasyarat hukum tentang wawancara dengan cara yang jelas dan profesional, meskipun memeriksa pemahaman mereka tentang alasan persyaratan tersebut masih menjadi masalah". Peneliti juga mengatakan bahwa pewawancara hanya memberikan sedikit informasi tentang tujuan wawancara dan apa yang akan terjadi, sehingga "menghambat terbangunnya hubungan" (hal. 36).

Tahap keterangan (A) menghasilkan hasil yang beragam. Meskipun penggunaan teknik-teknik PEACE yang utama seperti merangkum, menghubungkan dan mempertanyakan dianggap lemah, dan pertanyaan yang diajukan biasanya berupa pertanyaan terbuka dan tertutup, tetapi pewawancara dinilai "memiliki kepercayaan diri, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, dan pintar dalam mempertahankan terwawancara fokus pada topik-topik yang relevan" (hal. 39).

Dalam hubungannya dengan tahap penutup (C), hanya sedikit pewawancara yang memberikan rangkuman yang bagus tentang apa yang sudah disampaikan, tetapi tiga perempat dari pewawancara menawarkan kesempatan kepada terwawancara untuk

menambahkan, mengubah atau memperbaiki rangkuman yang diberikan. Secara keseluruhan, hanya 16% wawancara yang dinilai "memberikan penutup yang jelas dan profesional", dengan persentase yang sama dinilai "tidak memberikan penutup yang jelas" (hal. 39).

Rekaman wawancara tidak memungkinkan peneliti menilai kualitas tahap 'evaluasi' (E) wawancara.

Kualitas keseluruhan

Clarke dan Milne (2001) menyimpulkan bahwa kualitas wawancara secara keseluruhan telah membaik setelah studi inovatif oleh John Baldwin tahun 1992. Mereka mengatakan "ada bukti nyata" (hal. 100) "bahwa sejak PEACE diperkenalkan ada peningkatan etos kerja dan pendekatan etis dalam wawancara". Namun demikian, mereka menyimpulkan, masih ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam kaitannya dengan wawancara saksi.

DAMPAK PELATIHAN PEACE

Wawancara yang dinilai oleh Clarke dan Milne (2001) dilakukan oleh petugas yang pernah berlatih tentang PEACE dan yang belum. Peneliti menyadari bahwa bahkan petugas yang belum pernah berlatih PEACE sekalipun sudah pernah mendengar tentang model PEACE.

Dalam kaitannya dengan wawancara korban dan saksi, mereka menemukan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam durasi, hasil, atau perilaku wawancara yang diukur dalam studi ini. Kedua kelompok dinilai setengahnya 'membutuhkan pelatihan' dan setengah lainnya 'memuaskan'. Hanya 2 pewawancara yang dinilai 'memiliki keterampilan'. Ternyata fakta bahwa beberapa petugas telah menerima pelatihan PEACE tidak membawa perbedaan apapun terhadap kemampuan mereka untuk mewawancarai saksi.

Dalam kaitannya dengan wawancara tersangka, keadaannya berbeda, yang mana 13% pewawancara dinilai 'memiliki keterampilan'. Secara keseluruhan, Clarke dan Milne (2001) menemukan bukti adanya transfer pelatihan PEACE. Tetapi, hal ini lebih karena upaya memenuhi persyaratan hukum dan bukan karena keterampilan komunikasi dan teknik-teknik wawancara. Mereka juga menemukan perbedaan durasi wawancara (23 menit untuk petugas terlatih dibandingkan dengan 17 menit bagi petugas yang tidak terlatih). Temuan ini menafikan pendapat umum yang sering dikutip oleh petugas bahwa wawancara PEACE membutuhkan waktu yang jauh lebih lama daripada cara tradisional (meskipun temuan ini bisa juga mencerminkan bahwa hanya sebagian kecil pewawancara yang dinilai memiliki keterampilan).

Peneliti juga menafikan pandangan yang beranggapan model PEACE ini tidak fleksibel. Mereka mengatakan

"masalahnya ada pada penafsiran PEACE. Tampaknya ketika menjelaskan model ini, para pelatih menyajikannya dalam bentuk proses linear dan bukan sebagai alat bantu yang fleksibel yang didorong penggunaannya dalam "Panduan Praktis tentang Wawancara Investigatif" [NCF 1998]" (Clarke & Milne, 2001, hal. 98).

Peneliti merekomendasikan revisi komprehensif terhadap panduan, supervisi dan pelatihan PEACE. Mereka menyarankan hal ini melalui struktur pelatihan empat tahap yang berlangsung sepanjang karir polisi:

- Tahap 1 – untuk polisi magang (pelatihan dasar dan 2 tahun pertama)
- Tahap 2 – program pengembangan yang terus-menerus dilakukan untuk semua petugas (berseragam dan detektif)
- Tahap 3 – pelatihan spesialis (saksi anak-anak, serangan seksual serius, saksi rentan, wawancara saksi yang memerlukan keterampilan wawancara kognitif, dan wawancara tersangka tingkat mahir)
- Tahap 4 – penasihat wawancara (pewawancara piawai yang memberikan nasihat dan membantu merencanakan strategi wawancara di tingkat lokal dan selama penyelidikan kasus kejahatan besar)

SUPERVISI

Clarke dan Milne (2001) menemukan bahwa wawancara yang membaik diperoleh dari adanya supervisi, meskipun ketika hal tersebut dilakukan secara ad hoc. Hal ini mendukung penelitian terdahulu yang menyarankan supervisi sebagai bagian penting dalam keberhasilan wawancara investigatif. Penelitian utama tentang subjek ini dilakukan oleh Janet Stockdale (1993), yang memiliki premis dasar bahwa polisi harus menjelaskan tujuan dari wawancara. Beliau membayangkan bahwa seperti halnya fungsi dasar polisi yang lain, polisi akan membutuhkan mekanisme untuk memantau dan memperbaiki standar wawancara (Williamson, 1994).

Penelitian Stockdale terhadap lima kesatuan di Inggris & Wales menemukan bahwa masalah yang dihadapi oleh pewawancara diperburuk dengan fakta tidak adanya supervisor/penyelia yang melakukan pemantauan, supervisi atau penilaian berkala. Terlebih lagi, banyak supervisor/penyelia tidak memiliki kredibilitas di hadapan bawahannya dan gagal mendemonstrasikan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan supervisi dan kendali mutu yang efektif (Stockdale, 1993).

Berdasarkan penelitiannya, Stockdale mengatakan diperlukan perubahan organisasional dan kultural yang cukup besar. Beliau mengidentifikasi sejumlah indikator kinerja yang dapat digunakan untuk menilai mutu

wawancara dan memberikan beberapa rekomendasi khusus untuk pelatihan (Williamson, 1994). Rekomendasi ini kemudian diambil oleh Pusat Satuan Perencanaan dan Pelatihan (Harrogate, Inggris) dan diimplementasikan pada pertengahan tahun 1990an sebagai tambahan untuk implementasi model wawancara PEACE secara umum (*korespondensi pribadi*).

Pengungkapan laporan supervisi

Menurut Clarke dan Milne (2001, hal. 11) “kepolisian memiliki pandangan ganda tentang implementasi supervisi karena adanya anggapan bahwa laporan supervisi akan diberikan ke pengacara pembela apabila kasusnya dibawa ke pengadilan”. Meskipun penulis dan banyak pihak lainnya yang berargumen bahwa ketakutan ini dikalahkan oleh keuntungan memiliki sebuah sistem yang memungkinkan polisi untuk mengidentifikasi potensi masalah yang dihadapi oleh wawancara sebelum kasusnya disidangkan, daripada dikejutkan di pengadilan, hanya sedikit kesatuan yang mengimplementasikan rekomendasi supervisi (Clarke dan Milne, 2001).

Kurangnya dukungan

Penelitian lain terus menekankan pentingnya mendapatkan dukungan dan panduan dari atasan (contoh Collier & Styles-Power, dikutip dalam Clarke & Milne, 2001). Akan tetapi, sampai pada tahun 2000, sudah jelas bahwa pelatihan yang ada untuk manajer dan supervisor/penyelia hampir tidak ada pengaruhnya dan dukungan terhadap kinerja dan di tempat kerja (Clarke & Milne, 2001). Sehingga, tidaklah mengejutkan bahwa dalam survei tahun 2001 ditemukan hanya 13 dari 43 kesatuan yang memiliki pelatihan untuk supervisi wawancara (Shaw, 2001).

Aspek ini tampaknya merendahkan keberhasilan PEACE (Burbeck, 2001). Seperti yang dikatakan Shepherd (1991, hal. 58): “Semua ini tidak ada gunanya jika praktik tidak dipasangkan dengan kebijakan dan janji. ... Organisasi harus memastikan para pimpinan menunjukkan perilaku yang sesuai”. Clarke dan Milne (2001) menasihati bahwa jika supervisi wawancara tidak diberikan prioritas tinggi – termasuk dalam wawancara saksi – akan ada risiko kebijakan dianggap remeh, kesalahpahaman atau gangguan terhadap teknik, pemberian pesan yang bertentangan, dan petugas melakukan hal-hal yang tidak sesuai moral dalam wawancara agar mendapatkan hasil.

PENILAIAN FORMAL

Pada saat evaluasi Clarke dan Milne (2001) ada berbagai formulir penilaian wawancara yang digunakan oleh supervisor/penyelia di Inggris dan Wales, termasuk ‘Daftar Periksa Supervisor’ yang dikembangkan oleh Fakultas Pidana Nasional, Bramshill. Para peneliti, bersama-sama dengan

perwakilan dari 33 kesatuan kepolisian, mengembangkan satu instrumen spesifik yang mereka sebut sebagai ‘Behaviourally Anchored Rating Scale’ (Skala Peringkat berdasarkan Perilaku) (BARS). Instrumen ini diuji dengan menggunakan 4 contoh rekaman dan meminta supervisor/penyelia dari enam kesatuan untuk menggunakan formulir penilaian BARS (digunakan oleh 85 petugas) atau Daftar Periksa Supervisor-nys NCF (digunakan oleh 84 petugas).

Selain bagian perencanaan dan persiapan dan mengajukan pertanyaan, tingkat reliabilitas antar penilai (atau kesepakatan antara mereka yang menilai wawancara) pada umumnya bagus, meskipun penilaian keseluruhan untuk judul kelompok (contoh: tahap ‘keterangan’) seringkali mengaburkan perbedaan pendapat yang terjadi. Sejumlah penilai berpendapat contoh perilaku yang tercantum dalam BARS membantu agar lebih jelas dan lebih konsisten, dan semakin dipraktikkan skalanya menjadi lebih mudah digunakan. Namun, sebagian besar penilai lebih memilih menggunakan daftar periksa daripada BARS. Peneliti menyimpulkan “penilaian di seluruh lingkup bidang ini merupakan suatu keterampilan yang sulit dikuasai dan menimbulkan masalah ... [dan] perlu ada yang dilakukan untuk memperbaiki BARS agar lebih ramah pengguna” (Clarke & Milne, 2001, hal. 94).

Kesatuan lain mengembangkan formulir penilaiannya sendiri. Misalnya, Kantor Polisi Metropolitan memiliki Borang 4100

“Wawancara Investigatif: mengembangkan keterampilan wawancara” yang diisi oleh supervisor/penyelia sambil mereka mendengarkan contoh rekaman wawancara. Borang ini menggunakan pendekatan pertanyaan yang menentang jawaban Ya/Tidak dan memberikann tempat untuk menuliskan umpan balik untuk petugas dan rencana aksi. Sama seperti hal di atas, Kantor Polisi Kent juga memiliki “lembar evaluasi wawancara yang direkam” yang kemudian digunakan sebagai bagian dari kursus wawancara tingkat mahir mereka. Borang ini memiliki 20 faktor yang dinilai dengan menggunakan skala 1 sampai 5 dengan nilai 5 diberikan ketika pewawancara melakukan semua faktor (contoh: terlibat, pertanyaan lanjutan, mendengar, dll) dan nilai 1 diberikan ketika pewawancara gagal melakukannya sama sekali.

Tabel yang menunjukkan berbagai indikator kinerja yang digunakan di beragam penelitian dan formulir penilaian yang digunakan kesatuan disajikan dan dibahas dalam bab tentang ‘pelatihan’. Masih belum jelas apakah ada upaya untuk mengembangkan suatu borang nasional.

PELANGGARAN PACE

Mereka yang menilai mutu wawancara tersangka untuk evaluasi Clarke dan Milne (2001) diminta untuk mengindikasikan apakah menurut mereka wawancara

tersebut akan melanggar pasal 76 dan 78 Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984; misalnya adanya perilaku yang menindas, kegagalan memberikan pertimbangan yang cukup atas kesehatan mental atau kerentanan seseorang, atau tidak memberitahukan atau menjelaskan kepada tersangka mengenai hak-haknya. Sepuluh persen sampel wawancara diidentifikasi kemungkinan melanggar PACE.

Semua ini melibatkan pewawancara yang diberikan peringkat “membutuhkan pelatihan” (hal. 40).

PENERAPAN YANG LEBIH LUAS

Poin penting yang disampaikan oleh Clarke dan Milne (2001) adalah bahwa PEACE memberikan suatu kerangka yang cocok untuk semua wawancara – baik yang informal seperti percakapan di pinggir jalan, atau yang resmi di kantor polisi atau di tempat lain. Contoh, semua upaya untuk mendapatkan informasi akan melibatkan, walaupun singkat, persiapan diskusi (P), upaya menjalin hubungan dengan seseorang agar orang tersebut bersedia bicara (E), mengizinkan mereka menyampaikan apapun dengan bebas serta mengklarifikasi dan mempertanyakan hanya jika perlu (A), menutup wawancara dengan merangkum dan memeriksa makna apa yang telah disampaikan dan orang tersebut mengetahui apa yang akan terjadi kemudian (C), dan meninjau arti penting dari informasi baru (E).

Poin-poin utama

1. Model PEACE dikembangkan oleh polisi dan digunakan secara luas oleh polisi di Inggris Raya dan negara-negara barat lain.
2. Memiliki landasan teori, tetapi juga diilhami oleh perspektif praktis dan pragmatis dari perpolisian sehari-hari.
3. Dari tahun 1993, kepolisian di Inggris dan Wales menjalankan program besar bernama pelatihan PEACE namun evaluasi tahun 2000 menunjukkan hal ini tidak sesuai dengan harapan. Diantaranya karena minimnya dukungan dari pihak manajemen, kurangnya kepercayaan dari supervisor/penyelia, implementasi yang tidak konsisten, dan keterbatasan sumber daya untuk mengembangkan dan memelihara program.

Poin-poin utama (lanjutan)

4. Evaluasi Clarke dan Milne tahun 2001 untuk Departemen Dalam Negeri menemukan transfer informasi dan ilmu yang buruk dari ruang kelas ke tempat kerja. Sebagai contoh, penelitian menemukan penggunaan teknik wawancara yang buruk untuk mendapatkan keterangan terwawancara, sedikit bukti supervisi rutin atas wawancara di tempat kerja, dan kesalahpahaman tentang model PEACE.
5. Evaluasi menemukan bahwa wawancara korban dan saksi jauh lebih buruk daripada tersangka. Hal ini diperkirakan terjadi terutama karena kurangnya panduan, anggapan bahwa wawancara saksi 'statusnya' lebih rendah dan gangguan yang terjadi ketika mewawancarai seseorang di tempat yang tidak bisa dikendalikan oleh petugas (contoh: rumah atau tempat kerja saksi).
6. Clarke dan Milne sangat merekomendasikan untuk merekam semua wawancara dengan korban dan saksi yang 'terkait dengan kejadian'.

PENDAHULUAN

Wawancara, memiliki beberapa tujuan – forensik, klinis, sosial dan organisasional – dan masing-masing memiliki tekniknya sendiri-sendiri (Memon & Bull, 1999, hal. iii). Tidak ada yang namanya "satu-jawaban-untuk-semua" (Shaw, 2002). Penelitian menyarankan pewawancara yang efektif adalah mereka yang:

- memiliki pengetahuan tentang psikologi wawancara dan eksperimen ilmiah
- telah menerima pengetahuan dasar tentang berbagai teknik praktis
- memiliki kesempatan praktik yang cukup dalam lingkungan belajar, dan
- memiliki kesempatan melakukan wawancara dalam kehidupan nyata di bawah supervisi (Milne & Bull, 1999; Milne & Bull, 2003; Yeschke, 2003).

Sebagian besar nasihat tentang teknik wawancara berasal dari penelitian tentang wawancara secara umum. Misalnya, Hodgson (1987, hal. 2) yang memberikan masukan tentang wawancara di tempat kerja – misalnya untuk seleksi, penilaian, konseling, mendisiplinkan staf – semuanya memiliki empat fitur utama:

- perencanaan dan persiapan
- mendengar dan mengamati
- bertanya dan mengajukan pertanyaan lanjutan
- penilaian dan pengambilan keputusan

Ini adalah langkah-langkah yang sama yang disarankan untuk interogasi polisi di AS (contoh: Einspahr, 2000; Walters, 2002) dan wawancara investigatif di Inggris dan Wales (contoh: Shaw, 2002).

Bagian ini secara spesifik melihat pada faktor-faktor yang telah ditunjukkan untuk mendapatkan keterangan yang lengkap dan akurat:

- peran dan sifat 'mengajukan pertanyaan'
- wawancara kognitif yang disempurnakan
- wawancara ingatan bebas
- wawancara manajemen percakapan
- teknik-teknik bantuan umum
- teknik-teknik lain

1. MENGAJUKAN PERTANYAAN

Disepakati secara umum bahwa jenis pertanyaan yang

digunakan dalam wawancara investigatif, terutama pada tahap 'account (keterangan)', sangat penting untuk penyelidikan (contoh: Baldwin, 1993; Holmberg, 2004; Moston & Engleberg, 1993). Sehingga pewawancara harus memiliki pemahaman yang baik tentang:

- aturan dasar untuk bertanya
- jenis pertanyaan yang bermanfaat untuk wawancara dan kapan menggunakannya
- mengelola informasi yang didapat dari bertanya
- pertanyaan yang tidak sesuai untuk wawancara (Ord, Shaw and Green 2004).

Aturan dasar untuk bertanya

Banyak komentator yang menawarkan nasihat mereka tentang bertanya. Kerangka singkat tentang aturan dasar ini ditawarkan oleh Ord *et al* (2004):

Kosa kata	Bahasa yang digunakan harus sederhana, tidak bermakna ganda dan bebas jargon agar semua pihak dapat memahami maksudnya.
Relevansi	Setiap pertanyaan harus ada tujuan dan bukan hanya untuk mengisi waktu saja. Rencana wawancara yang baik dilengkapi dengan mendengarkan dengan seksama agar tidak perlu mengulang pertanyaan.
Kecepatan	Terwawancara harus diberikan waktu untuk memahami pertanyaan, memikirkan pengetahuan apa yang mereka miliki tentang hal tersebut, merumuskan jawaban mereka dan menyampaikannya.
Interupsi	Pewawancara harus belajar menekan dorongan untuk memotong atau menginterupsi terwawancara karena hal ini dapat mengganggu alur berpikirnya dan menghentikan arus informasi, dan berpotensi mencegah munculnya fakta penting.

Kontrol
Jika terwawancara keluar dari pembahasan inti, arahkan dia kembali dengan tegas dan pintar contoh: "Itu sangat menarik, tapi sebelum diteruskan, bisa kah kamu jelaskan apa yang terjadi ketika kamu pertama kali melihat orang yang bersikap mencurigakan di jalan?"

Kata 'apa' juga dapat bermanfaat untuk mengemas pertanyaan terbuka, seperti "Apa yang terjadi kemudian?" (Milne, 2004).

Pertanyaan lanjutan

Polisi Thames Valley, dan yang lain, (contoh: CFIS, 2004; Milne & Bull, 1999; Ord *et al*, 2004) juga menganjurkan penggunaan pertanyaan 'lanjutan' secara rutin yaitu pertanyaan yang dimulai dengan **What (Apa)**, **Where (Di mana)**, **When (Kapan)**, **Why (Kenapa)**, dan **Who (Siapa)** (pertanyaan '5 WH') karena biasanya pertanyaan ini akan mengundang penjelasan. Tambahkan juga pertanyaan dengan kata 'how' (bagaimana), karena pertanyaan ini meminta jawaban yang lebih dari satu kata. Panduan 'Wawancara Bukti' (Kepolisian Selandia Baru, 2004) menyarankan penggunaan 'how come' (bagaimana bisa) dan bukan 'why' (kenapa) ketika berbicara dengan anak-anak dan saksi rentan lainnya karena akan terdengar lebih tidak menuduh. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk menghadapi orang dewasa.

Tabel 6: Aturan dasar untuk bertanya (Diadaptasi dari Ord *et al*, 2004, hal. 23-26)

Jenis pertanyaan

Wawancara biasanya mengandung beberapa jenis pertanyaan. Beberapa dijelaskan di bawah ini.

Pertanyaan pembuka

Bagaimana mengemas pertanyaan pertama dalam tahap 'account (keterangan)' merupakan hal yang vital untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau informasi berikutnya. Penelitian menunjukkan beberapa pendekatan umum ternyata tidak efektif. Misalnya, Moston dan Engleberg (1993) menemukan 43% petugas yang membuka wawancara tersangka dengan pertanyaan yang spesifik tentang pelanggaran, atau dengan kata lain pertanyaan yang mengandung tuduhan langsung, pertanyaan yang mencari pengakuan atau pertanyaan yang menjelaskan bukti tentang kesalahan orang tersebut dan tuduhan langsung. Taktik ini dianggap tidak membantu karena banyak tersangka yang akan langsung menyangkal pengetahuan atau keterlibatan mereka. Hal ini meninggalkan pewawancara dan terwawancara sedikit ruang untuk bermanuver (Baldwin, 1992) dan, seperti yang dijelaskan sebelumnya, jarang akan membuat tersangka mengubah ceritanya.

Pertanyaan terbuka

Sebaliknya, pertanyaan terbuka dianjurkan karena pertanyaan jenis ini akan mendorong orang untuk memberikan jawaban yang lebih panjang yang berarti lebih banyak informasi. Hal ini juga akan memberikan kesempatan kepada pewawancara untuk menilai kemampuan intelektual terwawancara, yang nantinya dapat "mendikte bagaimana sebaiknya wawancara dilanjutkan serta mengindikasikan dukungan yang mungkin diperlukan" (Ord *et al*, 2004, hal. 28). Materi pelatihan kepolisian Thames Valley (Inggris) (TVP, 2004) menganjurkan penggunaan TED untuk pertanyaan terbuka, yaitu

Tell me

(Katakan pada saya)

I'd like you to Explain

(Saya ingin anda jelaskan)

Can you Describe

(Bisakah anda gambarkan)

Sebagai catatan, pakar komunikasi dan bahasa tubuh dari Amerika, Stan Walters, mengingatkan agar pewawancara baru tidak terjebak beranggapan wawancara hanyalah satu kegiatan yang menanyakan pertanyaan "siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana":

"Konsep ini mengindahkan fakta bahwa perilaku manusia dan komunikasi antar pribadi adalah hal yang rumit dan berlapis-lapis, dan tidak dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan yang kaku dan terstruktur" (Walters, 2002, hal. 2).

Milne (2004, hal. 33) menggunakan istilah 'specific-closed' (tertutup dan spesifik) untuk jenis pertanyaan lanjutan yang seperti ini. Karena pertanyaan ini membatasi tanggapan dari terwawancara, hanya mengizinkan tanggapan dengan lingkup terbatas, misalnya "apa warna rambut pria itu?" Milne menyarankan agar pertanyaan seperti ini hanya digunakan setelah upaya untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan terbuka sudah gagal.

Pertanyaan Produktif/tidak produktif

Selain dari pertanyaan terbuka, dan pertanyaan lanjutan (pertanyaan 5 *Wh* dan Bagaimana), penelitian membedakan pertanyaan untuk wawancara investigatif menjadi pertanyaan baik dan buruk (Bull & Cherryman, 1995; Milne, 2004; Milne & Bull, 1999; Shaw, 1996; Shaw, 2002; Yeschke, 2003).

Jenis pertanyaan baik (atau produktif) meliputi:

- terbuka (seperti dijelaskan di atas)
- mencari tahu dengan pertanyaan lanjutan (seperti dijelaskan di atas)

- mencari tahu dengan gaung
- tertutup – jika sesuai
- meminta kejelasan/klarifikasi
- menegaskan
- merangkum
- mengulang – jika sesuai
- menghubungkan
- menentukan batasan – jika sesuai
- netral / tidak menghakimi
- reflektif
- meminta menunjukkan sesuatu
- pendek / ringkas
- logis
- singular (satu pertanyaan atau satu hal pada satu waktu).

Menggunakan pertanyaan yang produktif dapat menghasilkan informasi yang diperlukan. Sebaliknya, jenis pertanyaan yang buruk, berisiko atau kontra-produktif meliputi:

- mengarahkan (mengasumsikan atau menyarankan jawaban)
- tertutup – tidak sesuai
- lebih dari satu
- menyesatkan / tidak akurat
- dugaan atau hipotesis
- tidak netral / menghakimi
- negatif (contoh: “jadi kamu tidak tahu namanya, begitu?”)
- negatif ganda (contoh: “kamu tidak tahu kalau dia tidak ada di sana, begitu?”)
- rumit
- terlalu panjang
- dipaksa memilih (contoh: “Apakah A atau B?”)
- lebih dari satu konsep (“Seperti apa penampilan mereka?”)
- menuduh
- berasumsi (berdasarkan pendapat pewawancara)
- pengulangan – tidak sesuai
- menentukan batasan – tidak sesuai
- sarkastik / ironis
- anak pertanyaan (dikaitkan ke pertanyaan utama)
- pertanyaan menandai (“Kamu memang melihat senjatanya kan?”).

Mengelola jawaban atas pertanyaan

Menurut Ord *et al* (2004, hal. 32) sejumlah taktik akan membantu pewawancara untuk mengontrol wawancara dan mendapatkan informasi yang diperlukan:

- menunjukkan kepada terwawancara bahwa anda mendengarkan dan tertarik dengan apa yang dia sampaikan;
- mencatat selama wawancara;
- mencari tahu untuk informasi yang lebih detail;
- merangkum penjelasan terwawancara, dan

[memeriksa] pemahaman dan akurasi penafsiran anda.

Saran seperti ini juga ditemukan di bacaan lain, seperti Milne dan Bull (1999) dan NCOF (2003), namun Koehnken (1995) mengingatkan bahwa pencatatan harus dilakukan seminimum mungkin agar pewawancara tetap dapat bebas mencerna apa yang disampaikan terwawancara.

Milne (2004, hal. 37) menyarankan ketika terwawancara gagal menjawab beberapa pertanyaan secara berturut-turut, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Pewawancara yang tanggap akan mengelola ini dengan mengganti dengan pertanyaan yang lebih mudah.

Literatur Amerika

Penulis Amerika (contoh: Inbau, Reid & Buckley, 1986) mencatat banyak kekurangan dalam cara polisi bertanya: misalnya tidak terstruktur, penggunaan berlebihan dari pertanyaan yang membutuhkan jawaban pendek, dan secara keseluruhan cara pengambilan informasi yang buruk. Mereka berusaha membuat teknik yang dapat mengatasi kekurangan ini.

Diantaranya, mereka menganjurkan penggunaan pertanyaan yang ‘dinormalkan’ yang memberikan jalan keluar kepada tersangka. Pertanyaan ini mengandung kata dan ungkapan ajaib, seperti ‘kecelakaan seperti ini biasa terjadi...’, ‘siapa pun yang berada dalam situasi tersebut akan...’, ‘semua orang pernah melakukan kesalahan ...’, ‘remaja memang bisa menyusahkan.’ Dan lain-lain (Napier dan Adams, 1998, hal. 11). Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, pendekatan ini berdasarkan pada pengetahuan tentang mekanisme pertahanan yang paling sering digunakan tersangka.

“beberapa tema dan argumen secara universal tetap bernilai untuk melakukan interogasi yang berhasil. Konsep ini termasuk mengurangi bobot kejahatan, menyalahkan korban, menurunkan rasa memalukan dari tindakan, meningkatkan rasa bersalah, dan menyentuh harapan subjek untuk hasil yang lebih baik” (Vessel, 1998, hal. 3).

Menariknya disini, meskipun penulis ini (Vessel) membahas tentang interogasi sebagai cara untuk meyakinkan subjek agar mengatakan yang sebenarnya, tetapi saran yang diberikan menyiratkan penyidik mengawalinya dengan pandangan yang tegas tentang kebersalahan subjek:

“Pertama, penyidik membuat subjek menghadapi, baik secara paksa atau secara halus, fakta dan permasalahan tentang kejadiannya, dan biasanya menuduh mereka terlibat dalam kejahatan tersebut. Pada umumnya, subjek akan menolak tuduhan yang

diberikan. Kemudian, penyidik mulai menghentikan atau memotong penolakan ini. Mereka harus menggagalkan upaya subjek untuk menutupi kebenaran dengan terus menghentikan penolakan ini selama proses interogasi. Jika tidak, subjek akan semakin percaya bahwa mereka dapat menghindari dan tidak perlu mengakui kejahatan mereka” (Vessel, 1998, hal. 4).

Vessel (1998) mengalamatkan "metode efektif dan terbukti untuk menjamin keberhasilan interogasi" ini (hal. 4) pada hasil kerja yang berpengaruh dan sering dikutip dari John E. Reid dan rekan pada pertengahan tahun 1980an (lihat Inbau, Reid & Buckley, 1986).

Di antara teknik-teknik bertanya lain yang dianjurkan Inbau *et al* (1986), salah satunya adalah pertanyaan 'yang mengumpani'. Yaitu

“sifatnya tidak menuduh tapi menyajikan kepada tersangka kemungkinan adanya bukti yang mengaitkannya dengan kejahatan. [Tujuan] yang diharapkan adalah untuk menghanyutkan tersangka yang berbohong agar mengubah, atau setidaknya tidaknya mempertimbangkan untuk mengganti, penolakan kesalahan yang dilakukan pada awalnya” (hal. 68-69).

Teknik ini diadopsi secara meluas di AS dan oleh banyak petugas polisi di seluruh dunia. Yeschke (1993, hal. xix) menunjukkan pandangan umum tentang hal ini:

“Tidak ada cetak biru atas teknik-teknik ini, meskipun kami [persaudaraan psikologis] secara bertahap merumuskan panduannya. Kami berhutang pada pemimpin seperti John E Reid yang, melalui contoh pribadinya, menunjukkan bagaimana caranya mengungkapkan kebenaran tanpa paksaan.”

Diterima secara hukum

Penelitian berikutnya, justru berpendapat teknik-teknik ini sebenarnya menekan dan dapat mendorong pengakuan palsu (lihat Gudjonsson, 1999; Kassin, 1997; Milne & Bull, 1999). Meskipun temuan baru ini telah membuat komentator dan kepolisian di Inggris Raya untuk bergeser ke pendekatan wawancara yang lebih 'etis', literatur Amerika masih mengacu pada pandangan lama dan masih diterima pengadilan.

Amerika tampaknya berpendapat teknik-teknik ini masih dapat diterima karena mereka memberikan pembenaran moral dan psikologis atas tindakan tersangka, tapi bukan pembenaran hukum. Sehingga, tersangka tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya (Napier & Adams, 1998). Di saat yang sama, jika polisi benar-benar yakin bahwa tersangka bersalah maka sepertinya dapat dibenarkan kalau

mereka meningkatkan stres psikologis dan ketidakpastian dengan cara, tipu daya, dan pengelabuan (Abney, 1986). Sebagai contoh, Vessel (1998) menganjurkan

“... petugas dapat mengajukan pertanyaan yang menyelamatkan wajah sehingga subjek dapat mengaku tanpa kehilangan martabat mereka. [Pertanyaan] ini mencakup menanyakan kepada subjek apakah mereka merencanakan kejahatannya atau melakukan dengan spontan, dan apakah mereka mencuri untuk membiayai ketergantungan obat atau untuk membantu menafkahi keluarga” (Vessel, 1998, hal. 4).

Pendekatan Inggris dan Wales untuk bertanya

Apakah praktiknya berbeda di Inggris dan Wales? Memang telah tampak perubahan di dalam kebijakan dan praktik sejak disahkannya PACE tahun 1984, yang mana ada kontrol yang lebih ketat atas praktik wawancara polisi daripada sebelumnya. Tetapi, bukti terkini (contoh: Pearse & Gudjonsson, 1999, dikutip oleh Baxter, 2004) menunjukkan teknik-teknik yang mencurigakan ternyata masih digunakan. Tidak dapat dikatakan bahwa pendekatan Amerika terhadap interogasi tidak diterima atau tidak dipraktikkan oleh beberapa polisi Inggris. Bahkan, Milne dan Bull (1999, Bab 6) dengan keras berpendapat bahwa kasus-kasus pengakuan palsu dan ingatan yang baru ditemukan dapat diakibatkan karena cara bertanya dan perilaku selama wawancara yang tidak layak. Sama halnya dengan Sanders (1994) yang berpendapat bahwa cara bertanya yang buruk dapat menyebabkan tersangka terjebak untuk menyetujui mereka telah melakukan kejahatan (contoh: mereka telah 'mencuri') ketika "mereka seharusnya dapat menjelaskannya dengan cara lain, yang meringankan" (hal. 789).

Indikasi yang paling jelas tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam wawancara tersangka dijabarkan oleh Hakim Agung Mitchell dalam *R vs Heron* (1993):

“Polisi, tentu saja, tidak dilarang mengajukan pertanyaan kepada tersangka hanya karena tersangka memilih untuk tidak menjawab. Mereka tidak diwajibkan menerima jawaban tersangka begitu saja. Mereka juga tidak dilarang untuk pantang menyerah, mencari dan dan tegas dalam pertanyaan mereka. Jika mereka tidak mempercayai apa yang disampaikan, mereka berhak mengungkapkannya. Tetapi bukan berarti pantang menyerah kemudian boleh berkembang menjadi perundungan; ketegasan tidak boleh berkembang menjadi penghinaan atau mengajukan pertanyaan yang merendahkan, dan ketegasan ijin melakukan serangan lisan yang repetitif ... ketika harus membedakan antara interogasi mana yang layak dan tegas serta pantang menyerah dan interogasi yang menekan, ini hanya dapat diidentifikasi dengan hal-hal yang umum. Selain itu, bertanya yang pantang menyerah dan tegas harus tetap adil ... penilaian

terhadap satu wawancara harus melihat karakter keseluruhannya. Apakah pada umumnya adil, atau tidak adil?" (dikutip dalam CFIS, 2004, hal. 139).

Materi pelatihan untuk jenis pertanyaan

Putusan Heron (1993) bersamaan dengan pengembangan model wawancara PEACE dan komitmen untuk meningkatkan pelatihan wawancara (CPTU, 1992 a, b, c). Dalam buku mereka yang berpengaruh *Wawancara Investigatif – Psikologi dan Praktik* (1999, hal. 182) Milne dan Bull mengingatkan bahwa sebagian besar penelitian di bidang ini lebih melihat pada anak-anak dan orang dewasa yang rentan, dan mahasiswa dalam laboratorium, dan bukan pada "orang dewasa pada umumnya". Literatur Inggris terbaru (contoh: Ord *et al*, 2004) dan materi pelatihan untuk bertanya (contoh: CFIS, 2004) berdasarkan pada pengalaman nyata. Aspek pelatihan yang penting di Inggris dan Wales adalah kesempatan yang didapatkan petugas untuk berlatih. Usaha mereka kemudian dinilai oleh instruktur dan sesama siswa.

WAWANCARA KOGNITIF DAN WAWANCARA KOGNITIF YANG DISEMPURNAKAN

Latar belakang

Ed Geiselman dan Ron Fisher dan rekan, dari Amerika, mengembangkan 'wawancara kognitif' (WK) pada pertengahan 1980an sebagai cara meningkatkan kelengkapan dan akurasi keterangan saksi mata (Geiselman & Fisher, 1985). Walaupun, teknik ini sudah dikembangkan lebih jauh, tapi tetap dianggap sebagai teknik wawancara investigatif yang paling penting sampai sekarang (contoh: Milne & Bull, 1999).

Dasar teori untuk WK adalah penelitian eksperimen tentang memori yang menemukan ada beberapa jalur untuk mengingat suatu kejadian, dan informasi yang tidak dapat diakses dengan satu teknik mungkin bisa diakses dengan teknik lain (Memon & Higham, 1999), dan 'prinsip pengkodean spesifik' yang berhubungan dengan seberapa dekat hubungan antara pengkodean dan pengambilan (Milne & Bull, 1999).

Dasar praktisnya adalah analisis yang dilakukan Geiselman dan Fisher terhadap ratusan rekaman video wawancara polisi. Analisis ini menunjukkan petugas sering melakukan interupsi, terlalu banyak menggunakan pertanyaan dengan jawaban pendek, dan menyusun pertanyaan tidak sesuai (yaitu urutan yang sembarangan atau sudah ditentukan sebelumnya) (Gudjonsson, 1992).

Secara keseluruhan, penggagas WK membuat pengamatan penting terhadap wawancara polisi, dan menemukan bahwa kebanyakan petugas:

- bervariasi gaya dan teknik wawancaranya
- tampak tidak atau hanya sedikit menyadari keterbatasan praktik wawancara mereka

- tidak memiliki alasan atau penjelasan tentang cara mereka mewawancara saksi (Fisher, Geiselman & Raymond, 1987).

Selain itu, mereka juga mencatat keterangan terwawancara mengandung informasi yang sering kali tidak lengkap, ragu-ragu, tidak konsisten, atau apa yang dianggap ingin didengar oleh pewawancara. Dari sini, mereka menyadari adanya kebutuhan mendesak untuk prosedur wawancara investigatif yang dapat diandalkan (Milne & Bull, 1999).

Apa yang dimaksud wawancara kognitif?

Istilah 'wawancara kognitif' adalah suatu yang rancu, karena sebenarnya ini bukanlah suatu 'wawancara' yang ada awal, tengah dan akhir. Tetapi lebih merupakan empat perangkat teknik yang dirancang untuk digunakan terhadap saksi yang mau bekerja sama sambil mereka menjelaskan apa yang mereka lihat, alami atau ketahui (Geiselman & Fisher, 1985). Teknik ini dapat digunakan terpisah atau bersama-sama untuk menghasilkan ingatan yang lebih baik. Pada bentuk aslinya, WK fokus untuk memandu saksi melalui fitur pengambilan ingatan dalam memori:

Laporkan semua (LS)	Saksi diminta untuk melaporkan semua yang diingatnya tentang kejadian dan kondisi di sekitar kejadian tersebut (biarpun terpotong-potong dan terlihat tidak penting)
Urutan terbalik (UT)	Saksi diminta untuk mengingat kejadian dengan urutan atau kronologis tertentu (contoh: awal sampai akhir, urutan terbalik, maju atau mundur dari satu titik)
Ubah sudut pandang (US)	Saksi diminta untuk mengingat kejadiannya dari sudut pandang lain (contoh: dari sudut pandang orang lain yang ada di TKP)
Penegasan konteks (PK)	Saksi diminta untuk memfokuskan pikirannya pada konteks di sekitar kejadian (contoh: fitur-fitur lingkungan fisik, pikiran atau perasaannya pada saat itu, dan seterusnya).

Tabel 7: Empat teknik wawancara kognitif (Diadaptasi dari Milne dan Bull 1999, hal. 185)

Teknik ini dirancang untuk memfasilitasi ingatan dan memotivasi subjek untuk bekerja sama selama wawancara (Gudjonsson, 1992). Walaupun terlihat lugas, tapi sebenarnya ini cukup canggih. Pewawancara harus dilatih dengan baik untuk dapat menggunakannya dengan benar (Memon & Higham, 1999).

Pada awal perkenalan WK, beberapa petugas kesulitan dengan teknik ‘Ubah sudut pandang’ (US) dan mengeluarkannya dari materi pelatihan wawancara kognitif mereka (Gudjonsson, 1992). Akan tetapi, Milne dan Bull (1999, hal. 37) percaya bahwa tindakan tersebut sebenarnya tidak diperlukan. Tidak ada bukti yang menyatakan, jika digunakan dengan benar, US tidak dapat diandalkan. Menurut mereka, intinya adalah, teknik wawancara kognitif tidak dapat dilakukan dengan terburu-buru. Tidak hanya pewawancara harus menyediakan cukup waktu untuk menerapkan semua tetapi pewawancara juga harus menjelaskan apa yang mereka harapkan dari terwawancara (Milne & Bull, 1999). Pewawancara dan terwawancara harus bekerja keras, dan kedua pihak harus memahami hal ini (Fisher & Geiselman, 1992).

Walaupun teknik WK dirancang untuk digunakan terhadap korban dan saksi yang ‘bekerja sama’, Bull dan Cherryman (1995) berpendapat teknik ini juga dapat bermanfaat jika digunakan terhadap tersangka yang bekerja sama yaitu mereka yang bersedia membuat pengakuan. Aspek penting disini adalah subjek harus bersedia membantu pewawancara.

WAWANCARA KOGNITIF YANG DISEMPURNAKAN

Kerja WK pada awalnya berdasarkan pada uji laboratorium. Tetapi uji coba di kehidupan nyata menemukan korban kejahatan dan saksi sering kali mengalami kecemasan dan menunjukkan keterampilan komunikasi yang lebih rendah, dan lebih mengalami kebingungan tentang peran mereka dalam wawancara daripada subjek di laboratorium. Oleh karena itu, perbaikan WK dilakukan dan menghasilkan pengembangan Wawancara Kognitif yang Disempurnakan (atau WKS) (Gudjonsson, 1992).

Kali ini, prosesnya mencakup keseluruhan wawancara (tidak seperti WK) dan ditunjukkan pada Tabel 8 berikut (dari Milne & Bull, 1999, hal. 40).

Fase Kegiatan	
1	Menyambut dan menciptakan suasana yang personal Menjalin hubungan

2	Menjelaskan tujuan wawancara <ul style="list-style-type: none"> • fokus pada mengingat • <i>laporkan semuanya (LS)</i> • Kontrol transfer • Jangan mereka-reka atau membuat • Konsentrasi penuh
3	Memberikan kesempatan keterangan bebas <ul style="list-style-type: none"> • <i>penegasan konteks (PK)</i> • pertanyaan terbuka • jeda • tidak ada interupsi • perilaku non-lisan
4	Bertanya <ul style="list-style-type: none"> • <i>laporkan semuanya (LS)</i> • bertanya sesuai dengan kapasitas terwawancara • jangan mereka-reka atau membuat • tidak apa-apa untuk berkata “tidak tahu” • tidak apa-apa untuk berkata “tidak mengerti” • konsentrasi • mengaktifkan dan mencari tahu tentang gambar • pertanyaan terbuka dan tertutup
5	Ragam dan cakupan mengingat <ul style="list-style-type: none"> • Ubah urutan waktu (UT) • Ubah sudut pandang (US) • Fokus pada semua panca indera
6	Rangkuman
7	Penutup

Tabel 8: Struktur Wawancara Kognitif yang Disempurnakan

Pada intinya WKS masih memasukkan teknik WK yang asli, tapi kali ini tidak hanya mencakup keseluruhan proses wawancara tetapi juga memberikan instruksi tambahan untuk memastikan agar:

- (1) membangun hubungan
- (2) kontrol dipindahkan ke saksi
- (3) pertanyaan sesuai dengan ingatan saksi
- (4) saksi didorong untuk mengingat dengan fokus, dan
- (5) saksi didorong untuk menggunakan ingatan berupa gambar atau citra (Kebbell *et al*, 1999; Milne, 2004).

Pada intinya, pewawancara:

- menentukan irama wawancara, memastikan semua kekhawatiran saksi tentang lamanya wawancara, potensi hadir di pengadilan, intimidasi dari tersangka, dan lain-lain sudah ditangani sejak awal
- perkenalkan diri dengan benar untuk mencegah segala stereotip yang mungkin dimiliki saksi tentang polisi dan wawancara polisi
- mendorong saksi untuk berperan aktif dalam mengingat informasi dan tidak hanya menjawab pertanyaan pewawancara
- gunakan waktu untuk menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa yang diperlukan dari terwawancara
- gunakan teknik-teknik bantuan untuk mendapatkan ingatan terbaik dari terwawancara (Milne, 2004; Shaw, 1996c).

Pertanyaan penyelidikan yang penting (IIQs)

Rebecca Milne menambahkan satu fase antara fase 5 dan 6 di atas. Beliau menyebutnya 'pertanyaan penyelidikan yang penting'. Tahap ini diperkenalkan karena dianggap perlu selama wawancara untuk memperkenalkan informasi yang penting untuk penyelidikan tetapi belum disebutkan oleh terwawancara (Milne, 2004, hal. 54).

IIQs ditanyakan di akhir tahap keterangan karena dua alasan:

- karena terwawancara harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk memberikan informasi yang mereka miliki, dan
- karena IIQs mungkin bisa mengarahkan (pertanyaan mengandung informasi yang mungkin sudah atau belum diketahui terwawancara).

Konsentrasi

Dengan wawancara kognitif yang disempurnakan, pewawancara juga menekankan pada pentingnya konsentrasi (Gudjonsson, 1992; Memon & Bull, 1999). Hal ini meliputi:

- membuat saksi merasa santai dan nyaman
- memastikan tidak ada gangguan
- mendorong saksi untuk memfokuskan perhatian mereka ke gambaran mental internal
- biarkan saksi mengetahui bahwa tidak mengapa mereka mengatakan "tidak tahu" atau "tidak mengerti"
- memastikan tidak ada tekanan kepada saksi yang memaksa mereka terburu-buru mengingat informasi

Hal ini juga melibatkan teknik-teknik kognitif spesifik lainnya seperti Laporkan Semua (LS), Penegasan Konteks (PK) dan Kontrol Transfer (KT).

Saksi kemudian menjelaskan apa yang terjadi dengan kata-kata mereka sendiri, dan dengan ritme mereka

sendiri, tanpa interupsi dari pewawancara. Setelah mendapatkan ingatan tentang kejadian, dan merangkum kisah dasarnya, petugas dapat meminta korban atau saksi untuk menjelaskan kembali kejadian tersebut. Setiap ingatan akan memberikan informasi tambahan. Pewawancara akan terus merangkum selama wawancara untuk memastikan pemahamannya tepat. Hati-hati jangan berlebihan dalam merangkum – hal ini bisa dianggap terwawancara sebagai tanda pewawancara tidak mempercayainya (Milne, 2004).

Pewawancara kemudian membuat rangkuman final di saat akhir. Ini berarti memeriksa ingatan mereka sendiri tentang apa yang disampaikan saksi dan memberikan terwawancara kesempatan untuk menambahkan sesuatu (Milne, 2004; Shaw, 1996c).

WKS diketahui telah meningkatkan WK secara substansial. Dalam penelitian yang diadakan oleh Fisher dan Geiselman (1996), saksi film serangan dengan kekerasan, mengingat 50 persen lebih baik ketika diwawancara oleh siswa SMA yang sudah dilatih tentang prosedur yang disempurnakan daripada ketika diwawancara oleh detektif polisi berpengalaman yang terlatih menggunakan teknik wawancara kognitif asli.

MEWAWANCARAI KORBAN TRAUMA

Pada pertengahan dekade 1990an, ada laporan tentang petugas yang enggan menerapkan teknik wawancara kognitif karena khawatir membuat korban trauma lagi. Hal ini memicu Shepherd *et al* (1999) untuk melakukan modifikasi terhadap prosedur WK yang mereka sebut sebagai 'wawancara kognitif berjarak' (WK Berjarak) yang bisa dilakukan pada beberapa sesi yang dilakukan dengan jarak berapa hari atau bahkan beberapa pekan. Mereka berpendapat WK Berjarak dapat memperoleh informasi tentang kejadian tanpa meningkatkan kecemasan atau rasa takut. Mereka mendasari hal ini atas argumen meyakinkan dari Memon & Bull (1991) yang mengatakan WK memiliki potensi menyembuhkan (terapeutik)

Para penulis (Shepherd *et al*, 1999) mengklaim bahwa menggunakan WK Berjarak untuk mengakses dan mengingat suatu pengalaman memiliki potensi untuk memperoleh dampak terapeutik dan forensik. Mereka menggarisbawahi bahwa mereka tidak menyarankan petugas polisi berperan sebagai ahli terapi. Tetapi, petugas harus menyadari bahwa mereka bisa memenuhi kebutuhan atas informasi dan bukti sambil menunjukkan sikap yang terapeutik.

Shepherd dan rekan menyadari bahwa wawancara harus dilakukan oleh seseorang yang terlatih dan sangat mengerti teknik WK. Mereka juga harus benar-benar berkomitmen untuk merekam wawancara WK. Hal ini memungkinkan untuk dilakukannya analisis isi wawancara lisan dan non-lisan di kemudian hari, aspek

penting untuk mengingat “gangguan” yang muncul dari keterangan saksi yang mengalami trauma (Shepherd *et al*, 1999).

Tidak ada kritik terhadap WK Berjarak atau bahkan penyebutannya di materi pelatihan polisi terkini (contoh: CFIS, 2004). Akan tetapi, tiga hal ini perlu diperhatikan:

- i) wawancara berjarak sudah umum dilakukan, contoh: sebagian besar yurisdiksi polisi sudah mempertimbangkan untuk menyebar wawancara tertentu ke lebih dari satu sesi atau lebih dari satu hari, terutama ketika mewawancarai saksi rentan (lihat NCOF, 2003)
- ii) dalam buku mereka yang sangat praktis “Menjelaskan Wawancara Investigatif” Ord, Shaw and Green (2004) menghimbau bahwa “Pada kasus-kasus tertentu, mungkin tidak baik untuk saksi atau korban diminta mengulang kejadian yang sudah mereka alami. Misalnya, ketika seseorang menderita trauma berat. Penyidik harus mencari bantuan profesional dalam situasi tersebut” (hal. 66).
- iii) Ord dan rekan (2004) juga menganjurkan lebih baik menunda wawancara dengan korban atau saksi yang trauma “sampai kesan yang ditimbulkan dari teror kejadian tersebut telah berkurang sehingga saksi dapat berkonsentrasi dengan pikiran yang lebih stabil” (hal. 64). Hal ini berbeda dari Shepherd *et al* (1999) yang menganjurkan agar menggunakan WK Berjarak sesegera mungkin untuk menghindari kemungkinan gangguan stres pasca trauma. Dengan perbedaan sudut pandang ini, kehati-hatian menjadi wajib dengan tidak mengizinkan petugas yang bukan spesialis WK untuk menggunakan teknik WK kepada saksi yang kemungkinan mengalami trauma.

Menurut Rebecca Milne (*komunikasi pribadi*) pertimbangan utama sebelum memutuskan untuk mewawancarai orang yang trauma adalah sebagai berikut:

- prioritas penyelidikan
- faktanya adalah memori akan rusak dengan cepat setelah beberapa jam pertama lalu kemudian tidak mengalami perubahan besar setelahnya (jadi kalau sudah lewat beberapa jam, maka kecil kerugian yang akan muncul jika kita menunda sehari atau dua hari)
- keinginan korban (dia ingin dilibatkan dalam keputusan)
- risiko kontaminasi

WK dan WKS berpotensi meningkatkan kualitas dan kuantitas ingatan ketika mewawancarai subjek yang bersedia bekerja sama. Misalnya, dalam studi yang melibatkan saksi dan korban dari kehidupan nyata, Fisher, Geiselman and Amador (1989) menemukan bahwa detektif yang terlatih menggunakan WK

menghasilkan 63% lebih banyak informasi dari detektif yang menggunakan wawancara standar polisi. Uji coba lain dengan detektif polisi yang dilatih menggunakan metode yang berat ini menunjukkan mereka mendapatkan 50% informasi lebih banyak dari saksi daripada sebelum pelatihan, sementara angka kesalahan tetap wajar (Gudjonsson, 1992).

Koehnken, Milne, Memon dan Bull (1999) menemukan bahwa WK meningkatkan kemampuan mengingat sampai sekitar 35-45% untuk saksi dewasa, dan menganjurkan penggunaan ini untuk anak-anak usia tujuh tahun ke atas (dengan pengecualian teknik pengubahan sudut pandang). Studi lain, oleh Brock, Fisher dan Cutler (1999), menggunakan prosedur pengujian dua tahap (mewawancarai saksi 5 menit setelah mereka menonton rekaman kecelakaan, lalu 2 minggu kemudian) untuk membandingkan WK dengan protocol wawancara standar. Mereka menemukan bahwa WK menghasilkan 70% lebih banyak fakta yang benar daripada wawancara standar, dan tingkat akurasi yang setara dengan studi lain.

Studi lain yang dilaporkan di tahun yang sama, oleh Kebbell, Milne dan Wagstaff (1999), melakukan survei terhadap 96 petugas yang terlatih WKS dan 65 petugas yang tidak terlatih. Di antara petugas yang terlatih, teknik WK yang paling bermanfaat dan paling sering digunakan adalah: membangun hubungan, laporkan segalanya, mendorong konsentrasi, pertanyaan yang sesuai kapasitas saksi, dan penegasan konteks mental. Namun, teknik WK techniques yang paling jarang dipakai dan dianggap tidak terlalu bermanfaat adalah: mengingat dengan urutan berbeda, membayangkan gambar, mengubah sudut pandang dan kontrol transfer.

Harus diingat, bahwa Kebbell *et al* mengacu pada WK dan WKS seakan-akan mereka dapat digunakan bergantian dan bukan dua model yang berbeda. Temuan mereka bahwa beberapa teknik wawancara kognitif digunakan lebih sering dari teknik yang lain, mengamini studi sebelumnya (contoh: Clifford & George, 1996). Dua penjelasan diajukan oleh Kebbell *et al* (1999). Pertama, pewawancara mungkin perlu lebih banyak latihan supaya lebih percaya diri. Alasan lain adalah antusiasme teknik baru berkurang seiring berjalannya waktu. Yang lain menyarankan tidak perlu menggunakan semua teknik WK dalam sekali waktu (misalnya Brock *et al*, 1999). Sekali lagi, ketika ada acuan ke “teknik-teknik WK”, maksud penulis adalah cakupan teknik WKS yang lebih luas, bukan hanya keempat teknik WK saja.

Dari literatur (contoh: Kebbell, Milne & Wagstaff, 1999), hanya sedikit keraguan bahwa banyak petugas yang meyakini manfaat dari teknik wawancara kognitif yang disempurnakan. Mereka memberikan lebih banyak detail daripada wawancara standar, membuat polisi lebih mempercayai informasinya, membantu penyelidikan dan mencegah harus kembali lagi

bertemu saksi untuk meminta informasi. Pertimbangannya adalah pewawancara yang harus bertanya kepada dirinya sendiri "Apakah sesuai menggunakan teknik WK/WKS dalam wawancara ini?" dan jika ya, "Teknik yang mana?"

ADOPSI WAWANCARA KOGNITIF

Sejak awal, Fisher, Geiselman dan Raymond (1987a, hal. 185) menekankan pada perlunya polisi menyediakan pelatihan spesialis tentang wawancara kognitif.

"perubahan besar harus dilakukan di tingkat institusi, terutama untuk memperkenalkan pelatihan formal tentang ilmu wawancara dengan saksi yang bekerja sama. Hal ini harus dilakukan di tingkat pemula untuk polisi berseragam, dan juga pelatihan di tempat kerja untuk penyidik yang lebih berpengalaman".

Mereka menyarankan minimal 2 hari pelatihan WK, termasuk tentang:

- sulitnya saksi mata mengingat
- bagaimana memori bekerja
- tahapan dalam memori
- prinsip kognitif
- bagaimana WK dapat menolong meningkatkan memori
- bagaimana WK menolong meningkatkan komunikasi
- prinsip dan etika dasar untuk memandu pengambilan informasi
- teknik-teknik khusus untuk mendorong saksi dan korban memberikan informasi lebih
- bagaimana mencegah kesalahan (contoh: mengumpulkan informasi yang salah)
- bagaimana menilai kapan atau teknik WK yang mana yang sesuai.

Penggagasnya (Fisher & Geiselman, 1992) dan yang lain (contoh: Kebbell *et al*, 1999; Memon & Highman, 1999) berpendapat bahwa prinsip dasar dari mendengar, dan bahkan mengingat, tidak cukup. Petugas harus mampu menerapkan teknik-teknik ini secara otomatis di setiap wawancara. Tidak hanya pelatihan yang disupervisi itu penting, tetapi instruksinya harus menggunakan pendekatan 'blok bangunan' yang mana kemajuan satu keterampilan baru hanya bisa terjadi ketika keterampilan sebelumnya telah dikuasai (Fisher & Geiselman, 1992).

Selain lamanya pelatihan, Memon *et al* (1994) mengingatkan bahwa efektifitas juga tergantung pada kualitas pelatihan, latar belakang dan kemampuan siswa, sikapnya terhadap pelatihan, dan lain-lain. Beberapa pelatihan tingkat mahir, seperti 'wawancara

bukti' korban penganiayaan anak (contoh: RNZPC, 2005) mencerminkan temuan ini.

Keberhasilan awal dari WK menyebabkan didirikannya program pelatihan di tempat kerja di sejumlah lembaga penegak hukum lokal dan federal di AS, termasuk the Federal Bureau of Investigation (FBI). Polisi di Inggris dan Wales juga mencatat keberhasilan WK dengan saksi yang mau bekerja sama dalam kondisi penelitian dan memasukannya ke dalam tahap 'keterangan' dalam model PEACE (Memon & Bull, 1999).

'Paket wawancara nasional' (CPTU, 1992) di Inggris dan Wales disiapkan untuk polisi baru/kadet dan polisi yang sudah bertugas dan berlangsung selama lima hari. Dua harinnya dialokasikan untuk WK (Kebbell *et al*, 1999).

Pada kenyataannya, waktu yang diberikan untuk pelatihan wawancara kognitif kurang dari 2 hari. Di sebagian besar kasus, pelatihannya diberikan selama 4 jam (Memon & Bull, 1999). Menurut Memon dan Higham (1999) waktu yang diberikan ini tidak cukup untuk membuat petugas memahami tekniknya dan menerapkannya dengan efektif. Inilah sebabnya mengapa Clarke dan Milne (2001) tidak menemukan bukti WK di 83% wawancara yang mereka analisis untuk evaluasi Departemen Dalam Negeri. Hal ini dibahas lebih lanjut di bagian tentang wawancara PEACE dan pelatihan.

KETERBATASAN DAN PERMASALAHAN PRAKTIS

Penelitian yang melibatkan WK telah meningkatkan pemahaman kita tentang pentingnya strategi kognitif dan hubungan antara kognitif dan faktor-faktor sosial dalam memfasilitasi ingatan (Kebbell & Wagstaff, 1997). Tetapi, selain hasil positif ini, ada beberapa keterbatasan yang sudah dikenali (Milne & Bull, 1999, hal. 184). Yaitu wawancara kognitif:

- hanya efektif secara signifikan untuk kejadian-kejadian yang kaya rincian
- hanya efektif secara signifikan untuk wawancara yang dilakukan tidak lama setelah kejadian (walaupun ditemukan bahwa teknik ini juga efektif bahkan setelah ada jeda yang lama)
- mungkin tidak sama efektifnya untuk semua orang
- meningkatkan kemungkinan korban mengalami trauma ulang
- menuntut kemampuan kognitif yang lebih tinggi dari pewawancara (membutuhkan lebih banyak konsentrasi dan fleksibilitas daripada wawancara tradisional)
- dianggap dapat menyebabkan banyak kasus kesalahan ingatan di anak-anak, terutama jika digunakan secara sembarangan oleh pewawancara yang tidak terlatih (saat ini

penelitiannya belum memberikan hasil yang pasti).

Keterbatasan ini juga dilengkapi dengan sejumlah masalah implementasi praktis yang lintas sektor (Kebbell & Wagstaff, 1996; Kebbell, Milne & Wagstaff, 1999), diantaranya:

1. laporan petugas yang menyatakan teknik ini membutuhkan waktu lebih banyak daripada yang tersedia
2. persepsi bahwa WK yang makan waktu tidak praktis untuk kejahatan biasa
3. beberapa petugas berpendapat WK tidak ada bedanya dari pendekatan dasar yang terstruktur
4. petugas tidak menggunakan teknik-teknik dengan cara yang dijelaskan oleh penggagasnya

1. Tidak cukup waktu

Banyak ahli (contoh: Memon & Stevenage, 1996) yang mengingatkan bahwa penggunaan WK sering kali terkompromi karena tidak cukup waktu untuk melakukannya. Seperti yang dijelaskan oleh Yeschke (2003, hal. 22): "wawancara lebih mirip seperti lari maraton daripada lari jarak pendek". Ternyata berbagai penelitian menekankan persepsi petugas yang merasa mereka ditekan untuk mendapatkan hasil, dan 'kekurangan waktu' ini berpengaruh terhadap kualitas wawancara mereka (Bull & Cherryman, 1995). Shepherd *et al* (1999) mengklaim bahwa petugas ingin mendapatkan pernyataan dengan cepat. Sayangnya, ini berarti mereka dapat

"bereaksi secara negatif ... ketika tidak terdapat detail yang cukup seperti yang diinginkan petugas, ketika ada perbedaan dalam keterangan, ketika banyak materi yang tidak relevan, dan ketika orangnya terlalu banyak bicara dan menghabiskan waktu" (hal. 139).

Tekanan waktu ini juga tampaknya berdampak pada kemampuan petugas untuk mempersiapkan wawancara mereka dengan baik - lihat misalnya, studi Baldwin (1992) yang menemukan hampir satu pertiga petugas mengeluhkan hal ini.

Sehubungan dengan detektif, ada beberapa bukti yang mendukung argumen 'kurang waktu' ini. Maguire menunjukkan (1994) bahwa taktik Reskrim cenderung lebih bersifat reaktif dan sangat individualistik. Mereka bergantung pada hasil dari inisiatif petugas junior yang tidak disupervisi. Sehingga mengambil jalan pintas adalah praktik yang umum terjadi. Sama halnya dengan Morgan dan Stephenson (1994) yang mengklaim bahwa:

"dengan beberapa pengecualian ... organisasi dan budaya direktorat reserse dan kriminal tidak disiapkan untuk melakukan penyelidikan rutin dan metodis, baik sebelum atau setelah

penangkapan. Di sebagian besar, pekerjaan Reskrim tidak dapat diprediksi, sangat birokratis dan kurang sumber daya. Petugas terus-menerus ditekan dengan beban kasus yang semakin bertumpuk, perubahan administratif, kolega senior, serta politisi dan media, untuk menghasilkan" (hal. 9).

Penelitian Clarke dan Milne tahun 2001 menemukan rata-rata wawancara tersangka oleh petugas yang terlatih dalam PEACE berlangsung selama 23 menit dibandingkan dengan 17 menit yang dilakukan petugas yang tidak terlatih PEACE. Sehingga, sulit untuk menilai apakah 'kekurangan waktu' untuk mempersiapkan wawancara yang baik tersebut adalah masalah yang nyata atau cuma alasan. Memang benar waktu yang diperlukan untuk wawancara WK lebih lama daripada wawancara tradisional, tetapi seperti yang telah dijelaskan, WK tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam mayoritas wawancara saksi (Ord *et al*, 2004).

2. Kepraktisan

Pengalaman tampaknya mengajarkan banyak petugas untuk meyakini bahwa wawancara kognitif yang 'memakan waktu' tidak diperlukan untuk 'kejahatan' biasa (korespondensi pribadi dengan kepolisian Northumbria dan Thames Valley). Pandangan ini menyiratkan bahwa petugas merasa mereka diharuskan untuk selalu menggunakan 'wawancara kognitif'.

Jika demikian, hal ini menunjukkan buruknya pemahaman tentang WK (atau WKS). Memon dan Bull (1999) menganjurkan agar petugas menyadari bahwa WK adalah sekumpulan teknik yang digunakan pada saat meminta keterangan dalam wawancara yang lebih sulit, dan hanya dilakukan oleh petugas yang terlatih penuh. Teknik ini tidak dianjurkan untuk dilakukan dalam semua wawancara saksi. Ketika menjelaskan secara garis besar, keterampilan dasar yang harus dimiliki penyidik, Ord, Shaw dan Green (2004) - dengan gabungan pengalaman perpolisian 75 tahun - mengatakan yang diperlukan dalam sebagian besar wawancara adalah pemahaman dasar tentang:

- bagaimana memori bekerja
- hal-hal yang berdampak merugikan untuk upaya saksi dalam mengingat, dan
- pengetahuan tentang taktis praktis yang dapat membantu terwawancara mengingat kejadian yang mereka saksikan dengan mendetail (hal. 63).

Poin ketiga yang disebutkan di atas (Ord *et al*, 2004) tentang sejumlah "taktis praktis", sebagian direkomendasikan dalam WKS, seperti menjalin hubungan, mendengarkan secara aktif, dan bertanya dengan efektif. Teknik utama yang dianjurkan untuk tahap keterangan adalah 'keterangan bebas'. Hal ini mirip dengan teknik WK 'laporkan semua' (LS), tetapi

bukanlah suatu teknik yang rumit secara psikologis sebagai "metode yang sangat berhasil dan praktis untuk mengumpulkan informasi dari saksi" (Ord *et al*, 2004, hal. 66).

Secara sederhana, keterangan bebas mengizinkan saksi untuk memberikan versi mereka tentang apa yang terjadi, dengan kata-kata dan tempo mereka sendiri, tanpa interupsi. Menggunakan keterangan bebas, biasanya pewawancara akan mendorong saksi untuk mengingat kembali dan membayangkan kejadiannya (sama seperti teknik penegasan konteks (PK)). Petugas mungkin akan menemukan manfaat meminta saksi membuat sketsa untuk membantu menjelaskan - seperti pengaturan ruangan - atau untuk mendorong orang tersebut agar bisa lebih berkonsentrasi lagi. Sehingga keterangan bebas itu mirip dengan bagian WK tetapi dapat digunakan untuk wawancara sehari-hari dan tidak hanya untuk wawancara yang membutuhkan pendekatan tingkat mahir.

Dalam beberapa kasus, terkadang bermanfaat untuk membawa saksi kembali ke TKP (Ord *et al*, 2004). Tetapi harus waspada agar mencegah korban mengalami trauma atau mencemari TKP, atau jika kondisinya sudah sangat berubah (*komunikasi pribadi*).

3. Kurang lebih sama dengan struktur wawancara dasar

Istilah 'wawancara kognitif' telah digunakan untuk hampir semua wawancara yang berupaya menggunakan pendekatan terstruktur (Ede & Sheherd, 2000). Beberapa komentator berargumen bahwa hipnotis forensik sangat mirip dengan wawancara kognitif yang disempurnakan sehingga harus dikelompokkan di bawah payung "kognitif" (Kebbell & Wagstaff, 1997). Namun Geiselman (1996), menentang argumen ini, dan mengklaim bahwa salah satu alasan WK dikembangkan adalah untuk menghindari beberapa perangkat hukum dalam penggunaan hipnotis.

Sementara WK (atau lebih tepatnya WKS) sudah pasti terstruktur, tapi jangan dicampur-adukkan antara struktur 'keterangan bebas' dan 'manajemen percakapan' yang dianjurkan oleh banyak komentator (contoh: Ede & Shepherd, 2000; Ord, Shaw and Green, 2004) dan dicantumkan dalam materi pelatihan di Inggris dan Wales sejak tahun 1992 (contoh: CPTU, 1992a,b; NCF, 1996; CFIS, 2004). Teknik WK dan WKS yang sebenarnya memerlukan pelatihan khusus agar bisa diterapkan secara etis dan dapat diandalkan.

4. Perubahan dari desain awal

Penelitian menyarankan agar petugas yang sudah menerima pelatihan (dengan durasi berapa pun) memilih bagian CI yang akan digunakan. Walaupun sebagian besar petugas menggunakan bagian "laporkan semua" dan beberapa menggunakan teknik "penegasan konteks" (Memon *et al*, 1994), tetapi

tampaknya petugas jarang menggunakan "urutan terbalik" atau "ubah sudut pandang" (George, 1991). Tetapi masih tidak jelas apakah pengamatan ini dilakukan terhadap pewawancara tingkat mahir yang berusaha menerapkan teknik-teknik yang 'benar' untuk wawancara sehari-hari. Juga tidak jelas apakah kritik ini terkait dengan CI asli atau kemudian 'CI yang disempurnakan).

Apapun kasusnya, Ede dan Shepherd (2000, hal. 474) agak pedas dalam komentar mereka tentang bagaimana petugas menggunakan istilah 'wawancara kognitif':

"Penelitian menunjukkan bahwa di sebagian besar kasus, petugas berpikir mereka menerapkan wawancara kognitif, padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah:

- *melakukan keterampilan mendengar yang lebih baik;*
- *menggunakan lebih banyak pertanyaan terbuka;*
- *membohongi diri mereka sendiri bahwa mereka menerapkan teknik yang meningkatkan memori padahal sebenarnya tidak."*

Pendapat ini didukung oleh psikolog Amina Memon dan Sarah Stevenage (1996) yang berpendapat banyak manfaat WK yang lenyap ketika kelompok pembanding yang terdiri dari pewawancara terlatih menggunakan teknik menjalin hubungan dan komunikasi terbuka tanpa menggunakan teknik pengambilan-memori yang spesifik. Dengan kata lain, pewawancara yang memiliki hubungan baik dengan saksi dan bisa menangkap pemikiran dan motivasi mereka mungkin tidak membutuhkan berbagai alat bantu pengingat.

BERGESER DARI TEKNIK WK UNTUK PELATIHAN UMUM

Di Inggris dan Wales, model wawancara yang diimplementasikan pada tahun 1993 dan ditegaskan melalui strategi wawancara investigatif ACPO tahun 2003 adalah model wawancara PEACE. Materi pelatihan dan dokumen utama lainnya menawarkan proses terstruktur 5-tahap sebagai kerangka kerja untuk perencanaan dan melaksanakan wawancara investigatif yang efektif (CFIS, 2004), dari tingkat dasar sampai ke tingkat yang paling lanjut (lihat di bab lain dalam bahan bacaan ini yang membahas lebih dalam tentang PEACE).

Seiring dengan waktu, polisi, akademisi, dan profesional lain di Inggris dan Wales telah mengembangkan dan menerapkan tiga model wawancara yang berbeda untuk digunakan dalam

model wawancara PEACE (CFIS, 2004; Milne, 2004; NCOF, 2003; Ord *et al*, 2004). yaitu:

- keterangan bebas
- manajemen percakapan, dan
- wawancara kognitif yang disempurnakan.

Tingkat pelatihan PEACE yang non-spesialis – untuk polisi baru dan polisi berseragam, dan untuk penyidik berseragam dan detektif – yang menekankan pada tingkat kepraktisan dan manfaat dari penerapan teknik 'keterangan bebas' dan 'manajemen percakapan' (lihat di bawah) untuk mendapatkan keterangan terwawancara tentang kejadian diajarkan di Tahap 1 dan 2. Materi dasar tentang 'wawancara kognitif yang disempurnakan' juga diajarkan di Tahap 2. Petugas diberikan sejumlah teknik-teknik yang dapat membantu mereka ketika menerapkan model wawancara ketika diperlukan.

Akan tetapi, teknik wawancara kognitif yang disempurnakan yang lebih canggih hanya disarankan untuk digunakan dalam wawancara pada tingkat yang lebih lanjut (contoh: kejahatan besar) dan wawancara khusus (contoh: saksi rentan), dan oleh sebab itu diajarkan di tingkat mahir (lihat NCOF, 2003 – Tahap 3 'Wawancara Saksi Penting Tingkat Mahir').

DISKUSI

Istilah 'wawancara kognitif' adalah bagian yang tidak terpisahkan dari wawancara investigatif, dan ada banyak sekali buku, artikel dan referensi tentang wawancara kognitif. Tetapi sering kali tidak jelas apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh petugas, materi pelatihan, dan penulis akademik ketika mereka menggunakan istilah ini. Bahkan semakin membingungkan ketika kita mempertimbangkan prosedur yang berkembang dari model aslinya, terutama wawancara kognitif yang disempurnakan (WKS). Ada beberapa kondisi, yang mana seorang penulis mengacu pada WK padahal sebenarnya sedang membahas tentang WKS.

Penggunaan kata 'wawancara' merupakan salah satu penyebab utama masalah ini. WK bukanlah suatu wawancara atau bahkan model pewawancara; namun, WK sebenarnya adalah metode empat langkah "... serangkaian teknik pengambilan memori yang dirancang untuk meningkatkan jumlah informasi yang bisa diperoleh dari seorang saksi" (Memon, 1999, hal. 343). Terlebih lagi, hal ini mengacu pada serangkaian teknik-teknik tingkat lanjutan yang merupakan sebagian kecil dari begitu banyak yang dapat digunakan untuk wawancara spesifik. Teknik WK tidak meliputi proses untuk mengawali dan mengakhiri wawancara. Tidak ada yang namanya wawancara kognitif. Yang ada adalah 'teknik wawancara kognitif' yang dapat digunakan dalam wawancara tertentu. Mengganti

istilah wawancara kognitif menjadi 'teknik-teknik pewawancara kognitif', dan menggunakan istilah ini secara eksklusif, dapat membantu mengurangi kebingungan.

Dan mengingat bahwa sebagian besar penyempurnaan WK telah diadopsi dalam wawancara PEACE, taktik individu yang dapat digunakan mungkin adalah dengan menyebutnya sebagai 'teknik-teknik pewawancara kognitif yang disempurnakan'. Keuntungannya adalah istilah ini dapat menggambarkan kondisi yang mana petugas dapat memutuskan berapa banyak teknik yang akan mereka gunakan. Sayangnya, penamaan ini merepotkan.

Dari informasi di atas, ada sejumlah poin penting yang dapat ditarik.

1. Kebingungan tentang berbagai istilah WK dan WKS menyebabkan kesalahpahaman dan salah penerapan.
2. Wawancara kognitif (WK) bukanlah wawancara – WK adalah empat teknis berbeda yang dirancang untuk digunakan terhadap saksi yang bekerja sama, secara satu persatu atau sekaligus, untuk menghasilkan kemampuan mengingat yang lebih baik.
3. WK adalah alat bantu forensik tingkat lanjutan dirancang untuk diunakan oleh pewawancara yang benar-benar terlatih.
4. Wawancara kognitif yang disempurnakan (WKS) dikembangkan dari WK tetapi digunakan untuk wawancara yang berbeda. WKS menggabungkan teknik-teknik WK yang sudah dimodifikasi serta teknik-teknik lain seperti menjalin hubungan, menggunakan pertanyaan terbuka, mendorong konsentrasi, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk wawancara investigatif sehari-hari.
5. Model wawancara yang ditegaskan kembali dalam strategi wawancara ACPO (2003) adalah model PEACE. WKS adalah jenis wawancara yang dilakukan dalam kerangka PEACE (tingkat dasar di Tahap 2 dan tingkat mahir di Tahap 3).
6. Pada tahap 1 dan 2 (petugas berseragam dan detektif), pelatihannya fokus pada memberikan keterampilan wawancara dasar seperti menjalin hubungan, mendengarkan, berpikiran terbuka dan mengetahui kapan harus menggunakan teknik-teknik alat bantu jika diperlukan.

Poin-poin utama

1. Peningkatan tajam dalam penelitian dan diskusi tentang wawancara kognitif (WK) dan wawancara kognitif yang disempurnakan (WKS) pada akhir tahun 1990an menegaskan kemampuan beberapa teknik yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas ingatan selama wawancara dengan subjek yang bekerja sama.
2. Kebingungan timbul tentang arti yang sebenarnya

dari 'wawancara kognitif' dan 'pewawancara kognitif', dan 'wawancara kognitif yang disempurnakan' dan 'pewawancara kognitif yang disempurnakan'.

3. Model wawancara PEACE digunakan dalam semua wawancara investigatif di Inggris dan Wales, dengan 'ingatan bebas' dan 'manajemen percakapan' adalah gaya wawancara yang dipilih untuk meningkatkan ingatan dalam mayoritas wawancara.
4. Di tahap 'keterangan' dalam wawancara PEACE dengan saksi yang bekerja sama, petugas menggunakan wawancara ingatan bebas (Tahap 1), WKS dasar (Tahap 2) atau WKS tingkat mahir (Tahap 3).
5. Semua jenis wawancara memiliki sejumlah taktik yang dapat digunakan oleh petugas.
6. WK yang disempurnakan terutama digunakan dalam wawancara yang memerlukan keterampilan spesialis, contoh: ketika mewawancarai saksi rentan, terintimidasi dan/atau penting.
7. Wawancara yang berhasil memerlukan gabungan antara kemampuan komunikasi kognitif antar individu dan faktor-faktor sosial untuk memfasilitasi pengambilan memori.

3. INGATAN BEBAS

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, wawancara kognitif yang disempurnakan sesuai untuk wawancara saksi yang spesialis. Akan tetapi, teknik utama yang digunakan untuk mewawancarai saksi yang mau bekerja sama di sebagian besar wawancara adalah 'ingatan bebas'

(CFIS, 2004). Ingatan bebas sudah menjadi bagian dari pelatihan wawancara polisi di Inggris dan Wales sejak sebelum tahun 1990 tetapi ketika saksi diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan tanpa interupsi diikuti dengan pertanyaan langsung memiliki keterbatasan keberhasilan. Biasanya cukup akurat tetapi tidak lengkap (Milne & Bull, 1999).

Materi pelatihan berikutnya (contoh: NCF, 1996) melihat istilah ini menghilang, tetapi deskripsi tentang bagaimana melakukan tahap 'keterangan' adalah ingatan bebas tapi tidak dinamai begitu. Misalnya, panduan untuk mendapatkan keterangan memberikan instruksi rinci dengan judul-judul:

- jangan terburu-buru – atur kondisinya
- pertama dapatkan keterangan tanpa interupsi
- mendorong untuk mengulang upaya mengingat.

Panduan 1996 lalu melanjutkan ke bagaimana 'memperluas dan mengklarifikasi keterangan' yang mana pewawancara didorong untuk mengelompokkan pertanyaannya ke dalam beberapa topik atau episode yang dapat dikelola. Cara ini membantu untuk menelusuri hal-hal yang telah dibahas dan memahami di mana menempatkan informasi baru (NCF, 1996).

Panduan terbaru (CFIS, 2004) menggunakan materi pelatihan sebelumnya dan hasil evaluasi formal yang lebih baru (contoh: Clarke & Milne, 2001) untuk menggarisbawahi pendekatan baru. Istilah 'ingatan bebas' kembali lagi dan gaya wawancara ini menjadi landasan untuk mewawancarai saksi dan tersangka yang mau bekerja sama. Tetapi materi pelatihan menyadari perlunya petugas belajar dari sejumlah teknik yang tersedia dalam model untuk membantu terwawancara mengambil informasi yang ada dalam memori mereka. Hal ini diajarkan dalam Tahap 1 pelatihan.

4. MANAJEMEN PERCAKAPAN

Teknik wawancara utama lain yang digunakan oleh polisi di Inggris dan Wales adalah 'manajemen percakapan' (Bull & Cherryman, 1995). teknik ini dikembangkan oleh psikolog Eric Shepherd secara spesifik digunakan untuk menghadapi terwawancara yang tidak bersedia, yaitu "terwawancara yang tidak mau bicara, yang memberikan jawaban "tidak ada komentar", yang tidak mau bekerja sama, bermusuhan, berbohong, tidak jelas, dan lain-lain" (Milne & Bull,

1999, hal. 187). Dalam wawancara seperti ini, pewawancara harus mengendalikannya sejak awal dan mengelolanya dengan berbeda dibandingkan dengan wawancara dengan subjek yang bersedia. Pewawancara harus menunjukkan pemahaman yang kuat tentang psikologi sosial dari pertemuan dan interaksi antara dua orang, dan mampu menghasilkan performa keterampilan antar perorangan (George & Clifford, 1992).

Mudah untuk berasumsi bahwa ingatan bebas dan wawancara kognitif yang disempurnakan dapat digunakan kepada korban dan saksi, dan manajemen percakapan (MP) digunakan dalam wawancara dengan tersangka – asumsi dasarnya adalah saksi “bersedia” memberikan informasi dan tersangka “tidak bersedia”. Polisi yang berpengalaman hal ini tidak selamanya benar. Korban dan saksi sering kali tidak bersedia.

Naskah materi pelatihan nasional Inggris terkini (CFIS, 2004) jelas-jelas menganjurkan MP untuk mewawancarai subjek yang tidak mau bekerja sama baik saksi, korban atau tersangka – lihat tabel 9. Saat ini, diagram alur MP diatur dalam CFIS (2004, hal. 101) digunakan hanya untuk tersangka. Akan bermanfaat (dan menghindari kebingungan) jika kita dapat memberikan diagram yang berbeda dan catatan terpisah untuk menangani berbagai subjek MP:

- tersangka yang tidak mau bekerja sama
- saksi yang tidak mau bekerja sama
- saksi yang mau bekerja sama tetapi kesulitan memberikan keterangan yang lengkap dan terpercaya karena beberapa alasan (diperlukan manajemen wawancara yang lebih baik).

Perbedaan utama antara ingatan bebas (dan WKS di kondisi yang lebih sulit) dan manajemen percakapan adalah pada jumlah kontrol yang perlu dikeluarkan oleh pewawancara. Seperti halnya dengan ingatan bebas, kerangka PEACE digunakan, tetapi pewawancara harus lebih menyadari perilaku lisan dan non-lisan dirinya, terwawancara dan pihak ketiga (Milne & Bull, 1999; Shepherd & Kite, 1988). Pada tahap keterangan, pewawancara harus mampu mengelola berbagai kemungkinan penolakan dari terwawancara.

Meskipun MP dikembangkan secara spesifik untuk petugas yang harus mendapatkan informasi dari subjek yang menolak dan keberatan, tetapi penggunaannya belum meluas. Contoh, ketika mengevaluasi efektivitas pelatihan PEACE, Clarke dan Milne (2001) menemukan bahwa hanya 36 persen dari wawancara tersangka yang menggunakan teknik MP.

	Saksi		Tersangka	
	Bekerja sama	Tidak bekerja sama	Bekerja sama	Tidak bekerja sama
Tahap 1	Ingatan bebas	MP	Ingatan bebas + proses hukum	MP + proses hukum
Tahap 2	WKS dasar	MP yang disempurnakan	WKS dasar + proses hukum	MP yang disempurnakan + proses hukum
Tahap 3	WKS mahir	MP tingkat mahir	WKS mahir + proses hukum	MP tingkat mahir + proses hukum

Tabel 9: Tipologi wawancara menurut kerangka wawancara PEACE

Bagian ini menerangkan mengenai teknik utama lainnya, termasuk hipnotis dan poligraf. Kemampuan untuk menerjemahkan bahasa tubuh dan komunikasi non-lisan sudah diterangkan sebelumnya.

1. HIPNOTIS FORENSIK

Hipnotis investigatif telah menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Hal ini sudah digunakan secara luas di Amerika Serikat dan negara lainnya untuk meningkatkan ingatan dari saksi dan korban, dan bila memungkinkan, pelaku yang bekerja sama (Gudjonsson, 1992). Istilah hipnotis datang dari Bahasa Yunani 'hypnos' (tidur) dikarenakan keadaan subjek yang tidak sadarkan diri. Orang yang terhipnotis sebenarnya ada pada keadaan kesadaran yang diatur ditandai dengan kewaspadaan yang masih tinggi dan keadaan relaksasi yang dalam. Hal ini dipercaya dapat membuat ingatan lebih mudah diakses (Reiser, 1980).

Sebagian besar penggunaan hipnotis adalah untuk tujuan hiburan, yang meliputi 'hipnotis terapi' (perawatan kondisi fisik dan mental seperti fobia dan merokok) dan hipnotis 'forensik' atau 'investigatif', yang mana teknik ini digunakan dalam penyelidikan kasus kejahatan (Gudjonsson, 1992). Penggunaan hipnotis dalam sistem peradilan pidana pertama kali digunakan pada pertengahan abad 1800an, dengan usaha kedua yang terdokumentasi pada tahun 1894 (Reiser, 1980). Tetapi baru pada kasus penculikan murid sekolah di Chowchilla, California pada 15 Juli, 1976 yang menjadi 'kasus penentu' yang membuat penggunaan hipnotis forensik untuk penegakan hukum menjadi perhatian (Olson, 1995). Kasus ini melibatkan penculikan 26 pelajar dan pengemudi bis mereka yang ditahan selama 36 jam di ruang bawah tanah oleh tiga orang bersenjata. Di bawah pengaruh hipnotis, pengemudi bis mampu mengingat plat nomor yang menjadi petunjuk bagi polisi untuk menemukan penculiknya.

Sejak saat itu hipnotisme sudah sering digunakan, termasuk dalam beberapa kasus terkenal di Amerika Serikat seperti yang melibatkan pembunuh berantai Ted Bundy dan 'Pencekik dari Boston' untuk membantu menentukan yang bersalah, serta kasus Sam Sheppard untuk menentukan yang tidak bersalah. Namun, secara umum, metode ini menghadapi banyak perdebatan terutama tentang tingkat kepercayaan dari bukti yang didapatkan (Reiser, 1984). Kebanyakan pertentangan itu berkisar pada bentuk dasar dari hipnotis, termasuk keuntungan dan risikonya (Gudjonsson, 1992; Wagstaff, 1999). Beberapa pihak mempertimbangkan ini sebagai suatu alat penting yang potensial untuk membuka ingatan secara akurat. Sementara pihak yang lain menganggapnya sebagai suatu beban dikarenakan ketidakakuratan yang diberikan, khususnya melalui sugesti yang berlebihan (Orne, 1979; Diamond, 1980 dikutip pada Wagstaff,

1999).

Pro dan kontra

Keuntungan menghipnotis orang termasuk salah satunya adalah bantuan untuk penyelidikan, bukti yang didapatkan seringkali sangat rinci dan spesifik, saksi yang cemas dapat disiapkan untuk memberikan bukti di pengadilan dengan prosedur hipnotis yang berbeda, dan saksi yang terhipnotis mampu membuat pernyataan yang meyakinkan di pengadilan, dan mampu membujuk juri dengan ingatannya yang meyakinkan (Olson, 1995; Reiser, 1980).

Banyak pendapat pro dan kontra tentang penggunaannya dalam tugas kepolisian (Reiser, 1984). Seiring dengan waktu, secara umum disetujui bahwa hipnotis investigatif merupakan hal berisiko (Gudjonsson, 1992). Empat risiko utama adalah:

- suggestibility - seorang penghipnotis dapat 'memberikan' masukan mengenai ras, tinggi, warna mata dan lain-lain yang dapat diterima oleh subjek sebagai suatu hal yang benar;
- hilangnya penilaian kritis – dibawah pengaruh hipnotis kepercayaan pribadi dan prasangka dapat mempengaruhi bagaimana suatu kejadian diterjemahkan selama proses mengingat kembali;
- rekaan atau kebohongan – seseorang yang mempunyai alasan untuk berbohong dapat membuat kebohongan meskipun dibawah pengaruh hipnotis, atau kosongnya ingatan dapat diisi dengan materi palsu yang disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu;
- melapisi ingatan – ingatan palsu yang begitu nyata bagi seorang saksi sehingga ia dapat menjadi begitu yakin terhadap hal tersebut.

Pendukung dari hipnotis investigatif berargumen bahwa tujuan dari alat wawancara ini adalah untuk mengumpulkan ingatan yang lebih baik tentang kejadian, dan mereka menerima bahwa kesaksian yang didapat dari hipnotis bisa sama kelirunya seperti ingatan lain pada umumnya (Reiser, 1984). Sementara, pihak yang menentang metode ini telah sukses meyakinkan pengadilan dan publik bahwa teknik ini mirip dengan poligraf. Karena sifat dasar hipnotis yang masih kontroversial, banyak negara bagian di Amerika Serikat yang memberlakukan pengecualian, melarang korban yang telah diwawancara di bawah pengaruh hipnotis untuk bersaksi di depan pengadilan (Wagstaff, 1999).

Panduan dan ketentuan

FBI dan beberapa yurisdiksi Amerika Serikat, termasuk California, telah mengambil sikap berbeda, dan memutuskan bahwa selama hipnotis digunakan dengan syarat dan ketentuan yang sangat ketat oleh ahli terlatih yang mengerti bagaimana mendapatkan informasi tanpa mengarahkan saksi atau tanpa sengaja

menanamkan sugesti atau ingatan, maka hal ini dapat menguntungkan baik bagi individu dan sistem pengadilan kejahatan (Gudjonsson, 1992).

Pada beberapa yurisdiksi (contoh, Surat Edaran Departemen Dalam Negeri No.66/1988) telah dilengkapi dengan panduan penggunaan hipnotis untuk wawancara. Sementara di yurisdiksi lainnya, peraturan mengatur standar pelatihan minimal, pengujian, dan sertifikasi petugas kepolisian yang menggunakan hipnotis investigatif (contoh, RUU Senat 929 yang disahkan pada Sidang ke-70 untuk menjadi legislasi Texas dan efektif berlaku per 1 Januari 1988). Di tempat di mana kesaksian hasil hipnotis diperbolehkan, tergantung pada pengadilan untuk menentukan apakah pembuktiannya sudah memenuhi standar yang diperlukan (Reiser, 1984).

Pada beberapa kasus, penggunaan hipnotis sudah terbukti problematis. Wagstaff (1999, hal. 167) mengambil kasus *R vs Browning* ([1995] Crim LR 227) sebagai contoh:

Browning telah divonis atas pembunuhan terhadap seorang wanita di jalan tol M50. Setelah vonis dijatuhkan, kemudian diketahui bahwa polisi telah memanggil penghipnotis untuk melakukan wawancara terhadap saksi kunci dalam penuntutan untuk menolongnya mengingat setiap detil kejadian. Namun, ketika bukti yang dihasilkan saksi ternyata tidak menguntungkan proses penuntutan, polisi tidak menginformasikan pihak pembela atau pengadilan bahwa wawancara tersebut telah dilakukan. Ketika hal ini diketahui, ironisnya jaksa kemudian mencoba membangun kasus dengan menolak bukti dari saksi mereka sendiri dengan alasan telah 'terkontaminasi' oleh hipnotis. Vonis Browning akhirnya kandas di tahap banding, dengan alasan bahwa juri bisa saja mengambil keputusan yang berbeda apabila mereka tadinya mengetahui bukti ini".

Dr Graham Wagstaff (1999, hal. 173) merangkum situasi ini bahwa:

- a) Penelitian yang mengindikasikan bahwa hipnotis merupakan sesuatu yang istimewa atau berstatus khusus sudah ketinggalan jaman dan tidak akurat. Kalaupun ada, bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa tambahan hipnotis dapat mengarah pada ketidak-akuratan dan kesaksian yang terdistorsi.
- b) Beberapa keuntungan yang didapat dari teknik hipnotis berasal dari faktor sosial dan pemberi petunjuk yang dimiliki oleh prosedur wawancara lainnya seperti wawancara kognitif. Wawancara kognitif lebih sedikit berisiko untuk terdistorsi atau menghasilkan kesaksian yang bias, dan mengurangi masalah apabila bukti dibawa ke pengadilan.

- c) Distorsi tidak bisa dihindarkan dan akan bergantung pada keadaan tertentu. Namun, saran terbaik yang dapat diberikan kepada polisi dalam hal penggunaan hipnotis adalah: tidak usah repot; gunakan wawancara kognitif sebagai pengganti.

2. POLIGRAF

Cara lain untuk mencari kebenaran adalah dengan menggunakan pengujian poligrafi. Penggunaan poligrafi pertama kali muncul pada tahun 1730 dalam esai yang ditulis oleh seorang penulis Inggris Daniel Defoe, yang menyebutkan bahwa "rasa bersalah selalu membawa rasa takut bersamanya; ada getaran dalam darah pencuri yang bila digunakan bisa untuk menemukan pencuri itu" (Ryder, 2003). Defoe mengusulkan bahwa "memeriksa denyut nadi" merupakan cara yang praktis dan manusiawi untuk menemukan kriminal.

Ide ini kemudian dijabarkan lebih lanjut pada tahun 1908 oleh seorang profesor psikologi Harvard, profesor Hugo Munsterberg, yang menyarankan bahwa pengelabuan dapat dilakukan dengan penggunaan alat perekam fisiologi. Pada tahun 1915 'tes pengelabuan' tekanan darah sistolik dibuat dan digunakan oleh seorang ilmuwan Amerika William Marston. FBI mulai membeli versi mesin 'pendeteksi kebohongan' yang lebih canggih pada tahun 1930an dan menggunakan alat ini untuk pertama kalinya dalam kasus spionase pada tahun 1938 (Holdstock, 2000).

Kamus Ringkas Oxford (1999) mendefinisikan poligraf sebagai "sebuah mesin yang dirancang untuk merekam perubahan dalam karakteristik fisiologi seseorang, seperti denyut nadi dan pernafasan, digunakan khususnya sebagai pendeteksi kebohongan." Poligraf dirancang untuk mengumpulkan data fisiologi dari aktivitas pernafasan, aktivitas kelenjar keringat, dan aktivitas kardiovaskuler. Instrumen poligraf mengukur perubahan pada kegiatan fisiologi ini. Dari tanggapan terhadap pertanyaan, pemeriksa menetapkan suatu kondisi psikologi, katakanlah, apakah seseorang berkata jujur atau berbohong (The National Academies Press, 2003).

Lain halnya dengan uji DNA, yang telah melalui pengujian ilmiah yang ketat serta telah dinyatakan valid dan terpercaya (oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti), uji poligraf belum mencapai tingkat kesuksesan yang sama. Bahkan, muncul semacam kesepakatan bersama bahwa pengujian ini tidak bisa diandalkan untuk mendeteksi apakah seseorang tersebut jujur atau berbohong (lihat The National Academies Press, 2003; Wen, 2001; McCarthy, 2000). Selain itu, ada peringatan mengenai risiko dari pengakuan palsu yang mampu melewati tes poligrafi (National Research Council, 2003).

Penggunaan secara luas oleh FBI dan yurisdiksi kepolisian Amerika

Sementara beberapa kalangan menafikan penggunaan poligraf (contoh, McCarthy (2000) menamai poligraf sebagai “ilmu sampah”) namun kalangan lainnya tetap yakin atas kegunaannya. Secara khusus, poligraf tetap merupakan alat bantu bagi banyak yurisdiksi kepolisian di Amerika Serikat dan FBI. Sebagai gambaran, reputasi poligraf sudah pada taraf yang mana orang yang diuji percaya bahwa mesin itu akan mendeteksi kebohongannya dan mereka lebih baik mengaku daripada ‘ketahuan’. Contoh yang cukup terkini yang mana poligraf membantu menangkap seorang pelaku kejahatan adalah pada tahun 1995 ketika Kepolisian South Carolina tidak memiliki bukti yang cukup guna menghubungkan Susan Smith dengan kematian kedua anak laki-lakinya. Tiga uji poligraf yang dijalankannya secara konsisten menunjukkan tanda-tanda pengelabuan. Polisi menjaga fokus mereka pada Susan dan akhirnya dia mengaku bahwa ia membiarkan mobilnya menggelinding ke arah danau, yang kemudian menenggelamkan kedua anaknya (Wen, 2001).

Perkembangan di masa depan

Stephen Kosslyn, seorang profesor psikologi dari Universitas Harvard yang mempelajari hasil pindaian otak pembohong, mempercayai bahwa hanya soal waktu saja sebelum alat pendeteksi kebohongan yang lebih canggih akan tersedia (Wen, 2001). Daripada mengukur tingkat stres pada tubuh, teknologi baru memungkinkan untuk masuk ke otak itu sendiri, dan mengukur perubahan pada gelombang otak dan arah laju darah di otak. Sejauh yang diketahui, hal ini tidak bisa kita kendalikan.

Serupa dengan ini, seorang ahli saraf di Iowa, Lawrence Farwell, yang telah mengerjakan teknologi “sidik jari otak” dan yakin bahwa ini akurat (Wen, 2001). Teknik ini menyediakan “sebuah jendela potensial menuju pengalaman visual masa lalu seseorang” sebagai contoh ketika seseorang ditunjukkan gambar senjata secara acak oleh polisi, dan tidak ada

perubahan gelombang otak, dapat dikatakan bahwa objek tersebut tidak dikenal. Di sisi lain, jika senjata pembunuhan ditunjukkan dan gelombang otak tertentu menjadi aktif, maka orang tersebut mempunyai pengalaman atau pengetahuan mengenai senjata tersebut (Wen, 2001). Tidak ada referensi yang menyebutkan apakah hal ini sudah pernah diujikan di persidangan atau tidak.

Dengan semua kritik dan kurangnya bukti ilmiah tentang pengujian poligraf, sepertinya tidak banyak harapan di masa depan untuk poligraf. Pada tahun 1994 (hal. 11), Strongman menyimpulkan bahwa “secara umum, penggunaan poligraf dan psikofisiologi yang dapat mengarah pada pengelabuan merupakan permasalahan yang harus dihindari di Selandia Baru”. Belum ada pendapat lain yang patut diperhatikan yang menyatakan sebaliknya hingga saat ini.

3. ANALISIS PERNYATAAN

Ada kalanya para penyidik harus mengandalkan wawancara awal yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, pembuat profil kepolisian sangat bergantung pada pernyataan saksi dan tersangka. Masalah yang sering muncul adalah banyak metode dan sikap pewawancara yang mengkontaminasi produk akhirnya (Walters, 2002). Sementara analis yang terlatih dapat menemukan sesuatu pada rekaman wawancara, namun kerja mereka akan sangat terbantu dengan standar wawancara yang tinggi dan adanya cukup informasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan atau mengurangi kredibilitas pernyataan (Walters, 2002).

Beberapa analisis pernyataan relatif tidak rumit. Sebagai contoh, Zulawski dan Wicklander (2001, hal. 210-212) menjelaskan struktur yang biasa ditemukan dari suatu kejadian dan bagaimana dua variasi yang berbeda dapat mengindikasikan ketidakjujuran/ketidakbenaran.

SEBELUM KEJADIAN	KEJADIAN	SETELAH KEJADIAN
------------------	----------	------------------

Gambar 4: Diagram mewakili keterangan yang jujur

SEBELUM KEJADIAN	KEJADIAN	SETELAH KEJADIAN
------------------	----------	------------------

Gambar 5: Diagram mewakili keterangan yang tidak jujur (kejadian tidak cukup detail)

SEBELUM KEJADIAN	KEJADIAN	SETELAH KEJADIAN
------------------	----------	------------------

Gambar 6: Diagram mewakili keterangan yang tidak jujur (terlalu banyak detail kejadian)

Menurut model ini, suatu cerita yang sebenarnya mempunyai bagian-bagian yang seimbang dalam kata-kata dan isinya (lihat gambar 4). Ketika tersangka mencoba berbohong, menghindar atau mengubah

bagian dari ceritanya, mereka mungkin melewatkan informasi (lihat gambar 5) atau justru memberikan terlalu banyak informasi (lihat gambar 6). Saat ini, penelitian tentang perkataan terwawancara sudah

dilakukan dengan dasar ilmiah (Vrij, 2003).

Amerika Serikat

Sebuah teknik yang populer di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa dalam hal mengukur kejujuran dari pernyataan lisan adalah ‘Penilaian Validitas Pernyataan -*Statement Validity Assessment*’ (SVA). Teknik ini dikembangkan oleh Stellar dan Koehnken (1989) dan berdasar pada pekerjaan dari seorang psikolog forensik, Udo Undeutsch (1967, dikutip dalam Vrij, 2003). Teknik ini terdiri dari tiga fase, yang kedua adalah “Analisa Isi Berdasar Kriteria-*Criteria-Based Content Analysis*” (CBCA)-yang terdiri dari 19 kriteria untuk menilai kredibilitas pernyataan secara sistematis:

“Penilai terlatih memeriksa pernyataan dan menilai kehadiran atau ketidakhadiran dari 19 kriteria tersebut. Kehadiran dari setiap kriteria meningkatkan kualitas dari pernyataan dan memperkuat hipotesis dari kejadian yang berdasar dari pengalaman pribadi seseorang ... Pertama, pengamat mencari ‘produksi tidak terstruktur’. Pembohong cenderung menceritakan kisahnya dalam urutan yang kronologis, yang mana orang yang bercerita jujur cenderung menceritakan kejadiannya secara tidak terstruktur dan tidak saling terkait ...Kriteria kedua adalah jumlah detail yang disebutkan dalam pernyataan. Hipotesisnya adalah pembohong akan memasukkan lebih sedikit detail daripada yang berkata jujur” (Vrij, 2003, hal. 77).

Tahap ketiga dari SVA adalah evaluasi CBCA – atau yang disebut ‘daftar periksa validitas -*validity checklist*’. Vrij (2003) mengulas 17 studi berkaitan dengan CBCA dan mengatakan bahwa tingkat akurasi yang ada tidak cukup tinggi untuk dapat digunakan di pengadilan.

Beberapa penelitian lain telah memeriksa beberapa tipe pendekatan untuk menentukan kejujuran. Sebagai contoh, artikel FBI terkini menggarisbawahi riset yang mana dilakukan analisis atas 60 pernyataan tertulis dari tersangka atau korban yang didapat selama proses penyelidikan kasus kejahatan dengan kekerasan dan kejahatan properti (Adams & Jarvis, 2004, hal. 7-12). Setengah dari pernyataan dinyatakan jujur oleh penyelidik; setengah lainnya dinyatakan berbohong. Kejujuran atau kebohongan ditentukan melalui keyakinan pelaku, bukti fisik yang melimpah, pengakuan oleh pelaku yang memberatkan, atau kombinasi dari hal-hal ini.

Para peneliti menemukan adanya hubungan antara kejujuran dan fitur dari pernyataan yang diperiksa. Hal ini dirangkum di tabel 11.

Penelitian Adams & Jarvis (2004) menjadi menarik karena dua alasan: 1) Fokusnya untuk menolong penyidik untuk menemukan tanda-tanda kejujuran daripada berfokus pada pengelabuan; dan 2) kesimpulan membantu menafsirkan tanggapan terhadap pertanyaan serta pernyataan tertulis.

Fitur	Kebenaran	Pengelabuan
1. Persentase perkataan dalam pernyataan yang berhubungan dengan kejadian kriminal	Bagian pendahuluan dari pernyataan (yang menjelaskan konteks kejahatan) lebih pendek dari bagian yang menjelaskan mengenai kejahatannya sendiri (yang menjelaskan apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, di mana, siapa, kapan dll)	Detail yang berlebihan tentang hal-hal yang menyebabkan kejadian, tapi hanya sedikit informasi kritis tentang kejadian kejahatan itu sendiri
2. Dimasukkannya detail sensorik yang unik	Pernyataan yang jujur biasanya akan meliputi penangkapan yang detail dari panca indera (contoh, apa yang dicium, didengar, dirasa, disentuh, atau dilihat). Hal ini hanya signifikan pada bagian kejadian kriminal sebagaimana penulis yang mengelabui dapat memasukkan detail perasa dalam bagian pendahuluan	Kejadian dari tersangka atau korban biasanya tidak menjelaskan pengalaman indera perasa secara mendetail. Didominasi oleh ketidaktepatan dan pengelakkan (contoh, “seseorang” daripada “orang yang tinggi dan menggunakan topeng ski”).
3. Dimasukkannya emosi (takut, marah, sedih, senang, cinta, terkejut, jijik, dan malu)	bagian pernyataan umumnya memasukkan reaksi emosional (contoh, seberapa takutnya mereka). Peneliti menemukan hubungan ini lebih kuat dalam pernyataan tentang pembunuhan dibanding kejahatan yang tidak serius lainnya.	Kejadian yang diciptakan biasanya tidak memasukkan informasi perasaan.

Tabel 11: Pernyataan tersangka – kejujuran dan pengelabuan (Diadaptasi dari Adams & Jarvis, 2004)

Temuan Adams dan Jarvis dapat juga diterapkan pada model Zulawski dan Wicklander (2001):

SEBELUM KEJADIAN	KEJADIAN	SETELAH KEJADIAN
Waktu yang pendek untuk mengingat hal-hal sebelum kejadian	Keterangan subjek tentang apa yang terjadi, bagaimana terjadi, di mana, siapa, kapan, dll. Mungkin dilengkapi dengan gambaran panca indera (apa yang dibau, dengar, dikecap, dirasakan (sentuh), atau lihat)	Kemungkinan melibatkan reaksi emosional (contoh, ketakutan yang dirasakan)

Gambar 7: Diagram mewakili keterangan yang jujur

SEBELUM KEJADIAN	KEJADIAN	SETELAH KEJADIAN
Cukup lama dan panjang sebelum masuk ke kejadian – banyak detail	Keterangan subjek tentang kejadian yang sebenarnya hanya memberikan sedikit informasi penting	Kemungkinan tidak melibatkan reaksi emosional

Gambar 8: Diagram mewakili keterangan yang tidak jujur

Sayangnya, keterangan yang jujur seperti digambarkan di gambar 7 (menggunakan Adams & Jarvis, 2004) saat ini memiliki struktur yang serupa dengan keterangan yang tidak jujur pada gambar 6 (menggunakan Zulawski dan Wicklander, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa kewaspadaan diperlukan dalam mengaplikasikan model yang sederhana. Pewawancara yang terlatih perlu menilai isi dari deskripsi 'kejadian' yang meluas untuk kemudian menentukan apakah itu jujur atau tidak.

Australia

Sebuah buku dari seorang ahli Linguistik Australia, Georgina Heydon, yang berjudul "Bahasa wawancara polisi" (diterbitkan bulan Maret 2005) telah membuat wawancara investigatif masuk ke dalam ranah sosiolinguistik interaksional dan analisis percakapan. Riset S3 Heydon mempelajari ratusan rekaman wawancara polisi dan menelusuri kepercayaan di balik teknik wawancara polisi dan bagaimana ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan selama wawancara (Gibson, 2004).

Dalam analisisnya, Heydon (2004) mengatakan bahwa pewawancara polisi seringkali merumuskan ulang narasi tersangka ke dalam 'versi polisi' yang mengesampingkan informasi kontekstual yang diberikan oleh tersangka, memperkenalkan versi alternatif yang menjadikan tindakan tersangka sebagai sesuatu yang kurang dan ceroboh, dan menekankan narasi kekerasan atau tindakan yang secara sosial tidak diinginkan. Heydon memberikan contoh 'Kamu setuju tidak kalau dia harusnya ketakutan' sebagai khas 'gaya bicara polisi' dalam situasi wawancara. Penelitian yang dilakukan berusaha untuk mengidentifikasi pola dan asumsi yang mengarahkan

pertanyaan pewawancara, agar dapat menyarankan perbaikan.

Inggris Raya

Ede dan Shepherd (2000, hal. 139-143) memberikan saran untuk menganalisis pernyataan yang disiapkan oleh polisi, dan cara untuk melakukannya baik secara manual atau pun elektronik. 'SE3R' adalah metode grafik untuk menggambarkan detail narasi dalam tulisan untuk teks yang tercatat untuk mendapatkan gambaran paling baik tentang "apa yang terjadi".

Digunakan secara luas di kepolisian se-Inggris Raya, SE3R merupakan singkatan dari lima langkah untuk mendapatkan sebanyak mungkin informasi dari suatu wawancara:

- *Survei* – Dokumen dibaca sekilas dengan cara membaca keseluruhan paling tidak sekali dengan kecepatan di atas kecepatan normal
- *Extract* (menggali) – Dokumen dibaca secara sistematis, dengan detail yang baik digali (menggunakan simbol, singkatan, dll) dan dimasukkan dalam 'barisan kejadian' (yang kemudian dikenal sebagai 'SE3R' sesuai dengan tujuannya)
- *Read* (baca) – dokumen dibaca dalam kecepatan normal untuk menyandingkan teks dengan informasi dari barisan kejadian dan melakukan perbaikan seperlunya
- *Review* (tinjauan) – dokumen dikesampingkan dan kejadian-kejadian dan informasi yang menyertainya diperiksa secara menyeluruh untuk kelengkapan, konsistensi, kejelasan, dan lain-lainnya.
- *Recall* (ingatan) – proses yang digunakan untuk menghasilkan SE3R akan menjamin sebagian

besar materi dapat diakses dalam ingatan jangka panjang, ini membuatnya jadi tampak familiar dan mudah untuk diingat kembali. Apabila diperlukan, usaha khusus dapat dilakukan untuk menjamin semuanya disimpan dalam memori.

Menurut Milne dan Bull (1999), SE3R didesain untuk:

- membantu petugas menyambungkan kejadian yang dialami saksi dan tersangka untuk dievaluasi sebagai bagian dari proses investigasi
- berfungsi sebagai alat bantu untuk merencanakan investigasi dan wawancara lebih lanjut
- digunakan sebagai referensi wawancara lebih lanjut
- membantu membandingkan kejadian satu terwawancara dengan lainnya
- membantu mengidentifikasi kesenjangan, kontradiksi dan lain sebagainya
- membantu mengevaluasi validitas dan reliabilitas dari informasi yang dilaporkan
- membantu penyidik untuk mengkomunikasikan hasil dari wawancara atau pernyataan kepada pihak utama seperti supervisor dan jaksa penuntut.

Walaupun pada awalnya dirancang untuk polisi, akhir-akhir ini si pembuat (Dr Eric Shepherd) menekankan pengacara pembela untuk juga menggunakan metode ini. Hal ini memberikan tekanan lebih pada polisi untuk melakukan wawancara sebaik mungkin, dan mendukung penggunaan alat perekam wawancara elektronik. Lihat Ede dan Shepherd (2000, hal. 529-544) serta Milne dan Bull (1999, hal. 61-63) untuk lebih detail tentang SE3R.

Penulis lain yang membicarakan implikasi analisa pernyataan pada praktik kepolisian adalah Profesor Aldert Vrij. Dalam bukunya mengenai psikologi berbohong dan cara mendeteksi kebohongan dan tipuan (Vrij, 2001). Dia menekankan sejumlah teknik, termasuk, Penilaian validitas pernyataan-*statement validity assessment* (SVA) sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dan 'pemantauan kenyataan' yang berhubungan dengan karakteristik ingatan dari pengalaman sebenarnya dan kejadian yang dibayangkan. Hal ini menyiratkan bahwa ingatan nyata akan berbeda kualitasnya dari 'mengingat' kejadian yang dibuat. Analis akan melihat pada kejelasan pernyataan; sudut pandang; tata ruang dan informasi sementara; pengaruh; kemungkinan cerita dapat dibangun kembali; realisme; dan lain-lain.

Analisis Ilmiah atas Isi - *Scientific content analysis* (SCAN)

Hasil penelitian dari Departemen Dalam Negeri terhadap analisis ilmiah atas isi - *scientific content analysis* (SCAN) menemukan bahwa cara ini

berpotensi membedakan antara pernyataan jujur dan bohong. Ditemukan bahwa petugas Inggris yang terlatih dalam SCAN mampu mengidentifikasi minimal 80 persen dari pernyataan yang jujur dan sekitar 75 persen dari pernyataan bohong (Mulraney, 2001). Namun, menurut penelitian Departemen Dalam Negeri, hasil ini bergantung pada akses yang dimiliki analis atas perkataan terwawancara yang sebenarnya daripada keterangan tertulis, karena yang tertulis merupakan penafsiran petugas dari apa yang dikatakan oleh terwawancara.

Komentator kepolisian berpengalaman di Inggris dan Wales seperti profesor Tom Williamson (mantan wakil kepala polisi kepolisian Nottinghamshire) dan kepala detektif Inspektur Gary Shaw (koordinasi wawancara nasional), secara umum mendukung analisis khusus terhadap pernyataan. Mereka menyebutkan bila SCAN dan teknik lainnya sudah diuji dengan "penelitian ilmiah yang ketat untuk melihat apakah bisa dijadikan sebagai dasar pelatihan di masa yang akan datang" lalu mereka bisa dimasukkan dalam kursus wawancara tingkat mahir. Namun, mereka mengingatkan, seperti halnya dengan teknik lanjutan lain, pelatihan ini harus bersifat komprehensif, karena bila tidak, petugas yang hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang teknik ini akan menafsirkan hal-hal secara salah" (Shaw, 2001 dikutip pada Mulraney, 2001, hal. 22).

4. RASIONALISASI, PROYEKSI, DAN MINIMALISASI - *RATIONALISING, PROJECTING AND MINIMISING* (RPMS)

Moston dan Engleberg (1993, hal. 236) tidak menyarankan pendekatan yang biasa dilakukan oleh banyak petugas kepolisian – menuduh secara langsung tersangka kejahatan pada awal wawancara dan meletakkan bukti-bukti yang memberatkan tersangka. Hal ini jelas-jelas dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan daripada bukti.

"Pada intinya, tersangka dikatakan bahwa ia bersalah dan kemudian diminta untuk menegaskannya. Tersangka tidak diberi kesempatan untuk memberikan cerita kejadian berdasar versi mereka ... Apabila tersangka tidak mengaku pada tahap ini, menanggapi justru dengan penyangkalan atau hanya diam saja, wawancara akan berantakan... masalah ini seringkali disebabkan oleh kurangnya perencanaan dan adopsi strategi bertanya yang menuduh"

Lalu bagaimana literatur Amerika menyarankan guna mendapatkan pengakuan? Banyak yang setuju bahwa petugas kepolisian harus mampu menggunakan variasi teknik untuk membuat tersangka untuk mengaku. Menurut Napier dan Adams (2002) penyidik perlu mengerti aspek pengakuan berikut ini:

- pengakuan penuh berawal dari pengakuan skala kecil
- tersangka yang bersalah jarang sekali mengatakan semuanya
- kebanyakan pelaku kejahatan tidak bangga atas tindakan mereka dan menyadari bahwa hal itu salah
- tersangka yang bersalah biasanya menghilangkan detail yang dapat menyulitkan mereka
- pelakunya biasanya mengaku hanya bila dirasa hal ini akan menguntungkan mereka

Dengan mempertimbangkan informasi ini, tiga taktik khusus – yang dikenal sebagai teknik RPM (rasionalisasi, proyeksi dan minimalisasi) – banyak dianjurkan (lihat, sebagai contoh, literatur FBI seperti Adams & Jarvis, 2004; Napier & Adams, 1998, 2002; Vessel, 1998).

“Penyidik yang mampu merasionalisasi tindakan tersangka, dan menyalahkannya pada orang lain, meminimalisasi kejahatannya dan memberikan alasan yang tersangka untuk mengatakan yang sebenarnya sudah dalam jalur yang benar untuk mendapatkan pengakuan” (Napier dan Adams, 2002, hal. 15).

Napier dan Adams memberikan saran tentang bagaimana pewawancara dapat berhadapan dengan mekanisme pertahanan ini:

Mekanisme Pertahanan	Tanggapan pewawancara
Rasionalisasi (ketika terwawancara menciptakan alasan untuk bertindak atau tidak bertindak untuk melindungi citra dirinya)	Mendorong terwawancara untuk melihat situasi yang terjadi secara lebih positif untuk menghilangkan aspek negatif dari keadaan
Proyeksi (tersangka menyalahkan pihak lain atau situasi itu atas sikapnya)	Secara halus membantu terwawancara untuk memproyeksikan kesalahan pada pihak lain untuk menyelamatkan muka
Minimalisasi (menurunkan tingkat kesalahan kejadian atau tindakan dengan menggunakan kata-kata bermakna lebih halus seperti ‘kesalahan’ atau	Menerima kata-kata ‘lembut’ untuk memberikan insentif agar terwawancara memberikan pengakuan, menghindari kata-kata ‘keras’ seperti ‘perkosaan’ atau ‘pembunuhan’

‘kecelakaan’

Table 12: Merespon RPMs (Diadaptasi dari Napier & Adams, 2002; Vessel, 1998)

Komentator (contoh, Leo, 1992) menyarankan agar yurisdiksi Amerika melihat nilai lebih dari penggunaan teknik-teknik ini untuk memanipulasi dan membujuk tersangka sehingga, apabila bersalah, mereka akan mengaku.

5. TAKTIK INTEROGASI

Seperti halnya RPM yang disebutkan diatas, literatur Amerika memberikan berbagai teknik untuk mewawancarai tersangka. Banyak diantaranya berdasarkan ajakan dan pengelabuan psikologis dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dari wawancara investigatif yang diatur dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri 2/1992 dan diadopsi oleh kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales sejak saat itu.

Tipologi taktik Kalbfleisch untuk mewawancarai tersangka

Pada tahun 1994, Pamela Kalbfleisch dari Amerika menggunakan literatur untuk menciptakan skema klasifikasi 15 bagian, bersama dengan 38 taktik interaksi. Strategi ini ditampilkan di Tabel 13 berikut ini.

- Intimidasi** (menuduh tersangka sebagai pembohong, menertawakannya; menunjukkan sikap agresif)
- Kesia-siaan situasi** (mencoba meyakinkan tersangka bahwa penyangkalan yang terus-menerus hanya akan memperburuk semuanya)
- Ketidaknyamanan dan kelegaan** (membujuk tersangka bahwa menyangkal dan berbohong hanya membuat tidak nyaman dan mengaku akan baik bagi semua yang terlibat)
- Gertakan** (contoh, berpura-pura bahwa anda memiliki lebih banyak bukti daripada yang sebenarnya)
- Dorongan halus** (meyakinkan tersangka untuk memberikan informasi dengan jalan memujinya dan memberi dorongan)
- Minimalisasi** (menurunkan tingkat keseriusan dari tindakan atau kejadian)
- Kontradiksi** (menggunakan sikap yang tegas namun tidak agresif untuk memunculkan kontradiksi, kebohongan, ketidakkonsistenan dalam pengakuan tersangka)
- Informasi yang diubah** (menanyakan pertanyaan yang berisi informasi yang keliru pada tersangka, dengan tujuan untuk melihat apakah tersangka mengatakan yang sebenarnya atau tidak)
- Celah dalam pertahanan** (membuat tersangka untuk mengakui mengenai suatu hal kecil dan menggunakannya sebagai pijakan untuk

- mengatakan bahwa tersangka berbohong tentang semuanya)
- x. **Pemaparan diri** (pewawancara memunculkan hal-hal tentang dirinya untuk meningkatkan kepercayaan dan keinginan berbicara dari tersangka)
 - xi. **Memperlihatkan tanda-tanda pengelabuan** (mengatakan kepada tersangka bahwa Bahasa tubuhnya mengindikasikan adanya pengelabuan)
 - xii. **Perhatian** (menunjukkan empati dan pengertian, dan memperhatikan kesejahteraan tersangka)
 - xiii. **Menjaga status quo** (mengatakan pada tersangka untuk mengatakan yang sejujurnya untuk mendapatkan statusnya kembali, contoh, memunculkan kebanggaannya (sebagai 'orang yang baik' dll) atau mengatakan bahwa keluarga/teman-temannya akan memandangnya rendah apabila mereka mengetahui bahwa tersangka berbohong)
 - xiv. **Pendekatan langsung** (pewawancara mengatakan pada tersangka untuk langsung mengatakan yang sebenarnya)
 - xv. **Diam** (pewawancara tetap diam setelah tersangka mengatakan sesuatu dengan tujuan untuk membuat tersangka menjadi tidak nyaman)

Table 13: Tipologi strategi untuk mewawancarai tersangka yang tidak mau bekerja sama (Kalbfleisch, 1994, hal. 473).

Tujuan dari strategi dan taktik ini adalah untuk membantu mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak mau bekerja sama. Meskipun tidak semua dari mereka melibatkan tipuan dan pengelabuan, komentar dari orang-orang berikut ini (contoh, Memon & Bull, 1999; Soukara et al, 2002) mengatakan bahwa hampir seluruhnya bersifat menindas. Argumen utama yang digunakan adalah dengan mengasumsikan bahwa tersangka pasti bersalah.

Kritik-kritik ini juga ditujukan untuk 'Teknik Reid'. John E. Reid mengembangkan proses tiga-bagian ini lebih dari 30 tahun yang lalu (Inbau, Reid & Buckley, 1986) yang terdiri dari: (1) analisis faktual informasi yang berhubungan dengan lokasi kejadian, korban dan subjek yang memungkinkan – untuk membantu menentukan arah penyelidikan yang harus diambil dan memberikan petunjuk kepada pelaku; (2) wawancara dengan subjek yang memungkinkan – menggunakan format wawancara yang terstruktur baik yang tidak bersifat menuduh dan dirancang untuk memberikan penyidik semua gejala sikap lisan dan non-lisan yang mungkin mendukung kebenaran atau pengelabuan; (3) Interogasi yang menuduh – digunakan apabila penyidik percaya bahwa subjek tidak berkata yang sebenarnya selama wawancara yang netral.

Tahap ketiga terbukti yang paling kontroversial (Kassin & Gudjonsson, 2004). Reid membagi interogasi menjadi Sembilan langkah:

Langkah	Deskripsi
Satu	Konfrontasi langsung positif. Penyidik menyarankan tersangka secara tegas bahwa penyelidikan telah menunjukkan bahwa ia bertanggung jawab atas terjadinya kejahatan. Hal ini mungkin bukan pernyataan sebenarnya. Namun, untuk membujuk tersangka yang bersalah untuk mengatakan yang sebenarnya penyidik seringkali membesar-besarkan keyakinannya terhadap kebersalahan tersangka.
Dua	Pengembangan 'tema' yang secara psikologis menjustifikasi atau membolehkan terjadinya suatu kejahatan. Menggunakan pendekatan monolog, penyidik menawarkan alasan moral atau psikologis terhadap sikap kriminal tersangka. Tema tidak dirancang untuk menanamkan ide baru dalam pikiran tersangka tapi hanya untuk memperkuat membenaran yang telah ada dalam pikiran tersangka yang bersalah (contoh, bahwa semua itu adalah kecelakaan).
Tiga	3 & 4 merujuk pada pernyataan tersangka selama pengembangan tema. Penyidik secara aktif mengecilkan niat (dengan cara memaksakan interupsi) tersangka untuk menyangkal atau penjelasan yang dapat menghilangkan bukti.
Empat	Interogator terus berbicara – tidak memberikan kesempatan tersangka untuk memberikan keberatan dalam bentuk faktual atau emosional.
Lima	Menyakinkan tersangka untuk memperhatikan tema (dan tidak menarik diri kembali). Pada tahap ini penyidik bisa memindahkan kursinya mendekati tersangka (orang yang secara fisik dekat dengan tersangka juga akan lebih dekat secara emosional). Penyidik juga bisa menanyakan pertanyaan hipotetis yang dirancang untuk merangsang pikiran tersangka.
Enam	Merespon terhadap perasaan pasif tersangka. Penyidik memampatkan tema konsep menjadi satu atau dua unsur dan menunjukkan simpati dan pengertian dan mendorong tersangka untuk bekerja sama. Langkah lanjutan dari proses ini dirancang untuk

mengeluarkan pengakuan awal dari rasa bersalah.

Tujuh Memberikan pertanyaan alternatif. Ini merupakan pertanyaan yang memberikan dua pilihan kepada tersangka mengenai beberapa aspek dari kejahatannya. Pilihannya biasanya kontras atas pilihan positif dan negatif (contoh, apakah kamu pernah melakukannya beberapa kali atau ini yang pertama kali?). Menerima pilihan manapun, tentunya akan berujung pada pengakuan bersalah.

Delapan Mengembangkan pengakuan oral. Bujukan aktif dihentikan dan penyidik mengembalikan pertanyaan dan jawaban yang digunakan pada saat wawancara. Hampir semua tersangka segan untuk membicarakan kejahatan mereka dan penyidik harus bersabar untuk dapat menarik keterangan dan detil yang diperlukan untuk memvalidasi suatu pengakuan.

Sembilan Merubah pengakuan oral menjadi dokumen yang dapat diterima oleh pengadilan yang mencakup tanggung jawab dari perbuatan kejahatan yang harus ditanggung oleh tersangka seorang termasuk detil yang hanya diketahui oleh orang yang memang bersalah.

Tabel 14: Teknik interogasi 9 langkah dari Reid

Meskipun dianggap oleh banyak satuan polisi di Amerika Utara sebagai 'standar emas', namun teknik Reid juga disalahkan karena menghasilkan pengakuan palsu (Leo, 1996). Hal ini karena teknik ini cenderung mengandalkan manipulasi psikologi terhadap tersangka (Kassin & Gudjonsson, 2004), seringkali dengan taktik yang tidak bisa diterima oleh pengadilan di Inggris dan Wales. Di antara beberapa hasil yang bertolak belakang disebabkan oleh teknik ini digunakan pada semua tersangka secara luas, tidak hanya pada tersangka yang diyakini kesalahannya oleh polisi sebagaimana diutarakan oleh Reid (Memon, Vrij & Bull, 1998).

Meskipun teknik Reid dianggap efektif, banyak yang terang-terangan menolaknya. Berdasarkan pernyataan dari pengacara pidana dari Calgary dan mantan hakim pengadilan tinggi John James: "Aku pikir bahwa hal ini sebaiknya tidak diperbolehkan di Kanada...teknik ini dirancang mematahkan kondisi psikologis seseorang hingga ia akan memberikan pada penyidik apa yang ingin mereka dengar" (Berita CBC, 2003).

Kemungkinan cerita tersangka berubah

Teknik apapun yang digunakan, penelitian

mempertanyakan cara yang mengubah pendirian tersangka yang awalnya menolak kejahatan yang terjadi untuk kemudian mengubah ceritanya. Milne dan Bull (1999) tidak menemukan penelitian apapun yang mendukung pendapat yang dipercaya oleh banyak pihak (baik oleh petugas polisi maupun masyarakat umum) bahwa pewawancara dapat membujuk mereka yang pada awalnya menolak agar mengakui kesalahannya. Faktanya, penelitian justru menemukan hal sebaliknya. Baldwin (1993) memeriksa 600 rekaman wawancara tersangka dan menemukan hanya 20 tersangka (3.3%) yang mengganti ceritanya pada saat wawancara berjalan dan dari jumlah ini hanya 9 orang yang dapat dikatakan terpengaruh oleh keahlian pewawancara.

Temuan ini berdampak pada praktik kepolisian. Pada satu sisi, mereka menyarankan agar petugas jangan merasa kecil hati hanya karena tidak mampu mendapatkan pengakuan. Terlebih lagi, tersangka sudah menolak keterlibatan dan penelitian mengatakan bahwa kecil kemungkinan pewawancara dapat mempengaruhi untuk mengubah ceritanya. Lebih jauh lagi, penelitian Baldwin (1993) menyarankan bahwa pelatihan wawancara harus terfokus pada pengumpulan bukti terbaik daripada hanya sekedar mendapatkan pengakuan.

Bukan berarti pengakuan bukanlah hal penting. Mungkin bisa jadi merupakan hal krusial, terutama jika itu memangkas panjang keseluruhan proses penyelidikan (Baldwin, 1993). Oleh karena itu, sepertinya penekanan pada pengakuan akan tetap bertahan di beberapa daerah yurisdiksi.

"Hari ini – meski dengan kehadiran bukti ilmiah seperti pembentukan profil DNA – RPM dan alasan untuk mengaku masih penting karena banyak penyidik yang masih mengandalkan pengakuan untuk memecahkan kasus kejahatan." (Napier & Adams, 2004, hal. 15).

Namun ada hal yang harus diwaspadai. Petugas harus menyadari bahwa tidak ada pewawancara yang selalu berhasil dengan tiap tersangka. "Setidaknya 10 persen dari subjek tidak akan mengaku terlepas dari kemampuan dan kerja keras pewawancaranya." (Vessel, 1998, hal. 5 [berdasarkan pada riset 10 tahun]).

Senada dengan teori diatas, Inbau et al (1986, hal. 166) mengatakan:

"Tidak mudah bagi siapapun untuk 'mengakui sepenuhnya' kesalahan apapun [dan] dalam suatu kasus kriminal, tersangka sangat sadar konsekuensi serius yang dihadapi apabila mengatakan yang sebenarnya...tidak seorangpun akan mengakui kesalahan sepenuhnya; untuk itu interogator harus mampu meringankan dampaknya".

Oleh karena itu, banyak komentator menekankan agar pewawancara berkonsentrasi mendapatkan fakta yang relevan daripada hanya mendapatkan pengakuan (contoh, Milne & Bull, 1999 dan 2003).

6. TEKNIK MUTT DAN JEFF (“POLISI BAIK/POLISI JAHAT”)

Ada satu plot yang sering digunakan selama ini (dan masih digunakan pada banyak acara televisi tentang polisi) yang dinamakan aksi “Mutt dan Jeff” – dan dikenal juga dengan nama “polisi baik/polisi jahat” atau “polisi ramah/polisi ketus” (Irving & Hilgendorf, 1980).

“Teknik ini, menggunakan dua petugas. Mutt, adalah seorang penyidik yang bersikap keras yang mengetahui bahwa subjek bersalah dan tidak mau membuang waktu. Dia sudah memenjarakan selusin orang karena kejahatannya dan dia juga ingin memenjarakan subjek dengan tuntutan penuh. Di lain pihak, Jeff, adalah seseorang yang baik hati. Dia memiliki keluarga. Dia memiliki saudara yang pernah terlibat dalam kasus seperti ini. Dia tidak sependapat dengan taktik yang digunakan Mutt dan bersedia membantu tersangka apabila ia bekerjasama. Jeff tidak bisa menahan Mutt lebih lama lagi. Akan sangat bijaksana bagi tersangka untuk membuat keputusan yang cepat. Teknik ini dilakukan dengan kedua penyidik hadir di dalam ruangan sementara Mutt melakukan aktingnya. Jeff berdiri tenang dan sesekali memprotes taktik Mutt. Ketika Jeff menawarkan kerjasama. Mutt tidak hadir dalam ruangan.”

Teknik ini didasarkan pada asumsi kuat bahwa plot psikologi semacam ini tidak akan membuat tersangka yang tidak bersalah untuk kemudian memberatkan dirinya. Bukti empiris dan akademis membuktikan bahwa asumsi ini tidak sepenuhnya benar (Abney, 1986).

7. WAWANCARA TERFOKUS DAN WAWANCARA ANALISIS

Peneliti lainnya juga menambahkan wawasan mengenai wawancara kepolisian. Dua contoh adalah:

- Teknik ‘wawancara terfokus’ (FI) – lihat Morgan, 1999; dan
- Teknik ‘wawancara analisis’ (AI) – lihat Stubbs dan Newberry, 1998.

Kedua teknik ini berasal dari Amerika dan ditawarkan melalui internet dengan biaya tertentu. Meskipun seluruhnya baik, namun sepertinya tidak ada referensi mengenai teknik ini dalam literatur utama.

KESIMPULAN

Perbedaan antara literatur Amerika dan Inggris mengenai wawancara tersangka dapat dijadikan bahan pemikiran. Yang pertama jelas sekali masih berdasar pada interogasi dan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan; yang kedua berdasar pada wawancara dan mendapatkan fakta. Banyak teknik yang terlalu rumit atau tidak dapat diandalkan atau bahkan keduanya. Sementara ada argumen yang cukup mengenai teknik-teknik tertentu, kebanyakan evaluasi akademis mengenai hal ini selama ini menegaskan bahwa kewaspadaaan harus diterapkan. Wawancara polisi bukanlah tempat dan waktu yang tepat untuk mencoba metode baru dan belum teruji. Namun inovasi perlu diakomodasi. Untuk itu para psikolog, akademisi, dan termasuk petugas kepolisian akan tetap melanjutkan penelitian tentang mana yang dapat berfungsi dan mana yang tidak – yang pertama dalam ranah penelitian dan selanjutnya dalam operasi.

Poin-poin utama

1. Secara umum disetujui bahwa wawancara dengan hipnotis merupakan hal yang berisiko, dengan empat bahaya utama yaitu *suggestibility*, hilangnya penilaian kritis, kebohongan atau penipuan, dan menguatkan ingatan yang keliru.
2. Terlepas dari penggunaannya yang berlanjut di sebagian Amerika Serikat, pengujian poligraf dianggap tidak dapat diandalkan dalam hal pendeteksian apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya atau berbohong.
3. Analisa pernyataan (pemeriksaan ilmiah dari perkataan terwawancara dengan berbagai teknik) makin banyak diajarkan pada petugas kepolisian. Agar dapat sukses maka memerlukan rekaman perkataan yang sebenarnya dan bukan penafsiran pernyataan tertulis mereka.

Poin-poin utama (lanjutan)

4. Taktik RPM (rasionalisasi, proyeksi dan minimalisasi) digunakan secara umum oleh polisi Amerika – dan didukung oleh pengadilan – agar tersangka mau mengaku. Mereka membantu tersangka menjustifikasi tindakannya, menyalahkan pihak lain dan mengurangi keseriusan dari tindakan kejahatan yang dilakukan.
5. Tipologi Kalbfleisch (1994) dan teknik Reid keduanya meletakkan cakupan taktik untuk mewawancarai tersangka. Banyak diantaranya dianggap manipulatif dan menindas.

STRATEGI WAWANCARA INVESTIGATIF ACPO

PENDAHULUAN

Berdasarkan rekomendasi dari Clarke dan Milne (2001) mengenai cara untuk meningkatkan performa dan standar wawancara, Asosiasi Kepala Kepolisian Inggris dan Wales (ACPO) mendirikan kelompok kerja di bawah kepemimpinan kepala polisi John Burbeck (Warwickshire) untuk mempelajari permasalahannya. Kelompok kerja ini mencakup akademisi, profesional, dan praktisi. Kesimpulan dari kelompok kerja ini (dimuat di kertas kerja untuk pertemuan kabinet ACPO tanggal 13 September 2001) yaitu:

- PEACE mewakili model yang baik yang untuk menyediakan standar profesional wawancara dan tidak ada alternatif yang lebih baik.
- PEACE gagal karena dukungan yang tidak mencukupi di bidang yang memerlukan perhatian, meskipun sudah diidentifikasi namun tidak dihiraukan.
- PEACE perlu dimodernisasi, diperkenalkan kembali dan didukung dengan struktur dan proses yang layak.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang diberikan oleh kelompok kerja ini adalah sebagai berikut:

- PEACE diteruskan untuk menjadi model wawancara
- Struktur lima tahap dari keterampilan wawancara dapat dikembangkan sebagai berikut:
 1. Polisi baru /magang dan petugas polisi berseragam
 2. Penyidik berseragam dan detektif
 3. Pewawancara khusus
 4. Supervisor/penyelia serta manajer wawancara investigatif
 5. Penasihat wawancara khusus
- Mendirikan kelompok pengawas yang dikepalai oleh seorang perwira kepala polisi yang memiliki portofolio penanganan kasus kriminal guna menyediakan petunjuk awal
- Pengembangan dan koordinasi PEACE merupakan tanggung jawab dari Fakultas Pidana Nasional (*National Crime Faculty* [sekarang NCOF - *National Crime and Operations Faculty* – Fakultas Pidana dan Operasi Nasional] dengan didukung sumber daya yang cukup. Strategi ini merupakan temuan dan rekomendasi dari Clarke dan Milne (2001). Namun satu tambahan dan satu amandemen juga tercatat.

Tambahan

Clarke dan Milne (2001) menyimpulkan bahwa sebagian dari masalah itu adalah ketiadaan suatu lembaga yang berwenang untuk paket PEACE. Tanpa pendekatan yang terkoordinasi, kemungkinan terjadinya kebijakan, manajemen dan pelatihan yang tidak selaras menjadi tinggi. Kemudian strategi yang direkomendasikan adalah pembentukan suatu kelompok pengawas yang diketuai oleh seorang kepala polisi untuk menyediakan petunjuk bagi pelaksanaan wawancara investigatif.

Amandemen

Clarke dan Milne (2001) merekomendasikan struktur 4 tahap. Strategi ini memperkenalkan lapisan tambahan. Perbedaannya adalah adanya supervisi. Kelompok kerja sudah mencatat kekhawatiran para peneliti tentang berbagai aspek terkait dengan wawancara investigatif dan telah mempertimbangkannya sebagai tahap terpisah. Materi pelatihan lanjutan (yaitu NCOF, 2003) menyarankan perlunya pembekalan dan pelatihan untuk para supervisor/penyelia sebelum menjelaskan strategi baru kepada staf. "Ini guna menjamin bahwa jika para staf sudah terlatih dengan metode kerja baru, mereka mendapatkan dukungan dan dorongan di tempat kerjanya dalam hal penggunaan keterampilan dan pengetahuannya" (NCOF, 2003, Tahap 4, hal. 6). Hal yang harus diperhatikan ialah struktur linear alami yang memperlihatkan kemajuan dari level magang hingga penasihat ahli. Dengan adanya penyelia serta manajer pelatihan saat Tahap 4 dilaksanakan, diharapkan mereka dapat berbuat lebih banyak dibanding dengan Tahap 3 untuk pewawancara khusus. Nyatanya, bukan hal ini yang menjadi masalah. Namun hal ini harus dapat dijelaskan secara baik selama pelatihan.

KOMITMEN

Melalui strategi wawancara investigatif, pentingnya wawancara yang berkualitas terhadap keseluruhan proses penyelidikan sudah disadari di Inggris dan Wales. Banyak pertemuan dan aksi menunjukkan komitmen total di bidang ini (termasuk penyebaran strategi, penunjukkan koordinator wawancara nasional, persiapan materi pelatihan oleh Fakultas Pidana dan Operasi Nasional - *National Crime and Operations Faculty* (NCOF), serta perlunya bagi keseluruhan kesatuan kepolisian untuk menunjukkan rencana implementasi satu tahun dari awal strategi ini diperkenalkan). Komitmen ini pada tingkat tertingginya diharapkan bisa terlihat pada usaha masing-masing kesatuan guna menghasilkan perubahan yang nyata dan berkesinambungan. Hal ini diharapkan terjadi melalui gabungan antara pelatihan wawancara dan pengembangan organisasi (*Korespondensi pribadi*).

MATERI PELATIHAN NASIONAL

Centrex (*the National Central Police Training and Development Authority for England and Wales* – Pusat Pelatihan dan Pengembangan Polisi (Pusdiklat) Inggris dan Wales²) bertanggung jawab untuk mendefinisikan, mengembangkan dan mempromosikan keunggulan perpolisian. Pada peran ini, mereka ditugaskan untuk mengembangkan program inti pelatihan tentang wawancara investigatif (lihat NCOF, 2003 tahap 1-5). Paket ini terdiri dari materi mendetail dari tiap tahapnya. Hal ini dapat digunakan oleh setiap satuan kepolisian untuk mempersiapkan bahan ajar mereka dan menyesuaikan dengan infrastruktur kepolisian setempat.

Paket 5 tahap ini dihasilkan dari strategi yang telah dirancang dengan mengambil dasar pemikiran pada ranah karir. Untuk mencapai tujuannya, paket ini dilengkapi dengan standar pekerjaan nasional guna mendukung penilaian kinerja dan kompetensi di tempat kerja (CFIS, 2004; NCOF, 2003). Pelatihan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan baik personil dan pengawasan kualitas penyelidikan, dan menjangkau seluruh petugas polisi di Inggris dan Wales sepanjang karir mereka.

Pendekatan ini sebelumnya didukung oleh berbagai komentator (contoh: Shepherd & Kite, 1988). Mereka berpendapat bahwa kemampuan wawancara bukanlah sesuatu yang dapat dipelajari satu kali saja, atau dengan memperhatikan orang lain, atau bahkan dengan hanya langsung melakukannya. Agar terlihat terlatih, petugas harus:

- memahami teori di balik taktik
- mempunyai kesempatan untuk menggunakan konsep dalam praktik
- eksperimen dan meningkatkan kepercayaan diri
- menilai dengan kriteria yang ketat
- menerima umpan balik yang teratur dan menyeluruh

Struktur 5 tahap berarti bahwa ketika petugas telah menunjukkan kompetensinya pada tingkat tertentu maka mereka akan mempunyai kesempatan untuk naik ke tingkat lanjutan. Kepolisian mengimplementasikan proses akreditasi dan registrasi pewawancara. Sebagai tambahan evaluasi juga telah dilakukan. Sebagai contoh, Becky Milne dan Andy Griffiths (Kepolisian Sussex, penerima dana penelitian dari Bramshill) sedang meneliti dampak dari pelatihan wawancara tingkat mahir terhadap efektifitas wawancara investigatif dan proses penyelidikan.

PEKERJAAN LEBIH LANJUT

Walaupun merupakan hal yang mengagumkan melihat materi pelatihan yang menggambarkan keputusan

ACPO dengan cepat dipersiapkan dan tersedia untuk semua kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan divalidasi. Sebagai contoh, implementasi strategi dirancang untuk dimulai dengan supervisor/penyelia, namun materi tahap 4 memiliki beberapa pernyataan sebagai berikut:

“Kebanyakan wawancara terhadap saksi dan korban tidak direkam sehingga harus dinilai melalui pengawasan langsung. Bagaimana hal ini dapat dilakukan tanpa harus mengkompromi wawancara yang dilakukan harus dipertimbangkan...ketika menyangkut saksi dan korban hanya ada tiga instrumen penilai yang ditemukan dan itu pun perlu divalidasi” (NCOF, 2003, hal. 6).

Hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa kesatuan akan menemukan cara mereka sendiri dalam bekerja, daripada mengikuti sesuatu yang dapat diandalkan, sudah teruji, dan konsisten. Terlepas dari ini, banyak satuan kepolisian yang menyambut sudut pandang baru dalam pelaksanaan wawancara investigatif dan mau memenuhi tantangan mengimplementasikan struktur 5 tahap (DCI Gary Shaw, *komunikasi pribadi*).

DOKTRIN INTI INVESTIGASI

Pusat Kajian Nasional untuk Keunggulan Kepolisian baru-baru ini menghasilkan sebuah dokumen berjudul *“Practical Advice on Core Investigative Doctrine - Saran Praktis tentang Doktrin Inti Investigatif”*. Meskipun ada sedikit reaksi negatif terhadap penggunaan istilah ‘doktrin’ namun istilah ini makin sering digunakan sebagai persamaan istilah dari ‘praktik profesional’ (*komunikasi pribadi*, Peter Stelfox, NCPE). Istilah doktrin digunakan karena tidak ada satupun panduan yang menjelaskan secara lengkap tentang filosofi, teori dan pengetahuan yang mendasari tugas penyelidikan polisi. Meskipun tidak wajib, doktrin telah digunakan dalam format HMIC yang berarti kesatuan kepolisian perlu menjelaskan mengapa mereka tidak mengikutinya.

² Perkembangan terakhir dinamai Pusat Keunggulan Perpolisian Nasional atas dasar Undang-Undang Reformasi

Polisi tahun 2002.

Poin-poin utama

1. Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari praktisi polisi dan akademisi dibentuk oleh Asosiasi Kepala Polisi Inggris dan Wales (ACPO) pada tahun 2001 untuk mengevaluasi kondisi pelaksanaan wawancara investigatif.
2. Pokja menyimpulkan bahwa PEACE merupakan model terbaik yang dapat memberikan standar wawancara yang diperlukan.
3. Pokja juga menyimpulkan bahwa model PEACE perlu dimodernisasi, diperkenalkan kembali dan didukung dengan struktur dan proses yang layak.
4. Dengan adanya dukungan berkelanjutan dari ACPO serta Departemen Dalam Negeri, Strategi Wawancara Investigatif dirumuskan pada tahun 2003 dan diharapkan semua satuan kepolisian mampu mengajukan rencana implementasi pada akhir tahun 2004.
5. Centrex (Pusat Pelatihan dan Pengembangan Polisi (Pusdiklat) Inggris dan Wales) mengembangkan dan menyediakan paket materi pelatihan untuk tiap tahap pada tahun 2004.
6. Masing-masing kesatuan kepolisian dapat merubah materi dari Centrex untuk menyesuaikannya dengan kondisi dan sumber daya lokal yang dimiliki.

PENDAHULUAN

Inovasi teknologi dan perkembangan yang telah dicapai selama tiga dekade terakhir telah menyentuh semua aspek kehidupan kita baik pribadi maupun profesional. Mulai dari peralatan audio/video, peralatan canggih, proyektor dan akses internet dengan kecepatan tinggi telah memberikan lingkungan komunikasi yang lebih kaya dan lebih bersifat segera. Sullivan (2004) mencatat bagaimana perekaman elektronik telah diterima menjadi sebuah bagian hidup sehari-hari yang berguna dan efisien:

“[orang-orang] sekarang sudah terbiasa direkam di banyak tempat, di bangunan milik pribadi, kantor pemerintahan, loket tol, toko-toko, gudang dan bandara, dan juga pada saat percakapan telepon. Mobil polisi dilengkapi dengan kamera untuk merekam perhentian lalu lintas. Rekaman video saat ini merupakan hal yang rutin. Kita mengandalkan rekaman video untuk menyelesaikan perselisihan pada acara olahraga, dan untuk mengabadikan kejadian penting ... kita melakukan hal itu dikarenakan perekaman memungkinkan kita untuk mengulang kejadian di masa lalu secara waktu sebenarnya, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih akurat dan lengkap mengenai apa yang terjadi dibandingkan apa yang bisa diberikan oleh gambar tidak bergerak atau penuturan kembali” (hal. 26).

Sistem pengadilan, meskipun kental dengan tradisi dan sejarah, mampu mengadopsi teknologi modern untuk mengatasi permasalahan dan batasan-batasan. Sebagai contoh, sebelum dikenalkannya peralatan merekam, apa yang terjadi di ruangan wawancara terjadi secara rahasia dan prosedur yang dilaksanakan bertujuan untuk menghasilkan pengakuan bersalah dan juga hasil yang cepat (Williams, 2000). Dengan terbukanya ruang wawancara polisi untuk dapat diperiksa, maka keberadaan perekaman wawancara secara audio dan video dapat mengatasi setidaknya masalah pertama.

AMERIKA SERIKAT

Banyak kantor kepolisian di seluruh Amerika Serikat sudah menggunakan metode perekaman elektronik untuk wawancara tersangka selama lebih dari dua puluh tahun (Zulawski & Wicklander, 2001). Mereka memulai dengan peralatan audio namun berpindah secara cepat ke video karena keuntungan dari media video yang lebih jelas. Geller (1992) memperkirakan bahwa lebih dari setengah kantor penegak hukum di Amerika merekam video untuk paling tidak beberapa wawancara tersangka. Studi terkini (Sullivan, 2004),

menggunakan sampel 238 lembaga penegak hukum dari 38 negara bagian, menemukan 89 persen penggunaan kombinasi video dan audio, 10 persen hanya menggunakan audio, dan 1 lembaga menggunakan video saja. Yang menarik adalah lembaga terbesar dalam sampel, Kepolisian Los Angeles, menggunakan hanya rekaman audio saja.

Hal ini dimungkinkan karena – seperti halnya Inggris dan Wales – mereka mengadopsi perekaman audio sudah sejak awal dan telah banyak investasi dikeluarkan untuk itu sehingga dijadikan pembenaran untuk menunda pengantiannya. Kemungkinan lainnya adalah penggunaan taktik wawancara yang banyak dipertanyakan saat ini oleh lembaga kepolisian Amerika (termasuk FBI) mengakibatkan perekaman visual menjadi kurang menarik bagi mereka.

Laporan Sullivan (2004) mengenai ‘pengalaman polisi terhadap perekaman wawancara tahanan’, mengakui bahwa studi tersebut hanya melibatkan sebagian kecil sampel dari lembaga penegak hukum Amerika, dan bahwa hukum tiap negara bagian mempunyai perbedaan mendasar. Namun, beberapa temuan menawarkan beberapa pengetahuan baru tentang praktik yang dilakukan di AS. Diantaranya adalah:

- Banyak departemen tidak mempunyai peraturan tertulis atau panduan untuk mengatur kapan dan bagaimana perekaman dilakukan.
- Banyak lembaga menyerahkan keputusan untuk perekaman pada diskresi petugas yang berwenang.
- Sebagian besar departemen merekam wawancara hanya untuk investigasi kejahatan yang ‘besar’ dan ‘serius’
- Sebagian besar lembaga menggunakan rekaman video, atau video dan audio, untuk merekam wawancara – pandangan umumnya adalah “audio itu baik, video lebih baik lagi”
- Cakupan sudut pengambilan gambar – kamera perekam biasanya diposisikan di belakang penginterogasi dan terfokus pada tersangka; lembaga lainnya menggunakan beberapa kamera dengan sudut berbeda atau kamera tunggal yang memperlihatkan semua orang di dalam ruangan
- Beberapa negara bagian mengizinkan petugas polisi untuk merekam tanpa memberitahu tersangka; namun sebagian besar departemen meletakkan alat perekam secara terbuka dan mendapatkan persetujuan tersangka sebelum merekam
- Banyak departemen berpindah pada teknologi digital untuk meningkatkan kualitas resolusi gambar dan mengurangi kebutuhan tempat penyimpanan
- Wawancara biasanya direkam sejak disebutkan Hak-Hak Tersangka (*Miranda Warning*) hingga wawancara berakhir [meskipun laporan memberikan komentar yang menentang

departemen yang hanya merekam pertanyaan dan pernyataan terakhir tersangka dan bukan proses interogasi sebelumnya]

- Meskipun pada awalnya menolak, mayoritas petugas mendukung perekaman wawancara tersangka secara elektronik
- Dalam hal kasus diajukan ke pengadilan, perekaman dapat segera diterima dan diandalkan oleh para hakim dan juri
- Beberapa pengadilan dan hakim pengadilan banding mengkritisi lembaga yang memiliki peralatan memadai namun hanya memiliki sedikit jumlah rekaman elektronik atas wawancara tersangka
- Rekaman dianggap memberikan keuntungan dalam hubungannya dengan pelatihan dan proses evaluasi
- Biaya bukan masalah bagi sebagian besar departemen (karena penghematannya melebihi pengeluaran)

Laporan Sullivan (2004) menyimpulkan bahwa “perekaman elektronik dari wawancara polisi terhadap tersangka kejahatan merupakan tindakan efisien dan alat penegakan hukum yang kuat” dan bahwa pengalaman kepolisian menggunakan rekaman ini “memiliki tanggapan yang seluruhnya positif” (hal. i). Sullivan menambahkan bahwa “para juri mengharapkan agar perekaman dilakukan pada saat proses bertanya dilakukan di ruang wawancara kepolisian.” Apabila perekaman tidak dilakukan, pihak pembela akan dapat berargumen bahwa ada kecurigaan terjadinya tindakan yang tidak sah” (hal. 26). Hal ini berimplikasi pada kebijakan saat ini, yang banyak diikuti di berbagai yurisdiksi, untuk menyerahkan keputusan untuk melakukan perekaman di tangan petugas yang berwenang.

Efek dari perbedaan sudut pandang kamera

Beberapa komentator di Amerika mengingatkan untuk berhati-hati menarik kesimpulan terlalu cepat bahwa rekaman bukti pengakuan adalah suatu keberhasilan. Sebagai contoh, Daniel Lassiter dan rekan (contoh: Lassiter et al, 2002) telah melaksanakan penelitian sejak tahun 1986 yang mengindikasikan bahwa mengubah sudut pengambilan gambar akan mempengaruhi proses penilaian tentang kerelaan pengakuan itu sendiri.

Dalam studi sebelumnya (Lassiter & Irvine, 1986) “para juri” (terdiri dari mahasiswa universitas) pada simulasi persidangan diperlihatkan rekaman video pengakuan yang diambil dalam berbagai kondisi – ketika kamera terfokus hanya pada tersangka, hanya pada petugas wawancara, atau terfokus pada keduanya secara seimbang. Berdasarkan pada sudut pengambilan gambar ketiga kamera ini, hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut:

- terfokus hanya pada tersangka – mayoritas juri mengatakan bahwa pengakuan diberikan dengan sukarela
- terfokus pada petugas wawancara – mayoritas juri mengatakan bahwa pengakuan diberikan di bawah paksaan
- terfokus pada keduanya secara seimbang – jumlah juri terbagi dua sama rata berpendapat sukarela atau dipaksa.

Penulis menyimpulkan bahwa “... ada kecenderungan bagi orang yang mengamati suatu interaksi untuk menilai pihak yang tampak dominan sebagai agen penyebab” (hal. 269). Karena tidak adanya panduan dari juri atau persidangan yang sebenarnya, maka penelitian ini dijadikan dasar bagi penentuan sudut pengambilan gambar oleh Kepolisian Selandia Baru ketika memperkenalkan rekaman wawancara tersangka pada tahun 1991. Kebijakan tersebut menyatakan bahwa sudut pengambilan gambar harus netral – dengan wawancara dan terwawancara saling berhadapan di sebuah meja dan tampak samping pada kamera (Takitimu & Schollum, 1991).

Terlepas dari keterbatasan studi simulasi pengadilan dan juri, dalam penelitian-penelitian berikutnya, Lassiter dan rekan dapat menunjukkan bahwa bias sudut pengambilan gambar pada pengakuan yang direkam video merupakan fenomena yang dapat dipercaya dan dapat terjadi lagi, dan sulit dihilangkan (Lassiter et al, 2002). Sebagai contoh, pada sebuah studi yang mana para peserta diberitahu bahwa mereka harus memberikan alasan pembenaran atas keputusan mereka kepada hakim, 75 persen dari mereka yang melihat versi yang terfokus pada tersangka masih menganggap bahwa pengakuan tersebut adalah sukarela dibandingkan dengan 42 persen dari mereka yang melihat dari sudut pengambilan gambar yang terfokus setara.

Menanggapi beberapa kritik (contoh: Bornstein, 1999) bahwa tipe peserta dan tempat yang digunakan dalam penelitian tidak mencerminkan dunia nyata, Lassiter dan rekan telah melakukan penelitian yang menggunakan metode yang lebih valid dan lebih detail sesuai dengan kondisi nyata. Sebagai contoh, dalam studi yang dilaporkan oleh Lassiter dan rekan (2002), mereka menggunakan juri dewasa dan bukan mahasiswa (rata-rata usia 41 tahun), mengadakan simulasi persidangan yang direkam selama 4 – 5 jam (versi singkat dari persidangan yang sebenarnya yang mana penghukuman sebagian besar mempertimbangkan pengakuan), memastikan bahwa para juri menerima arahan dari seorang pensiunan hakim tentang keadilan dan kesukarelaan (dalam tiga kondisi terpisah), dan dua orang pengacara yang berperan sebagai jaksa penuntut dan pembela tersangka.

Simulasi berdasarkan persidangan nyata ini lagi-lagi menunjukkan bias sudut pengambilan gambar.

Proporsi vonis bersalah yang diberikan pada kondisi fokus pada tersangka secara signifikan lebih besar dibanding dengan kondisi yang mana fokus kamera berimbang. Fakta bahwa hal ini terjadi, terlepas dari arahan hakim dan konteks pengadilan yang realistis mendukung kesimpulan penulis bahwa “pengaruh perspektif kamera terhadap penilaian merupakan fenomena yang umum dan tidak dapat dihilangkan dengan mudah” (Lassiter et al, 2002, hal. 871).

Pada bagian kedua dari studi ini, para juri melihat pengakuan dari sudut pengambilan gambar yang terfokus pada petugas penginterogasi atau yang terfokus berimbang. Hasil yang didapatkan juga konsisten dengan studi terdahulu. Jumlah juri yang memberikan vonis tidak bersalah terhadap kondisi yang terfokus pada petugas penginterogasi secara signifikan lebih besar dibanding dengan kondisi fokus berimbang. Dengan kata lain, ketika mereka melihat petugas, mayoritas juri menganggap bahwa tersangka telah dipaksa untuk mengaku.

Penelitian ini mempertanyakan praktik yang dilakukan banyak lembaga kepolisian di Amerika (dan mungkin juga di tempat lain) untuk perekaman video dari wawancara tersangka yang mana fokusnya pada tersangka. Paparan bias yang dihasilkan dari praktik ini tidak boleh dikesampingkan.

Program komputer interaktif FBI

FBI telah menggunakan teknologi untuk tujuan lain yang berkaitan dengan wawancara. Einspahr (2000) menjelaskan bagaimana pada tahun 1996 para instruktur FBI melatih agen baru dengan jumlah terbesar. Mereka memerlukan sistem yang memungkinkan para siswa untuk dapat melatih keterampilan wawancara mereka dan menerima umpan balik tanpa memerlukan sesi latihan yang harus terus dipantau oleh instruktur. Mereka memerlukan suatu sistem yang juga dapat digunakan oleh para petugas lama sebagai alat pelatihan mandiri untuk meningkatkan keterampilan wawancara mereka.

Akademi FBI dan Laboratorium Fisika Terapan Universitas John Hopkins (APL) menerima tantangan untuk menghasilkan sesuatu yang interaktif, dengan kecepatan yang dapat diatur sendiri, mudah digunakan, dan cukup mampu membuat siswa ingin menggunakannya, dan sebuah komputer sebagai ‘terwawancara’ yang mampu memunculkan berbagai jenis orang yang mungkin akan dihadapi oleh penyelidik. Sebagai tambahan, siswa tidak mungkin ‘mengalahkan’ atau ‘menipu’ komputer.

Piranti lunak yang lengkap diluncurkan pada tahun 1998 dan dikenal sebagai “Mike Simmen” (singkatan dari *simulated man*-simulasi manusia). Fitur yang ada pada Mike terdiri dari empat tingkat kesulitan – *beginner* (dasar), *intermediate* (lanjutan), *advanced* (mahir) atau *professional* (profesional) – dan mampu memberikan tanggapan yang bervariasi dari satu

wawancara ke wawancara lainnya, sebagai contoh, bekerja sama dalam satu wawancara, bersikap defensif atau bahkan berbohong pada wawancara lainnya. Perubahan terjadi karena Mike “mengingat” karakter dari pertanyaan dan pernyataan pengguna serta mendasarkan tanggapan pada pola sikap tertentu yang yang terkait dengan skenario tertentu (contoh: bersalah atau tidak bersalah) serta muatan wawancara yang dilakukan.

Terlebih lagi “otak” Mike mempunyai komponen logika dan emosional. Komponen logika melacak tanggapan dan menjaganya tetap konsisten dan masuk akal, sementara komputer memilih perubahan keadaan emosional Mike secara acak sehingga pengguna tidak akan pernah tahu bagaimana Mike akan merespon suatu wawancara (contoh: marah pada satu wawancara, dan tidak mau bekerjasama pada lainnya).

Untuk dapat mewawancarai Mike dengan baik, pengguna perlu memiliki keterampilan wawancara yang baik, seperti mengembangkan hubungan dan menentukan batasan pola respon yang normal. Proses tersebut meliputi:

“Ketika pertanyaan dan tanggapan Mike muncul di salah satu bagian layar komputer, pengguna melihat tampilan seluruh tubuh dari Mike duduk di hadapan mereka dan wajah jarak dekatnya di bagian layar yang lain. Pada waktu yang bersamaan, pengguna akan mendengar pertanyaan mereka disusul dengan tanggapan dari Mike. Sementara “otak” Mike menentukan sikap dan tanggapan yang akan diberikan, seorang aktor akan memerankan respon secara visual dan suara. Presentasi visual dan audio ini mampu mensimulasikan wawancara yang sebenarnya secara realistis” (Einspahr, 2000, hal. 18).

Menurut Einspahr (2000) piranti lunak wawancara telah digunakan untuk melengkapi instruksi di dalam kelas bagi semua agen FBI yang menjadi peserta pelatihan sejak 1 Oktober 1998, dan pada awal tahun 1999 piranti lunak ini diperbanyak dan disebar ke semua kantor untuk dapat digunakan oleh petugas di lapangan. Instruktur melaporkan peningkatan keterampilan wawancara yang signifikan dari para pengguna piranti lunak tersebut – meskipun Einspahr tidak menjelaskan bagaimana pengukuran keberhasilan ini dilakukan. Meskipun tidak akan mampu menggantikan wawancara dengan orang yang sebenarnya, program ini mampu melatih siswa untuk belajar dari kesalahannya dalam lingkungan pelatihan yang mendukung.

Artikel ini merupakan satu-satunya tulisan yang ditemukan tentang program ini dan tidak ada evaluasi tentang tingkat efektivitasnya, namun cukup menarik untuk dibahas dalam tinjauan ini. Apabila efektif, maka kemungkinan penggunaan piranti lunak atau

sejenisnya dapat digunakan oleh petugas kepolisian. Biaya pembuatannya mungkin akan cukup tinggi namun akan tertutupi dengan biaya yang bisa dihemat dari waktu pelatihan yang lebih pendek dan hasil keterampilan wawancara yang dihasilkan.

INGGRIS DAN WALES

Kepolisian di Inggris dan Wales telah menggunakan piranti rekaman wawancara secara elektronik sejak tahun 1986 ketika perekaman suara untuk wawancara tersangka diwajibkan oleh Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 bagi semua orang yang terkait dengan pelanggaran yang bisa menghasilkan dakwaan (Ord et al, 2004). Ini meliputi percakapan antara penyidik dan tersangka, sebagian besar kesatuan kepolisian (termasuk yurisdiksi negara barat lain yang mengikuti contoh Inggris dan Wales) harus menghadapi situasi yang mana mereka mengalami kekurangan peralatan yang layak untuk digunakan di lapangan, sehingga mereka mengatasinya dengan cara mengkonfirmasi kejadian dan percakapan terdahulu selama sesi wawancara yang direkam (Ord et al, 2004).

Selain untuk menjaga integritas barang bukti, keuntungan dari perekaman wawancara secara elektronik juga untuk melihat keterampilan dan karakteristik dasar wawancara (Milne & Bull, 2003). Rekaman ini ideal digunakan untuk menilai kebutuhan pelatihan lanjutan dan analisa pernyataan oleh ahli linguistik (contoh: Adams, 2004; Heydon, 2004).

Ketersediaan rekaman menunjukkan bahwa sekarang ruang wawancara polisi menjadi tempat yang sering menjadi obyek penelitian. Meskipun ijin untuk mendengarkan atau melihat rekaman tidak mudah diberikan, peneliti Inggris seperti John Baldwin, Rebecca Milne dan Ray Bull telah mendapatkannya sejak sekitar tahun 1991. Hingga pada kisaran belakangan ini, penelitian tersebut umumnya melibatkan wawancara tersangka. Meskipun Komisi Kerajaan untuk Peradilan Pidana yang dilaporkan pada tahun 1993 (Lea, 2004) merekomendasikan rekaman untuk pernyataan saksi, namun hal ini jarang dilakukan (Clarke & Milne, 2001).

VIDEO DIBANDINGKAN DENGAN AUDIO

Rekaman visual secara umum lebih disukai dibandingkan dengan rekaman suara karena keuntungan tambahan yang didapat yang memungkinkan pengamat melihat keseluruhan pesan yang dikomunikasikan oleh para pihak dalam wawancara (Burbeck, 2001; Takitimu & Schollum, 1991). Dengan kata lain, perekaman visual menunjukkan muatan secara faktual dari apa yang disampaikan, sikap sebenarnya ketika mengatakan suatu hal dan apakah hal tersebut didukung oleh

komunikasi non-lisan (dengan kemungkinan pesan kasat mata yang 'bocor').

Yang menarik adalah meskipun ada banyak perbedaan antara literatur Amerika dan Inggris, beberapa tulisan dari Amerika mengenai wawancara secara kinetik (misalnya: Walters, 2002, Zuwalski & Wicklander, 2001) memberikan argumen yang cukup kuat untuk mendukung wawancara yang direkam video. Ilmu psikologi menunjukkan perkataan seseorang terhubung dengan sikap non-lisannya. Oleh karena itu, pengamatan terhadap dua aspek tersebut merupakan hal yang penting. Rekaman dari suatu pembicaraan dapat disalahtafsirkan sehingga akan kehilangan sesuatu yang mungkin dikomunikasikan secara non-lisan.

Argumen lainnya adalah hubungan dengan analisa 'bahasa non-lisan' dari terwawancara seperti "volume suara, getaran, kecepatan, nada, ritme dan penekanan pada kata-kata tertentu" – semua hal di luar dari perkataan yang diucapkan yang juga mengandung makna (Milne, 2004, hal. 26). Meskipun hal ini dapat dilakukan dari rekaman audio saja, namun analisisnya dapat ditingkatkan dengan melihat bahasa tubuh, ekspresi wajah dan banyak hal lainnya dari orang yang bersangkutan.

DAPAT DITERIMA OLEH PENGADILAN (ADMISSABILITY)

Berdasarkan Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Kerajaan (Inggris dan Wales), rekaman video dapat diterima sebagai bukti seperti halnya hasil fotografi dan rekaman suara. Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 telah menyarankan agar semua wawancara dengan saksi yang rentan harus direkam dalam bentuk video, kemudian jika disetujui oleh pengadilan, rekaman tersebut dapat digunakan sebagai bukti utama dari saksi.

Panduan NCOF (2003) untuk tahap ke 3 dari strategi wawancara investigatif ACPO menggariskan proses yang digunakan. Khususnya ditekankan peran pengambil keputusan. Ketika diputuskan untuk merekam wawancara saksi yang rentan dengan video, polisi harus mempertimbangkan "apakah kualitas dari bukti saksi dapat dimaksimalkan" (hal. 28).

Serupa dengan hal tersebut, menentukan apakah suatu rekaman video harus diputar, "pengadilan berkewajiban untuk mempertimbangkan keadaan kasus tersebut, termasuk pandangan saksi dan apakah ada kemungkinan penggunaan rekaman video akan menghalangi pengujian bukti oleh para pihak" (hal. 28). Terlebih lagi, panduan menekankan bahwa polisi harus memastikan tidak memberi kesan kepada saksi rentan bahwa rekaman keterangan tersebut membebaskannya dari bersaksi langsung di

pengadilan.

Meskipun tidak ada keharusan bagi polisi untuk memeriksa tersangka yang rentan dengan rekaman video, tetapi isi dan makna dari Undang-Undang ini menyiratkan bahwa petugas penyidik harus melihat jauh ke depan untuk memperkirakan proses hukum yang akan terjadi ketika mereka mempertimbangkan strategi wawancara. Hal ini merupakan pendekatan yang masuk akal bagi pelaksanaan wawancara investigatif.

TETAP MENGANALKAN PERNYATAAN TERTULIS

Peningkatan penggunaan video untuk merekam wawancara terhadap korban dan saksi yang rentan beberapa tahun terakhir ini berarti juga semakin banyak yang dapat ditunjukkan di pengadilan. Namun, ini sebenarnya hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan wawancara. Saat ini, polisi masih mengandalkan pernyataan tertulis yang disiapkan selama wawancara atau setelah selesainya wawancara. Dan penelitian terus menemukan pola praktik yang buruk dalam menangkap substansi dari apa yang benar-benar terucap. Sebagai contoh, dalam analisisnya terhadap wawancara dan pernyataan saksi, Daniell (1999) menemukan bahwa pernyataan yang disiapkan oleh pewawancara terbaik sekalipun sering kali menyimpang dari informasi yang diberikan oleh saksi.

Kekurangan serupa juga dilaporkan oleh Hooke dan Knox (1995) yang membandingkan ringkasan dari wawancara yang disiapkan oleh personil sipil dan polisi tersumpah. Kualitas dalam kedua kasus cukup bervariasi, yang mana sebagian besar sangat tidak memuaskan. Studi menemukan bahwa ringkasan yang disiapkan oleh staf sipil secara konsisten lebih berkualitas dibandingkan dengan yang disiapkan oleh petugas tersumpah – keduanya pada poin khusus (seperti lingkupan, akurasi, relevansi, koherensi, dan literasi) dan juga pada penilaian secara keseluruhan.

Schollum (1996) mengatakan bahwa sikap semua pihak dalam sistem – termasuk polisi, pengacara pembela, dan penuntut umum – yang mengandalkan ringkasan yang seringkali menyesatkan, menyimpang atau berkualitas buruk adalah suatu hal yang tidak dapat diterima dan “tidak memenuhi standar keterbukaan dan keadilan yang menjadi dasar penggunaan rekaman video” (hal. 743).

Kekurangan yang terdapat pada pernyataan tertulis dan ringkasan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan vonis dan kesalahan pembebasan terdakwa. Belakangan ini, para pengacara dianjurkan untuk melihat pernyataan tertulis atau ringkasan dengan sangat teliti dan kritis (contoh Ede dan Shepherd, 2000). Bahkan, Milne dan Bull (2003) menemukan

bahwa banyak dari kalangan polisi, pengacara, hakim dan psikolog yang berpendapat bahwa banyak pernyataan tertulis tidak dapat digunakan dan tidak bisa diterima sebagai ‘bukti yang baik’. Langkah untuk merekam pernyataan dan kemudian menunjukkannya di hadapan pengadilan berpotensi mengurangi risiko tersebut di atas.

MEREKAM WAWANCARA SAKSI DENGAN PERALATAN ELEKTRONIK / DIGITAL

Beberapa kesatuan kepolisian di Inggris telah menetapkan kriteria terbatas – seperti tingkat keseriusan kejadian – untuk menentukan apakah perlu merekam keterangan para saksi (Shepherd & Milne, 1999). Hal ini sejalan dengan pendapat belakangan ini yang mendorong pengadopsian rekaman audio atau video sebagai cara untuk memelihara keterangan asli dari saksi mata. Sebagai contoh, Milne dan Bull (1999, hal. 183) menulis bahwa

“kebutuhan untuk merekam seluruh wawancara, baik itu dengan tersangka, saksi ataupun korban, terlepas dari usia terwawancara, tidak bisa lebih ditegaskan lagi”.

Milne dan Bull (2003) menegaskan hal ini dalam kritik mereka terhadap praktik saat ini dalam mengambil pernyataan tertulis dari saksi:

“Tidak mungkin untuk melakukan wawancara yang baik, berkonsentrasi pada perilaku lisan dan non-lisan dari terwawancara, mendengarkan apa yang dikatakannya, menyusun pertanyaan berikutnya dan seterusnya, dan di saat yang sama juga menulis semua perkataan dari orang tersebut. Harus ada yang dilepaskan karena melakukan semua ini secara bersamaan akan merugikan wawancaranya dan juga keterangan saksi” (hal. 115).

Pendapat Dr Milne mengenai hal ini cukup kuat dan secara gamblang dikatakan dalam paragraf berikut ini (Shepherd & Milne, 1999, hal. 141):

“Apabila rekaman wawancara saksi tetap menjadi diskresi petugas, maka mayoritas wawancara tersebut tidak akan direkam. Petugas akan melakukan wawancara sebagaimana biasanya, merasa aman karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi, performa dari petugas itu dan juga efeknya, apa yang sebenarnya dikatakan oleh saksi atau yang dilarang untuk dikatakan, dan juga keabsahan dari pernyataan yang disusun oleh petugas”.

Milne dan Bull (1999) menyatakan bahwa kekurangan dalam pernyataan tertulis dari polisi dapat

mengakibatkan efek yang mendasar terhadap kredibilitas saksi di pengadilan. Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999, hal. 223) mendukung pandangan ini dengan mengatakan bahwa dalam pandangan mereka yang berpengalaman sebagai pengacara, perbedaan antara pernyataan wawancara dan keterangan saksi di depan sidang “seringkali menjadi dasar dibebaskannya seseorang yang bersalah”.

Senada dengan pernyataan di atas, Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999) berpendapat bahwa penggunaan alat perekam elektronik dalam semua keterangan saksi dapat memberikan keuntungan besar bagi proses hukum. Mereka mendukung argumen ini dengan memberikan contoh sebagai berikut:

“... hasil dramatis dari persidangan di peradilan pidana pusat pada bulan Februari 1998, dilaporkan secara luas oleh pers nasional dan media massa (lihat The Times, 4 dan 6 Februari 1998). Diadili untuk kasus perkosaan, dua anak umur 10 tahun, terdakwa termuda dalam sejarah, kemudian oleh hakim diperintahkan untuk dibebaskan karena korban, yang berusia sebelas tahun, tidak membuat pengaduan atas kasus perkosaan dalam wawancara selama 45 menit dengan polisi perempuan yang direkam dalam bentuk video. Ketika sesi wawancara sepertinya sudah berakhir, petugas masuk kembali ke dalam ruangan dan mengajukan suatu pertanyaan yang oleh hakim dianggap ‘mengarahkan dan sangat tidak pantas,’ hakim kemudian mengamati bagaimana hal ini kemudian mendikte perkataan korban. Setelah itu, tuduhan perkosaan pun dibatalkan karena dianggap telah tercemar dan tidak layak untuk diajukan di hadapan juri” (hal. 232).

PERNYATAAN TERTULIS MASIH DIPERLUKAN

Beberapa komentator telah menyarankan bahwa rekaman elektronik harus disertai dengan pernyataan tertulis dari wawancara tersebut. Menurut Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999) ada beberapa cara untuk melakukan hal ini, dengan semua pro dan kontranya (lihat tabel 15).

Pendekatan oleh Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999) mengasumsikan bahwa pernyataan formal tertulis diperlukan meskipun rekaman wawancara telah dibuat. Hal ini dapat diperdebatkan. Dapat dikatakan bahwa rekaman itu sendiri merupakan “pernyataan”. Rekaman dan semua transkripsi berikutnya sudah mewakili semua yang dikatakan oleh saksi dalam wawancara sehingga tidak lagi diperlukan adanya pernyataan tertulis lain.

Namun, investigasi memerlukan akses cepat terhadap apa yang dikatakan dalam wawancara dan tidak bisa menunggu hingga transkripsinya selesai. Sebagaimana dibahas dalam model wawancara PEACE, pewawancara bisa membuat catatan ringkas selama wawancara sehingga mereka terus mengikuti apa yang disampaikan oleh terwawancara. Selama wawancara PEACE, petugas akan mendapatkan keterangan pertama, diikuti keterangan kedua dan ketiga untuk mendapatkan detail yang lebih baik. Rekaman akan menjadi ‘pernyataan’ tetapi petugas dapat menggunakan catatan mereka untuk menyiapkan rangkuman yang dapat digunakan oleh tim penyelidikan, atau catatan itu dapat berfungsi sebagai rekaman wawancara. Apapun yang dipilih, proses penyelidikan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu transkripsi.

Pernyataan	Keuntungan	Kerugian
Ringkasan yang disiapkan setelah wawancara oleh petugas (<i>ex post facto</i>)	Petugas dapat mendengarkan rekaman sesering mungkin untuk menyegarkan ingatannya tentang poin-poin utama. Dapat dilakukan pada waktu paling sesuai bagi petugas	Memerlukan sesi tindak-lanjut dengan terwawancara untuk mendapatkan tanda tangan (dan persetujuan terhadap isinya). Terwawancara mungkin ingin mengurangi atau menambah beberapa hal, sehingga perlu mengulas kembali rekaman wawancara dan merekam perubahan atau klarifikasi yang dibuat, kemudian menambahkannya pada pernyataan tertulis.
Disiapkan pada akhir wawancara yang direkam ketika terwawancara masih ada	Petugas dan terwawancara mendapatkan informasi yang masih segar. Petugas dapat membuat pernyataan yang menyeluruh dan mendetail, bebas dari pengulangan dan ketidakjelasan, dapat dicek langsung dengan terwawancara untuk mendapatkan akurasi. Perubahan dapat direkam dan dimasukkan dalam pernyataan tertulis.	Kemungkinan kehilangan beberapa detail yang dapat diingat dengan mendengarkan atau melihat kembali wawancaranya. Memperpanjang waktu kehadiran terwawancara sehingga dapat mengakibatkan kelelahan (meskipun hal ini mungkin lebih baik daripada wawancara awal yang lebih pendek dibanding apabila pernyataannya ditulis dari awal)

Table 15: Menyiapkan pernyataan tertulis setelah wawancara saksi

ASPEK-ASPEK PRAKTIS DARI MEREKAM WAWANCARA DENGAN SEMUA SAKSI

Kelayakan

Meskipun pelaksanaan Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999 mengatur dengan jelas tentang rekaman video untuk wawancara dengan saksi rentan jika dianggap hal ini akan memberikan hasil yang maksimal atas bukti yang ada, namun hanya sedikit praktisi yang mendukung perekaman semua wawancara saksi secara elektronik.

Bahkan pendukung terkuat (seperti Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999; dan Milne & Bull, 1999) menyadari bahwa hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan atau diperlukan. Kepolisian berurusan dengan banyak kasus kejahatan setiap tahunnya (contoh: 5,935 juta pada tahun 2003/04 untuk Inggris dan Wales; 0,426 juta pada tahun 2003/04 untuk Selandia Baru). Banyak kasus-kasus ini yang cukup jelas dan dapat ditangani secara cepat dan efisien. Pengeluaran yang berhubungan dengan perekaman dan penyimpanan semua wawancara saksi yang relevan mungkin akan menghabiskan biaya lebih besar dari dana yang ada dan mengalahkan manfaat yang didapatkan.

Bahkan pada kasus besar, seperti pembunuhan berencana sekalipun, tetap tidak praktis untuk merekam setiap wawancara. Dalam beberapa kasus pembunuhan, misalnya, polisi bisa mewawancarai ratusan saksi. Hal ini biasanya harus dilakukan dalam rentang waktu yang pendek – tidak hanya untuk mengumpulkan petunjuk yang penting tapi juga untuk membatasi kontaminasi memori yang dapat terjadi pada saksi potensial ketika mereka saling bicara satu sama lain (Gabbert et al, 2004). Hal ini memerlukan keterlibatan banyak petugas, dengan sebagian besar wawancara dilaksanakan jauh dari kantor polisi. Jika harus mempersiapkan peralatan video untuk merekam semua wawancara ini membuatnya menjadi tidak praktis. Akan tetapi, dalam jangka panjang, kemajuan teknologi mungkin dapat mengatasi segala kesulitan yang mungkin terjadi.

Kriteria pemilihan

Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999, hal. 237-238) mendiskusikan beberapa kemungkinan kriteria untuk memutuskan perlunya merekam pernyataan saksi, yang mencakup:

- tingkat keseriusan pelanggaran yang sedang diselidiki (contoh, pembunuhan dan penyerangan seksual serius)
- kemungkinan saksi akan mengatakan sesuatu yang dapat diperdebatkan di proses hukum berikutnya
- penilaian oleh petugas yang menangani atau petugas senior (contoh: pangkat inspektur)

- semua saksi mata terhadap kejadian sebenarnya yang sedang diselidiki
- saksi yang terlibat percakapan yang relevan dengan tersangka setelah kejadian
- saksi yang bersikap bermusuhan atau berpotensi bertindak memusuhi
- setiap orang yang diketahui bersama dengan korban sebelum kejadian
- saksi yang menemukan jasad, dan
- petugas polisi yang pertama kali menerima panggilan dan yang menyaksikan kejadian atau yang menahan tersangka.

Beberapa kesatuan kepolisian di Inggris Raya (contoh: Kepolisian Northumbria) telah mengimplementasikan sistem yang mana petugas menggunakan kriteria tertentu untuk mengambil keputusan mengenai kapan harus merekam pernyataan saksi (*komunikasi pribadi*). Sampai saat ini belum ada evaluasi terhadap efektivitas sistem ini.

Dalam “Doktrin Inti Investigasi” (NCPE, 2005) yang baru saja dikeluarkan, disarankan untuk merekam dengan video wawancara saksi untuk kasus-kasus seperti: pembunuhan terencana, pembunuhan tidak direncanakan, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, penganiayaan serius, kejahatan seksual, penculikan, perampokan dengan senjata api, dan percobaan atau konspirasi kejahatan yang berhubungan dengan daftar di atas. Doktrin juga menganjurkan bagi setiap petugas kepolisian yang menyaksikan kejahatan sebagaimana disebutkan di atas harus dianggap sebagai saksi penting dan harus direkam menggunakan video (hal. 87).

Dalam menentukan kriteria mana yang akan digunakan, dan memastikan bahwa petugas mematuhi hal ini, merupakan tugas yang tidak ringan. Shepherd dan Milne (1999, hal. 141) memperingatkan bahwa:

“Selama keputusan untuk merekam bergantung dari persepsi subjektif petugas tentang keseriusan kejadian dan penilaian pasca kejadian terkait dengan pentingnya saksi dan tingkat keseriusan kejahatan yang terjadi, kualitas wawancara saksi akan tetap menjadi ganjalan untuk keefektifan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi”.

Kalaupun anggapan bahwa merekam semua korban dan saksi secara elektronik tidak memungkinkan dan tidak diperlukan, dapat diterima, akan tetap sulit untuk menghindari subjektifitas yang mungkin terjadi.

Transkripsi

Jika jumlah wawancara terhadap saksi dan korban yang dapat direkam semakin banyak, hal ini akan menghasilkan lebih banyak transkripsi. Beberapa hal perlu dipertimbangkan, termasuk:

- keperluan sumber daya tambahan (orang dan peralatan)

- perlunya petugas yang mewawancarai untuk membandingkan transkripsi dan rekaman (atau kemungkinan tugas ini dapat dilakukan oleh petugas sipil)
- apakah transkripsi atau rekaman (atau keduanya) digunakan di pengadilan
- masalah berbagi informasi. Sebagai contoh: apakah transkripsi dapat ditahan untuk tidak diberikan kepada pengacara pembela
- kebutuhan akan ringkasan informasi yang relevan oleh tim penyidik sesegera mungkin setelah wawancara dilaksanakan
- efek psikologis yang mungkin dialami oleh juru ketik setelah mentranskripsikan sekian banyak wawancara dengan korban
- waktu yang diperlukan untuk mengedit transkrip guna menghilangkan semua informasi yang tidak diperlukan (Ede & Shepherd, 2000; Takitimu & Reid, 1994).

Peralatan perekam

Sudah saatnya memikirkan peralatan apa yang diperlukan untuk merekam wawancara saksi. Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999, hal. 240) mengatakan bahwa peralatan khusus seperti yang digunakan untuk wawancara tersangka tidak diperlukan untuk merekam wawancara saksi. Hal ini ada benarnya, karena wawancara dengan saksi dan korban seringkali dilaksanakan di lokasi yang jauh dari kantor polisi, dan tidak praktis untuk menggunakan sistem perekam dengan ukuran yang sama dengan yang digunakan oleh banyak petugas untuk melakukan wawancara tersangka. Meskipun beberapa negara, Selandia Baru contohnya, memiliki sejumlah video portabel yang terbatas yang dapat digunakan untuk wawancara di rumah sakit dan wawancara lainnya (Takitimu & Schollum, 1991), tipe yang lebih kecil masih dapat dikembangkan dengan mudah, terutama karena organisasi kita bergeser dari kaset rekaman audio dan video ke sistem digital.

ruangan khusus untuk mewawancarai saksi dan sebagian besar saksi menyetujui untuk melakukan wawancara di ruang tersebut. Clarke dan Milne (2001) mengemukakan satu poin menarik mengenai apabila wawancara saksi yang dilaksanakan di kantor polisi itu direkam, tindakan tersebut akan menimbulkan efek yang mana masyarakat akan merasa nyaman untuk masuk ke kantor polisi dan memberikan informasi.

Dengan mengesampingkan kemungkinan itu, beberapa wawancara saksi memang perlu dilakukan di luar kantor polisi seperti di jalan atau di rumah atau di tempat kerja yang bersangkutan. Peralatan yang telah tersedia mungkin bisa memenuhi kebutuhan polisi. Peralatan ini bisa berupa kamera DVD digital (dengan casing pelindung dan tripod portabel) atau laptop yang dilengkapi kamera sehingga aspek visual dan audionya dapat ditangkap. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, rekaman audio saja secara umum tidak dapat diterima disebabkan karena adanya batasan yang mana komunikasi non-lisan tidak terlihat dan juga kesulitan pada saat melakukan transkripsi.

Bagi pihak-pihak yang khawatir bahwa hasil rekaman dapat diubah, hal ini dipatahkan dengan kenyataan bahwa hampir tidak mungkin untuk mengedit suatu rekaman tanpa terdeteksi oleh ahli (Heaton-Armstrong & Wolchover, 1999). Namun, kebijakan mengenai perekaman wawancara saksi mungkin memerlukan rekaman 'utama' (*master copy*) yang belum diedit untuk digunakan dalam pemeriksaan.

Biaya

Faktor besar dalam penggunaan teknologi rekaman adalah pengadaan peralatan yang dibutuhkan. Tabel di bawah ini menunjukkan beberapa keuntungan dan kerugian antara alat yang dibuat khusus dengan alat yang tersedia di pasaran. Hal ini harus dipertimbangkan ketika kita ingin memperluas penggunaan peralatan elektronik dalam wawancara.

Idealnya, semua kantor polisi dilengkapi dengan

Peralatan	Keuntungan	Kerugian
Dibuat khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Dibuat untuk memenuhi persyaratan tertentu • Dapat menyembunyikan tombol atau sirkuit yang rumit • Mampu menyediakan rekaman 'master' sekaligus rekaman rangkapan • Tahan lama 	<ul style="list-style-type: none"> • Mahal • Komponen atau suku cadangnya susah ditemukan atau tidak ada di pasaran dalam waktu singkat • Memerlukan perbaikan atau pemeliharaan khusus • Menghambat kemampuan untuk memanfaatkan teknologi yang lebih baik atau lebih murah
Tersedia di pasar	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah dan murah didapatkan dan diganti • Keputusan untuk membuang akan lebih mudah ketika ada versi yang lebih baik tersedia di pasaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak sekuat seperti peralatan yang dibuat khusus • Melibatkan pekerjaan tambahan, seperti waktu yang diperlukan untuk menyalin produk aslinya • Dapat menghasilkan ketidakkonsistenan pada organisasi karena pilihan model dan produsen yang berbeda

- Petugas tidak menggunakannya secara hati-hati sebagaimana peralatan yang dibuat khusus

Table 16: Pro dan kontra penggunaan alat yang dibuat khusus versus peralatan rekaman tersedia di pasar.

Selain dari peralatan, pengeluaran lain yang terkait (lihat contoh dari Baldwin, 1992; Sullivan, 2004; Takitimu & Schollum, 1991) meliputi:

- restrukturisasi atau penyediaan fasilitas wawancara baru
- pelatihan personil untuk penggunaan peralatan dan teknik-teknik wawancara
- upah pegawai yang mentranskripsi rekaman
- penyimpanan kaset rekaman dan cakram padat
- biaya perawatan dan perbaikan
- waktu dan pengeluaran personil untuk:
 - mengambil rekaman dari ruang penyimpanan
 - memeriksa atau mendengarkan rekaman
 - mengedit bagian yang tidak dapat diterima
 - menyiapkan rangkuman rekaman untuk digunakan di pengadilan, dan
 - membuat rangkapan video untuk pihak pengacara pembela, pengadilan, dan para juri.

Penghematan

Kita perlu mempertimbangkan sejumlah penghematan dan manfaat yang terkait usulan penggunaan rekaman digital dan elektronik dalam wawancara saksi (Sullivan, 2004). Diantaranya meliputi:

- berkurangnya waktu di pengadilan, sebagai contoh: pemeriksaan silang terhadap saksi karena adanya ketidaksesuaian antara pernyataan dan apa yang disampaikan di dalam sidang
- bukti penuntutan yang lebih kuat
- menghemat waktu dan uang karena tidak perlu melakukan tahap pra-peradilan dan peradilan yang lama hanya untuk memastikan apa yang dikatakan oleh saksi
- pengurangan risiko terjadi kesalahan vonis bagi orang yang tidak bersalah atau yang sebenarnya bersalah tetapi dibebaskan
- para juri bisa memberikan putusan lebih cepat apabila tidak ada perdebatan mengenai kebenaran dari pernyataan saksi.

Heaton-Armstrong dan Wolchover (1999, hal. 243) mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan (peralatan, penambahan staf, dll.) lebih kecil jika dengan manfaat, misalnya “terhindar dari kewajiban membayar ganti rugi dalam jumlah besar pada pihak yang dakwaannya dibatalkan karena munculnya keraguan terhadap reliabilitas dan keabsahan metode wawancara secara tradisional”.

Menurut Sullivan (2004, hal. 24) “sebagian besar biaya muncul di awal, namun kemudian akan menghilang setelah peralatan dan fasilitas telah diberikan dan pelatihan sudah dilaksanakan. Sebaliknya, penghematan akan berlanjut selama perekaman elektronik masih dilaksanakan”. Kenyataannya, mungkin tidak sesederhana itu. Biaya besar untuk menyediakan ruang wawancara memang hanya akan terjadi sekali, dan peralatan yang ada tidak diganti secara rutin, tetapi staf tambahan dan pelatihan merupakan bentuk pembiayaan yang berkelanjutan. Apakah kemudian hal ini kemudian setimpal dengan penghematan waktu yang didapatkan, dan meningkatnya putusan bersalah dan vonis, namun tetap perlu dipertimbangkan secara seksama.

PENERIMAAN REKAMAN DIGITAL DI PENGADILAN

Dengan berakhirnya teknologi rekaman dengan menggunakan kaset video, polisi perlu memikirkan dampak yang terjadi dengan berpindah ke teknologi digital (Sullivan, 2004). Sebagai contoh, apakah penggunaan istilah ‘kaset video’ pada kebijakan, peraturan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini mempengaruhi penerimaan dari pengakuan yang didapat dengan peralatan digital?

Di Selandia Baru, dokuman yang berjudul Panduan Kebijakan dan Prosedur Rekaman Elektronik Wawancara Polisi menyebutkan “Rekaman elektronik...dengan kaset video” tapi tidak mendefinisikan istilah tersebut. Dan jelas penggunaan media lain selain dari kaset magnetic (seperti Cakram Padat (CD), Digital Video Disc (DVD), flash disk) tidak disebutkan. Tetapi di Selandia Baru, Kebijakan dan Panduan tidak memiliki status dalam hierarki perundang-undangan. Penggunaan bukti pengakuan ditentukan oleh pengadilan dengan menggunakan diskresi hukum untuk menjamin keadilan, kesukarelaan dan kebijakan publik. Oleh karena itu, apabila pengadilan merasa puas bahwa rekaman pengakuan tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, maka teknologi yang digunakan dalam proses rekaman tidak akan membuat materi kasus yang ada jadi tidak dapat diterima. Hal ini juga berlaku di yurisdiksi negara-negara yang mana peraturan perundang-undangan mengatur tentang penggunaan kaset video untuk wawancara kepolisian.

KESEDIAAN UNTUK DIREKAM

Pertimbangan lebih lanjut tentang kemungkinan saksi merasa keberatan apabila pernyataannya direkam

masih sedikit sekali diteliti. Tetapi informasi mengenai reaksi tersangka terhadap perekaman dapat sedikit membantu. Anggapan yang ada saat ini bahwa tersangka akan menolak untuk direkam ternyata tidak berdasar (Baldwin, 1992; Takitimu & Schollum, 1991). Pengalaman pihak kepolisian menunjukkan penggunaan peralatan rekaman tidak membuat petugas kesulitan untuk mendapatkan kerjasama, bisa diterima, dan pengakuan dari tersangka (Sullivan, 2004).

Jika tersangka, yang justru taruhannya lebih besar, mau direkam, maka kemungkinan besar para saksi dan korban akan merasakan hal yang sama. Satu dari sedikit penelitian tentang wawancara saksi yang direkam dilakukan oleh Clarke dan Milne (2001) sebagai bagian dari evaluasi Kantor Pusat terhadap model wawancara PEACE, dengan cara melengkapi petugas dengan peralatan perekam dan meminta mereka untuk merekam sejumlah wawancara saksi yang mereka lakukan. Laporan akhir tidak mengindikasikan adanya kesulitan dengan perubahan metode praktiknya.

MENJADI DIGITAL

Alat perekam VHS VCR telah digunakan sebagai standar selama 25 tahun, dan penggunaan HiFi VCRs oleh polisi (contoh, Kepolisian Selandia Baru) sudah dilakukan sejak akhir tahun 1980an (Takitimu & Schollum, 1991). Teknologi ini kemudian digantikan secara cepat oleh DVD yang merupakan generasi baru dari teknologi optik cakram padat penyimpanan data. Teknologi ini memiliki banyak keuntungan yang menarik untuk keperluan kepolisian (contoh, dapat menyimpan hingga 30 jam video kualitas VHS; dapat menampilkan hingga 9 sudut kamera (dengan sudut pandang yang berbeda yang dapat dipilih ketika diputar kembali); menggunakan menu tampilan pada layar; mempunyai kapabilitas untuk pencarian seketika dan memutar kembali; kuat (tidak berbekas karena dimainkan, namun dari kerusakan fisik); tidak rentan terhadap medan magnet; tahan panas; termasuk dapat diprogram (putar kembali dari bagian terpilih dengan urutan tertentu); mempunyai fitur untuk melakukan pembesaran digital hingga 2x atau 4x dari bagian tertentu dari gambar; bentuknya yang ringkas dan mudah disimpan dan digunakan (*komunikasi pribadi dengan pemasok di Selandia Baru*).

Selain dari keuntungan, DVD juga mempunyai kekurangan yang harus dipahami ketika memutuskan untuk menggunakan DVD sebagai perekam bukti. Perekam DVD yang berbasis PC secara khusus banyak mengalami masalah dengan sistem piranti lunak yang berhenti berfungsi dan waktu pakai perangkat kerasnya yang terbatas. Sebagai tambahan, perekam optik tidak dapat bertahan lama di lingkungan berdebu.

Sistem VHS yang ada akan segera ketinggalan zaman – beberapa perusahaan elektronik besar sudah mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mengeluarkan produk yang mendukung mesin VHS. Berdasarkan hal ini, banyak pihak kepolisian yang mulai mencari solusi pengganti untuk merekam wawancara investigatif.

Spesifikasi dari Polisi Federal Australia (*komunikasi pribadi*) membutuhkan sistem digital terbaru yang merefleksikan keuntungan di atas tapi juga harus mampu menyimpan rekaman wawancara dalam pusat data/server terpusat dan dapat diakses sesuai permintaan, memungkinkan petugas kepolisian memasukkan data yang berhubungan dengan wawancara ke dalam sistem yang baru sebelum rekaman dimulai, dan mengaplikasikan beberapa formulir guna melindungi rekaman digital dari tuduhan manipulasi yang mungkin terjadi.

Apakah kemudian industri dapat memenuhi permintaan ini masih belum dipastikan. Namun hal ini merupakan bidang yang harus mulai diperhatikan oleh polisi yang menggunakan peralatan perekam audio dan video, agar dapat tetap mempertahankan kemampuannya menghasilkan hasil rekaman yang dapat diandalkan.

Hal-hal lain terkait dengan teknologi

Bagian ini menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan rekaman wawancara polisi secara elektronik namun tidak dibahas panjang lebar karena keterbatasan tempat. Diantaranya berkaitan dengan penggunaan mikrofon (contoh: penempatan dan kualitas suara) dan penyimpanan serta pengambilan rekaman bukti.

Poin-poin utama

1. Pengadilan di Amerika Serikat telah menerima rekaman elektronik sebagai suatu sarana praktis dan terpercaya untuk mendokumentasikan wawancara polisi terhadap tersangka. Sebagian besar lembaga di Amerika Serikat memberikan kewenangan perekaman kepada petugas yang berwenang saat itu.
2. Undang-Undang Kepolisian dan Bukti Pidana tahun 1984 mewajibkan semua kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales untuk merekam wawancara tersangka dengan peralatan elektronik. Rekaman dari wawancara saksi merupakan fenomena terkini.
3. Semakin banyak lembaga kepolisian yang merekam paling tidak beberapa wawancara saksi.
4. Penelitian menunjukkan bahwa sudut pengambilan gambar kamera dapat memiliki pengaruh pada penilaian para juri terhadap bukti pengakuan secara sukarela.
5. Peralatan rekaman berganti dengan sangat cepat. VHS akan segera ketinggalan zaman dan tidak dapat digunakan lagi. Pihak kepolisian harus bersiap untuk mengganti sistem rekaman pita video yang ada sekarang.

LOKASI WAWANCARA

PENDAHULUAN

Lokasi wawancara investigasi merupakan hal yang penting dikarenakan dapat mempengaruhi hubungan yang terjadi antara semua pihak yang terlibat (Kepolisian Queensland, 2003). Kontrol polisi terhadap lokasi yang paling besar mungkin pada saat wawancara tersangka – sebagian besar dilakukan dalam ruangan wawancara milik polisi. Hal ini akan lebih terbatas pada saat wawancara saksi. Wawancara dapat dilaksanakan di kantor kepolisian namun sebagian besar dilaksanakan di rumah atau tempat kerja saksi (Moston & Stephenson, 1993). Mayoritas wawancara saksi secara informal oleh pihak kepolisian dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja (Szczesny, 2002).

MEWAWANCARAI TERSANGKA

Tidak ada perdebatan bahwa tersangka harus diwawancarai di tempat yang ditentukan oleh polisi. Biasanya dilaksanakan di kantor polisi namun apabila diperlukan maka terkadang dapat dilaksanakan di lokasi lainnya seperti di rumah sakit. Menurut Vessel (1998) petugas polisi dapat melakukan wawancara hanya apabila mereka bisa dapat menjamin privasi serta mampu mengontrol lingkungan sekitar. Secara khusus disebutkan:

“Pengaturan tempat yang baik adalah ruangan yang kecil, terkontrol, kedap suara dan tidak ada gangguan pengalih perhatian. Penyidik harus menghindari lingkungan dengan jendela, telepon, jam dinding, penyeranta, dan sistem interkom yang terlihat dengan jelas. Pengaturan tempat yang bebas dari gangguan pengalih perhatian akan mampu memaksa tersangka untuk merespon hanya pada pertanyaan yang diberikan. Hal ini juga memberikan kesempatan pada penyidik untuk melakukan pengamatan terhadap respon lisan dan non-lisan dari subjek terhadap permasalahan yang diberikan, sehingga mereka dapat mengetahui apakah reaksi yang terjadi merupakan hasil dari permasalahan yang diberikan dan bukan dari rangsangan luar lain.” (hal.2)

Namun ada perdebatan mengenai penempatan perabot dalam ruangan wawancara yang juga menyangkut keberadaan dan penempatan peralatan elektronik dan alat perekam. Tinjauan ini tidak membahas secara mendetil mengenai macam variasi ruangan, namun dapat dikatakan bahwa tidak ada kesepakatan baik dalam hal praktik maupun kebijakan mengenai hal ini. Namun ada beberapa ketentuan, sebagai contoh:

- menggunakan kursi berlengan, sementara yang lain menggunakan kursi serbaguna.
- menempatkan meja di antara tersangka dan pewawancara, sementara yang lain tidak menggunakan meja sama sekali, penempatan meja diposisikan sedemikian rupa agar pewawancara dapat tetap mencatat namun tidak menjadi penghalang antara pewawancara dan tersangka.
- memasang meja secara permanen (sekaligus dengan kursinya) ke lantai untuk mencegah tersangka menggunakan perabotan sebagai senjata; sementara yang lain agar ditempatkan sesuai dengan kebutuhan petugas yang ada.
- menggunakan alat bantu pengingat untuk memastikan bahwa semua hal yang menjadi perhatian dan tanggung jawab selama proses wawancara dapat ditangani dengan baik.

Sementara itu peneliti kenamaan seperti Clarke dan Milne (2001) menekankan pentingnya keberadaan alat pembantu pengingat, sementara yang lain merasa bahwa peralatan seperti itu tidak perlu ada dalam ruangan wawancara.

- menggunakan peralatan kamera yang diletakkan secara terbuka, sementara yang lain dapat diletakkan tersembunyi.
- menggunakan kamera tunggal yang memperlihatkan tersangka dan semua orang dalam ruangan; yang lain menggunakan kamera tersendiri yang berfokus pada tersangka; secara bertingkat, dua kamera atau lebih digunakan untuk membuat perspektif menyeluruh (sebagai contoh, gambar besar memperlihatkan bagian depan dari tersangka serta bagian belakang dan sedikit tampak samping dari petugas; gambar yang lebih kecil memperlihatkan tampak depan dari petugas serta bagian belakang dan sedikit tampak samping dari tersangka).

Arah atau orientasi

Milne (2004, hal. 25) memberikan saran untuk penempatan tempat duduk:

“Meskipun perbedaan budaya dapat terjadi, posisi saling berdampingan dapat diartikan sebagai kerjasama, dan percakapan dapat dilaksanakan secara nyaman pada posisi sudut 90° (seperti arah jarum jam pada pukul 13.50). Konfrontasi cenderung terjadi pada orientasi tatap muka. Dapat disimpulkan bahwa penempatan posisi dalam ruang wawancara dapat mempengaruhi hasil wawancara bahkan sebelum interaksi lisan dilakukan”.

PENEMPATAN OPTIMAL

Tabel berikut ini menunjukkan beberapa anjuran dari

beberapa literatur mengenai bagaimana sebuah ruangan wawancara tersangka seharusnya diatur.

Ruangan dasar

Ruangan sebaiknya berukuran kecil (sebagai contoh 8 hingga 10 kaki atau 2.5 hingga 3 meter), berventilasi baik, berwarna netral dengan tidak terlalu terang maupun terlalu gelap, paling tidak semi-kehadapan suara. Jendela yang ada agar tertutup dengan baik, dan seharusnya ada alat yang memastikan tidak adanya interupsi – seperti dipasangnya lampu merah yang menyala apabila ruangan sedang digunakan – meskipun ruangan tidak dipasangi kunci (Wicklander & Zulawski, 2003).

Kamera dan arah kamera

Penilaian yang akurat terhadap reliabilitas informasi yang diberikan memerlukan seluruh pihak yang berada di dalam ruangan diperlihatkan secara setara – baik menggunakan satu kamera atau lebih (Lassiter et al, 2002).

Perlengkapan dan peralatan

Ruangan harus dibuat sesederhana mungkin tanpa ada pengalih perhatian seperti adanya telepon, peralatan kantor, atau catatan yang ada di dinding (Vessel, 1998). Kursi yang digunakan tidak mempunyai roda atau dapat bergoyang dan cukup nyaman. Kursi tersangka harus memunggungi tembok sehingga dia tidak dapat bergerak secara berlebihan selama proses wawancara atau bergerak keluar dari cakupan kamera (Wicklander & Zulawski, 2003). Pengaturan posisi tempat duduk harus memungkinkan pewawancara dengan terwawancara untuk dapat terlibat dalam percakapan (CFIS, 2004) dan juga agar bahasa tubuh dapat terlihat dengan jelas (Walters, 2002). Selain itu keberadaan alat pembantu pengingat diperlukan dalam ruangan untuk mempermudah pewawancara (Milne & Bull, 1999).

MEWAWANCARAI KORBAN DAN SAKSI

Keberadaan ruangan yang nyaman bagi korban dan saksi merupakan hal yang penting. Studi dari Jordan terhadap delik pemerkosaan (2004, hal. 79) menunjukkan sekitar 49% menggambarkan atmosfer ruangan pada waktu wawancara dan pengambilan pernyataan yang “hangat dan mendukung”, sementara 51% sisanya mempunyai kesan yang lebih negatif yang menggambarkan ruangan yang “dingin, seperti ruangan klinik” (23%) dan “tidak nyata, buruk dan berlebihan” (28%). Hal-hal yang menambah persepsi negatif adalah wawancara dilaksanakan dalam ruangan yang dipenuhi dengan perlengkapan kepolisian atau banyaknya gangguan yang terjadi. Jordan (2004) menekankan pentingnya privasi dan kenyamanan sebagai salah satu prasyarat yang paling mendasar.

Proyek Safir

Aspek-aspek tersebut di atas sudah mendapatkan perhatian dari beberapa kesatuan kepolisian. Sebagai contoh, “Proyek Safir” yang dilaksanakan oleh Dinas Kepolisian Metropolitan pada April 2001 menunjukkan beberapa kekurangan dalam praktik dan pengaturan ruangan masih dapat diatasi. Proyek ini melingkupi ‘tempat aman’ yang mana tim spesialis yang terdiri dari polisi, penasihat dan psikolog, dan dokter serta perawat berlisensi khusus dari dinas kesehatan nasional (NHS) yang melaksanakan pendekatan ‘satu atap’ terhadap penyelidikan terhadap kejahatan seksual dan perawatan untuk korban (MPS, 2005).

Pelayanan secara khusus dapat dilaksanakan tergantung dari apakah korban berencana untuk melaporkan tindakan kejahatan tersebut kepada polisi. Pada ‘tempat aman’ di proyek safir ini, polisi yang tidak tersumpah bekerja sama dengan staf medis melalui berbagai prosedur, termasuk mewawancarai korban, mengumpulkan bukti ilmiah dan menyimpan contoh DNA. Sehingga, material yang bernilai penting dapat digunakan di persidangan pada kemudian hari. Penyelidikan secara menyeluruh hanya dilakukan apabila mendapatkan ijin dari korban. Dalam tulisannya di Guardian, jurnalis Raekha Prasad (9 Oktober 2001) menggarisbawahi bagaimana tempat aman ini merevolusi penyelidikan terhadap dugaan perkosaan dan penanganan terhadap korban.

“Sudah tidak ada lagi menunggu dokter forensik selama berjam-jam yang sangat menyiksa dan seringkali di ruangan penanganan kasus perkosaan yang buruk di kantor polisi – di mana korban tidak bisa membersihkan diri, minum atau sekedar buang air kecil dengan alasan agar bukti forensik dapat terjaga. Sudah tidak ada juga, masalah tambahan yang muncul ketika melaporkan kasus perkosaan kepada petugas polisi yang tidak berpengalaman dalam penyelidikan kasus kejahatan seksual dan tanpa disertai pelatihan khusus – yang menimbulkan persepsi umum bahwa tanggapan polisi terhadap korban perkosaan adalah sangat skeptis dan mengintimidasi.”

Sementara itu pendekatan secara layak terhadap korban dari kejahatan seksual yang serius tengah meluas di Inggris dan Wales, namun masih diragukan bahwa penanganan ini akan melebar pada korban dan saksi secara umum. Dengan proporsi yang lebih besar dari wawancara investigatif perlu dilakukan di kantor polisi, maka akan tergantung pada polisi untuk menyediakan fasilitas yang mampu mengurangi pengalaman buruk semaksimal mungkin, mendorong kerjasama, dan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya. Paling tidak diharapkan adanya privasi, kenyamanan, dan pewawancara yang memiliki kompetensi dan ketertarikan terhadap kasus yang ditangani.

PEMANTAUAN JARAK JAUH

Ruang wawancara polisi di wilayah yurisdiksi di negara-negara barat makin banyak menggunakan rekaman video dan pemantauan video. Hal ini berarti bahwa wawancara tidak hanya dapat direkam, namun apapun yang diucapkan dan dilakukan di dalam ruangan dapat dipantau dari lokasi lain. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri 50/1995 yang mengatur mengenai pemantauan yang direkam menekankan bahwa tersangka dan penasihat hukumnya harus mengetahui kapan pemantauan jarak jauh dilakukan, dan pihak polisi harus menjamin bahwa percakapan yang bersifat rahasia tidak mungkin didengar pihak lain yang tidak berkepentingan.

Terlepas dari edaran diatas, Shepherr (2004, hal. 205) memperingatkan agar penasihat hukum harus bersikap waspada dalam ruangan yang diperuntukkan oleh polisi untuk berkonsultasi:

“Tidak ada jaminan bahwa polisi tidak akan merekam konsultasi tersebut secara ‘tidak sengaja’ dengan cara menyalakan mikrofon atau perekam video, [oleh karena itu] penasihat hukum harus selalu menanyakan pada petugas tahanan dan/atau petugas penyidik untuk:

- *Menjelaskan kepada anda mengenai fasilitas pemantauan jarak jauh yang ada di ruangan;*
- *Menunjukkan lokasi lampu penanda bahwa pemantauan ‘sedang beroperasi’;*
- *Mengkonfirmasi bahwa konsultasi tersebut tidak akan dipantau audionya.*

Jenis perhatian ini menggambarkan bagaimana hubungan antara polisi dan pengacara pembela di Inggris dan Wales. Peringatan serupa belum diperlukan di Selandia Baru. Ruang wawancara secara rutin diatur agar wawancara dapat dipantau ketika sedang dilaksanakan (Takitimu & Reid, 1994). Hal ini memungkinkan para penasihat untuk menolong dalam kasus yang kompleks, penyidik mendapatkan informasi yang vital secepat mungkin, dan pengawas memeriksa kemampuan wawancara bawahannya.

Pemantauan melalui pewawancara kedua

Wawancara yang melibatkan anak-anak memerlukan orang kedua untuk memantau wawancara dari ruangan terpisah dari ruangan tempat wawancara. Orang ini akan mencatat dan meyakinkan bahwa pewawancara utama tidak melewatkan apapun. Hal ini mengingat bahwa pewawancara utama tidak dapat mencatat dan harus memberikan perhatian penuh kepada terwawancara (Milne & Bull, 1999), pihak kepolisian juga menggunakan pendekatan ini terhadap jenis wawancara lainnya.

Di Irlandia Utara, sebagai contoh, ruang wawancara saksi ditata sehingga pewawancara utama (pertama) melaksanakan wawancara di satu ruangan sementara

pewawancara kedua memantau dari ruangan yang bersebelahan. Istilah pewawancara kedua digunakan untuk menjamin bahwa para petugas mengetahui pentingnya peran ini – tidak hanya untuk memastikan agar semua peralatan berfungsi penuh dan mencatat, namun juga untuk memperhatikan hal-hal yang tidak konsisten atau tertinggal dan menyampaikannya kepada pewawancara pertama melalui alat pendengar yang digunakan di telinga pewawancara utama (*korespondensi pribadi dengan Sersan Valerie Brady PSNI*).

Pendekatan ini disarankan untuk wawancara saksi yang rentan, terintimidasi dan penting. Bahkan ketika terbatas hanya pada situasi tersebut, adanya dua ruangan untuk wawancara saksi dan bukannya hanya satu ruangan menimbulkan dampak terhadap sumber daya yang dikeluarkan polisi. Namun hal ini makin disarankan oleh banyak pihak (*misalnya Dr Becky Milne dan DCI Gary Shaw, komunikasi pribadi*) sebagai hal yang vital untuk mencapai rasa keadilan yang lebih baik dengan rasa puas dari korban, kualitas informasi hasil penyelidikan yang lebih baik, bukti-bukti yang memenuhi persyaratan untuk penuntutan, pengakuan bersalah yang lebih awal, dan sebagainya.

Poin-poin utama

1. Polisi harus mampu mengendalikan lokasi dari wawancara investigasi semaksimal mungkin. Adanya gangguan di rumah atau tempat kerja saksi tidak kondusif bagi wawancara yang efektif.
2. Pada ruangan wawancara tersangka harus diyakinkan bahwa kamera terfokus pada semua pihak secara merata.
3. Ruang harus bebas dari gangguan, letakkan meja pada sisi petugas dan bukan antara petugas dan tersangka, dan sediakan alat pembantu pengingat untuk memenuhi persyaratan hukum dan lainnya.
4. Privasi dan kenyamanan dari saksi merupakan pertimbangan utama.
5. Dua pewawancara (satu berada di ruangan wawancara dengan saksi dan yang lainnya berada di ruangan yang bersebelahan melakukan pencatatan, mengoperasikan peralatan agar berfungsi, dan berkomunikasi dengan pewawancara utama mengenai ketidak konsistenan dan hal-hal lain yang mungkin terlewat) semakin disarankan sebagai hal yang penting dalam wawancara saksi rentan, terintimidasi, dan penting.

ISI PELATIHAN

Tabel berikut ini diberikan sebagai rangkuman dari unsur-unsur penting yang direkomendasikan untuk dimasukkan pada pelatihan tentang wawancara investigatif. Elemen-elemen ini bersumber dari penelitian internasional dan telah diidentifikasi dan didiskusikan pada bagian awal dari tinjauan ini.

1. Pentingnya dan peran dari wawancara investigatif

- Tipe-tipe wawancara investigatif
- Definisi: korban, pelapor, saksi, tersangka, penyelidik, wawancara vs interogasi
- Prinsip-prinsip wawancara investigatif
- Wawancara yang etis
- Kesalahan hukum

2. Pengaruh psikologi

- Keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal
- Bagaimana memori bekerja
- Bahasa tubuh / komunikasi non-lisan / pengelabuan
- Pengakuan palsu / *suggestibility*
- Memahami penolakan
- Terwawancara – korban, saksi, tersangka
- Bertanya
- Mendengarkan
- Memahami ‘kerentanan’

3. Model wawancara PEACE

- Latar belakang
 - *Planning and Preparation* (Perencanaan dan Persiapan)
 - *Engage and Explain* (Terlibat dan Jelaskan)
 - *Account* (Keterangan)
 - *Closure* (Penutup)
 - *Evaluation* (Evaluasi)
- Wawancara ‘free recall’/‘keterangan bebas’ (FR)
- Wawancara ‘*conversation management*’/‘manajemen percakapan’ (CM)
- Wawancara ‘*enhanced cognitive interview*’/‘kognitif yang disempurnakan’ (ECI)
- Perlengkapan umum pada teknik praktis

4. Pengetahuan dan persyaratan hukum

- Putusan hakim
- Hak-hak
- Peringatan

- Pengungkapan
- Berhubungan dengan pengacara
- Kasus hukum yang relevan

5. Praktik dan prosedur

- Bagaimana untuk:
 - melakukan wawancara ‘jalan-jalan’
 - menyimpan wawancara ‘tercatat’
 - menulis keterangan yang lengkap, terpercaya, dan akurat
 - melaksanakan wawancara dengan saksi yang mau bekerja sama (FR)
 - melaksanakan wawancara dengan saksi yang tidak mau bekerja sama (CM)
 - melaksanakan wawancara dengan tersangka yang mau bekerja sama (FR)
 - melaksanakan wawancara dengan tersangka tidak yang mau bekerja sama (CM)
 - melakukan wawancara visual (dengan tersangka, korban, dan saksi)
 - menulis rangkuman dari wawancara yang terekam secara visual
 - mengenali dan menangani terwawancara yang rawan dengan baik

Tabel 17: Unsur-unsur utama dari wawancara investigatif sebagaimana tertera dalam literatur

Tabel di atas menawarkan pendekatan logis untuk pelatihan wawancara investigatif – dari memahami mengapa wawancara investigatif itu penting dan mengapa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan etika, untuk memahami dasar teori dari praktik yang baik, hingga dengan bagaimana melakukannya dengan baik. Dasar-dasar ini kemudian dibangun seiring dari perkembangan karir seseorang. Sebagaimana dicatat oleh Strongman (1994, hal. 21-23):

“Pada akhir pelatihan dasarnya, para petugas polisi seharusnya merasa nyaman dan yakin bahwa mereka mampu menghadapi situasi wawancara yang standar ... pada tahap selanjutnya dari pelatihan wawancara formal ... semestinya dalam bentuk yang lebih halus dan lebih baik dari pelatihan awalnya, yang dibangun dari pengalaman wawancara yang dimiliki oleh petugas kepolisian selama bertugas ... Penekanannya selalu pada peningkatan kemampuan dan bukan pada mengumpulkan pengetahuan.”

TUJUAN PELATIHAN

Literatur (yang telah dijelaskan sebelumnya pada

dokumen ini) menyarankan bahwa pelatihan wawancara harus:

- merupakan kombinasi menyeluruh dari instruksi di ruang kelas, skenario simulasi dan permainan peran, pemantauan diri, dan penilaian di tempat kerja
- memberikan kerangka kerja teoritis dan juga kompetensi teknis
- terfokus pada keseluruhan-polisi dan keseluruhan-karir
- menyediakan sejumlah besar pewawancara umum terlatih dan jumlah kecil pewawancara khusus
- menyediakan pewawancara dengan keahlian dan keyakinan untuk menghadapi berbagai macam situasi yang mungkin dihadapi
- meyakinkan bahwa pewawancara menyadari metode-metode dan pendekatan yang berbeda diperlukan untuk tipe-tipe orang yang berbeda yang akan diwawancarai
- meyakinkan bahwa para petugas mengerti bahwa mempelajari teknik wawancara adalah proses berkelanjutan – untuk dipraktikkan dimanapun merupakan hal yang penting.
- meyakinkan bahwa pewawancara mengembangkan kemampuan fisik, sosial dan psikologis yang akan dapat dibawa ke semua tipe interaksi antara polisi dan publik.

Dari sudut pandang pelatihan, merupakan hal yang penting untuk menyampaikan pesan bahwa wawancara merupakan bagian penting dari proses penyelidikan secara keseluruhan, dan bukan bagian terpisah.

LAMANYA PELATIHAN DI TEMPAT PENDIDIKAN

Satu alasan mengapa implementasi awal model wawancara PEACE di Inggris dan Wales tidak berhasil adalah karena pelatihan yang tidak memadai (Clarke & Milne, 2001; Shaw, 2001). Kini, setelah komponen penting dari pelatihan wawancara efektif telah teridentifikasi, semua usaha telah dilakukan untuk menghindari kesalahan yang sama dari terulang kembali. Semua upaya dikerahkan guna menyediakan pelatihan yang lebih baik (campuran dari sistem belajar di tempat pendidikan, pelatihan jarak jauh, dan belajar sambil bertugas) yang melingkupi struktur lima tahap dalam Strategi Wawancara Investigatif ACPO.

Kursus di tempat pendidikan berkisar antara satu hingga tiga minggu. Kursus ini didasarkan pada panduan nasional yang disediakan oleh Centrex (yang baru-baru ini diubah namanya menjadi Pusat Keunggulan Perpolisian Nasional) namun bahan ajar kemudian disiapkan oleh kesatuan masing-masing (*komunikasi pribadi*).

Penulis tinjauan ini berkesempatan untuk mengikuti beberapa contoh kursus di Inggris, yang termasuk:

Tahap 1 - 2 minggu pelatihan untuk siswa magang (polisi baru) dalam wawancara saksi dan tersangka - Durham

Tahap 2 - 1 minggu pelatihan RESKRIM tentang wawancara saksi dan tersangka – Kepolisian Thames Valley

Tahap 3 - 3 minggu pelatihan wawancara tersangka – Kepolisian West Yorkshire.

Tahap 5 – Menghadiri selama satu hari sesi perencanaan yang sebenarnya yang diberikan oleh penasihat pewawancara – yang memberikan saran pada tim penanganan pembunuhan tentang bagaimana mewawancarai tersangka utama - Durham

HUKUM

Merupakan hal yang tidak diperlukan dan tidak mungkin untuk memasukkan keseluruhan 'dasar hukum' yang diperlukan oleh pewawancara dalam pelatihan wawancara. Milne dan Bull (2003) menekankan bahwa ada perdebatan antara kebutuhan untuk mengajarkan hukum yang berkaitan dengan wawancara (termasuk memasukkan peraturan-peraturan terbaru), dan seni wawancara. Mereka mengatakan bahwa penekanan harus kepada pelatihan berdasarkan keterampilan dan bahwa peraturan itu dapat diajarkan di bagian lain dari pelatihan tersebut atau sebagai modul pelatihan jarak jauh. Pendekatan ini tergambar pada "Panduan Praktis Wawancara Investigatif" (NCOF, 2004) yang dikirimkan kepada peserta pelatihan sebelum menghadiri kursus PEACE.

TERWAWANCARA YANG RENTAN

Peringatan khusus diperlukan bagi petugas ketika berhadapan dengan terwawancara yang rawan, sebagai contoh anak-anak berusia di bawah 17 tahun, mereka yang mempunyai keterbatasan belajar dan keterbatasan lainnya, dan lain-lain. Petugas yang tidak berpengalaman tidak akan mampu mewawancarai orang-orang semacam ini dengan baik dan efektif. Sejumlah komentator (misalnya Gudjonsson, 1994; Leishman et al, 2000; Milne, 1999) berpendapat bahwa petugas tidak berpengalaman harus mengikuti pelatihan kesadaran yang berbeda dengan pelatihan wawancara khusus sehingga mereka dapat mengidentifikasi dengan tepat terwawancara yang rawan dan kemudian wawancara tersebut seharusnya dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai pelatihan tingkat mahir.

PENILAIAN EFEKTIFITAS PELATIHAN

Keterampilan wawancara yang baru, seperti halnya keterampilan baru yang lain, memerlukan waktu untuk dapat dikuasai. Latihan secara teratur, pengawasan, penilaian dan umpan balik diperlukan. Sementara anggapan bahwa pembelajaran dan perubahan akan

terjadi melewati batas pelaksanaan atau pengalaman pelatihan, ada berbagai faktor (seperti “fasilitator dan hambatan” yang dijelaskan oleh Ottoson, 1997, hal. 94) yang mempengaruhi pengalihan proses belajar dari ruang kelas ke tempat kerja. Faktor-faktor ini melingkupi rancangan program, lingkungan kerja, tingkat pelibatan, sejumlah pengaruh pribadi, sosial, ekonomi dan politik, struktur organisasi, dukungan dari rekan kerja dan penyelia, sumber daya, wewenang untuk bertindak, jumlah waktu praktik, budaya, sikap dan pengetahuan sebelumnya. Menurut Ottoson (1997, hal. 94) variabel-variabel ini menyarankan lima sumber pengaruh umum terhadap pengalaman pasca pelatihan dari peserta:

- program itu sendiri
- inovasi dan ide baru untuk diaplikasikan
- keadaan siswa
- karakteristik dari lingkungan yang mendukung atau menghambat kemajuan, dan
- dukungan atau insentif untuk menerapkan hasil pembelajaran.

Hal ini menyarankan bahwa pendekatan yang berfokus hanya pada pemberian pengetahuan dan keterampilan, dan gagal untuk mengenali pengaruh yang lebih luas dalam praktik, tidak akan membawa perubahan yang berarti pada praktiknya. Sebagai tambahan, Strongman (1994, hal. 20) berpendapat bahwa:

“Bagi sistem apapun agar dapat berguna dan fleksibel dan untuk dapat berkembang dan tidak stagnan, maka harus disertai proses evaluasi ... secara umum, yang hilang adalah evaluasi sistematis terhadap setiap wawancara, kemampuan wawancara dari petugas perseorangan, dan keefektifan program pelatihan secara umum.”

Merupakan hal yang penting untuk meletakkan proses-proses yang tidak hanya dapat mengimplementasikan program-program baru yang sedang berlangsung untuk dimonitor tapi juga untuk dievaluasi pada interval yang bervariasi.

PROSES PENILAIAN TAHUNAN

Bagian dari proses pemantauan dapat melingkupi pembuatan penilaian keterampilan wawancara sebagai bagian umum dari penilaian kinerja (Rigg, 1999). Clarke dan Milne (2001) membawa hal ini lebih jauh dengan menggunakan penelitian dari psikologi organisasi untuk berargumen bahwa apabila wawancara merupakan keterampilan penting untuk polisi, maka perlu dimasukkan dalam pengelolaan kinerja di semua tingkatan.

Pendekatan ini berasumsi manajer tidak hanya dilengkapi untuk menilai wawancara tapi mereka juga termotivasi untuk melakukan hal tersebut. Laporan

Departemen Dalam Negeri tahun 2004 perihal “Kepemimpinan Polisi: Harapan dan Akibat” (Dilaporkan pada *Police Review*, 7 Mei 2004) menemukan bahwa sejumlah besar manajer petugas kepolisian bersikap ‘malas, plin-plan, dan tidak beretika’ dan tidak menangani kinerja yang buruk dan tidak dapat diterima. Apabila hal ini benar adanya, maka Shaw (1996f) dan Stockdale (1993) benar ketika mengatakan mendapat dukungan dari pimpinan/manajer merupakan hal yang sangat penting sebelum mencoba mengimplementasikan program wawancara yang telah direvisi. Semua supervisor/penyelia perlu menerima pelatihan yang tidak hanya meningkatkan kemampuan wawancara mereka sendiri namun juga mengajari mereka bagaimana memantau dan mengawasi wawancara yang dilakukan oleh petugas lain.

Perlunya supervisor/penyelia yang aktif, berpengetahuan luas, dan berkomitmen diakui oleh kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales. Dua kepala kesatuan kepolisian, Peter Neyroud (Thames Valley) dan Ken Jones (Surrey) memberikan komentar mengenai perlunya melibatkan kelompok ini dalam bingkai kerja perpolisian yang lebih modern. “Dengan memasukkan penilaian di tempat kerja ke dalam pelatihan lokal dan nasional, kita akan dapat melengkapi para sersan dan inspektur dengan portofolio keterampilan dan pengetahuan yang terakreditasi yang berarti bahwa mereka lebih baik dalam pekerjaan mereka” (*Police Review*, 1 April 2005, hal. 14).

MELATIH STAF UNTUK MENILAI KUALITAS WAWANCARA

Pada tahun 1993, Baldwin (hal. 327) mengekspresikan pandangannya bahwa “wawancara polisi dapat dinilai dengan menggunakan standar praktik yang baik yang telah diterima secara luas, yang merupakan subjek dari banyak literatur-literatur yang ada”. Namun, di tahun berikutnya beliau menyadari bahwa:

“Penilaian standar wawancara merupakan hal yang bermasalah... apa yang menentukan suatu wawancara itu ‘baik’ atau ‘efektif’ merupakan penilaian yang sangat subjektif, dan mempertanyakan standar, katakanlah, apa yang dilihat oleh seorang psikolog sebagai suatu tindakan yang berlebihan dan menekan mungkin akan dilihat dengan sangat berbeda dari pandangan petugas polisi, pegiat hak-hak sipil atau tersangka itu sendiri” (Baldwin, 1994, hal. 67).

Standar yang diterapkan oleh Baldwin melingkupi: mengijinkan tersangka mendapatkan kesempatan tidak tergesa-gesa dan tidak diinterupsi untuk menyatakan posisinya; mendengarkan tanggapannya; menghindari taktik yang otoriter, koersif dan mengganggu; dan

memeriksa keterangan tersangka dengan integritas dan kelayakan (Baldwin, 1994).

Sejumlah instrumen untuk menilai kualitas wawancara investigatif telah dikembangkan oleh atau untuk kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales. Semua ini bertujuan untuk menjaga konsistensi, reliabilitas, dan ketidakberpihakan. Semua borang dirancang untuk mengidentifikasi fitur-fitur khusus yang dapat dinilai lalu disediakan metode pengukuran menggunakan peringkat yang dapat diberikan pada tiap-tiap fitur (contoh 1 (tidak pernah) sampai dengan 5 (selalu)) dan kolom kosong bagi penilai untuk menulis komentar dan mencatat contoh-contoh khusus.

Tabel 18 merangkum indikator kinerja utama yang digunakan dalam delapan studi berbeda untuk mengkaji kualitas dari wawancara investigatif. Setiap indikator kinerja mempunyai hingga sepuluh komponen. Beberapa tabel ini diadaptasi dari tulisan untuk pengarah yang tidak dipublikasi untuk Kelompok Pengawas Wawancara Investigatif ACPO yang berjudul "Wawancara Investigatif: Tinjauan Analisa Kebutuhan Pelatihan" (2001).

Dr Becky Milne (*korespondensi pribadi*) menyatakan bahwa alat penilaian yang digunakan untuk keperluan penelitian (contoh: menilai kualitas sejumlah pita rekaman wawancara terpilih) merupakan hal yang kompleks dibanding dengan yang disarankan untuk digunakan oleh para supervisor/penyelia. Kelompok yang terakhir ini memerlukan sesuatu yang cukup mudah untuk diisi namun tetap menjamin konsistensi di antara penggunanya. Saat ini, tidak ada formulir yang disepakati secara nasional.

MENGGUNAKAN DATA NASIONAL

Meskipun tampaknya hanya sedikit perlengkapan resmi untuk perekaman yang diberikan untuk keperluan pelatihan dan juga yang diterima secara standar oleh staf kepolisian, Inggris dan Wales telah melakukan banyak hal (Contoh yang dilakukan oleh lembaga *National Centre for Policing Excellence and Skills for Justice (SfJ)* - Pusat Kajian Nasional untuk Keunggulan dan Keterampilan Perpolisian untuk Keadilan) tentang "pendekatan standar terhadap kompetensi." Pekerjaan lembaga ini diarahkan untuk membangun suatu standar operasi nasional/SOP Nasional (NOS-*National Operating Standards*) dan kerangka kerja kompetensi nasional. Pekerjaan terkini diarahkan pada pembuatan "data nasional" (*komunikasi pribadi*).

Menurut Mr Richard Winterton (Direktur Eksekutif, SfJ) kepolisian di Inggris dan Wales mempunyai beberapa basis data nasional, misalnya untuk senjata api, tetapi tidak ada pendataan khusus yang melingkupi keseluruhan karir petugas kepolisian dari mulai masuk hingga pensiun. Fitur kunci untuk pendataan ini adalah harus berlingkup nasional, berdasarkan pada keahlian

dan bukan pada pangkat, dan berdasar pada standar operasi nasional.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompeten dan termotivasi dengan baik, yang mana orang yang tepat ditempatkan di posisi yang tepat. Tetapi Winterton mengatakan bahwa pendataan seperti ini harus memiliki validitas dan kredibilitas:

"Keberhasilan pendataan dinilai dari mereka yang tidak bisa masuk dalam data karena tidak memenuhi persyaratan. Kesatuan kepolisian harus mengakui ketika ada personil yang tidak mampu memenuhi suatu standar tertentu dan harus mau mengeluarkannya (ceramah pada seminar "Meningkatkan Kinerja Investigasi", Belfast, 18 Oktober, 2005)

Penulis	Baldwin (1992)	Stockdale (1993)	McGurk, Carr & McGurk (1993)	Bull & Cherryman (1995)	Clark & Milne (1998)	Borang 4100 Kantor Polisi Metropolitan	Kepolisian Kent	BARS Clark & Milne (1999)	
Keterampilan	Persiapan	Perencanaan & persiapan	Perencanaan	Gaya bertanya	<i>Skala nilai 5 untuk tiap bagian</i>	TERLIBAT & JELASKAN:	Perencanaan	<i>Skala nilai 7 untuk tiap bagian</i>	
	Menjelaskan prosedur	Pengetahuan hukum	Membangun hubungan	Tata cara wawancara	Perencanaan & persiapan	Perkenalkan diri sendiri dan orang lain	Persiapan	Persyaratan hukum	
	Adil	Gaya bertanya	Teknik bertanya	Komunikasi	Terlibat & jelaskan	Jelaskan:	Terlibat	Perkenalan tentang wawancara	
	Mendengar & menanggapi	Struktur wawancara	Keahlian komunikasi	Teknikalitas wawancara	Keterangan	<ul style="list-style-type: none"> Waktu/ tanggal/ lokasi 	Persyaratan hukum	Alasan & rutinitas	Bertanya
	Fleksibilitas	Memenuhi persyaratan bukti	Struktur wawancara	Teknik wawancara	Penggunaan instruksi wawancara kognitif (RE, RC, CO, CP, kendali saksi, gambar, konsentrasi)	<ul style="list-style-type: none"> Hak Peringatan Alasan wawancara 	Rencana & harapan	Keterangan pertama	Keterampilan mendengar
	Mempertahankan kendali	Percaya diri dan kontrol	Mendengarkan	Sikap petugas		Usaha untuk membangun hubungan	Pilihan topik	Menggali lebih lanjut	Pengetahuan tentang kejadian/kejahatan dan hal-hal yang perlu dibuktikan
	Pengetahuan hukum	Adil & berpikiran terbuka	Mencakup semua hal yang perlu dibuktikan	Pemberitahuan informasi oleh petugas					Pengetahuan hukum acara (peraturan kerja, peringatan khusus, ADVOKATE)
	Pembawaan tenang	Mempertahankan integritas penyelidikan	<u>Wawancara tersangka</u>		Karakteristik pewawancara (percaya diri, berpikiran terbuka, fleksibilitas, keterampilan komunikasi, mendengarkan secara aktif)	KETERANGAN	Bertanya		
	Sabar	Menjamin hasil wawancara dapat diterima pengadilan	Mengumpulkan rangkaian kejadian			Teknik wawancara (yang layak)	Merangkul & menghubungkan		
	Bijak		Berpikiran terbuka			<ul style="list-style-type: none"> Agenda tersangka Agenda polisi Menelusuri info Mempertanyakan Merangkul Hal-hal yang perlu dibuktikan Alat bukti 	Mendengarkan		Mempertanyakan
	Percaya diri		Membangun kredibilitas				Percakapan		Mengakhiri wawancara
	Keterampilan sosial		Menutup wawancara				Bahasa		Keadilan
	Keterampilan komunikasi					Keterampilan bertanya	Fleksibilitas		Gaya wawancara
					Data saksi mata (ADVOKATE)				
					Penutup				
					Kemampuan keseluruhan				
						KETERAMPILAN BERTANYA	Penolakan		
							Penutup		
						KETERAMPILAN MENDENGAR	Efektifitas evaluasi		
						PENUTUP			

Tabel 18: Indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian wawancara investigatif secara resmi.

PEWAWANCARA SPESIALIS

Strongman (1994, hal. 23) menyarankan agar “sistem formal dapat dibangun yang mana para pewawancara terbaik, baik secara umum maupun yang khusus dapat diidentifikasi dan digunakan. Hal ini dapat terjadi di semua tingkatan dari pangkat terendah hingga pangkat tertinggi yang bisa dijangkau oleh sistem.” Definisi dari wawancara investigatif khusus (atau lanjutan) diberikan oleh Cherryman dan Bull (2001, hal. 202) adalah:

“Pertanyaan yang adil atau wawancara yang fasilitatif oleh petugas yang terlatih dengan baik, dengan pengetahuan yang mendalam mengenai hal tertentu, mengenai tersangka, saksi atau korban pada kondisi khusus atau dalam keadaan yang tidak biasa. Hal ini dapat berupa pelanggaran yang kompleks, parah atau sensitif yang memerlukan keahlian tambahan yang sesuai dengan aturan pembuktian dan sejalan dengan prinsip-prinsip wawancara investigasi, agar dapat memperoleh informasi yang akurat, kredibel dan terpercaya untuk dapat membuktikan kebenaran”.

Jadi, sebuah wawancara menjadi khusus ketika membutuhkan suatu keahlian khusus diatas rata-rata wawancara yang dilakukan biasanya. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi terwawancara (contoh: orang yang rentan), pengetahuan khusus yang dibutuhkan, atau sifat dari kejahatan yang terjadi. Beberapa peneliti yang terlibat dalam penelitian tentang kualitas wawancara polisi (contoh: Baldwin, 1992) berpendapat bahwa pelatihan spesialisasi seharusnya hanya diberikan pada pewawancara yang menunjukkan kemampuan diatas rata-rata. Struktur 5 tahap digunakan oleh satuan kepolisian di Inggris dan Wales untuk melakukan hal seperti ini. Dua dari lima tahap tersebut ditujukan untuk secara spesifik melatih sejumlah kecil pewawancara spesialis (Tahap 3) dan jumlah yang lebih kecil lagi untuk penasihat pewawancara spesialis (Tahap 5).

Poin-poin utama

1. Keterampilan utama yang perlu dikembangkan oleh pewawancara kepolisian adalah: kemampuan untuk merencanakan dan mempersiapkan wawancara; kemampuan untuk membangun hubungan; mendengarkan secara efektif dan bertanya secara efektif.
2. Pelatihan wawancara seharusnya: kombinasi komprehensif dari instruksi di ruang kelas, simulasi skenario, dan permainan peran, pemantauan diri, dan penilaian di tempat kerja; memberikan kerangka kerja teoritis dan juga kompetensi teknis; dan berfokus pada keseluruhan polisi dan keseluruhan karir.
3. Pemantauan dan evaluasi harus menjadi bagian dari setiap implementasi program.
4. Pelatihan harus melibatkan supervisor/penyelia dan manajer/pimpinan. Dukungan mereka sangat penting.

Poin-poin utama (lanjutan)

5. Pelatihan perlu menekankan pentingnya persiapan karena pewawancara manapun yang melakukan wawancara tanpa adanya perencanaan yang baik terlebih dahulu hanyalah semata “terburu-buru untuk melakukannya dengan salah.”
6. Struktur wawancara 5-tahap yang dikembangkan pada tahun 2003 sedang dalam proses untuk digabungkan dengan proyek dibawah kepemimpinan *Departemen Dalam Negeri/ACPO* yaitu “Meningkatkan Keprofesionalan Proses Penyelidikan” (PIP). Sebagai contoh, wawancara saksi dan wawancara tersangka adalah dua dari tiga komponen untuk PIP tingkat 1 – memenuhi 3 standar operasional nasional untuk semua ‘penyidik’.

KESIMPULAN

Bagi polisi, pembuktian fakta adalah tugas yang sangat penting. Kemampuan untuk menanyakan pertanyaan dan menafsirkan jawaban merupakan keterampilan yang sangat penting dalam perpolisian, baik untuk polisi baru maupun penyidik yang berpengalaman. Dalam usaha mencari kebenaran, kemampuan untuk melakukan wawancara dengan baik merupakan suatu kebutuhan namun sulit untuk dipahami.

Tinjauan ini hanya mampu untuk mencakup sebagian kecil dari literatur yang tersedia mengenai wawancara investigatif. Namun diharapkan sudah cukup mampu untuk menunjukkan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan wawancara yang efektif. Pewawancara polisi harus mampu, tidak hanya secara psikologis dan aspek taktis dari wawancara, tapi juga mengenai persyaratan hukum dari proses. Kombinasi dari pengetahuan yang diperlukan oleh ketiga aspek tersebut mempunyai dasar yang luas dan kompleks.

Sebagaimana telah dibahas dalam tinjauan ini, bahwa baru beberapa saat terakhir ini petugas kepolisian di banyak negara menerima pelatihan formal dalam hal melakukan wawancara. Penelitian dan penggunaan rekaman audio dan video menunjukkan lemahnya praktik dan prosedur wawancara serta perubahan yang diperlukan.

Sebagian besar satuan kepolisian di negara barat sudah mulai menjawab tantangan ini, dengan pendekatan terintegrasi yang dilakukan yang mana di dalamnya termasuk pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta panduan umum. Hal ini terlihat paling jelas dalam strategi wawancara investigatif ACPO tahun 2003. Implementasi strategi ini oleh seluruh kesatuan kepolisian di Inggris dan Wales dan Irlandia Utara mendemonstrasikan komitmen terhadap wawancara yang etis, terpercaya dan efektif. Strategi memperkuat praktik yang baik melalui adopsi model PEACE menyebar luas, mengetahui bahwa wawancara perlu waktu, konsentrasi dan fleksibilitas, dan menyadari peran penting dari supervisi.

Karena yurisdiksi kepolisian yang beragam di Amerika Serikat, sangat sulit untuk mendapatkan gambaran akurat mengenai praktik wawancara investigatif di negara tersebut. Namun, sebagian besar dokumentasi berkaitan dengan subjek ini, khususnya literatur milik FBI, memberikan keyakinan bahwa Amerika menempatkan fitur-fitur wawancara berikut sebagai hal yang penting, sebagaimana polisi di Inggris dan Wales, seperti perencanaan pra-wawancara, membangun hubungan dan memungkinkan terwawancara untuk berbicara tanpa interupsi.

Secara keseluruhan, literatur Anglo-Amerika menyarankan beberapa komponen dasar yang diperlukan untuk menghasilkan wawancara efektif:

- Pertama, pengetahuan tentang psikologi wawancara dan pengujian ilmiah yang relevan (contoh, bagaimana untuk meningkatkan kemampuan saksi untuk mengingat, waspada terhadap efek yang mungkin dihasilkan dari komunikasi lisan dan non-lisan dari terwawancara itu sendiri, berhadapan dengan saksi-saksi yang rentan, dan lain sebagainya);
- Kedua, memberikan dasar yang cukup kuat dan menyeluruh untuk teknik praktik melakukan wawancara sebagaimana mestinya (contoh, membangun hubungan dan menciptakan atmosfer yang baik, memperhatikan kesejahteraan terwawancara, mendorong konsentrasi, membiarkan orang berbicara tanpa interupsi, membiarkan mereka bercerita sesuai dengan cara mereka, memastikan terwawancara mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi dan apa langkah selanjutnya, mengklarifikasi hal-hal untuk memastikan semua dipahami dengan benar, membuka pikiran dan fleksibel, dan lain sebagainya);
- Ketiga, praktik yang meluas dalam lingkungan belajar (kursus mengenai wawancara investigatif di Inggris dan Wales saat ini dilaksanakan secara rutin selama 5 hari atau lebih – termasuk untuk polisi baru, detektif, pewawancara spesialis dan pengawas); dan
- Keempat, peluang untuk melakukan wawancara dalam pekerjaan sehari-hari yang dipantau dan menerima umpan balik yang konstruktif (supervisor/penyelia diharapkan dapat memberikan penilaian secara umum dari wawancara sebagai bagian dari pengembangan dan pemantauan kinerja bawahan).

Mengimplementasikan suatu rezim yang memiliki semua hal-hal di atas membutuhkan komitmen dan keberanian. Akan ada implikasi sumber daya bagi yurisdiksi yang berpikiran untuk mengikuti contoh Inggris, Wales dan Irlandia Utara. Dan hal itu mungkin tidak akan diterima oleh semua pihak. Beberapa pewawancara polisi mungkin tidak bisa beradaptasi dan fleksibel dalam gaya dan kepribadian mereka untuk dapat menggunakan model wawancara yang disempurnakan. Sementara beberapa yang lain tidak memiliki motivasi dan kesabaran yang cukup. Bahkan dengan pelatihan yang baik sekalipun, tidak semua petugas dapat menjadi pewawancara yang baik. Beberapa orang menunjukkan kemampuan alami untuk menjadi pewawancara. Ada yang dapat dilatih hingga mencapai standar tinggi. Sementara beberapa yang lain tidak akan pernah memenuhi persyaratan. Sementara semua petugas mungkin dapat melakukan wawancara yang bersifat dasar, Contoh dari Inggris menunjukkan bahwa wawancara paling menantang harus diberikan kepada kelompok pewawancara terlatih.

Untuk menjaga kepercayaan publik, manajemen polisi harus menyediakan sumber daya untuk menjamin

bahwa setiap petugas dapat memenuhi fungsi inti kepolisian. Salah satu kegiatan inti tersebut adalah berbicara kepada orang-orang dan menghasilkan informasi yang lengkap, terpercaya, dan relevan. Berbagai jenis wawancara merupakan titik pertemuan antara polisi dan publik. Oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan pentingnya wawancara.

DAFTAR PUSTAKA

Abney, D. (1986). Mutt and Jeff meet the Constitution: the propriety of a good guy/bad guy interrogation. *Criminal Law Bulletin*, 22, hal. 118-130. [Mutt dan Jeff membedah konstitusi: kelayakan interogasi dengan cara orang baik dan orang jahat. *Buletin Hukum Pidana*]

ACPO (2003). *ACPO Investigative Interviewing Strategy*. National Crime and Operations Faculty: England [Strategi Wawancara Investigatif ACPO. Fakultas Pidana dan Operasi Nasional: Inggris]

Adams, S.H. & Jarvis, J.P. (2004, Oct). Are You Telling Me the Truth? Indicators of Veracity in Written Statements. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 73 (10), hal. 7-12. [Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Indikator kebenaran dari pernyataan tertulis. *Buletin Penegak Hukum FBI*]

Adams, S.H. (2004). The Case Study, Statement Analysis, Beyond the Words. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 73 (4) Apr. [Studi Kasus, Analisis Pernyataan, Dibalik Kata-Kata. *Buletin Penegak Hukum FBI*]

Adelson, R. (2004). Detecting deception. *Monitor on Psychology*. 35, No. 7 Juli/Agustus. [Mendeteksi pengelabuan. *Monitor Psikologi*]

Alley, A., Waugh, L. & Ede, A. (1996, Jul). Police Culture, Women Police and Attitudes Towards Misconduct. *Criminal Justice Commission: Queensland*. hal. 1-9. [Budaya Polisi, Polisi Perempuan dan Sikap terhadap Tindakan yang Melanggar Peraturan. *Komisi Hukum Pidana*]

Amey, P., Hale, C. and Uglow, S. (1996). Development and evaluation of a crime management model. *Police Research Series Paper 18*. Home Office: London. [Perkembangan dan evaluasi model pengelolaan pidana. *Seri Kertas Penelitian Polisi 18*. Kantor Pusat]

Ashworth, A. (1998). *The criminal process* (2nd ed). Oxford University Press: Oxford. (Proses Pidana)
Audit Commission (1993). *Helping with Enquiries*. Police Paper: No 12. London: H.M.S.O. FOLIO—351.740942-HEL [Komisi Audit. Membantu Penyidikan. *Kertas Kerja Polisi*]

Audit Commission (1993). *Helping with enquiries: tackling crime effectively*. Audit Commission: London. [Komisi audit. Membantu penyidikan: menanggulangi kejahatan secara efektif]

Baldwin, J. (1992). Video-taping of police interviews with suspects - an evaluation. *Police Research Series: Paper No.1*. Home Office: London. [Rekaman Video wawancara polisi dengan tersangka – sebuah evaluasi. *Seri kertas penelitian polisi: No. 1*]

Baldwin, J. (1993). Police interview techniques – establishing truth or proof? *British Journal of Criminology*, 33, hal. 325-351. [Teknik wawancara polisi – mencari kebenaran atau bukti? *Jurnal Kriminologi Inggris*]

Baldwin, J. (1994). Police interrogation: what are the rules of the game? In D. Morgan and G. Stephenson (eds) *Suspicion and silence: the right to silence in criminal investigations*. Blackstone: London. [Interogasi Polisi: Apa aturan utamanya? Dalam D. Morgan dan G. Stephenson (eds) *Kecurigaan dan Diam: Hak untuk diam dalam penyelidikan pidana*]

Baxter, J. (2004). Managing interrogative pressure in police interviews. *The Police Journal*. 77, (4), hal. 303-308. [Mengelola tekanan interogatif pada wawancara polisi. *Jurnal Polisi*]

Baxter, J. and Rozelle, R. (1975). Non-verbal expression as a function of crowding during a simulated police-citizen encounter. *Journal of Personality and Social Psychology*, 32, hal. 40-45. [Ekspresi non-lisan sebagai fungsi keramaian dalam simulasi pertemuan polisi dan masyarakat. *Jurnal psikologi kepribadian dan sosial*]

Bayley, D.H. (1994). *Police for the future*. Oxford University Press: Oxford. [Polisi untuk masa depan]

Bayley, D.H. (1996). What do police do? In W. Saalsbury, J. Mott and T. Newburn (eds) *Themes in contemporary policing*. London: Independent Enquiry into the Roles and Responsibilities of the Police. [Apa yang dilakukan oleh polisi? Tema dalam kepolisian kontemporer: Penyidikan independen dalam peran dan tanggung jawab polisi]

Benson, R.W. (2001). *Changing Police Culture: The Sine Qua Non of Reform*. *Loyola of Los Angeles Law Review*, 34, hal. 681- 690. [Mengubah budaya polisi: syarat-syarat reformasi]

Bogels, S.M. (1999). Diagnostic interviewing in mental health care: methods, training and assessment. Dalam A. Memon & R. Bull (eds) *Handbook of the psychology of interviewing*. John Wiley: Chichester. [Wawancara diagnostik dalam perawatan kesehatan mental: metode, pelatihan dan penilaian. Dalam buku pegangan tentang psikologi wawancara]

Bornstein, B.H. (1999). The ecological validity of jury simulations: is the jury still out? *Law and human behaviour*, 23, hal. 75-91. [Validitas ekologi dari simulasi juri: Apakah juri masih dianggap? *Perilaku hukum dan manusia*]

Brock, P., Fisher, R.P., & Cutler, B.L. (1999). Examining the cognitive interview in a double-test paradigm. *Psychology, Crime and Law*, 5, hal. 29-45. [Memeriksa wawancara kognitif dalam paradigma tes]

ganda. Psikologi, kriminalitas dan hukum]

Brown, M. (1981). *Working the street: Police discretion and dilemma of reform*. Russell Sage: New York. [Bekerja di jalanan: diskresi polisi dan dilema reformasi]

Bull, R. (1995). *Interviewing children in legal contexts*. Dalam R. Bull & D. Carson (eds) *Handbook of psychology in legal contexts*. Wiley: Chichester. [Mewawancarai anak-anak dalam konteks hukum dalam Buku panduan untuk psikologi dalam konteks hukum]

Bull, R. and Cherryman, J. (1995). *Helping to identify skills gaps in specialist investigative interviewing: literature review* [Membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan wawancara investigatif spesialis: tinjauan literatur]. Home Office: London.

Bull, R. and Cherryman, J. (1996). *Helping to identify skills gaps in specialist investigative interviewing: enhancement of professional skills* [Membantu mengidentifikasi kesenjangan keterampilan wawancara investigatif spesialis: peningkatan keahlian profesional]. Home Office Police Department: London

Burbeck, J. (2001). *New ACPO Investigative Interviewing Strategy* [Strategi wawancara investigatif ACPO baru. Kepolisian Warwickshire]. Polisi Warwickshire: Inggris. (tidak dipublikasikan)

Cape, E. (1995). *Defending suspects at police stations* 2nd ed. London: Legal Action Group. [Pembelaan tersangka di kantor polisi, edisi kedua]

Carson, D. & Bull, R. (eds) (2003). *Handbook of psychology in legal contexts - 2nd edition*. Wiley: Chichester. [Buku panduan psikologi pada konteks hukum]

CBC News. (2003). *Widely used police interrogation technique can result in false confession: Disclosure*. Accessed on 10 August 2005 from: <http://www.cbc.ca/stories/2003/01/27/interrogation030127>. [Teknik interogasi polisi yang secara luas digunakan yang dapat berakibat pada pengakuan palsu: Terungkap]

CFIS (Centre for Investigative Skills) (2004, June). *Practical guide to investigative interviewing*. Central Police Training and Development Authority: England. [Panduan praktis untuk wawancara investigatif. Otoritas Pusat untuk Pengembangan dan Pelatihan Polisi: Inggris]

Chan, J. (1996) 'Changing police culture'. *British Journal of Criminology*, 36 (1), hal. 109-134. [Mengubah budaya polisi. Jurnal kriminologi Inggris]

Chan, J. (1997). *Changing police culture: Policing in a multicultural society*. Cambridge University Press: Inggris. [Merubah budaya polisi: Kepolisian di tengah

masyarakat multikultur]

Cherryman, J. & Bull, R. (1999) *Police officers' perceptions of specialist investigative interviewing skills*. *International Journal of Police Science and Management*. 3, No.3, hal. 199-212. [Persepsi petugas kepolisian terhadap keterampilan wawancara investigatif spesialis. Jurnal Ilmu kepolisian dan manajemen internasional]

Cherryman, J. & Bull, R. (2000). *Reflections on investigative interviewing* [Refleksi tentang wawancara investigasi]. Dalam F. Leishman, B. Loveday, & S. Savage, (Eds.) *Core Issues in Policing* (2nd ed). London: Longman.

Clarke, C. & Milne, R. (2001). *National evaluation of the PEACE investigative interviewing course*. Home Office: UK, Research Award Scheme, Report No. PRSA 149. (diambil dari http://www.homeoffice.gov.uk/peace_interviewcourse.pdf) [Evaluasi terhadap kursus wawancara investigatif PEACE nasional]

Clarke, C. & Milne, R. (2003, Juli). *Interviews with victims and witnesses: the reality*. Paper presented at the Psychology and Law International, Interdisciplinary Conference, Edinburgh, Scotland. [Wawancara korban dan saksi: Realita. Dipaparkan pada konferensi antar disiplin ilmu, psikologi dan hukum internasional, Edinburgh, Skotlandia].

Clarke, R. & Hough, M. (1984). *Crime and police effectiveness*. Home Office Research Study 79, HMSO: London. [Kriminal dan efektifitas Kepolisian]

Clifford, B.R. & George, R. (1996). *A field investigation of training in three methods of witness / victim investigative interviewing*. *Psychology, Crime and Law*, 2, hal. 231-248. [Investigasi lapangan terhadap pelatihan dengan tiga metode wawancara investigatif terhadap saksi / korban]

Cohen, Gillian. (1999). *Human memory in the real world*. Dalam A. Heaton-Armstrong., E. Shepherd, & D. Wolchover (eds). *Analysing Witness Testimony*. Blackstone Press: London, hal. 3-18. [Ingatan manusia di dunia nyata]

Coleman, C. and Norris, C. (2000). *Introducing criminology* [Pengenalan tentang kriminologi]. Willan Publishing: Cullompton.

Collins, R., Lincoln, R. & Frank, M.G. (2002). *The Effect of Rapport in Forensic Interviewing*. *Psychiatry, Psychology and Law*. 9 (1), hal. 69-79. [Efek dari hubungan dalam wawancara forensik, psikiatri. Psikologi dan hukum]

CPTU (Central Planning and Training Unit) (1992a). *A Guide to Interviewing*. Metropolitan Police: Harrogate.

- [Panduan wawancara]
- CPTU (Central Planning and Training Unit) (1992b). *The Interviewer's Rule Book*. Metropolitan Police: Harrogate. [Buku aturan pewawancara]
- CPTU (Central Planning and Training Unit) (1992c). *The Interview Workbook*. Metropolitan Police: Harrogate. *Crown Prosecution Guidelines*. Diakses 10 Maret 2003 dari: www.cps.gov.uk/legal/section13/chapter_r.html. [Buku kerja wawancara]
- CYFS & NZP - Child Youth and Family Services & New Zealand Police (2005). *Forensic interviewing with at-risk children and young people under the Evidence Act 1908 and the Evidence (Videotaping of Child Complainants) Regulations 1990 - Operating Guidelines*. Child Youth and Family Services & New Zealand Police: Wellington. [Dinas Pelayanan keluarga, kanak-kanak dan remaja & Kepolisian Selandia baru. Wawancara forensik terhadap anak dan orang berkecenderungan dibawah peraturan pembuktian 1908 dan peraturan bukti (merekam video pelapor anak) tahun 1990 – panduan operasi].
- Daniell, Clare (1999). *The truth, the whole truth and nothing but the truth? An analysis of witness interviews and statements*. University of Plymouth, unpublished Masters Thesis. [Kebenaran, Seluruh kebenaran dan tidak ada yang lain selain kebenaran? Analisa wawancara dan pernyataan saksi. Tesis magister tidak dipublikasikan]
- Davies, G.M. (1995). *Contamination of witness memory in theory and practice*. *Medicine, Science and Law*, 35, No.2, hal. 95-101. [Kontaminasi ingatan saksi dalam teori dan praktik]
- Discussion Paper 29 (1993). *People with an Intellectual Disability and the Criminal Justice System: Policing Issues*. Law Reform Commission: NSW. Diakses 5 April 2005 dari: . [Orang dengan disabilitas intelektual dan sistem peradilan pidana]
- Dixon, D. (1997). *Law in policing: legal regulation and police practices*. Clarendon studies in criminology. Oxford: Clarendon. [Hukum dalam perpolisian: ketentuan hukum dan praktik polisi. Studi Clarendon dalam kriminologi]
- Dunham, R.G., & Alpert, G.P. (eds). *Critical issues in policing: contemporary readings* (2nd ed). Prospect Heights, Ill: Waveland. [Isu kritis dalam perpolisian: Bacaan kontemporer (edisi ke-2)]
- Dunstall, G. (1994). *Police in New Zealand*. Dalam D. Das (ed.), *Police practices: An international review*. Scarecrow Press: London, hal. 285-417. [Polisi di Selandia Baru dalam Praktik polisi: Tinjauan internasional]
- Eck, J.E. (1983). *Solving crimes: the investigation of burglary and robbery*. Police Executive Research Forum: Washington DC. (Memecahkan kasus kejahatan: Investigasi kasus penggarongan dan perampokan. Forum kajian eksekutif kepolisian)
- Ede, R. & Shepherd, E. (2000). *Active Defence* (Ed. Ke-2) [Pertahanan aktif]. London: Law Society Publishing
- Ekman, P., O'Sullivan, M., Friesen, W.V. & Scherer, K. (1991). *Face, voice, and body in detecting deceit*. *Journal of non-verbal behaviour*, 15, 125-135. [Wajah, suara, dan badan dalam mendeteksi kebohongan. Jurnal perilaku non-lisan]
- Einspahr, O. (2000). *The Interview Challenge: Mike Simmen versus the FBI*. *FBI Law Enforcement Bulletin*, 69 (4), hal. 16-20. [Tantangan wawancara: Kasus Mike Simmen versus FBI. Buletin Penegak Hukum FBI]
- Euale, Jim. & Turtle, John. (1998). *Interviewing and Investigation*. Emond Montgomery Publications: Canada. [Wawancara dan Investigasi]
- Evans, G. and Webb, M. (1993). *High profile - but not that high profile: interviewing of young persons*. Dalam E. Shepherd (ed), *Aspects of police interviewing*. Leicester: British Psychological Society. [Kalangan atas – tapi tidak termasuk kalangan atas: mewawancarai orang muda]
- Fahsing, I. A., Ask, K. & Granhag, P.A. (2004). *The Man Behind the Mask: Accuracy and Predictors of Eyewitness Offender Descriptions*. *Journal of Applied Psychology*. 89 (4), hal. 722-729. [Orang dibalik topeng: akurasi dan perkiraan deskripsi saksi mata terhadap pelaku. Jurnal psikologi terapan/]
- Fielding, N., & Fielding, J. (1991). *Police attitudes to crime and punishment: certainties and dilemmas*. *British Journal of Criminology*, 31 (1, Winter), hal. 39-53. [Sikap kepolisian terhadap kejahatan dan hukuman: ketentuan dan dilema: Jurnal Kriminologi Inggris]
- Fielding, N.G. (1988). *Joining Forces: Police Training, Socialization, and Occupational Competence*. Routledge: London. 351.740942-FIE [Bergabung dalam kesatuan: Pelatihan polisi, sosialisasi dan kompetensi pekerjaan]
- Fisher, R. (1995). *Interviewing victims and witnesses of crime*. *Psychology, Public Policy and Law*, 1, hal. 732-764. [Mewawancarai korban dan saksi kejahatan. Psikologi, Kebijakan Publik dan Hukum]
- Fisher, R.P. & Geiselman, R.E. (1992). *Memory enhancing techniques for investigative interviewing: the cognitive interview*. Charles C Thomas: Springfield. [Teknik peningkatan memori untuk wawancara investigatif: wawancara kognitif]

Fisher, R.P. & Geiselman, R.E. (1996). *Intersections in basic and applied memory research*. Lawrence Erlbaum: New York. [Persimpangan pada riset dasar dan terapan tentang ingatan].

Fisher, R.P., Geiselman, R.E., & Amador, M. (1989). Field test of the cognitive interview: enhancing the recollection of actual victims and witnesses of crime. *Journal of Applied Psychology*, 74, hal. 722-727. [Uji lapangan terhadap wawancara kognitif: meningkatkan ingatan korban dan saksi kejahatan]

Fisher, R.P., Geiselman, R.E., & Raymond, D.S. (1987a). Critical analysis of police interview techniques. *Journal of Police Science and Administration*, 15 (4), hal. 177-185. [Analisis kritis terhadap teknik wawancara polisi. *Jurnal Ilmu dan administrasi kepolisian*].

Fisher, R.P., Geiselman, R.E., Raymond, D.S., Jurkevich, L.M. & Warhartig, M.L. (1987b). Enhancing Enhanced Eyewitness Memory: refining the Cognitive Interview. *Journal of Police Science and Administration*, 15 (4), hal. 291-297. [Meningkatkan ingatan saksi mata: menyempurnakan wawancara kognitif]

Gabbert, F., Memon, A., Allan, K. & Wright, D.B. (2004). Say it to My Face: Examining the Effects of Socially Encountered Misinformation. *Legal and Criminological Psychology*, 9, hal. 215-227. [Katakan di depanku: Memeriksa efek kesalahan informasi secara sosial. *Psikologi hukum dan kriminologi*]

Geiselman, R.E. (1996). On the Use and Efficacy of the Cognitive Interview, *Psychology*: 7, No.11 Witness Memory (2). [Penggunaan dan efektifitas wawancara kognitif]

Geiselman, R.E. & Fisher, R.P (1985). Interviewing victims and witnesses of crime. National Institute Justice Research Brief (NCJ-99061). [Mewawancarai korban dan saksi kejahatan]

Geller, W.A. (1992). Police videotaping of suspect interrogations and confessions: a preliminary examination of issues and practices (A report to the National Institute of Justice). US Department of Justice: Washington, DC. [Rekaman video dalam interogasi dan pengakuan tersangka: pemeriksaan pendahuluan terhadap isu dan praktik]

George, R. & Clifford, B. (1992). Making the most of witnesses. *Policing*, 8 (3): hal. 185-198. [Memanfaatkan para saksi sepenuhnya]

Gibbons, S. (1996). Interview training overdue says HMI. *Police Review*, August, p9. (Keterlambatan pelatihan wawancara kata HMI)

Gibson, J (2004) Police interviewing techniques probed. Diakses 24 Juli 2005 dari

adm.monash.edu.au/news/story.html [Penyelidikan teknik wawancara polisi]

Gilmour, D.R. (1988). *The psychological aspects of pursuits*. Wellington: Gilmour, Keenan, McGregor & Associates, Ltd. [Aspek psikologis dari pengejaran]

Gudjonsson, G. (1992). *The psychology of interrogations, confessions and testimony*. Wiley: Chichester. [Psikologi interogasi, pengakuan dan kesaksian]

Gudjonsson, G. (1994). Psychological vulnerability: suspects at risk. Dalam D. Morgan & G. Stephenson. *Suspicion and Silence: the right to silence in criminal investigations*. Blackstone Press: London. [Kerentanan psikologis: tersangka yang menghadapi risiko].

Hale, C.M., Uglow, S.P. & Heaton, R. (2005, Maret). Uniform styles II: police families and policing styles. *Policing and Society*, 15 (1), hal. 1-18. [Gaya berseragam II: Keluarga Polisi dan bentuk tugas perpolisian. *Perpolisian dan masyarakat*].

Heaton-Armstrong, A. & Wolchover, D. (1999). Recording witness statements. Dalam A. Heaton-Armstrong, E. Shepherd & D. Wolchover (eds) *Analysing witness testimony: a guide for legal practitioners and other professionals*. Blackstone Press: London. [Merekam pernyataan saksi dalam analisis keterangan saksi: panduan bagi praktisi hukum dan profesional lainnya].

Heydon, G. (2004) *The language of police interviewing: a critical analysis*. Palgrave Macmillan, Australia. [Bahasa wawancara kepolisian: Analisis kritis]

Heydon, G. (2004). 'The moral of the story': Formulations in police-suspect interviews. Paper to Sociolinguistics Symposium at Newcastle upon Tyne, 1-4 April, 2004. [Moral dari cerita: perumusan wawancara polisi dan tersangka. Naskah pada simposium sosiolinguistik]

HMIC (1997). *Policing with intelligence*. Thematic Inspection Report, HMSO: London. [Melakukan tugas kepolisian dengan cerdas]

Hobbs, D. (1988). *Doing the business*. Oxford University Press: Oxford. [Melakukan Pekerjaan]

Hodgson, P. (1987). *A practical guide to successful interviewing*. McGraw-Hill: Maidenhead. [Panduan praktis untuk wawancara yang sukses]

Holdstock, T. (2002) *Polygraph History*. Polygraph Association of South Africa. Diakses 10 Maret 2005 dari <http://> . [Sejarah Poligraf]

Holmberg, U. (2004). Crime victims' experiences of police interviews and their inclination to provide or omit

information. *International Journal of Police Science and Management*. 6 (3), hal. 155-170. [Pengalaman wawancara polisi pada korban kejahatan dan kecenderungan untuk memberi atau menghalangi informasi]

Holmberg, U. & Christianson, S-A. (2002). Murderers' and sexual offenders' experiences of police interviews and their inclination to admit or deny crimes. *Behavioural Sciences and the Law*, 20, hal. 31-45. [Pengalaman wawancara polisi pada pembunuh dan pelaku kejahatan seksual dan kecenderungan untuk mengakui atau menyangkal kejahatannya].

HMSO. (2002a). Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999. Diakses 3 Mei 2005 dari acts1999/19990023.htm. [Undang-Undang tentang Peradilan Anak dan Barang Bukti Pidana tahun 1999]

HMSO. (2002b). Achieving best evidence in criminal proceedings: guidance for vulnerable or intimidated witnesses, including children". Home Office Communication Directorate: London. Men (Mendapatkan bukti terbaik dalam proses hukum pidana: panduan bagi saksi rentan atau terintimidasi, termasuk anak-anak)

Home Office (2002). The National Policing Plan, 2003-2006. Home Office: London. (Rencana Perpolisian Nasional)

Home Office Circular 22/1992. Principles of investigative interviewing. Home Office: London. [Prinsip-prinsip wawancara investigative]

Home Office Circular 50/1995. Guidelines for the remote monitoring of tape-recorded interviews. Home Office: London [Panduan pemantauan wawancara yang direkam jarak jauh]

Hooke, A. & Knox, J. (1995). Preparing records of taped interviews. Home Office: Research Findings No.22: London. [Menyiapkan rekaman untuk wawancara]

Hoover, L.T., Dowling, J.L. and Fenske, J.W. (1998). Extent of citizen contact with the Police. *Police Quarterly*, 1 (3), hal. 1-18. [Cakupan interaksi warga dengan polisi]

Horton, C., & Smith, D.J. (1988). Evaluating Police Work: An Action Research Project. London: Police Studies Institute. 305- P.S.I. [Mengevaluasi kerja polisi: Proyek riset aksi]

Inbau, F.E., Reid, J.E. & Buckley, J.P. (1986). Criminal interrogation and confessions. Williams & Watkins: Baltimore. [Interogasi dan pengakuan pidana]

Inbau, F.E. (1999). Police interrogation - a practical necessity. *Journal of Criminal Law and Criminology*. 89

(4). [Interogasi polisi- praktik yang diperlukan]

Innocence Project (2001). Diakses 10 Juni 2005 dari: <http://www.innocenceproject.org/case/index.php>.

Irving, B. (1980). Police interrogation: a case study of current practice. Research Study Number 2. Royal Commission on Criminal Procedure. HMSO: London. [Interogasi polisi: studi kasus untuk praktik terkini. Studi penelitian nomor 2. Komisi Kerajaan untuk Hukum Acara Pidana]

Jordan, J. (2004). The word of a woman? Police, rape and belief. Palgrave Macmillan: Australia. [Perkataan perempuan? Polisi, pemerkosaan, dan kepercayaan]

Kalbfleisch, P. J. (1994). The language of detecting deceit. *Journal of Language and Social Psychology*, 13, 469-496. [Bahasa untuk mendeteksi kebohongan]

Kassin, S.M. (1997). The psychology of confession evidence. *American Psychologist*, 52, hal. 221-233. [Psikologi bukti pengakuan]

Kassin, S.M. & Gudjonsson, G. (2004). The Psychology of Confessions. *Psychological Science in the Public Interest*. 5, No.2, hal. 33-67. [Psikologi pengakuan]

Kassin, S.M., Tubb, A.V., Hosch, H.M. & Memon, A. (2002, Mei). Eyewitness researchers as experts in court: responsive to change in a dynamic and rational process. *American Psychologist*. 57 (5), hal. 378-379. [Saksi mata sebagai ahli di pengadilan: responsif terhadap perubahan dalam proses yang dinamis dan rasional]

Kassin, S.M., Tubb, A.V., Hosch, H.M. & Memon, A. (2001, Mei). On the "general acceptance" of eyewitness testimony research: a new survey of the experts. *American Psychologist*. 56 (5), hal. 405-416. [riset terhadap penerimaan terhadap kesaksian saksi mata: survei terkini dari para ahli]

Kebbell, M.R. & Milne, R. (1998). Police officers' perception of eyewitness performance in forensic investigation. *Journal of Social Psychology*, 138 (3), hal. 323-330. [Persepsi petugas kepolisian terhadap performa saksi mata dalam investigasi forensic]

Kebbell M.R., Milne, R. & Wagstaff, G.F. (1999). The cognitive interview: a survey of its forensic effectiveness. *Psychology, Crime and Law*. 5, hal. 101-115. [Wawancara kognitif: survey tentang keefektifan forensiknya. Psikologi, Hukum dan Pidana]

Kebbell M.R. & Wagstaff, G.F. (1996). Enhancing the practicality of the cognitive interview in forensic situations. *Psychology*, 7 (16). [Meningkatkan kepraktisan wawancara kognitif dalam situasi forensic]

Kebbell M.R. & Wagstaff, G.F. (1997). An investigation

into the influence of hypnosis on the confidence and accuracy of eyewitness recall. *Contemporary Hypnosis*, 14, hal. 157-166. [Investigasi pengaruh hipnotis terhadap keyakinan dan akurasi ingatan saksi mata]

Kennedy, L. (1989). *Europe v England: The Advantages of the Inquisitorial over the Adversary System of Criminal Justice*. Lecture given by Sir Ludovic Kennedy to the Howard League for Penal Reform on 15 November. Diakses dari <http://flac.htmlplanet.com/news/kennedy89.htm> [Eropa vs Inggris: keuntungan Sistem Peradilan Pidana Kontinental dari Anglo-saxon. Ceramah Sir Ludovic Kennedy pada Howard League untuk Reformasi Hukum Pidana pada 15 November]

Kiley, W.P. (1998). *The Advanced Criminal Investigation Course: An innovative Approach to Detective In-Service Training*. *FBI Law Enforcement Bulletin*, 67 (10), hal. 16-18. [Kursus Penyelidikan Pidana Lanjutan: Pendekatan inovatif pada pelatihan dalam dinas detektif]

Kleinig, J. (1996). *The Ethics of Policing*. Cambridge Studies in Philosophy and Public Policy. Cambridge: Cambridge University Press. 351.74-KLE. [Etika kepolisian. Studi Cambridge untuk filosofi dan kebijakan publik]

Koehnken, G. (1995) *Interviewing adults*. Dalam R. Bull & D. Carson (eds). *Handbook of psychology in legal contexts*. Wiley: Chichester. [Mewawancarai orang dewasa]

Koehnken, G., Milne, R., Memon, A. & Bull, R. (1999). *The cognitive interview - a meta-analysis*. *Psychology Crime and Law*, 5, hal. 3-27. [Wawancara kognitif – sebuah meta analisis].

Lassiter, G.D. & Irvine, A.A. (1986). *Videotaped confessions: the impact of camera point of view on judgments of coercion*. *Journal of Applied Psychology*, 16, hal. 268-276. [Pengakuan terekam video: pengaruh dari sudut pengambilan kamera pada penilaian tentang paksaan]

Lassiter, G.D., Geers, A.L., Handley, I.M., Weiland, P. E., & Munhall, P.J., (2002). *Videotaped confessions and interrogations: A simple change in camera perspective alters verdicts in simulated trials*. *Journal of Applied Psychology*, 87, No.5, hal. 867-874. Law Reform Commission: NSW (2005, Mar). [Pengakuan dan interogasi yang terekam video: perubahan kecil pada perspektif kamera yang mampu mengubah putusan pada pengadilan simulasi]

Report 66 (1990) - *Criminal Procedure: Police Powers of Detention and Investigation After Arrest - Chapter 6*. Diakses 7 April 2005 dari. (Prosedur kriminal: kewenangan polisi untuk menahan dan menyelidiki setelah penangkapan)

Law Reform Commission: NSW (2005, Mar). *Discussion Paper 29 (1993) - People with an Intellectual Disability and the Criminal Justice System: Policing Issues*. Diakses 7 April 2005 dari: DP29TOR. [Orang-orang dengan disabilitas intelektual dan sistem peradilan pidana]

Lea, J. (2004) *Criminal investigation in the UK*. Diakses 16 April 2005 dari: 26903.htm [Investigasi pidana di Inggris Raya]

Leishman, F., Loveday, B., & Savage, S.P. (eds) (2000). *Core Issues in Policing (Edisi ke-2)*. London: Longman. [Isu utama dalam kepolisian]

Leo, R.A. (1992). *From coercion to deception: the changing nature of police interrogation in America*. *Crime, Law and Social Change*, 18, hal. 33-59. [Dari pemaksaan ke pengelabuan: Perubahan sifat interogasi polisi di Amerika]

Leo, R.A. (1996). *Inside the interrogation room*. *The Journal of Criminal Law and Criminology*, 86, hal. 266-303. [Di dalam ruang interogasi. Jurnal hukum pidana dan kriminologi]

Lindsay, S. & Read, J.D. (1994). *Psychotherapy and memories of childhood sexual abuse: a cognitive perspective*. *Applied Cognitive Psychology*, 8, hal. 281-338. [Psikoterapi dan ingatan tentang kekerasan seksual di masa kanak-kanak: Perspektif kognitif. Psikologi kognitif terapan]

Loftus, E.F. (1984). *Eyewitnesses: essential but unreliable*. *Psychology Today*. Feb, hal. 22-26. [Saksi mata: penting tapi tidak dapat diandalkan]

Loftus, E.F. (1989). *Distortions in eyewitness memory from postevent information*. Dalam H. Wegener, F. Losel, & J. Haisch (eds). [Distorsi ingatan saksi mata dari informasi setelah kejadian] *Criminal behaviour and the justice system: psychological perspectives*. London: Springer-Verlag. [Perilaku kriminal dan sistem peradilan: perspektif psikologi]

Loftus, E.F. (2004). *The Devil in Confessions*. Editorial in S.M. Kassin & G. Gudjonsson. *The Psychology of Confessions*. *Psychological Science in the Public Interest*, 5, No.2, hal. i-ii. (Kejahatan dalam pengakuan. Psikologi pengakuan. Ilmu psikologi dalam ranah publik)

Loftus, E.F. & Calvin, W.H. (2001). *Memory's Future [Masa Depan Ingatan]*. *Psychology Today*, 34 (2): 55ff (Maret-April).

Maguire, M. (1994). *The wrong message at the wrong time? The present state of investigative practice*. Dalam D. Morgan & G. Stephenson. *Suspicion and Silence: the right to silence in criminal investigations*.

- Blackstone Press: London. [Pesan yang salah pada waktu yang salah? Kondisi praktik investigasi saat ini]
- Maguire, M. (2003). Criminal investigation and crime control. Dalam T. Newburn (ed) Handbook of policing. Willan Publishing: Cullompton, hal. 363-393. [Investigasi pidana dan kendali kejahatan]
- Mastrofski, S.D., Snipes, J.B. dan Supina, A.E. (1996). Compliance on demand: the public's response to specific police requests. *Journal of Research in Crime and Delinquency*, 33 (3), hal. 269-305. [Permintaan untuk bekerja sama: respon publik terhadap permintaan khusus polisi]
- Matthews, R. (2002). Armed Robbery. Willan Publishing: UK. [Perampokan bersenjata]
- McCarthy, S. (2000) The Truth About The Polygraphs. Diakses 10 Maret 2005 dari polygraph/nf_susanmccarthy1.htm. [Kebenaran mengenai poligraf]
- McConville, M., Sanders, A. & Leng, R. (1991). The case for the prosecution: police suspects and the construction of criminality. London: Routledge. [Kasus penuntutan: tersangka polisi dan konstruksi kejahatan]
- McGurk, B.J., Carr, M.J. & McGurk, D. (1993). Investigative interviewing courses for police officers: an evaluation. Police Research Series: Paper No.4. Home Office: London. [Kursus wawancara investigatif untuk petugas kepolisian: sebuah evaluasi]
- McKenzie, I. (1994). Regulating custodial interviews: a comparative study. *International Journal of the Sociology of Law*, 22, hal. 239-259. [Mengatur wawancara dalam penahanan: Studi perbandingan]
- Memon, A. & Bull, R. (1991). The cognitive interview: its origins, empirical support, evaluation and practical implications. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 1, hal. 291-307. [Wawancara kognitif: asal muasal, dukungan empiris, evaluasi dan implikasi dalam praktik]
- Memon, A. & Bull, R. (eds) (1999). Handbook of the psychology of interviewing. John Wiley: Chichester. [Buku pegangan psikologi wawancara]
- Memon, A. & Higham, P.A. (1999). A review of the cognitive interview. *Psychology, Crime and Law*, Vol.5, hal. 177-196. [Tinjauan terhadap wawancara kognitif]
- Memon, A. & Stevenage, S. (1996). Interviewing Witnesses: What Works and What Doesn't? March, witnessmemory.1.memon. [Wawancara saksi: Apa yang bisa digunakan dan yang tidak bisa?]
- Memon, A., Milne, R., Holley, A., Bull, R. & Koehnken, G. (1994). Towards understanding the effects of interviewer training in evaluating the cognitive interview. *Applied Cognitive Psychology*, 8, hal. 641-659. [Memahami efek pelatihan pewawancara dalam evaluasi wawancara kognitif]
- Merrill, W.F. (1995). The Art of interrogating rapists. *FBI Law Enforcement Bulletin*. (1), hal. 8-12. [Seni menginterogasi pemerkosa]
- Metropolitan Police Service (2001) Initial investigation of Crime 1. Foundation Course: Recruit Training School, Peel Centre England. [Investigasi awal kejahatan. Kursus dasar]
- Metropolitan Police Service (2005). Project Sapphire. Diakses 19.8.05 dari http://sapphire_whatism.htm [Proyek Safir]
- Miller, L. (2004). Good cop - bad cop: problem officers, law enforcement culture, and strategies for success. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 19, (2) 30-48. [Polisi baik dan polisi jahat: Permasalahan petugas, budaya penegakan hukum, dan strategi keberhasilan]
- Milne, R. (1999). Interviewing children with learning disabilities. Dalam A. Memon and R. Bull (eds). *Handbook of the psychology of interviewing*. Wiley & Sons: Chichester, hal. 165-180. [Mewawancarai anak dengan disabilitas belajar]
- Milne, R. (2004). The Enhanced Cognitive Interview - a step-by-step guide. Personal lesson notes provided by author. [Wawancara kognitif yang disempurnakan – panduan bertahap. Bahan ajar pribadi diberikan oleh penulis]
- Milne, R. & Bull, R (1999). *Investigative Interviewing: psychology and practice*. John Wiley and Sons Ltd: Chichester. [Wawancara investigatif: psikologi dan praktik]
- Milne, R. & Bull, R (2003). Interviewing by the Police [Wawancara oleh Polisi]. Dalam D. Carson & R. Bull (eds). *Handbook of psychology in legal contexts*. John Wiley & Sons: Chichester.
- Morgan, C. (1999). *Focused Interviewing*. Trafford Publishing: Canada. [Wawancara Terarah]
- Morgan, R., & Newburn, T. (1997). *The Future of Policing*. Clarendon: Oxford. [Masa depan perpolisian]
- Morgan, D. & Stephenson, G. (1994). *Suspicion and Silence: the right to silence in criminal investigations*. Blackstone Press: London. [Kecurigaan dan diam: hak untuk diam dalam penyelidikan pidana]
- Moston, S. & Engleberg, T. (1993). Police questioning techniques in tape recorded interviews with criminal suspects. *Policing and Society*, 3, 223-237. [Teknik bertanya polisi dalam wawancara yang direkam pada

tersangka criminal]

Moston, S.J. & Stephenson, G.M. (1993). The changing face of police interrogation *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 3, 101-115. [Perubahan pada interogasi kepolisian, jurnal komunitas dan psikologi sosial terapan]

Moston, S., Stephenson, G. & Williamson, T. (1992). The effects of case characteristics on suspect behaviour during police questioning. *British Journal of Criminology*, 32, hal. 23-40. [Efek karakteristik kasus pada perilaku tersangka selama wawancara polisi]

Moston, S., Williamson, T. M. & Stephenson, G.M. (1993). The incidence, antecedents and consequences of the use of the right to silence during police questioning. *Journal of Community and Applied Social Psychology*, 3, 30-47. [Insiden, pendahuluan dan konsekuensi penggunaan hak untuk diam selama wawancara polisi]

Mulraney, S. (2001). Reality check. *Police Review*. 13 April, hal. 22-24. [Cek realitas]

Napier, M.R. & Adams, S.H. (1998, Oct). Magic Words to Obtain Confessions. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 67 (10), hal. 11-15. [Kata-kata ajaib untuk mendapatkan pengakuan]

Napier, M.R. & Adams, S.H. (2002, Nov). Criminal confessions: overcoming the challenges - interview and interrogation techniques. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 71 (11), hal. 9-15. [Pengakuan kejahatan: Mengatasi tantangan – teknik wawancara dan interogasi]

National Research Council (2003) "The Polygraph and Lie Detection," Report from the Committee to Review the Scientific Evidence on the Polygraph. The National Academies Press, Washington, D.C. [Deteksi kebohongan dan poligraf]

NCF (1996). Investigative interviewing: a practical guide. Bramshill Training & Development Unit: National Crime Faculty, England. [Wawancara investigatif: panduan praktis]

NCF (1998). A practical guide to investigative interviewing. Bramshill: National Crime Faculty and National Police Training, England. [Panduan praktis untuk wawancara investigatif]

NCOF (2003). ACPO Investigative Interview Strategy: Training Curriculum. Centrex: National Crime and Operations Faculty, England. [Strategi wawancara investigatif ACPO]

NCPE (2005). Practice advice on Core Investigative Doctrine. Produced on behalf of the Association of Chief Police Officers by the National Centre for Policing

Excellence, ACPO Centrex [Saran dalam praktik pada doktrin utama investigasi. Diproduksi atas nama asosiasi kepala polisi dari pusat keunggulan perpolisian nasional]

Newburn, T. (ed). (2003). *Handbook of policing*. Willan Publishing: Cullompton. [Buku pegangan kepolisian]

NZ Herald. (2003 Des). The Christchurch Civic Creche Case: Flaws in Children's Evidence Says Study, NZPA. Diakses dari: . [Kasus Christchurch Civic Creche: studi tentang kesalahan dalam bukti berdasarkan keterangan anak-anak]

Olson, D. (1995) *Hypnosis History*. Diakses 7 Maret 2005 dari hypnosis_history.html. [Sejarah Hipnotis]

Ord, Brian & Shaw, Gary. (1999). *Investigative interviewing explained (first ed): The operational guide to practical interviewing skills*. The New Police Bookshop: England. [Ulasan Wawancara investigatif (edisi pertama): panduan operasional untuk keterampilan praktik wawancara]

Ord, B., Shaw, G. & Green, T. (2004). *Investigative interviewing explained*. LexisNexis Butterworths: Australia. [Ulasan wawancara investigatif]

Orne, M.T. (1979). The use and misuse of hypnosis in court. *International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis*, October, hal. 311-339. [Penggunaan dan penyalahgunaan hipnotis di pengadilan]

Ottoson, J.M. (1997). After the Applause: Exploring Multiple Influences on Application Following Adult Education Programs. *Adult Education Quarterly*, 47 (2): 92-107. [Setelah tepuk tangan: eksplorasi beberapa pengaruh pada aplikasi lanjutan dari program pendidikan dewasa]

Packer, H.L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press: Stanford. [Batasan sanksi pidana]

Queensland Police Service. (2003). *Investigative Interviewing (Phase One)*. Detective Training Programme: Queensland. [Wawancara investigatif (Fase Satu)]

Rabon, D. (1992). *Interviewing and interrogation [Wawancara dan interogasi]*. Carolina Academic Press: Durham North Carolina.

Ratcliffe, J. (2003). Intelligence-led policing. Trends and issues in crime and criminal justice. *Australian Institute of Criminal Justice*, No.249. [Kepolisian dengan mengandalkan intelijen. Tren dan isu tentang kejahatan dan hukum pidana]

Reiner, R. (2000). *The politics of the police [Politik polisi]* (Edisi ke-3). Harvester Wheatsheaf: London.

- Reiser, M. (1980). Handbook of investigative hypnosis. Lehi Publishing Company: Los Angeles. [Buku pegangan hipnotis investigatif]
- Reiser, M. (1984). Police use of investigative hypnosis. American Journal of Forensic Psychology. Vol.II, No.3, 115-143. [Hipnotis investigatif untuk kepolisian]
- Rigg, K. (1999, Apr). The use of the Peace Model of Investigative Interviewing by Uniformed Constables when Interviewing Suspects [Penggunaan model wawancara PEACE oleh petugas polisi berseragam ketika mewawancarai tersangka]. Northumbria Police: England. Royal Commission on Criminal Justice (1993). Laporan. HMSO:London.
- Royal Commission on Criminal Procedure (1981). Report. HMSO: London. Royal New Zealand Police College (2005). The New Zealand forensic (evidential) interviewing structure for children making allegations of abuse. Training Service Centre: Wellington. [Struktur wawancara forensik Selandia Baru (pembuktian) terhadap anak-anak yang membuat tuduhan atas penganiayaan]
- Ryder, M. (2003) The Polygraph [Poligraf]. Diakses 11 Maret 2005 dari http://carbon.cudenver.edu/~mryder/polygraph_este.html.
- Sanders, A. (1994). From suspect to trial. Dalam M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner. The Oxford Handbook of Criminology. Clarendon Press: Oxford, hal. 773-818. [Dari tersangka ke pengadilan]
- Sanders, A. & Young, R. (2000). Criminal Justice [Peradilan pidana] (Edisi ke-2). Butterworths: London.
- Sanders, A. & Young, R. (2002). From suspect to trial. Dalam M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner. The Oxford Handbook of Criminology 3rd ed. Oxford University Press: Oxford, hal. 1034- 1075. [Dari tersangka menuju persidangan]
- Saulsbury, W., Mott, J., & Newburn, T. (Eds.) (1996). Themes in Contemporary Policing. Independent Committee of Inquiry into the Role and Responsibilities of the Police: London. [Komite independen untuk penyidikan tentang tugas dan tanggung jawab polisi]
- Schollum, M (1996). A Prosecution Bias in Records of Taped Interviews. Solicitors Journal, London, 26 Juli, hal. 742-743. [Penuntutan yang bias dalam wawancara yang direkam]
- Shaw, G. (1992). Interviewing techniques [Teknik wawancara]. Serangkaian artikel di Police Review. 15 Maret, 5 April, 26 April, 7 Juni.
- Shaw, G. (1996a). The new PEACE. Police Review. 5 January, hal. 26-27. [Model PEACE baru]
- Shaw, G. (1996b). Be prepared [Bersiaplah]. Police Review. 12 Januari, hal. 18-19.
- Shaw, G. (1996c). Go with the flow [Mengikuti arus]. Police Review. 19 Januari, hal. 24-25.
- Shaw, G. (1996d). Controlling chat [Mengendalikan percakapan]. Police Review. 26 Januari, hal. 20-21.
- Shaw, G. (1996e). Firm but fair [Tegas tetapi adil]. Police Review. 9 Februari, hal. 20-21.
- Shaw, G. (1996f). Supervisors [Penyelia]. Police Review. 16 Februari, hal. 20-21.
- Shaw, G. (2001). Current state of force interview training [Kondisi terkini dalam pelatihan wawancara di kesatuan kepolisian]. Dalam J. Burbeck. (2001). New ACPO Investigative Interviewing Strategy. Warwickshire Police: England.
- Shepherd, E. (1991). Ethical interviewing [Wawancara yang etis]. Policing, 7 (1), hal. 42-60.
- Shepherd, E (ed) (1993). Aspects of police interviewing. Issues in Criminological and Legal Psychology. No.18, The British Psychological Society: Leicester. [Aspek-aspek wawancara polisi]
- Shepherd, E. (1996). The trouble with PEACE. Police Review. 26 Juli, hal. 14-16. [Permasalahan dengan PEACE]
- Shepherd, E. & Kite, F. (1988). Training to interview. Policing. 4, hal. 264-280. [Pelatihan wawancara]
- Shepherd, E. & Kite, F. (1989). Teach 'em to talk. Policing. 5, hal. 33-47. [Ajarkan mereka untuk berbicara]
- Shepherd, E. & Milne, R. (1999). Full and faithful: ensuring quality practice and integrity of outcomes in witness interviews [Penuh dan patuh: meyakinkan kualitas praktik dan integritas hasil wawancara saksi]. Dalam A. Heaton-Armstrong, E. Shepherd & D. Wolchover (eds) Analysing witness testimony: a guide for legal practitioners and other professionals. Blackstone Press: London, hal. 124-145. [Analisa kesaksian saksi: panduan bagi praktisi hukum dan profesional lainnya]
- Shepherd, E., Mortimer, A., Turner, V. & Watson, J. (1999). Spaced cognitive interviewing: facilitating therapeutic and forensic narration of trauma memories. Psychology, Crime and Law, 5, hal. 117-143. [Wawancara kognitif berjarak: memfasilitasi terapi dan narasi forensik untuk ingatan traumatis]
- Shepherd, E. (2004). Police Station Skills for Legal

- Advisers: Accreditation Manual (3rd edition). Law Society Publishing: London. [Keterampilan kantor polisi bagi penasihat hukum: akreditasi manual (edisi ketiga)]
- Shepherd, E. (2004). *Police Station Skills for Legal Advisers: Practical Reference* (3rd edition) Law Society Publishing: London. [Keterampilan kantor polisi bagi penasihat hukum: referensi praktik (edisi ketiga)]
- Smith, D.J. (1997). Case construction and the goals of criminal process. *British Journal of Criminology*, 37 (3, Summer), hal. 319- 46. [Konstruksi kasus dan sasaran dalam proses pidana]
- Soukara, S., Bull, R. & Vrij, A. (2002). Police detectives' aims regarding their interviews with suspects: any change at the turn of the millennium? *International Journal of Police Science and Management*. 4, No.2, hal. 100-114. [Tujuan detektif kepolisian berdasarkan wawancara dengan tersangka: Perubahan pada saat pergantian milenium?]
- Stace, M. (1986). The police as prosecutors. Dalam Cameron, N. & Young, W. *Policing at the Crossroads*. Allen and Unwin NZ Ltd: Wellington. [Polisi sebagai jaksa penuntut]
- Steller, M. & Koehnken, G. (1989) *Criteria-Based Content Analysis*. Dalam D.C. Raskin (ed). *Psychological methods in criminal investigation and evidence*. Springer-Verlag, New York, hal. 217-245. [Analisis isi berdasarkan kriteria]
- Stephenson, G.M. and Moston, S.J. (1993). Attitudes and assumptions of police officers when questioning criminal suspects. Dalam Eric Shepherd (ed) *Aspects of police interviewing*. *Issues in Criminological and Legal Psychology*, (18), hal. 30-36. [Sikap dan asumsi petugas kepolisian ketika menanyai tersangka pelaku criminal]
- Stockdale, J.E. (1993). *Management and Supervision of Police Interviews*. Police Research Group, Home Office: London. [manajemen dan supervisi wawancara kepolisian]
- Strongman, K.T. (1994). *Interview training in the New Zealand Police*. New Zealand Police: Wellington. [Pelatihan wawancara di kepolisian Selandia Baru]
- Stubbs, C. & Newberry, J.T. (1998). *Analytic interviewing – a training paper*. Australian Institute of Analytic Interviewing. Sullivan, T.P. (2004). *Police experiences with recording custodial interrogations*. Centre on Wrongful Convictions: Northwestern University School of Law. No.1, Summer. [Wawancara analisis – kertas Latihan]
- Swanson, C.R., Chamelin, N.C. & Territo, L. (2002). *Criminal Investigation*. McGraw-Hill Higher Education: United States. [Penyidikan pidana]
- Szczesny, P. (2002). *Suspect Interviews: Asking for the Necessary Information*. *Law and Order*, 50 (6), hal. 126-128. [Wawancara tersangka: Menanyakan informasi yang diperlukan]
- Takitimu, L. & Schollum, M. (1991) *The New Zealand Video Interview Project*, Police National Headquarters, Wellington (unpublished). [Proyek wawancara dengan Rekaman Video Selandia Baru (tidak dipublikasikan)]
- Takitimu, L. & Reid, L. (1994). *The impact of videotaped interviews with suspects on seven groups of people*. Unpublished thesis. Massey University: New Zealand. [Dampak wawancara terhadap tersangka yang terekam video terhadap tujuh kelompok]
- Takitimu, L. (1996). *Report of police interviewing in New Zealand* [Laporan tentang wawancara polisi di Selandia Baru]. Police National Headquarters, Wellington (tidak dipublikasikan).
- Thames Valley Police (2004). *Tier Two Investigative Interviewing Programme*. Sulhamstead: Force Training Centre, Thames Valley Police: England. [Program wawancara investigatif tahap dua]
- The National Academics Press (2003) *The Polygraph and Lie Detection*. Diakses 7 Maret 2005 dari openbook/0309084369/htm/1.htm. [Deteksi kebohongan dan poligraf]
- Vessel, D. (1998). *Conducting Successful Interrogations*. *FBI Law Enforcement Bulletin*. 67 (10), hal. 1-6. [Melaksanakan interogasi yang baik dan berhasil]
- Victoria University (2005, Apr). *Conference Programme*. The Society for Applied Research in Memory and Cognition. Diakses dari full-timetable.html.
- Vincent, A. & Sandoval, M.A. (2003). *Strategies to Avoid interview Contamination*. *FBI Law Enforcement Bulletin*, 72 (10), hal. 1-12. [Strategi untuk menghindari kontaminasi wawancara]
- Vrij, A. (2001). *Detecting lies and deceit: the psychology of lying and the implications for professional practice*. John Wiley & Sons: Chichester. [Mendeteksi kebohongan dan penipuan: psikologi kebohongan dan implikasi terhadap praktik profesional]
- Vrij, A. (2003). *The assessment and detection of deceit*. Dalam D. Carson & R. Bull (eds). *Handbook of psychology in legal contexts*. John Wiley & Sons: Chichester. [Penilaian dan deteksi penipuan]
- Waddington, P.A.J. (1999). *Policing citizens*. UCL Press: London. [Perpolisian warga negara]
- Wagstaff, G.F. (1999). *Hypnotically induced testimony*.

- Dalam A. Heaton-Armstrong, E. Shepherd & D. Wolchover (eds) *Analysing witness testimony: a guide for legal practitioners and other professionals*. Blackstone Press: London. [Kesaksian dengan menggunakan hipnotis pada analisis kesaksian saksi: panduan terhadap praktisi hukum dan profesional lainnya]
- Walker, C (ed) (1999). *Miscarriages of Justice: a review of justice in error*. Blackstone Press: London. [Kesalahan pelaksanaan hukum: tinjauan kesalahan pengadilan]
- Walkley, J. (1987). *Police Interrogation* [Interogasi polisi]. London: HMSO (HORS 70).
- Walters, S.B. (2002). *Principles of kinesic interview and interrogation - 2nd ed*. CRC Press: Washington DC. [Prinsip interogasi dan wawancara kinestetik – edisi ke-2]
- Weatheritt, M. (Ed.) (1989). *Police Research: Some Future Prospects*. Avebury: Aldershot. [Penelitian polisi: beberapa prospek di masa depan]
- Wells, G.L. & Loftus, E.F. (eds) (1984). *Eyewitness testimony: psychological perspectives*. Cambridge University Press: Cambridge. [Kesaksian saksi mata: perspektif psikologi]
- Wen, P. (2001). "Brain Fingerprints" may offer better way to detect lying. *The Boston Globe*, 5 Juli. Diakses 12 April 2005 dari: . ["Sidik jari otak" memberikan pilihan lebih baik untuk mendeteksi kebohongan]
- Wicklender, D.E. & Zulawski, D.E. (2003). *Interview and interrogation techniques - a training course*. Wicklender - Zulawski and Associates, Inc: Illinois. [Teknik wawancara dan interogasi – kursus pelatihan]
- Williams, J.W. (2000). *Interrogating justice: a critical analysis of the police interrogation and its role in the criminal justice process*. *Canadian Journal of Criminology*. 42 (2) hal. 209-240. [Interogasi keadilan: analisa kritis dari interogasi polisi dan perannya pada proses pengadilan kejahatan]
- Williamson, T. (1993). *Review and prospect*. Dalam Eric Shepherd (ed) *Aspects of police interviewing*. *Issues in Criminological and Legal Psychology*, No 18, 57-59. [Tinjauan dan prospek]
- Williamson, T. (1994). *From interrogation to investigative interviewing: strategic trends in police questioning*. *Journal of community and applied social psychology*, 3, 89-99. [Dari interogasi hingga wawancara investigatif: tren strategis dalam wawancara polisi]
- Williamson, T. (1994). *Reflections on current police practice*. Dalam D. Morgan & G. Stephenson.
- Suspicion and Silence: the right to silence in criminal investigations. Blackstone Press: London. [Refleksi terhadap praktik perpolisian terkini]
- Wilson, D. & Fowles, T. (2005). *Penal Policy File No.99* [Berkas kebijakan pidana No. 99], Oktober- Desember 2004. *The Howard Journal*, 44, No.2, Mei.
- Wright, A. (2002). *Policing - an introduction to concepts and practice*. Willan Publishing: Cullompton. [Perpolisian – pengenalan terhadap konsep dan praktik]
- Yarmey, A.D. (2003). *Eyewitnesses* [Saksi mata]. Dalam D. Carson & R. Bull (eds). *Handbook of psychology in legal contexts*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Yeschke, Charles L. (1997). *The art of investigative interviewing - a human approach to testimonial evidence*. Butterworth- Heinemann: Boston. [Seni wawancara investigatif – pendekatan manusiawi pada bukti kesaksian]
- Yeschke, Charles L. (2003). *The art of investigative interviewing - a human approach to testimonial evidence (2nd ed)*. Butterworth-Heinemann: Boston. [Seni wawancara investigatif – pendekatan manusiawi pada alat bukti kesaksian (edisi kedua)]
- Young, M. (1991). *An inside job* [Pekerjaan dari dalam]. Clarendon: Oxford.
- Young, W. (1983). *Rape Study: a discussion of law and practice*. Vol.1. Institute of Criminology and Department of Justice: Wellington: [Studi perkosaan: diskusi hukum dan praktik]